



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah, dapat diubah apabila terjadi perubahan mendasar untuk penyesuaian terhadap kebijakan;
 - b. bahwa berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor : B/876/M.AA.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2018 memberikan agar pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan reviu atas dokumen perencanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 7), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan;
 - d. BAB IV : Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Daerah;
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
 - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
 - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
 - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - i. BAB IX : Penutup
- (2) Penjabaran RPJMD berikut matriknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 23 Juli 2020
GUBERNUR BENGKULU,

ttd

ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 23 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd

HAMKA SABRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: (2-78/2020);

KEPALA BIRO HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

SUPRAN S.H.,M.H.

Pembina Utama Muda

Nip. 19681221 199303 1 002





GUBERNUR BENGKULU

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan. Penyusunan Perubahan Kedua RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 didasarkan kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) , serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Tujuan penyusunan Perubahan Kedua RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 adalah untuk memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan selama sisa tahun perencanaan. Secara umum materi Perubahan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan program Kepala Daerah. Perubahan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 ini harus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 secara sinergis, koordinatif dan saling melengkapi.

Harapan kami dalam mengemban amanah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu masa bakti 2016-2021 adalah mengajak seluruh pemangku kepentingan secara bersama-sama berbuat untuk membenahi dan mensejahterakan masyarakat Provinsi Bengkulu. Dengan bekerja keras dan dengan ketulusan hati serta penuh rasa tanggung jawab, Insya Allah kita dapat mewujudkan Visi : ***“Terwujudnya Bengkulu Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat, dan Berdaya Saing”***.

Sebagai penutup, saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada DPRD Provinsi Bengkulu dan semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Kedua RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 ini. Semoga segala upaya yang mulia dari kita dalam menata pembangunan Provinsi Bengkulu ke depan selalu mendapatkan bimbingan dan ridho Allah SWT, sehingga membuahkan hasil yang berdaya guna dan memberikan maslahat bagi masyarakat Provinsi Bengkulu.

Bengkulu, 2020

GUBERNUR BENGKULU

Dr. H. ROHIDIN MERSYAH



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	li
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN	3
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	10
1.5 MAKSUD DAN TUJUAN	11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	13
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	13
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.....	33
2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM	50
2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH.....	74
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN	84
3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU	84
3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU	103
3.3 KERANGKA PENDANAAN	105
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	116
4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	116
4.2 ISU STRATEGIS	123
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	134
5.1 VISI	134
5.2 MISI	135
5.3 TUJUAN DAN SASARAN	151



BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	162
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	207
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	336
BAB IX	PENUTUP.....	349



DAFTAR GAMBAR

		Hal
BAB I	PENDAHULUAN	
Gambar 1.1	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Daerah dan Nasional	5
Gambar 1.2	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Lainnya	6
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
Gambar 2.1	Peta Administratif Provinsi Bengkulu	15
Gambar 2.2	Ketinggian Tempat di Provinsi Bengkulu	17
Gambar 2.3	Perkembangan IPM Provinsi Bengkulu dan Nasional Tahun 2011-2016	37
Gambar 2.4	Angka Melek Huruf Menurut Kab/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016	39
Gambar 2.5	Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 – 2019	40
Gambar 2.6	Harapan Lama Sekolah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 - 2018	41
Gambar 2.7	Angka Harapan Hidup Provinsi Bengkulu Tahun 2010 – 2019	42
Gambar 2.9	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 201	47
Gambar 2.10	Rasio Posyandu per 100 Balita Tahun 2019	56
Gambar 2.11	Rasio Medis per 100.000 Penduduk di Provinsi Bengkulu Tahun 2019	58
Gambar 2.12	Rasio Perawat per 100.000 Penduduk di Provinsi Bengkulu Tahun 2019	51
Gambar 2.13	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Bengkulu Tahun 2018	61
Gambar 2.14	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2018	62
Gambar 2.15	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Sanitasi Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2018	63
Gambar 2.16	Persentase Rumah Tangga yang menempati RTLH Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2018	64
Gambar 2.17	Persentase Rumah Tangga Kumuh di Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2018	65
Gambar 2.18	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2018–2020	69
Gambar 2.19	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Bengkulu Tahun 2019	72
Gambar 2.20	IPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018	73
Gambar 2.21	Pola Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu	75



Gambar 2.22	Sebaran Pembangkit Listrik di Provinsi Bengkulu Tahun 2019	79
Gambar 2.22	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2018–2019	83
BAB IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	
Gambar 4.1	Perkembangan Kemiskinan Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2019	117
Gambar 4.2	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Sanitasi Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2016 – 2018	119
Gambar 4.3	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2018	120
Gambar 4.4	Persentase Rumah Tangga yang menempati RTLH Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2018	121
Gambar 4.5	Persentase Rumah Tangga Kumuh di Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2018	121



DAFTAR TABEL

		Hal
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
Tabel 2.1	Luas wilayah Provinsi Bengkulu dirinci menurut Kabupaten/Kota	14
Tabel 2.2	Jumlah Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa Provinsi Bengkulu Tahun 2015	15
Tabel 2.3	Luas Hutan Menurut Fungsinya dan Kabupaten/Kota (Ha) Provinsi Bengkulu Tahun 2016	18
Tabel 2.4	Luas Areal Sawah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2018	19
Tabel 2.5	Luas Panen Dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2018	20
Tabel 2.6	Luas Areal Dan Produksi Perkebunan Rakyat Tahun 2019	21
Tabel 2.7	Jumlah Petani, Luas Areal, Produksi dan Produksi Rata-Rata Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman Provinsi Bengkulu Tahun 2019	22
Tabel 2.8	Produksi dan Penjualan Batubara menurut Kabupaten/Kota (ton) Tahun 2019	23
Tabel 2.9	Produksi dan Rumah Tangga Nelayan Usaha Perikanan Menurut Subsektor di Provinsi Bengkulu Tahun 2019	25
Tabel 2.10	Potensi, Produksi, Tingkat Pemanfaatan dan Peluang Pengembangan Usaha Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bengkulu Tahun 2019	25
Tabel 2.11	Potensi dan Jumlah Boleh Tangkap Sumberdaya Perikanan Tangkap Menurut Jenis Ikan di Provinsi Bengkulu Tahun 2018	26
Tabel 2.12	Volume dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum Daerah (PUD) Menurut Komoditas Utama Tahun 2018	27
Tabel 2.13	Potensi Bencana Alam di Provinsi Bengkulu	29
Tabel 2.14	Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2015-2018	30
Tabel 2.15	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Bengkulu Tahun 2018	31
Tabel 2.16	Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010	32



	dan 2019	
Tabel 2.17	Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota Tahun 2010 dan 2019	33
Tabel 2.18	PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2020	34
Tabel 2.19	PDRB ADHB per Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2014-201	35
Tabel 2.20	Pertumbuhan PDRB per Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2014-2018	36
Tabel 2.21	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Provinsi Bengkulu Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012 – 2019	37
Tabel 2.22	Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Bengkulu Tahun 2014 – 2019	38
Tabel 2.23	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Bayi dan Angka Kematian Ibu Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2019	42
Tabel 2.24	Angka Kemiskinan Provinsi Bengkulu Tahun 2012 – 2019	44
Tabel 2.25	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (%) Tahun 2013-2018	44
Tabel 2.26	Kondisi Kemiskinan (%) Provinsi Bengkulu Tahun 2014-2019	45
Tabel 2.27	Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2019	46
Tabel 2.28	Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Tahun 2019	48
Tabel 2.29	Jenis dan Jumlah Sarana Olahraga Pemprov Bengkulu	49
Tabel 2.30	Prestasi POPNAS Provinsi Bengkulu	50
Tabel 2.31	Alokasi Anggaran Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Tahun 2018 – 2019	50
Tabel 2.32	Rasio Guru terhadap Siswa dan Rasio Kelas terhadap Rombongan Belajar Provinsi Bengkulu Tahun 2018 – 2019	51
Tabel 2.33	Persentase Guru yang Sudah Sertifikasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2018 – 2019	52
Tabel 2.34	Kondisi Ruang Kelas di Provinsi Bengkulu Tahun 2018 – 2019	52
Tabel 2.35	Perkembangan Akreditasi Sekolah di Provinsi Bengkulu Tahun 2018 – 2019	53
Tabel 2.36	Jumlah Puskesmas dan Jaringannya di Provinsi Bengkulu Tahun 2019	54
Tabel 2.37	Jumlah SDM Kesehatan di Provinsi Bengkulu Tahun 2019	56
Tabel 2.38	Kondisi Jalan di Provinsi Bengkulu Tahun 2019	60



Tabel 2.38	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status pekerjaan Utama 2018–2020	68
Tabel 2.39	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status pekerjaan Utama 2018–2020	68
Tabel 2.40	Peserta KB Menurut Metode di Provinsi Bengkulu Tahun 2019	69
Tabel 2.41	Perkembangan IPG Provinsi Bengkulu Tahun 2010 – 2018	70
Tabel 2.42	Perkembangan IDG Provinsi Bengkulu Tahun 2011 – 2018	71
Tabel 2.43	Skor PPH Provinsi Bengkulu Tahun 2019	74
Tabel 2.44	Pendapatan APBD Provinsi Bengkulu Triwulan I 2020	76
Tabel 2.45	Belanja APBD Provinsi Bengkulu Triwulan IV 2019	77
Tabel 2.46	Perkembangan Inflasi Tahunan per Kelompok Provinsi Bengkulu	78
Tabel 2.47	Perkembangan Investasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2017 – 2019	80
BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN	
Tabel 3.1	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2010 s/d 2016 Provinsi Bengkulu	85
Tabel 3.2	Persentase Proporsi Realisasi Komponen pendapatan terhadap total pendapatan daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2016	86
Tabel 3.3	Proporsi Realisasi komponen pendapatan terhadap total pendapatan daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2015	87
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2016	88
Tabel 3.5	Target dan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2016	89
Tabel 3.6	Target dan Realisasi Retribusi Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2016	89
Tabel 3.7	Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2016	90
Tabel 3.8	Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang sah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2015	90
Tabel 3.9	Target dan Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2016	91



Tabel 3.10	Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2016	91
Tabel 3.11	Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2016	92
Tabel 3.12	Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2016	92
Tabel 3.13	Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2016	93
Tabel 3.14	Target dan Realisasi Pendapatan Hibah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2016	93
Tabel 3.15	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Bengkulu	94
Tabel 3.16	Analisis Rasio Keuangan Provinsi Bengkulu Tahun 2013-2015	95
Tabel 3.17	Target dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2015	96
Tabel 3.18	Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2015	97
Tabel 3.19	Target dan Realisasi Belanja Pegawai Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2015	97
Tabel 3.20	Target dan Realisasi Belanja Subsidi Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2015	97
Tabel 3.21	Target dan Realisasi Belanja Hibah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2015	98
Tabel 3.22	Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2015	98
Tabel 3.23	Target dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2015	99
Tabel 3.24	Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2015	99
Tabel 3.25	Target dan Realisasi Belanja Bantuan Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2015	100
Tabel 3.26	Target dan Realisasi Belanja Langsung Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2015	100



Tabel 3.27	Target dan Realisasi Belanja Pegawai Pada Belanja Langsung Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2015	101
Tabel 3.28	Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2015	101
Tabel 3.29	Target dan Realisasi Belanja Modal Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2015	102
Tabel 3.30	Rincian Target dan Realisasi Belanja Penerimaan Pembiayaan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2015	102
Tabel 3.31	Rincian Estimasi dan Realisasi SILPA Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2015	103
Tabel 3.32	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Bengkulu	103
Tabel 3.33	Defisit Riil Anggaran Provinsi Bengkulu	104
Tabel 3.34	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Bengkulu	105
Tabel 3.35	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Bengkulu	105
Tabel 3.36	Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Bengkulu	106
Tabel 3.37	Proyeksi Pendapatan Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021	112
Tabel 3.38	Proyeksi Belanja Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021	113
Tabel 3.39	Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021	114
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI DAERAH	
Tabel 4.1	Angka Kemiskinan Provinsi Bengkulu Tahun 2012 – 2019	117
Tabel 4.2	Kondisi Jalan di Provinsi Bengkulu Tahun 2019	118
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	
Tabel 5.1	Koherensi Visi, Misi dan Prioritas RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021	141
Tabel 5.2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD	152
Tabel 5.3	Keselarasan Sasaran Pembangunan RPJMD dan RPJMN	156
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
Tabel 6.1	Strategi dan Arah Kebijakan	162



Tabel 6.2	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah	169
Tabel 6.3	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif	187
Tabel 6.4	Keselararasan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD dengan RPJMN	199

**BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH**

Tabel 7.1	Rekapitulasi Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan	208
Tabel 7.2	Rekapitulasi Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan	266
Tabel 7.3	Keselarasan Program Prioritas Nasional dengan Program Pembangunan RPJMD	334

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Tabel 8.1	Tujuan,Sasaran Dan Indikator Kinerja Utama Daerah	337
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja	339

BAB IX PENUTUP



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan melibatkan masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyiapkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang telah dilantik pada tanggal 12 Februari 2016 ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, selanjutnya Rancangan Awal RPJMD 2016-2021 yang telah disusun oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut akan disampaikan kepada semua Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk digunakan sebagai rujukan penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD).

Dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), perlu diselenggarakan Musrenbang Perubahan RPJMD dengan menggunakan Rancangan Awal RPJMD 2016-2021 sebagai bahan pembahasan pokok. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD bertujuan untuk (1) Mendukung koordinasi lintas pelaku pembangunan; (2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi; (3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam kurun waktu jangka menengah selama lima tahun ke depan.



Dengan perhatian pada semangat partisipatif yang ada dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka penyusunan dokumen Perubahan RPJMD 2016-2021 perlu dilakukan secara partisipatif dengan memastikan kesepahaman dan komitmen bersama dari para pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan publik terutama pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta dengan melibatkan peran serta dan kontribusi lintas pelaku lainnya seperti kalangan dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat yang mewakili aspirasi masyarakat madani (*civil society*) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penjabaran visi, misi dan program Gubernur Bengkulu telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021.

Dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024, maka diperlukan penyesuaian terhadap kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 ke dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021. Hal ini dikarenakan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 terdapat beberapa program strategis Provinsi Bengkulu yang perlu diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 diantaranya : Pembangunan Jalan Tol Bengkulu – Curup – Lubuk Linggau yang terkoneksi dengan Jalan Tol Trans Sumatera, Pembangunan Jalur Kereta Api Bengkulu – Kota Padang Rejang Lebong yang akan terkoneksi dengan Jalur Kereta Api Sumatera (*Trans Sumatera Railways*), Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pulau Baai, Pengembangan Bandara Enggano, Jalan Trans Pulau Enggano, Pelabuhan di Pulau Enggano, Pengembangan Bandara Mukomuko dan beberapa program strategis lainnya.

Selain itu adanya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Penyebaran Bencana Non Alam Covid 19 sebagai Bencana Nasional perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan dan program dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 untuk menanggulangi dampak Covid 19 di tahun 2020 dan 2021.

Sebagai landasan hukum Perubahan RPJMD ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 342 ayat 1 huruf c dan ayat 3 menyatakan bahwa:

- Ayat 1 huruf c : Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar.
- Ayat 3 : Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Dasar yang digunakan adalah karena terjadinya bencana non alam Covid 19 sebagai bencana nasional dan perubahan kebijakan nasional terkait program strategis Provinsi Bengkulu dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik



- Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);



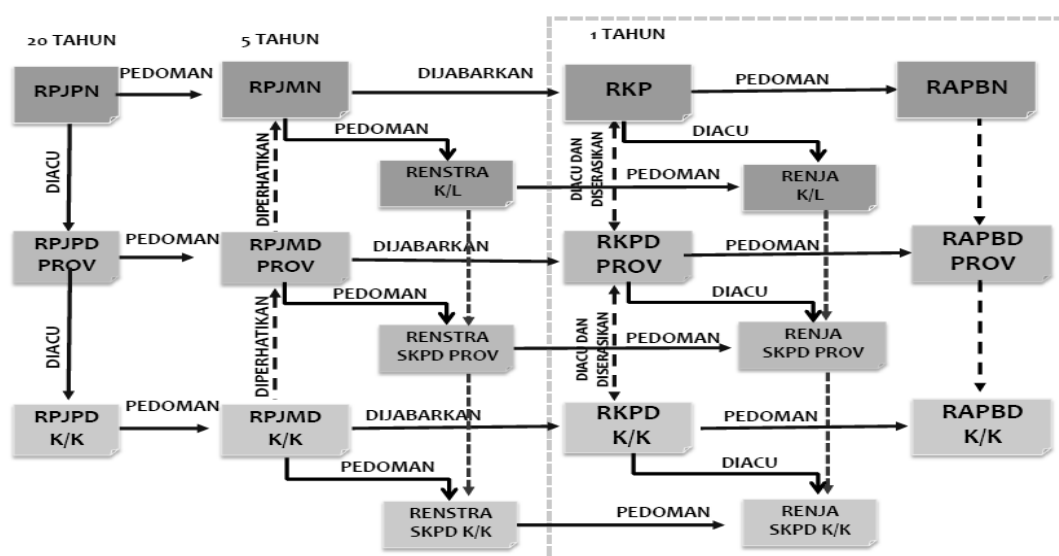
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan lainnya. Penyusunan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 serta mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta memperhatikan RPJMD dan RTRW Provinsi tetangga.

Gambar 1.1.

Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Daerah dan Nasional



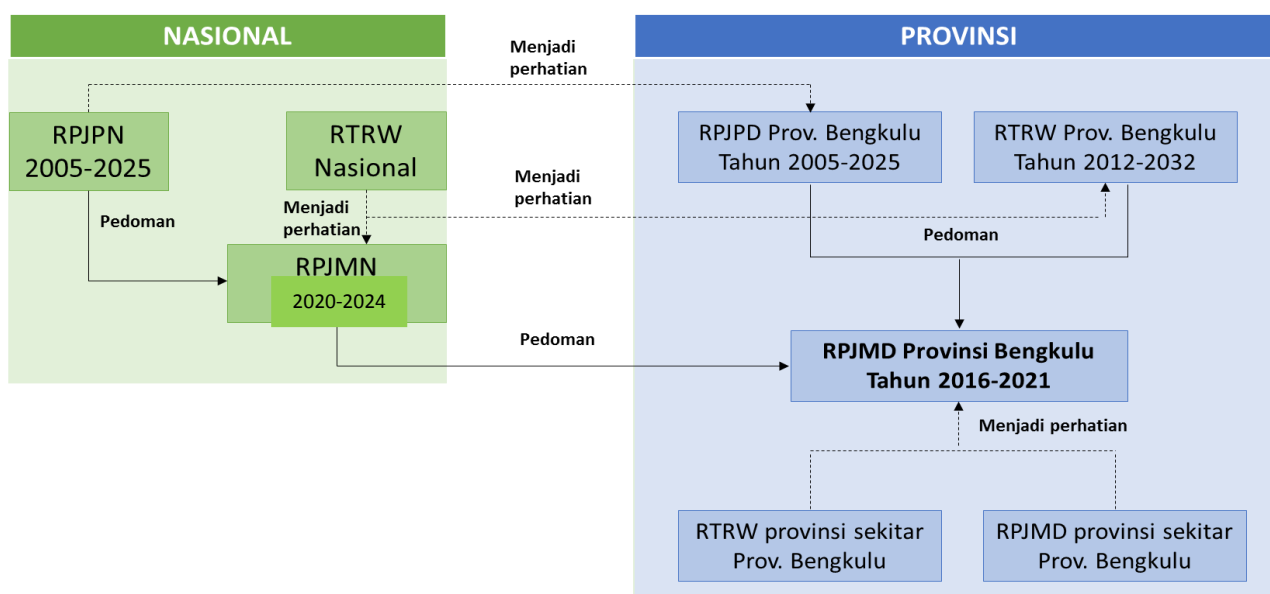
Sebagai subsistem, maka berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan Perubahan Kedua RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 juga perlu ditelaah, baik dokumen pada level nasional dan Provinsi tetangga, yaitu :



1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Bengkulu;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMD tetangga Provinsi Bengkulu
5. Dokumen terkait lainnya (yang bersifat perencanaan sektoral);

Skema hubungan antara Perubahan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 dengan dokumen lainnya dapat dilihat dalam Gambar berikut ini.

Gambar 1.2. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Lainnya



Secara lebih terperinci hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

A. RPJMD dan RPJPD Provinsi Bengkulu

RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 merupakan rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2016-2021, juga berpedoman pada visi dan misi Provinsi Bengkulu beserta arah pembangunannya dalam RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional.

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang “Provinsi Bengkulu yang sejahtera, adil dan demokrasi bertumpu pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh”, ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan yaitu :



1. Mewujudkan sumber daya manusia yang menguasai IPTEK dan IMTAQ;
2. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, merata dan bermanfaat;
3. Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing tinggi;
4. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan masyarakat adil dan demokrasi.

Pada tahap ketiga RPJPD Provinsi Bengkulu, fokus pembangunan masing-masing misi diarahkan pada pemanfaatan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat, yang difokuskan kepada:

1. Kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu terus meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang berpenghasilan menengah, dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumberdaya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesejahteraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta, kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; dan mantapnya budaya dan karakter bangsa.
2. Pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan perekonomian secara serasi, seimbang dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Peningkatan pemantapan pembangunan kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan dan disertai partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan bencana alam.
3. Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat, terutama industri rakyat berbasis sumber daya lokal meliputi pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya



pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

4. Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; peningkatan pasokan tenaga listrik yang lebih optimal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat teratasi dengan baik; terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi itu semakin mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.
5. Pembangunan kelembagaan politik dan hukum terus ditingkatkan dan diupayakan dalam rangka terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; peningkatan pembangunan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral lebih ditingkatkan demi terwujudnya masyarakat Provinsi Bengkulu yang sejahtera, adil dan demokratis.

B. RPJMD dengan RTRW Provinsi Bengkulu

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang. Kebijakan penataan ruang Provinsi



Bengkulu sesuai dengan RPJPD Tahun 2012-2032 dalam rangka mendukung capaian RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 dilakukan untuk:

1. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya ke seluruh wilayah provinsi;
2. Memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi resiko bencana alam;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
4. Meningkatkan produktifitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan;
5. Membuka peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup ;
6. Mengentaskan kemiskinan di kawasan tertinggal;
7. Mendukung fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan

Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

C. RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah

RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu.

D. RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan



Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa hingga Kabupaten.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Bagian ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan. Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya informasi yang relevan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi

BAB III. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah

Bab ini menggambarkan analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB IV. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

BAB V. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran

Bab ini berisi tentang visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang sekaligus sebagai visi dan misi RPJMD Provinsi Bengkulu 2016-2021 beserta penjelasannya. Bab ini juga menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran dari setiap misi.

Bab VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan



program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX. Penutup

1.5 Maksud dan Tujuan

RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 merupakan dokumen yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Maksud dari penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 adalah :

- a. Menjabarkan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah ke dalam rencana pembangunan periode 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif;
- b. Menjabarkan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; *dan*
- c. Mensinergikan dan menyelaraskan kebijakan dan program pembangunan baik di tingkat pusat maupun di daerah, serta aspirasi masyarakat.

Tujuan Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Bengkulu periode 2016-2021 adalah (1) untuk memberikan landasan yang tepat dan gambaran akan kemajuan yang akan dicapai daerah dalam menyusun perencanaan setiap tahunnya secara terintegrasi antar PD; (2) untuk menterjemahkan visi-misi pemerintah daerah secara konkrit *dan* (3) untuk menilai tingkat capaian target dan program/kegiatan yang telah dilaksanakan serta penyesuaian dengan target nasional (RPJMN 2015-2019). Selanjutnya dokumen RPJMD Provinsi Bengkulu 2016-2021 ini akan menjadi acuan untuk penyusunan :



-
- a. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
 - b. Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu; *serta*
 - c. Sebagai landasan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Bengkulu.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Provinsi Bengkulu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828). Pada awalnya, Provinsi Bengkulu merupakan Karesidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Sejak Tahun 1967, Provinsi Bengkulu mengalami beberapa kali pemekaran. Semula Provinsi Bengkulu terdiri dari 3 (tiga) kabupaten dan 1 (satu) kota, akan tetapi sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), maka Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 (sembilan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, dan 128 (seratus dua puluh delapan) Kecamatan.

Provinsi Bengkulu terletak di wilayah pantai barat Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dengan garis pantai sepanjang 525 km. Wilayah di bagian timur merupakan daerah berbukit-bukit yang merupakan bagian dari Bukit Barisan yang membentang di sepanjang Pulau Sumatera dan bagian lainnya merupakan wilayah yang relatif datar. Secara astronomis, Provinsi Bengkulu terletak di pantai barat Pulau Sumatera pada garis lintang 2°16' - 3°31' LS dan garis bujur 101°1' - 103°41' BT, sedangkan secara administratif berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Barat
2. Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia dan Provinsi Lampung.
3. Sebelah Barat dengan Samudera Hindia.
4. Sebelah Timur dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan.



Adapun luas wilayahnya sendiri mencapai $\pm 32.365,6 \text{ Km}^2$ dengan luas daratan $\pm 20.030,5 \text{ Km}^2$ dan luas perairan (laut) mencapai $\pm 12.335,2 \text{ Km}^2$ dengan panjang garis pantai mencapai $\pm 525 \text{ Km}$ yang seluruhnya terletak di bagian barat Provinsi Bengkulu. Selain itu, Provinsi Bengkulu memiliki beberapa pulau kecil baik yang berpenghuni seperti Pulau Enggano, serta pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni seperti Pulau Dua, Pulau Merbau, Pulau Bangkai, Pulau Satu, Pulau Mega dan Pulau Tikus.

Tabel 2.1

Luas Wilayah Provinsi Bengkulu dirinci menurut Kabupaten/Kota

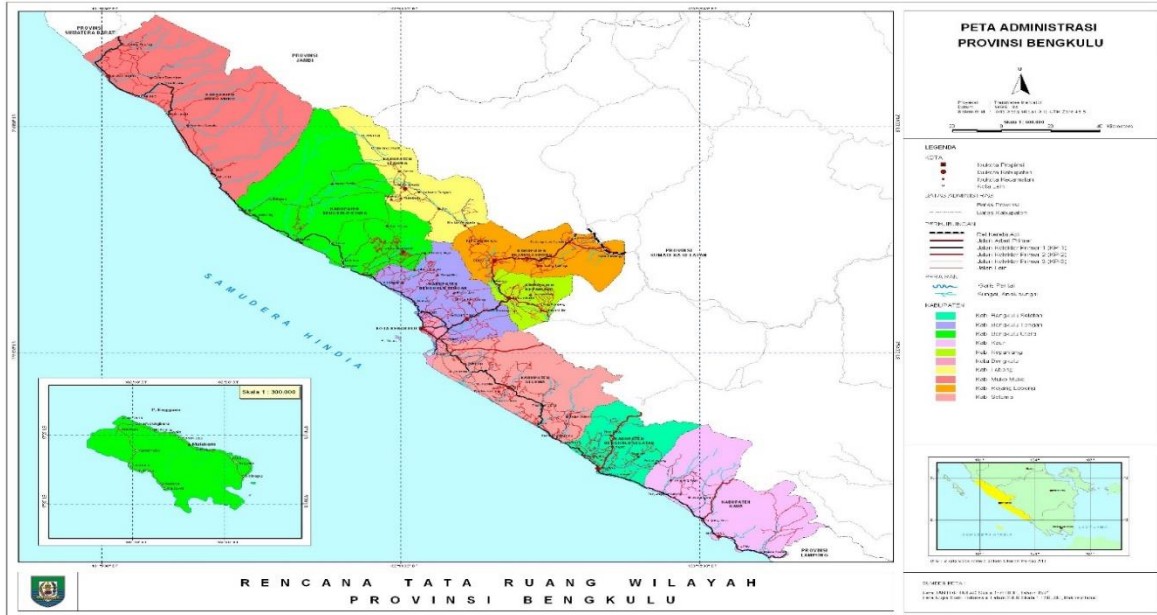
No.	Kabupaten/ kota	Luas darat (km ²)	Luas Laut (km ²)
1	Bengkulu Selatan	1.218,5	307,7
2	Rejang Lebong	1.506,8	0,0
3	Bengkulu Utara	4.392,96	1.495,93
4	Kaur	2.547,0	606,0
5	Seluma	2.461,5	422,7
6	Mukomuko	4.143,7	862,2
7	Lebong	1.672,2	0,0
8	Kepahiang	713,1	0,0
9	Kota Bengkulu	151,7	387,6
10.	Bengkulu Tengah	1.223,94	622,27
	Jumlah	20.030,5	12.335,2

Sumber : RTRW Provinsi Bengkulu 2012-2032.

Berdasarkan luas wilayah, Kabupaten Bengkulu Utara merupakan kabupaten yang paling luas yang mencapai $4.392,96 \text{ Km}^2$, atau sebesar 21,93% dari total wilayah Provinsi Bengkulu. Sedangkan Kota Bengkulu memiliki wilayah terkecil dan menjadi satu-satunya kota administratif di Provinsi Bengkulu, yang juga menjadi Ibukota Provinsi.



Gambar 2.1
Peta Administratif Provinsi Bengkulu



Sumber : RTRW Provinsi Bengkulu 2012-2032

Provinsi Bengkulu terdiri dari 128 Kecamatan dan 1.514 Desa/Kelurahan. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa
Provinsi Bengkulu Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	Bengkulu Selatan	Manna	11	158
2	Rejang Lebong	Curup	15	156
3	Bengkulu Utara	Arga Makmur	19	220
4	Kaur	Bintuhan	15	195
5	Seluma	Tais	14	202
6	Mukomuko	Mukomuko	15	152
7	Lebong	Muara Aman	12	104
8	Kepahiang	Kepahiang	8	117
9	Bengkulu Tengah	Karang Tinggi	10	143
10	Kota Bengkulu	Kota Bengkulu	9	67
Jumlah			128	1.514

Sumber : Bengkulu Dalam Angka Tahun 2020.

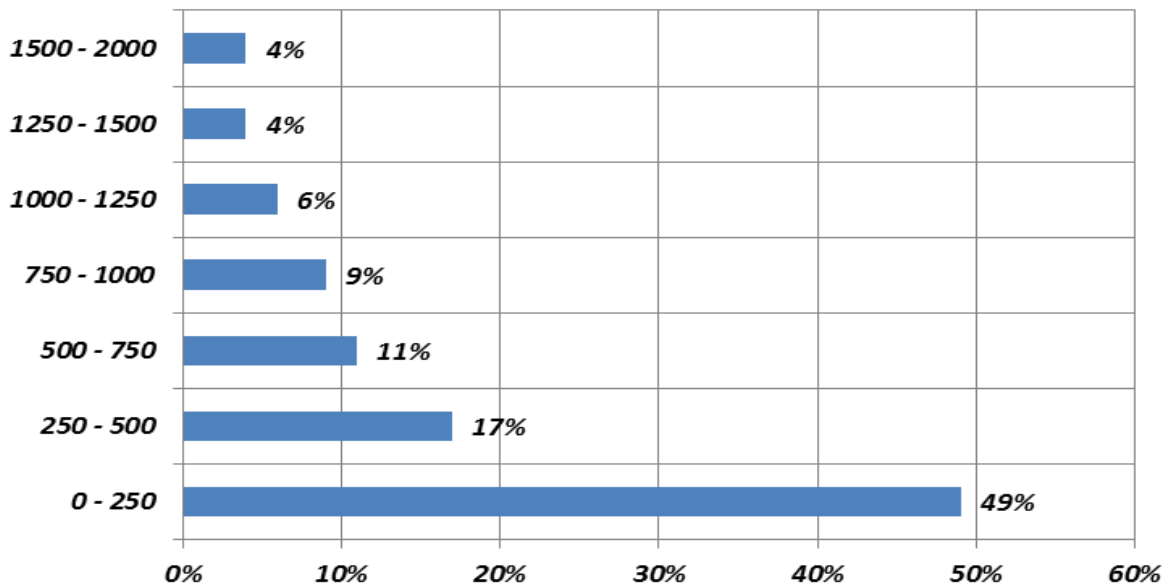


Secara geografis, Provinsi Bengkulu terletak di Pantai Barat Pulau Sumatera, membujur dari utara ke selatan. Di sebelah Timur merupakan hutan suaka alam dan hutan lindung, dan Samudera Indonesia di sebelah Barat serta dataran tinggi yang membentang dari ujung utara sampai ujung selatan dengan lebar ± 50 Km. Dataran tinggi merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan. Provinsi Bengkulu memiliki bentuk wilayah relatif memanjang sejajar garis pantai, dengan panjang garis pantai ± 525 Km. Wilayah Provinsi Bengkulu memiliki kontur yang bergelombang dengan ketinggian tempat (*altitude*) berkisar antara 0-1.938 meter di atas permukaan laut (dpl). Titik terendah dijumpai di sepanjang pantai sedang titik tertinggi terletak di Puncak Gunung Kaba. Ditinjau berdasarkan kelas ketinggian tempat, maka wilayah Provinsi Bengkulu dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Wilayah dengan ketinggian tempat 0 - 250 m dpl, meliputi areal seluas 976.624 ha yang menyebar disepanjang pantai dari utara sampai bagian selatan yang merupakan dataran *aluvium*;
- b. Wilayah dengan ketinggian tempat >250 - 500 m dpl, meliputi areal seluas 338.365 ha yang menyebar disepanjang pantai dari utara sampai bagian selatan yang merupakan peralihan dari *aluvium* ke perbukitan;
- c. Wilayah dengan ketinggian tempat >500 - 750 m dpl, meliputi areal seluas 228.881 ha yang menyebar disebagian besar Kabupaten Lebong dan Kabupaten Rejang Lebong;
- d. Wilayah dengan ketinggian tempat >750 - 1000 m dpl, meliputi areal seluas 181.548 ha yang menyebar di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Kaur yang merupakan Taman Nasional;
- e. Wilayah dengan ketinggian tempat >1.000 - 1.250 m dpl, meliputi areal seluas 128.664 ha di sepanjang bagian bawah pegunungan bukit barisan yang merupakan Taman Nasional;
- f. Wilayah dengan ketinggian tempat >1.250 - 1.500 m dpl, meliputi areal seluas 78.630 ha yang sebagian besar menyebar di sepanjang bagian bawah pegunungan bukit barisan di Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kaur;
- g. Wilayah dengan ketinggian tempat >1.500 - 2.000 m dpl, meliputi areal seluas 70.338 ha yang merupakan puncak gunung-gunung di sepanjang pegunungan Bukit Barisan.



Gambar 2.2
Ketinggian Tempat di Provinsi Bengkulu



Sumber : Bengkulu Dalam Angka Tahun 2020.

Luas kawasan hutan di Provinsi Bengkulu, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 420/ Kpts-II/1999 juncto Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 643/Menhut-II/2011 juncto Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.784/Menhut-II/2012 adalah 924.631 hektar atau 46.16 % dari luas wilayah daratannya; yang terdiri dari fungsi hutan konservasi, lindung, dan produksi. Sebagian besar, luas kawasan hutan di Provinsi Bengkulu ini berupa hutan dengan fungsi konservasi, yaitu sekitar 50,07 %; diikuti oleh luasan hutan lindung sekitar 27,12 %, dan hutan produksi sekitar 22,81 %. Ini berarti sebagian besar fungsi hutan yang berada di Provinsi Bengkulu adalah untuk perlindungan lingkungan.



Tabel 2.3
Luas Hutan Menurut Fungsinya Dan Kabupaten/Kota (Ha)
Provinsi Bengkulu Tahun 2019

No.	Fungsi Kawasan Hutan	Luasan (Ha)	
1.	Hutan Konservasi	462.965	
	- Cagar Alam	4.300	
	- Taman Nasional	412.325	
	- Taman Wisata Alam	27.630	
	- Taman Hutan Raya	1.748	
	- Taman Buru	16.962	
2.	Hutan Lindung (HL)	250.750	
3.	Hutan Produksi	210.916	
	- Hutan Produksi Terbatas	173.280	
	- Hutan Produksi Tetap	25.873	
	- Hutan Produksi Konversi	11.763	
Total		924.631	
No.	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	Presentase
1	Bengkulu Selatan	49.299,89	5,33 %
2	Rejang Lebong	53.448,23	5,78 %
3	Bengkulu Utara	194.622,05	21,05 %
4	Kaur	144.779,91	15,66 %
5	Seluma	88.399,87	9,56 %
6	Mukomuko	228.378,32	24,70 %
7	Lebong	118.887,03	12,86 %
8	Kepahiyang	17.701,87	1,91 %
9	Bengkulu Tengah	27.330,60	2,96 %
10	Kota Bengkulu	1.783,23	0,19 %
Total		924.631,00	100 %

Sumber : SK Menhut No. 784/Menhut-II/2012

Kawasan hutan Provinsi Bengkulu tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan luasan arealnya bervariasi menurut fungsinya. Kabupaten Mukomuko memiliki kawasan hutan produksi yang terluas yakni sekitar 74.675,17 Ha. Kabupaten Seluma memiliki luas kawasan hutan lindung terluas, yakni sekitar 66.527,63 Ha. Kawasan hutan konservasi terluas juga berada di Kabupaten Mukomuko, dengan luasan arealnya sekitar 150.817,65 ha.



2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

A. Pertanian Tanaman Pangan

Sektor pertanian memberikan peran penting dalam perekonomian Provinsi Bengkulu karena merupakan sektor utama yang mempunyai peranan terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2017 peranan sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Bengkulu adalah 29,85 persen (angka sangat sementara). Dengan nilai nominal 16.537,9 milyar rupiah (atas dasar harga berlaku). Pada tahun 2018 PDRB Provinsi Bengkulu 28.65 persen (angka sangat sementara), dengan nilai nominal 19.029,3 milyar rupiah (atas dasar harga berlaku). Cakupan kegiatan pertanian terdiri beberapa jenis kegiatan yaitu pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian, kehutanan dan penebangan kayu serta perikanan.

Tabel 2.4
Luas Areal Sawah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2018

Nama Kab/ Kota	2018	2017	2016	2015
Bengkulu Selatan	8.368,41	10.924,0	11.010,0	11.036
Rejang Lebong	5.553,48	9.952,0	9.952,0	9.951
Bengkulu Utara	5.429,50	12.317,8	11.723,8	11.757
Kaur	6.286,83	5.951,1	8.099,0	8.099
Seluma	8.986,26	14.845,0	16.743,0	18.118
Muko-muko	3.993,54	10.716,0	9.370,0	9.469
Lebong	8.804,26	9.594,0	9.605,0	9.605
Kepahiang	3,256,81	5.287,0	5.287,0	5.287
Bengkulu Tengah	2.358,16	5.945,0	6.117,0	6.615
Kota Bengkulu	702,06	1.423,0	1.435,0	1.714
Total Provinsi	50.842,50	86.954,9	89.341,8	91.651

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2020.

Pada tahun 2018 total produksi yang mengalami penurunan produksi dibanding tahun sebelumnya yaitu komoditi padi sawah, jagung, kacang tanah dan kacang hiaju. Sedangkan padi ladang, kedelai, ubi kayu dan ubi jalar mengalami kenaikan produksi dibanding tahun sebelumnya yaitu 23.001 ton, 2.118 ton, 46.960 ton dan 37.542 ton. Selain tanaman padi dan palawija, Provinsi Bengkulu juga mempunyai keragaman produksi tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan. Pada tahun 2018, terdapat 26 jenis komoditi tanaman sayuran dan



26 komoditi buah- buahan dengan total luas panen tanaman sayuran mencapai 29.950 hektar dengan produksi sebesar 3.081.535 ton.

Tabel 2.5
Luas Panen Dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2018

Kabupaten/ Kota	2015		2016		2017		2018	
	Luas Panen (Ha)	Luas Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Luas Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Luas Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Luas Produksi (Ton)
Bengkulu Selatan	19.819	88.307	17.598	88.789	18.554	81.459	20.841	93.983
Rejang Lebong	22.415	93.756	20.247	85.183	21.962	85.917	21.034	86.863
Bengkulu Utara	25.234	106.867	16.948	73.706	26.394	101.154	26.856	117.745
Kaur	10.334	40.626	11.707	52.018	12.050	50.699	12.278	50.831
Seluma	21.154	63.439	17.509	59.460	23.943	94.786	20.083	81.285
Mukomuko	12.864	52.582	14.259	81.755	14.930	82.271	13.132	76.845
Lebong	10.724	46.456	9.598	51.490	9.728	51.591	15.208	84.437
Kepahiang	11.835	52.252	11.195	47.738	11.423	52.255	10.713	48.543
Bengkulu Tengah	10.827	34.707	7.634	31.624	7.615	34.154	11.763	50.809
Kota Bengkulu	2.904	14.205	2.138	6.889	1.862	8.466	1.721	8.195
JUMLAH	147.572	593.194	128.833	578.650	148.460	642.752	153.629	699.531

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2020.

B. Perkebunan

Sub sektor perkebunan memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan pertanian di Provinsi Bengkulu terutama sebagai penghasil devisa, penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap produk domestik bruto. Usaha perkebunan di Provinsi Bengkulu sebagian dilakukan oleh rumah tangga Perkebunan Rakyat (PR). Dan saat ini komoditi yang merupakan unggulan yaitu kelapa sawit, karet, kopi dan kakao, disamping komoditi perkebunan spesifik lainnya seperti kelapa, lada, aren dan lain-lain. Komoditi perkebunan tersebut merupakan usaha tani yang sangat mempengaruhi perekonomian kehidupan masyarakat di Bengkulu. Selain itu komoditi perkebunan diusahakan oleh perkebunan besar Negara/swasta dalam bentuk inti dan plasma. Komoditi yang banyak dan yang dikembangkan perusahaan perkebunan swasta yaitu kelapa sawit, karet, kakao, kopi arabika dan teh.



Dukungan luas wilayah dan kondisi lahan di Provinsi Bengkulu terhadap komoditas tanaman perkebunan menjadikan wilayah ini banyak yang dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Selain dikelola oleh perusahaan pemerintah (Perkebunan Nusantara), terdapat juga perkebunan yang dimiliki dan dikelola rakyat. Komoditi yang dihasilkan antara lain kelapa sawit, karet, kopi, dan lain-lain. Pada tahun 2018 kelapa sawit dan karet merupakan komoditas unggulan dengan produksi masing-masing 735.766 ton dan 68.842 ton.

Tabel 2.6
Luas Areal Dan Produksi Perkebunan Rakyat Tahun 2019

Lokasi	KOMODITI	TBM	TM	TTM/ TR	Jumlah	Produksi (Ton)	Rata-Rata Luas kebun
Bengkulu Utara	Kelapa Sawit	10.295	27.141	1.319	39.755	77.943	1.74
	Karet	5.168	27.141	2.101	34.409	3.615	1.55
	Kopi Arabika	73	266	313	652	274	1.34
	Kopi Robusta	705	3.609	853	5.166	3.300	1.12
Seluma	Kelapa Sawit	9.272	21.990	183	31.455	71.687	2.25
	Kopi Robusta	738	6.799	446	7.983	4.882	1.05
	Karet	3.886	20.806	1.370	26.062	25.695	1.18
Bengkulu Tengah	Kelapa Sawit	1.439	7.562	-	9.001	23.500	1.26
	Karet	1.959	8.503	35	10.497	11.295	1.32
	Kopi Arabika	-	300	-	300	304	0.87
	Kopi Robusta	159	4.252	-	4.411	3.190	1.69
Mukomuko	Kelapa Sawit	11.129	90.638	1.055	102.822	502.345	2.17
	Karet	420	9.352	374	10.146	8.417	1.12
	Kopi Arabika	-	5	4	9	-	0.24
	Kopi Robusta	13	80	1	94	50	0,58
Kaur	Kelapa Sawit	3.800	4.350	123	8.273	16.000	1.17
	Kopi Robusta	2.010	7.578	182	9.770	6.820	1.33
	Karet	3.921	2.843	320	7.084	11.000	0.87
Rejang Lebong	Kelapa Sawit	354	411	-	765	986	1.95
	Karet	3.665	5.786	399	9.850	4.696	1.47
	Kopi Arabika	284	231	5	515	179	1.02
	Kopi Robusta	1.979	19.572	1.486	23.037	15.740	1.25
Lebong	Kopi Robusta	1.036	6.946	116	8.097	4.995	1.49
	Kelapa Sawit	147	89	3	239	62	0.17
	Karet	3.189	1.598	40	4.827	1.228	1.05
Kepahiang	Kelapa Sawit	15	96	2	113	230	1.40
	Karet	95	62	8	165	53	1.14
	Kopi Arabika	1	59	2	60	32	0.31
	Kopi Robusta	1.110	23.566	10	24.686	19.778	1.82
Bengkulu Selatan	Kopi Robusta	130	2.527	25	2.682	2.044	0.74
	Kelapa Sawit	2.438	12.477	13	14.927	36.840	1.12
	Karet	1.247	3.025	10	4.282	2.801	0.99
Kota Bengkulu	Kopi Robusta	-	4	-	4	3	0.81



Lokasi	KOMODITI	TBM	TM	TTM/ TR	Jumlah	Produksi (Ton)	Rata-Rata Luas kebun
	Karet	50	67	2	119	42	1.43
	Kelapa Sawit	238	1.575	5	1.818	6.173	1.70
Jumlah – Total		70.965	321.306	10.805	404.075	866.199	0.58

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2020.

Tabel 2.7

Jumlah Petani, Luas Areal, Produksi dan Produksi Rata-Rata Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman Provinsi Bengkulu Tahun 2019

Jenis Tanaman	Petani (KK)	Keadaan Tanaman-Conditions of Plant (Ha)				Produksi- (Ton)	Produksi Rata-Rata (Kg/Ha)
		TBM	TM	TTM/TR	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kelapa Sawit	7.122	1.439	7.562	-	9.001	23.500	3.108
Karet	7.931	1.959	8.503	35	10.497	11.295	1.328
Kopi Robusta	2.607	159	4.252	-	4.411	3.190	750
Kopi Arabika	345	-	300	-	300	304	1.013
Kakao	595	-	281	-	281	30	107
Kelapa	290	-	1.113	-	1.113	1.105	993
Lada	133	-	100	-	100	62	620
Cengkeh	-	-	-	-	-	-	-
Aren	12	-	7	-	7	6	857
Kayu Manis	160	6	74	-	80	62	886
Pinang	1.550	-	469	-	469	551	1.175
Kapuk	21	-	15	-	15	5	333
Kemiri	63	-	40	-	40	10	250
Panili	-	-	-	-	-	-	-
Pala	35	6	8	-	14	3	375
Jarak Pagar	15	-	-	-	-	-	-
Jumlah	20.879	3.569	22.724	35	26.328	40.123	11.795

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2020.

Keterangan TBM : Tanaman Belum Menghasilkan

TM : Tanaman Menghasilkan

TTM/TR : Tanaman Tidak Menghasilkan/Tanaman Rusak

C. Pertambangan dan Industri

Subsektor pertambangan juga merupakan subsektor yang kecil peranannya dalam perekonomian Provinsi Bengkulu seperti terlihat dari relatif rendahnya peranan subsektor pertambangan dalam PDRB Provinsi Bengkulu. Selama waktu 2000-2017 peranan subsektor pertambangan dalam PDRB rata-rata berkisar antara 3% - 4% per tahun. Rendahnya peranan



subsektor pertambangan dalam perekonomian disebabkan belum optimalnya eksploitasi bahan-bahan tambang yang terkandung di bumi Provinsi Bengkulu.

Batubara merupakan hasil tambang unggulan pada subsektor pertambangan di Provinsi Bengkulu. Hingga kini produksi batubara di Provinsi Bengkulu diperkirakan mencapai 3,7 juta ton. Pada tahun 2018 1,1 juta ton batubara Provinsi Bengkulu ditujukan untuk penjualan pasar dalam negeri, sisanya di ekspor ke negara lain. Seiring dengan terus meningkatnya produksi batubara, total volume ekspor batubara Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 mencapai 2,34 juta ton, ini mencapai 61,58% dari jumlah seluruh penjualan.

Tabel 2.8
Produksi dan Penjualan Batubara menurut Kabupaten/Kota (ton) Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Produksi	Luar Negeri	Dalam Negeri	Jumlah Penjualan
Bengkulu selatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Rejang Lebong	0,00	0,00	0,00	0,00
Bengkulu Utara	2.484.694,78	1.471.300	878.227,4	23.490.527
Kaur	0,00	0,00	0,00	0,00
Seluma	147.356,59	77.404,212	61298,108	138.702,32
Muko-muko	0,00	0,00	0,00	0,00
Lebong	30.307,00	7.902,085	14.126.841	22.028,926
Kepahiang	0,00	0,00	0,00	0,00
Bengkulu Tengah	1.068.022,49	1.091.946	211.593,1	1.303.539,00
Kota Bengkulu	0,00	0,00	0,00	0,00
Bengkulu	3.730.380,86	2.348.551,851	1.165.245,376	3.813.797,227

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2020.

Potensi tambang di Provinsi Bengkulu meliputi batubara, pasir besi, serta emas dan mineral pengikutnya. Kegiatan eksploitasi tambang batubara berada di Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Seluma. Di Kabupaten Bengkulu Utara kegiatan eksplorasi batubara berada di beberapa wilayah seperti Kecamatan Ketahun, Kecamatan Batik Naudan Kecamatan Lais. Sementara di Kabupaten Bengkulu Tengah eksplorasi batubara berada di wilayah Kecamatan Air Napal, Kecamatan Karang Tinggi dan Kecamatan Taba Penanjung. Di Kabupaten Seluma eksplorasi batubara berada di wilayah kecamatan Sukaraja, Kecamatan Seluma dan Kecamatan Talo. Di Kabupaten Bengkulu Selatan eksplorasi batubara berada di wilayah Kecamatan Kedurang. Di Kabupaten Kaur eksplorasi batubara berada di wilayah Kecamatan Kaur Utara.



Kegiatan pertambangan pasir besi di Provinsi Bengkulu, pada umumnya terdapat di kawasan pantai barat yang tersebar di beberapa wilayah di masing-masing Kabupaten. Sedangkan untuk potensi tambang emas dan mineral pengikutnya (dmp), telah dikeluarkan beberapa SIPP (Surat Ijin Penyelidikan Pendahuluan) di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur.

D. Kelautan dan Perikanan

Sub sektor perikanan di Provinsi Bengkulu memiliki potensi yang cukup besar, terutama perikanan laut. Hal ini disebabkan letak wilayah Provinsi Bengkulu yang sebagian besar menghadap ke Samudera Hindia dengan panjang pantai yang diperkirakan sekitar 525 km, dengan luas Laut Teritorial sebesar 53.000 km² dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yaitu batas jarak 12-200 mil laut dari pantai dengan luas sebesar 685.000 km².

Wilayah Provinsi Bengkulu yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia menunjukkan besarnya potensi perikanan yang besar. Disamping berasal dari laut, produksi ikan juga diperoleh dari pengembangan budidaya perikanan. Berdasarkan data jumlah produksi perikanan laut sebesar 67.299.181,97 Kg/Tahun dengan nilai Rp. 1.026.935.792.864,86. Sedangkan jumlah produksi perikanan darat sebesar 1.805.947 Kg/Tahun akan tetapi di One Data belum dimasukkan nilai/nominalnya dalam Rupiah. Pada Tahun 2017 jumlah produksi yang berasal dari perikanan laut dan perikanan darat adalah 67.547.640,78 Kg/Tahun, sedangkan Tahun 2018 jumlah produksi yang berasal dari perikanan laut dan perikanan darat adalah 69.105.128,97 Kg/Tahun. Jumlah total rumah tangga nelayan Tahun 2018 adalah 53.742 orang.



Tabel 2.9
Produksi dan Rumah Tangga Nelayan Usaha Perikanan Menurut Subsektor di Provinsi Bengkulu Tahun 2019

Usaha Perikanan		Produksi		Rumah Tangga Nelayan
		Kuantitas	Nilai	
A	Perikanan Laut	67.299.181,97	1.026.935.792.864,86	
B	Perairan Umum	1.805.947,00		
1.	Sungai	1.151.433		
2.	Danau	183.583		
3.	Waduk	74.778		
4.	Rawa	396.153		
	2018	69.105.128,97		
	2017	67.547.640,78		

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2020.

Tabel 2.10
Potensi, Produksi, Tingkat Pemanfaatan dan Peluang Pengembangan Usaha Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bengkulu Tahun 2019

Jenis Kegiatan	Luas Potensi	Luas	Produksi Lestari	Tingkat Pemanfaatan		Peluang	
		Potensi Lestari	(Ton/Ha)	Ton	(%)	Ton	(%)
Perikanan Laut	(0-200 Mil)	1.166.760	67.299	67.299	673,00	70.804	708,00
Perairan Umum	73.790 Ha	49.506	1.805	1.805,94	18,05	118.961	1.189

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2020.



Tabel 2.11
Potensi dan Jumlah Boleh Tangkap Sumberdaya Perikanan Tangkap
Menurut Jenis Ikan di Provinsi Bengkulu Tahun 2018

No	Jenis Ikan	Potensi (Kg)	Nilai (Rp)
1.	Tuna	7.190.756	171.598.605.650
2.	Udang	6.926.358	420.392.545.688
3.	Tongkol	6.897.080	137.616.601.800
4.	Tenggiri	4.845.391,85	266.588.914.427
5.	Kembung	3.747.941	94.130.583.500
6.	Bawal	3.586.277	279.566.881.150
7.	Kakap	2.954.165	155.818.561.000
8.	Cakalang	2.268.266	56.706.649.500
9.	Layur	2.096.153	62.409.600.800
10.	Manyung	1.761.563	26.146.962.409
11.	Kerapu	2.442.964	161.485.227.690
12.	Layang	2.620.138	65.503.441.000
13.	Gulamah	1.634.927	41.149.279.800
14.	Teri	2.327.754	40.942.807.600
15.	Selar	1.294.441	34.024.241.900
16.	Kurisi	392.903	5.893.545.750
17.	Kuwe	327.020	8.545.712.600
18.	Belanak	323.720	4.109.400.450
19.	Tembang	355.473	5.332.098.750
20.	Baronang	72.565	1.088.469.750
21.	Ikan Lainnya	13.173.327,12	307.231.053.905
22.	Kepiting	40.000	1.850.000.000
23.	Cumi-cumi	20.000	700.000.000

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2020.

Berdasarkan data, potensi hasil tangkapan terbesar adalah ikan Tuna jika dilihat dari jenis atau spesies ikannya, potensi Tuna di perairan Provinsi Bengkulu adalah 7.190.756 Kg/Tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa perairan laut Provinsi Bengkulu didominasi oleh ikan Tuna sepanjang tahunnya. Potensi hasil tangkapan terkecil adalah cumi-cumi yaitu 20.000 Kg/Tahun. Nilai dalam Rupiah tertinggi untuk potensi hasil tangkapan perairan laut Provinsi Bengkulu adalah Udang, Tenggiri, Bawal, Kerapu, Kakap, Kepiting dan Cumi-cumi meskipun potensi hasil tangkapannya kecil. Hal tersebut dikarenakan jenis-jenis ikan tersebut adalah ikan yang bernilai ekonomis tinggi.



Tabel 2.12
Volume dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum Daerah (PUD) Menurut
Komoditas Utama Tahun 2018

Jenis Ikan	Volume (Kg)	Nilai (Rp)
Gabus	218.270	8.680.700.000
Sepat	254.126	7.828.410.000
Betok	186.577	5.181.760.000
Baung	141.453	3.536.325.000
Nila	263.747	5.595.440.000
Lele	158.445	3.484.900.000
Mujair	123.280	2.767.100.000
Sidat	111.239	7.973.120.000
Mas	109.460	2.736.500.000
Udang	19.000	665.000.000
Jelawat	15.500	232.500.000
Lais	11.500	115.000.000
Tawes	4.500	67.500.000
Toman	4.000	60.000.000
Gurame	2.000	30.000.000
Ikan lainnya	182.850	2.762.950.000
Total	1.805.947	51.717.205.000

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2020.

Berdasarkan data tersebut, volume produksi tertinggi yaitu ikan Nila adalah 263.747 Kg/Tahun dengan nilai Rp. 5.595.440.000,-. Volume produksi terendah yaitu ikan Gurame adalah 2.000 Kg/Tahun dengan nilai Rp. 30.000.000,-. Ikan Sidat dan Ikan Gabus adalah ikan dari perairan umum yang bernilai ekonomis tinggi sehingga nilainya cukup tinggi jika dibandingkan dengan jenis-jenis ikan lainnya walaupun volume produksinya relatif rendah.

E. Pariwisata dan Budaya

Sumberdaya pariwisata di Provinsi Bengkulu pada dasarnya cukup potensial untuk dikembangkan agar berdaya saing tinggi dibandingkan dengan provinsi sekitar. Namun demikian, dari data yang ada jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Bengkulu relatif masih terbatas. Pada tahun 2016, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Bengkulu berjumlah 492.841 orang dengan tingkat hunian hotel dan rata-rata lama menginap untuk hotel berbintang sebesar 57 persen dan 1,54 hari serta hotel melati sebesar 22 persen dan 1,17 hari.



Sedangkan jumlah hotel tahun 2016 sebanyak 60 hotel terdiri atas hotel berbintang sebanyak 9 hotel dan hotel melati sebanyak 51 hotel.

Berikut ini merupakan beberapa objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut: Kota Bengkulu; (1) Pantai Panjang (2) Danau Dendam Tak Sudah (3) Tapak Padri & Pantai Jakat, (4) Benteng Marlborough, (5) Rumah Peninggalan Bung Karno, (6) Monumen Parr & Hamilton (7) Makam Sentot Ali Basya (8) Masjid Jamik. Kabupaten Rejang Lebong; (1) Telaga 7 Warna (2) Air Terjun & Air Panas Suban, (3) Bukit Kaba. Kabupaten Lebong (1) Danau Tes. Kabupaten Bengkulu Utara; (1) Pantai Lais, (2) Air Terjun Kemumu, (3) Taman Nasional Kerinci Seblat, (4) Air Terjun 9 Tingkat, (5) Danau Gedang, (6) Peninggalan Kerajaan Balai Buntar. Kabupaten Bengkulu Selatan; (1) Pantai Pasar Bawah, (2) Danau Ulu Seginim, (3) Pantai Gunung Perak Mutiara Kedurang, (4) Air Sungai Manna. Kabupaten Mukomuko; (1) Pantai Indah, (2) Bendungan Air Manjuntjo. Kabupaten Kaur; (1) Pantai Muara Kedurang, (2) Pantai Linau. Kabupaten Seluma; (1) Air Terjun Batu Bekinyau, (2) Bendungan Seluma, (3) Pantai Seluma. Kabupaten Kepahiang; (1) Air Terjun Curug Embun Kabawetan, (2) Kebun Teh Kabawetan, (3) Cagar Alam Bunga Rafflesia. Kabupaten Bengkulu Tengah; (1) Pantai Sungai Suci

Saat ini jenis wisata yang dapat menarik perhatian wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata budaya berupa perayaan Tabot yang setiap tahunnya diagendakan pemerintah daerah dengan acara puncaknya setiap tanggal 10 Muharam Tahun Hijriah. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas/ instansi terkait melalui program *multi years* seperti penataan kawasan wisata pantai panjang, berupa pembuatan jalan dua jalur, *jogging track*, *sea wall*, *sunset deck*, *gazebo*, revitalisasi objek wisata sejarah, panggung terbuka, *sport center*, *view tower*, mess pemda, marina, dan lain-lain.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Secara geomorfologi Provinsi Bengkulu mempunyai empat karakter utama yaitu dataran pantai yang membentang dari Kabupaten Mukomuko sampai Kabupaten Kaur, dataran *alluvial* dan zona vulkanik yang merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan dengan karakter pegunungan yang dikenal dengan Patahan Semangko. Dengan kondisi ini, maka Provinsi Bengkulu termasuk wilayah yang rawan bencana, terutama untuk pulau-pulau kecil yang



berada di Samudera Hindia seperti Pulau Enggano, Pulau Merbau, Pulau Tapak Balai dan lain-lain.

Tabel 2.13
Potensi Bencana Alam di Provinsi Bengkulu

NO	JENIS BENCANA	LOKASI	KETERANGAN
1	Banjir (Rawan Banjir)	Kota Bengkulu	Muara Bangkahulu,
		Bengkulu Utara	Talang Empat
		Mukomuko	Mukomuko Utara
		Lebong	Lebong Selatan, Lebong Tengah
		Kepahyang	Bermani Ilir
		Seluma	Ilir Talo, Sukaraja dan Air Periukan.
		Kaur	Kaur Selatan, Nasal, Tanjung Iman
2	Tanah longsor	Bengkulu Utara	Pagar Jati, Taba Penanjung, Karang Tinggi
		Mukomuko	Lubuk Pinang, Teras Terunjam, Pondok Sugh
		Rejang Lebong	Bermani Ulu Raya, Padang Ulak Tanding,
		Lebong	Lebong Selatan, dan Lebong Atas
		Kepahyang	Bermani Ilir
		Seluma	Ulu Talo, Talo, Seluma Utara dan Lubuk Sandi
		Bengkulu Selatan	Pino Raya, Ulu Manna, Kedurang Ilir
3	Gunung Berapi	Rejang Lebong	Gunung Kaba
		Lebong	Gunung Belerang
4	Gempa bumi		Tercatat gempag dengan kekuatan terbesar mengguncang pada tanggal 20 Juni 2000 sekitar pukul 23.38 WIB kekuatan 7,3 SR dan hari Rabu tanggal 12 September 2007 sekitar pukul 18.10 WIB.

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu 2012-2032

Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menetapkan prioritasnya yaitu mengurangi dampak bencana dengan mengidentifikasi daerah-daerah rawan bencana, mengurangi kerentanan bencana dan meningkatkan kapasitas untuk menanggapi bencana alam, yang didukung oleh Bappenas dan UNDP melalui program kerjasama SCDRR (*Safer Communities Through Disaster Risk Reduction*). Dalam rangka program BDRM (*Bengkulu Disaster Risk Mapping*), Pemerintah Provinsi Bengkulu telah membentuk tim kerja *multi-stakeholder* sebagai ‘pemain’ utama, yang dibantu oleh tim ahli dari *Swisscontact* sebagai ‘pelatih’. Tim kerja *multi-stakeholder* ini terdiri atas perwakilan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, DPRD, masyarakat, sektor swasta, lembaga perguruan tinggi dan media massa.



Berdasarkan masukan dari tim kerja *multi-stakeholder*, telah disiapkan peta detail tentang risiko bencana yang dipresentasikan dalam atlas. Tipe-tipe bencana yang terkait dengan Provinsi Bengkulu adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, angin puting beliung, kekeringan, banjir, tanah longsor, abrasi pantai dan kebakaran hutan. Untuk masing-masing tipe bencana, juga telah disiapkan peta tematis yang meliputi Peta Bahaya, Peta Kerentanan, Peta Kapasitas dan Peta Risiko. Peta risiko bencana ini berfungsi sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi untuk menyiapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berbasis mitigasi bencana seperti dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

2.1.4. Demografi

Demografi atau ilmu kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Cakupan demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Jumlah penduduk Provinsi Bengkulu berdasarkan data proyeksi Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu tahun 2018 adalah sebanyak 1.963.300 jiwa yang terdiri atas 1.000.644 jiwa penduduk laki-laki dan 962.656 jiwa penduduk perempuan.

Tabel 2.14
Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Bengkulu, 2015-2018

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk			
		2016	2017	2018	2019
1	BENGKULU SELATAN	153.930	155.427	156.930	158.410
2	REJANG LEBONG	257.498	258.763	259.945	260.900
3	BENGKULU UTARA	293.099	298.757	304.386	310.000
4	KAUR	117.269	118.586	119.951	121.210
5	SELUMA	187.807	189.874	191.907	193.800
6	MUKOMUKO	181.343	185.499	189.668	193.880
7	LEBONG	111.063	113.042	114.789	116.610
8	KEPAHIANG	133.703	134.938	136.097	137.190
9	BENGKULU TENGAH	109.593	111.318	113.147	114.700
10	KOTA BENGKULU	359.488	368.065	376.480	385.140
Jumlah		1.872.100	1.874.944	1.904.793	1.991.840

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2020.



Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2010, penduduk Bengkulu mengalami pertumbuhan 1,65 %. Sementara itu, besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 1,53 persen

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Provinsi Bengkulu Tahun 2018

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	99.875	95.549	195.424
2	5-9	97.921	92.568	190.489
3	10-14	94.433	90.164	184.597
4	15-19	92.156	88.953	181.109
5	20-24	89.919	88.325	178.244
6	25-29	88.714	87.396	176.110
7	30-34	86.000	84.690	170.690
8	35-39	79.559	76.658	156.217
9	40-44	68.652	66.112	134.764
10	45-49	58.576	55.376	113.952
11	50-54	48.966	44.487	93.453
12	55-59	36.596	31.769	68.365
13	60-64	23.560	20.852	44.412
14	65-69	14.953	15.020	29.973
15	70-75	10.517	11.382	22.899
16	75+	10.247	13.355	23.602
Jumlah		1.000.644	962.656	1.963.300

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2020.

Hasil analisa Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu terhadap Bonus Demografi menggunakan proyeksi Penduduk dari Sensus Penduduk tahun 2010, Provinsi Bengkulu telah memasuki apa yang disebut dengan Bonus Demografi pada tahun 2015 dan pada masa tahun tersebut di proyeksikan fertilitas pada 2,3 rata-rata anak per Wanita Usia Subur dan akan memasuki masa *Window Of Opportunity* pada tahun 2026 suatu kondisi



dimana wilayah bersangkutan masyarakatnya maju, mandiri, adil, makmur dan sejahtera , rentang masa panjang dari 2015 sampai tahun 2026 harus dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam pembangunan berwawasan kependudukan, hal ini disebabkan tingkat pendidikan, kemiskinan, fertilitas masih menjadi catatan garapan serius bagi pembangunan di Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2029 akan terjadi peledakan penduduk usia lanjut (Lansia) atau *Population Aging Explosions* suatu kondisi yang tidak menguntungkan bilamana Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak dapat memperbaiki kondisi terutama bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan adalah 104. Jumlah rumah tangga di Provinsi Bengkulu tahun 2018 mencapai 490.825 dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Jumlah rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 0,62 persen dibandingkan tahun 2017.

Tabel 2.16
Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010 dan 2019

No	Kabupaten/Kota	Penduduk (ribu)			Laju Pertumbuhan per tahun	
		(2010) 1	(2010) ²	(2018) ²	(2009)-(2010)	(2010)-(2019) ²
1	BENGKULU SELATAN	142,9	143,4	156,9	1,19	1,11
2	REJANG LEBONG	246,8	247,5	259,9	0,67	0,59
3	BENGKULU UTARA	257,7	258,8	304,4	2,11	2,03
4	KAUR	107,9	108,3	120,0	1,35	1,26
5	SELUMA	173,5	174,1	191,9	1,28	1,20
6	MUKOMUKO	155,8	156,5	189,7	2,50	2,41
7	LEBONG	99,2	99,6	114,8	1,85	1,77
8	KEPAHIANG	124,9	125,3	136,1	1,10	1,01
9	BENGKULU TENGAH	98,3	98,7	113,1	1,77	1,68
10	KOTA BENGKULU	308,5	309,9	376,5	2,52	2,44
Jumlah		1715,5	1722,1	1963,3	1,67	1,63

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2020.

Catatan : ¹ Hasil SP2010 (Mei)

² Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045



Rasio jenis kelamin Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 sebesar 104. Hal ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki. Dari 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bengkulu, hanya Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kota Bengkulu yang memiliki rasio jenis kelamin di bawah 104, masing-masing adalah: 101, 102, dan 101. Sementara Kabupaten Mukomuko memiliki rasio jenis kelamin paling tinggi yakni sebesar 108.

Tabel 2.17
Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota Tahun 2010 dan 2019

No	Kabupaten/Kota	Persentase penduduk		Kepadatan penduduk per km ²	
		(2010) ¹	(2019) ²	(2010) ¹	(2019) ²
1	BENGKULU SELATAN	8,33	7,95	121	134
2	REJANG LEBONG	14,37	13,10	151	159
3	BENGKULU UTARA	15,03	15,56	60	72
4	KAUR	6,29	6,09	46	51
5	SELUMA	10,11	9,73	73	81
6	MUKOMUKO	9,09	9,73	39	48
7	LEBONG	5,78	5,85	52	61
8	KEPAHIANG	7,28	6,89	188	206
9	BENGKULU TENGAH	5,73	5,76	81	94
10	KOTA BENGKULU	18,00	19,34	2043	2539
	BENGKULU	100	100	86	100

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2020.

Catatan : ¹ Hasil SP2010 (Mei)

² Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2013-2017, kinerja perekonomian Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian



disuatu daerah. Nilai PDRB Atas dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan di Provinsi Bengkulu dari tahun 2013- 2017 untuk jelasnya dapat dilihat pada indikator dibawah ini.

Tabel 2.18
PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2020

Uraian	2018	2019	Tw-1 2020
PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	66.412,90	72.143,37	18.466,48
PDRB ADHK 2010 (Miliar Rupiah)	44.171,16	46.362,33	11.808,25
PDRB perkapita ADHB (Rupiah)	33.827.176,20	36.219.498,21	-
PDRB perkapita ADHK (Rupiah)	22.498.426,72	23.276.153,56	-
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,99	4,96	3,82

Sumber : BPS, SIPD diolah, 2020.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB pada tahun 2019 mengalami kenaikan dibanding tahun 2018 dimana pada tahun 2018 PDRB ADHB mencapai Rp66.412,90miliar sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp71.143,37 miliar. Hal ini menyebabkan nilai PDRB perkapita ADHB tahun 2018 sebesar Rp33.827,178 juga lebih rendah dari tahun 2019 sebesar Rp36.219,498. Selain itu, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sedikit melambat jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang tumbuh sebesar 4,99% sedangkan pada tahun 2019 tumbuh 4,96%.

Kondisi pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Pandemi Covid-19 terjadi di lebih dari 200 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bahkan, di penghujung Maret 2020, Provinsi Bengkulu masuk dalam zona merah. Dampak Covid-19 terbesar adalah mengganggu proses produksi, distribusi, dan konsumsi akibat tingkat dan skema penularan virus yang menyerang aspek paling fundamental dari seluruh aktivitas kita, yaitu interaksi fisik antarmanusia hingga memaksa kita menerapkan kebijakan social/physical distancing.

Sebagai instrumen utama penggerak aktivitas ekonomi, tentu ini akan sangat berdampak. Hal ini tergambar dalam tertahannya laju perekonomian triwulan I-2020 Provinsi Bengkulu. Perekonomian Provinsi Bengkulu triwulan I-2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 18,47 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 11,81 triliun. Ekonomi Provinsi Bengkulu triwulan I-2020 (y-o-y) tumbuh sebesar 3,82 persen, melambat bila dibandingkan triwulan I-2019 yang tumbuh 5,08



persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,80 persen dan jasa keuangan sebesar 13,73 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai pada ekspor barang dan jasa sebesar 10,70 persen.

Pada tahun 2017, tiga wilayah dengan tingkat PDRB tinggi di Provinsi Bengkulu adalah Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Lebong.

Tabel 2.19
PDRB ADHB per Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2014-2018

No.	Kab/Kota	2015	2016	2017	2018
1	Bengkulu Selatan	4.024,79	4.431, 92	4.863,25	5.302,89
2	Rejang Lebong	6.575,85	7.250,75	7.935,67	8.685,05
3	Bengkulu Utara	5.736,57	6.365,90	6.960,99	7.609,32
4	Kaur	2.455,11	2.714, 45	2.960,34	3.239,53
5	Seluma	3.186,26	3.502,43	3.840,99	4.509,14
6	Mukomuko	3.566,82	3.936,73	4.326,56	4.743,25
7	Lebong	2.330,64	2.594,01	2.854,02	3.092,44
8	Kepahiang	2.952,97	3.284,57	3.639,33	3.979,49
9	Bengkulu Tengah	3.256,84	3.554,10	3.871,70	4.253,68
10	Kota Bengkulu	15.815,85	17.510,73	19.244,91	21.228,16
	Provinsi Bengkulu	50.334,02	55.394,07	60.675,68	66.343,98

Sumber: Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2020.

Perekonomian Provinsi Bengkulu sepanjang tahun 2018 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 4,99%, lebih tinggi dari tahun 2017 yang sebesar 4,98%. Kota Bengkulu adalah wilayah dengan pertumbuhan PDRB terbesar di Provinsi Bengkulu mencapai 5,48% dan Kabupaten Seluma adalah yang terendah yaitu sebesar 4,80%.



Tabel 2.20
Pertumbuhan PDRB per Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2014-2018

No.	Kab/Kota	2015	2016	2017	2018
1	Bengkulu Selatan	5,14	5,32	5,01	4,95
2	Rejang Lebong	5,15	5,27	5,01	4,96
3	Bengkulu Utara	5,07	5,01	5,00	4,81
4	Kaur	4,96	5,34	5,11	4,97
5	Seluma	4,31	5,02	5,01	4,80
6	Mukomuko	5,54	5,69	5,31	5,01
7	Lebong	4,99	5,21	5,14	5,01
8	Kepahiang	5,65	5,71	5,23	5,00
9	Bengkulu Tengah	5,01	5,04	5,02	4,97
10	Kota Bengkulu	6,02	6,17	5,64	5,48
	Provinsi Bengkulu	5,13	5,28	4,98	4,99

Sumber: Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2020.

B. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: pendidikan, kesehatan dan pengeluaran. Kegunaan IPM adalah untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan backcasting sejak tahun 2010.

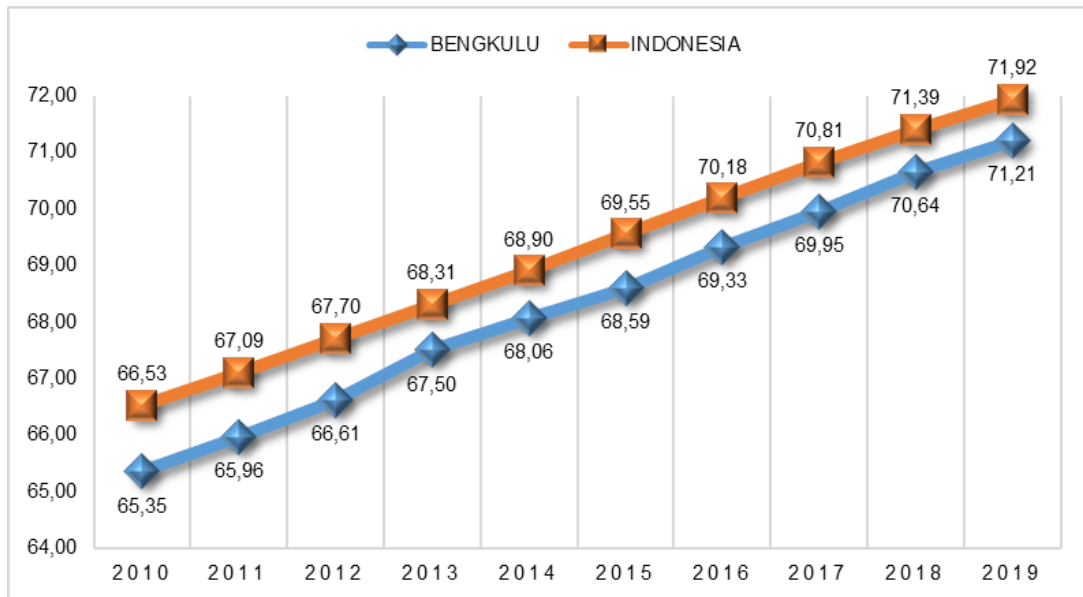
IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia Indonesia terus mengalami kemajuan selama periode 2012 hingga 2018. IPM Provinsi



Bengkulumeningkat dari 66,61 pada tahun 2012 menjadi 70,64 pada tahun 2018. Selama periode tersebut, IPM Bengkulu rata-rata tumbuh sebesar 0,99 persen per tahun. Pada tahun 2018, IPM Provinsi Bengkulu berhasil masuk dalam kategori IPM TINGGI.

Gambar 2.3

Perkembangan IPM Provinsi Bengkulu dan Nasional Tahun 2012-2019



Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2020.

Tabel 2.21

**Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Provinsi Bengkulu
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012 – 2019**

Kab/Kota	IPM								Pertumbuhan 2018-2019
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Provinsi Bengkulu	66,61	67,5	68,06	68,59	69,33	69,95	70,64	71,21	0,81
Bengkulu Selatan	66,77	67,61	68,28	68,57	68,71	69,04	69,85	70,27	0,60
Rejang Lebong	65,51	66,11	66,55	67,51	68,34	68,61	69,40	70,10	1,01
Bengkulu Utara	65,47	66,67	67,27	67,46	67,63	67,80	68,36	68,80	0,64
Kaur	62,32	63,17	63,75	64,47	64,95	65,28	66,20	66,78	0,88
Seluma	61,55	62,1	62,94	63,41	64,04	65,00	65,99	66,69	1,06
Mukomuko	64,16	64,79	65,31	65,77	66,52	67,07	67,47	68,12	0,96



Kab/Kota	IPM								Pertumbuhan 2018-2019
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Lebong	62,84	63,15	63,9	64,72	65,58	65,87	66,28	66,84	0,84
Kepahiang	63,86	64,44	65,22	65,45	66,35	66,60	67,14	67,67	0,79
Bengkulu Tengah	63,12	63,71	64,1	64,68	65,44	65,80	66,65	67,30	0,98
Kota Bengkulu	75,71	76,16	76,49	77,16	77,94	78,82	79,67	80,35	0,85

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2020.

Berdasarkan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bengkulu, IPM tertinggi dicapai oleh Kota Bengkulu sebesar 78,82. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kualitas hidup dengan kriteria pendidikan, kesehatan dan pendapatan di wilayah Kota Bengkulu lebih baik daripada wilayah lain di Provinsi Bengkulu. Kabupaten dengan IPM terendah adalah Kabupaten Seluma, dengan indeks sebesar 65,00. Seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bengkulu juga masuk dalam kategori wilayah dengan nilai IPM sedang.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Pendidikan

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Indikator kemajuan pendidikan dapat diukur dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) disetiap jenjang pendidikan. Di Provinsi Bengkulu APK dan APM tiap jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)
Provinsi Bengkulu Tahun 2014 – 2019

Jenjang	APK (%)						APM (%)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pendidikan SD	113,9	116,1	113,1	112,7	113,5	109,9	98	98,1	98,2	98,6	98,6	98,7
SLTP	88,23	88,79	90,38	90,52	92,08	89,5	76,4	76,8	77	77,8	78,0	78,8
SLTA	79,49	82,79	83,56	87,10	85,57	93,8	64,6	64,9	65,2	65,3	65,5	65,5

Sumber : Provinsi Bengkulu Dalam Angka, SIPD diolah, 2020.

Dari Tabel 2.22 dapat dilihat untuk tingkat SD, Angka Partisipasi Kasar (APK) sudah melebihi 100 %. Ini artinya masih banyak siswa yang berumur di bawah tujuh tahun (*underage*)



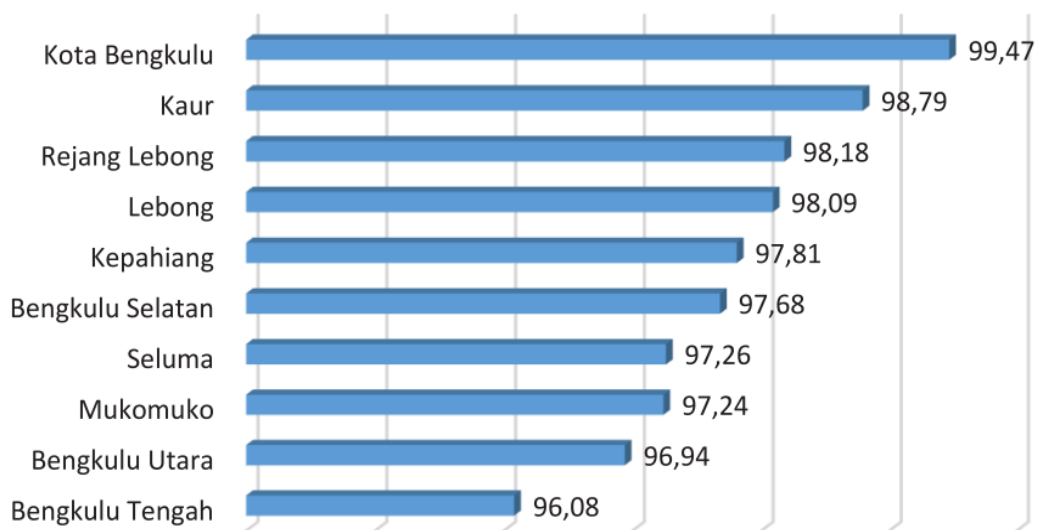
dan di atas 12 tahun (*overage*) yang masih mengikuti pendidikan di tingkat SD. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan bertujuan mengukur banyaknya usia sekolah yang bersekolah tepat waktu dalam suatu jenjang pendidikan dari setiap 100 penduduk usia sekolah, yaitu SD 7-12 tahun, SLTP 13-15 tahun dan SLTA 16-18 tahun. Dari data diatas terlihat bahwa, semakin tinggi tingkat pendidikan maka tingkat partisipasi sekolah semakin kecil, hal ini disebabkan oleh kurangnya fasilitas pendidikan dan keterbatasan ekonomi yang memaksa mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Angka Partisipasi Murni (APM) per jenjang pendidikan terus meningkat selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa akses masyarakat untuk memasuki sekolah per jenjang pendidikan terus meningkat.

b. Angka Melek Huruf

Program pemerintah dalam memberantas buta huruf di Provinsi Bengkulu sudah bisa dikatakan berhasil, yang terlihat dari tingginya persentase penduduk yang telah melek huruf. Angka melek huruf penduduk di Provinsi Bengkulu relatif tinggi. Pada tahun 2018, angka melek huruf telah mencapai 96,00% ke atas untuk seluruh wilayah Bengkulu. Dari data angka melek huruf per Kabupaten/Kota tahun 2018 di bawah dapat terlihat bahwa Kota Bengkulu mencapai angka melek huruf paling tinggi sebesar 99,47 % disusul Kabupaten Kaur sebesar 98,79 %. Sedangkan Kabupaten dengan angka melek huruf paling rendah yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 96,08%.

Gambar 2.4

Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Provinsi Bengkulu



Sumber : Provinsi Bengkulu Dalam Angka, SIPD diolah, 2020.

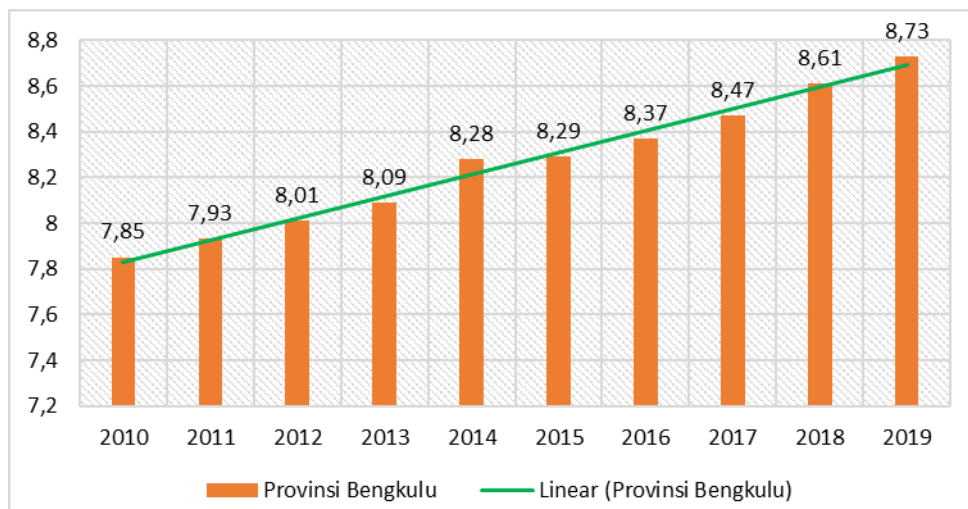


c. Rata-Rata Lama Sekolah

Selama periode 2012 hingga 2019, Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Provinsi Bengkulu tumbuh 1,18 persen per tahun. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Provinsi Bengkulu yang lebih baik. Pada tahun 2019, secara rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Bengkulu usia 25 tahun ke atas mencapai 8,73 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas VIII (SMP kelas II).

Gambar 2.5

Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 – 2019



Sumber : Provinsi Bengkulu Dalam Angka, SIPD diolah, 2020.

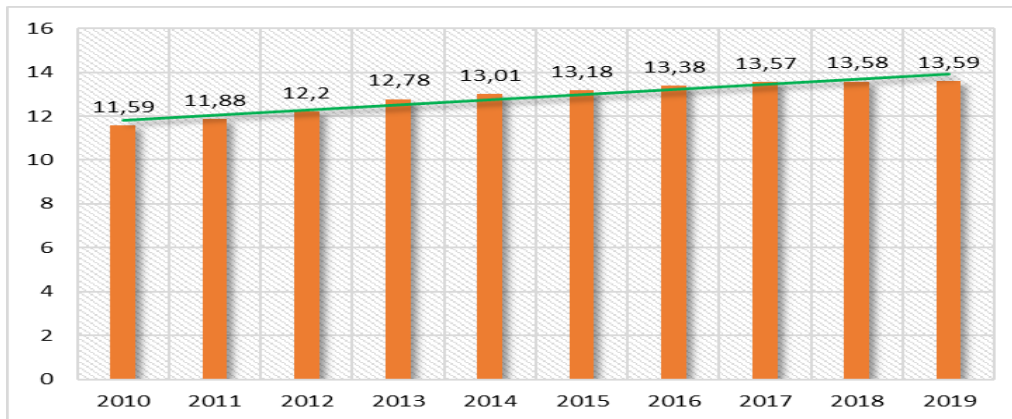
d. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 1,94 persen pertahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah serta adanya ketersediaan fasilitas untuk sekolah pada semua jenjang pendidikan. Pada tahun 2019, Harapan Lama Sekolah di Provinsi Bengkulu telah mencapai 13,59 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga perguruan tinggi atau lulus D1.



Gambar 2.6

Harapan Lama Sekolah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 - 2018



Sumber : Provinsi Bengkulu Dalam Angka, SIPD diolah, 2020.

2. Kesehatan

a. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI)

Salah satu indikator dalam penilaian tingkat kesehatan masyarakat adalah Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Angka kematian bayi adalah angka kematian yang terjadi pada bayi sebelum mencapai usia satu tahun. Angka kematian bayi (umur penduduk dibawah satu tahun) adalah jumlah kematian bayi yang dibandingkan dengan jumlah kelahiran bayi pada tahun tertentu per seribu kelahiran hidup. Angka kematian ibu adalah merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Salah satu faktor tingginya angka kematian ibu di Indonesia adalah disebabkan karena relatif masih rendahnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Penurunan angka kematian Ibu, bukan saja disebabkan oleh faktor kesehatan, ekonomi, dan *cultur* tetapi juga ditentukan oleh kecenderungan usia perkawinan.

Angka kematian bayi di Provinsi Bengkulu sejak 4 (tahun) tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2016 angka kematian bayi sebesar 10/1000 kelahiran hidup dan menurun menjadi 8/1000 kelahiran hidup pada tahun 2019. Provinsi Bengkulu memiliki angka kematian ibu yang cukup tinggi. Pada tahun 2016 AKI di Provinsi Bengkulu adalah sebesar 117/100.000 kelahiran hidup dan menurun menjadi 100/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019.



Tabel 2.23
Angka Kematian Bayi Kelahiran Bayi dan Angka Kematian Ibu
Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2019

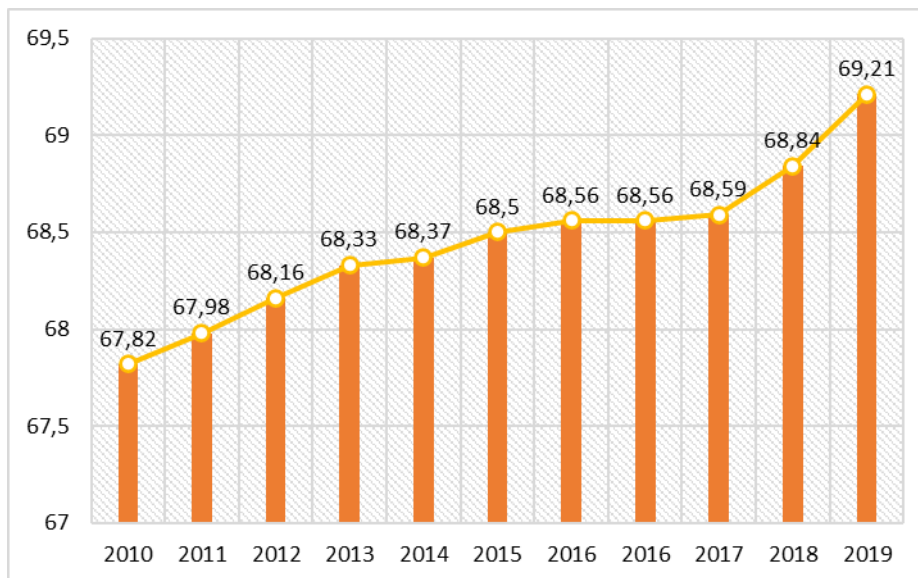
Item	2016	2017	2018	2019
Angka Kematian Bayi (AKB)/1000 Kelahiran Hidup	10	9	7	8
Angka Kematian Ibu (AKI)/100.000 Kelahiran Hidup	117	79	111	100

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu 2019.

b. Angka Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2012 hingga 2018, Provinsi Bengkulu telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir sebesar 0,68 tahun, yaitu dari 68,16 tahun menjadi 68,84 tahun. Selama periode tersebut, secara rata-rata Umur Harapan Hidup tumbuh sebesar 0,18 persen per tahun.

Gambar 2.7
Angka Harapan Hidup Provinsi Bengkulu Tahun 2010 – 2019



Sumber : Provinsi Bengkulu Dalam Angka, SIPD diolah, 2020.



3. Kemiskinan

Pada bulan Maret 2019, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Bengkulu mencapai 302.302 orang (15,23 persen), naik sebesar 488 orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2018 yang sebesar 301.814 orang (15,43 persen). Persentase Penduduk Miskin Maret 2019 turun 0,2 persen poin dari Maret 2018. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2018 sebesar 15,25 persen turun menjadi 14,70 persen pada Maret 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2018 sebesar 15,52 persen turun menjadi 15,49 persen pada Maret 2019.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu pada Maret 2019 mencapai 302.302 orang. Terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 488 orang dibandingkan Maret 2018. Sementara dengan september tahun sebelumnya jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 1.243 orang. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2018-Maret 2019, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebesar 952 orang sedangkan daerah perdesaan naik sebesar 1.438 orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 15,25 persen menjadi 14,70 persen. Begitu juga di perdesaan turun dari 15,52 persen menjadi 15,49 persen.

Gambar 2.8
Perkembangan Kemiskinan Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2019



Sumber : Provinsi Bengkulu Dalam Angka, SIPD diolah, 2020.



Selain angka kemiskinan mengalami penurunan, Indeks Kedalaman Kemiskinan selama kurun waktu 2017-2019 juga mengalami penurunan. Pada periode Maret 2018-Maret 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada Maret 2018 sebesar 2,59 dan pada Maret 2019 sebesar 2,48. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan dari 0,61 menjadi 0,58 pada periode yang sama. Begitu juga apabila dilihat pada periode September 2018-Maret 2019 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami peningkatan yaitu dari 2,35 menjadi 2,48 begitupula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan dari 0,52 menjadi 0,5.

Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional secara agregat provinsi Bengkulu memang lebih rendah nilainya. Namun secara persentase penurunan selama kurun waktu 2015-2019 Provinsi Bengkulu lebih baik dari nasional. Pada tahun 2015 persentase kemiskinan nasional sebesar 11,22% dan tahun 2019 sebesar 9,41% atau turun sebesar 1,81% sedangkan Provinsi Bengkulu dalam kurun waktu yang sama berhasil menurunkan kemiskinan hingga turun sebesar 2,65%.

Tabel 2.24
Angka Kemiskinan Provinsi Bengkulu Tahun 2012 – 2019

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Provinsi Bengkulu	17,51	17,75	17,09	17,16	17,03	16,45	15,43	14,91
Nasional	11,66	11,37	10,96	11,13	10,70	10,04	9,82	9,22

Sumber : Provinsi Bengkulu Dalam Angka, SIPD diolah, 2020.

Tabel 2.25
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (%) Tahun 2013-2018

Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bengkulu Selatan	22,59	21,91	22,76	22,10	21,06	18,65	18,54
Rejang Lebong	18,48	17,99	18,03	17,81	16,97	16,23	15,95
Bengkulu Utara	14,50	13,95	14,78	13,67	13,11	11,81	11,65
Kaur	23,25	21,96	22,87	22,36	21,54	19,40	18,89
Seluma	21,84	21,17	22,98	21,68	20,73	19,60	19,1
Mukomuko	12,98	12,48	13,45	13,01	12,20	11,40	11,7



Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Lebong	12,89	12,44	12,32	12,26	11,83	11,59	11,77
Kepahiang	16,13	15,65	16,83	16,31	15,95	14,42	14,74
Bengkulu Tengah	7,24	8,22	8,33	8,71	8,41	8,20	8,8
Kota Bengkulu	21,51	20,16	21,14	20,72	19,18	18,82	18,09

Sumber : Provinsi Bengkulu Dalam Angka, SIPD diolah, 2020.

Dari data persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota tahun 2019 terlihat bahwa kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten Kaur sebesar 18,89% dan terendah berada di Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 8,80%.

Tabel 2.26
Kondisi Kemiskinan (%) Provinsi Bengkulu Tahun 2014-2019

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Penduduk Miskin (Ribu jiwa)	316,5	322,8	325,6	302,62	303,54	298,04
% Penduduk Miskin	17,09	17,16	17,73	15,59	15,41	14,91
Garis Kemiskinan (000 Rp/kap/bln)	356,6	410,8	437,18	462,77	492,11	520,29
Koefisien Gini	0,36	0,37	0,35	0,35	0,36	0,32

Sumber : Provinsi Bengkulu Dalam Angka, SIPD diolah, 2019.

Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama periode 2018-2019, Garis Kemiskinan naik sebesar 3,79% yaitu dari Rp492.110,- per kapita per bulan pada tahun 2018 menjadi Rp499.660,- per kapita per bulan pada tahun 2019.

Angka Koefisien Gini merupakan ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Angka koefisien Gini terletak antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nol merupakan pemerataan sempurna dan satu menggambarkan ketidakmerataan sempurna. Indeks gini Provinsi Bengkulu pada tahun 2019 sebesar 0,34 turun sebesar 0,02 dari tahun 2018 yang sebesar 0,36. Penurunan ini melebihi dari angka nasional yang hanya turun sebesar 0,007



dimana Indeks Gini nasional tahun 2018 adalah 0,389 dan turun menjadi 0,382 tahun pada tahun 2019.

4. Kesempatan kerja

Keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu pada periode Agustus 2018–Februari 2020 menunjukkan kondisi yang cukup menggembirakan. Hal itu tergambar dari turunnya tingkat pengangguran dan naiknya jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk bekerja juga mengalami peningkatan. Keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu pada periode Februari 2019–Februari 2020 menunjukkan kondisi yang cukup baik. Hal itu tergambar dari menurunnya tingkat pengangguran dan naiknya jumlah penduduk bekerja. Jumlah Angkatan kerja juga mengalami peningkatan sebesar 42.652 orang.

Jumlah penduduk yang bekerja bertambah sebanyak 33.855 orang, jumlah penganggur juga bertambah sebanyak 8.797 orang. Sementara itu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada periode Februari 2019-Februari 2020 mengalami peningkatan dari 73,24 persen menjadi 73,83 persen. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan. Pada Februari 2020, TPAK laki-laki sebesar 86,71 persen sementara TPAK perempuan hanya 60,48 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bengkulu pada Februari 2020 mencapai 3,22 persen, mengalami kenaikan dibandingkan TPT Februari 2019 sebesar 0,71 persen poin.

Tabel 2.27
Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2019

	Jenis Kegiatan Utama	Satuan	Agu 2018	Feb 2019	Agu 2019	Feb 2020
1	Angkatan Kerja	Orang	998.524	1.039.259	1.015.534	1.081.911
	- Bekerja	Orang	963.463	1.013.245	981.095	1.047.100
	- Penganggur	Orang	35.061	26.014	34.439	34.811
2	TPAK	%	70,06	72,24	69,9	73,83
3	TPT	%	3,51	2,5	3,39	3,22

Sumber : Provinsi Bengkulu Dalam Angka, SIPD diolah, 2020.

Struktur lapangan pekerjaan kondisi Februari 2020 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya, dimana sektor Pertanian masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bengkulu. Sektor Pertanian menyerap tenaga kerja sebesar 46,70 persen, sektor Perdagangan besar dan eceran menyerap tenaga kerja

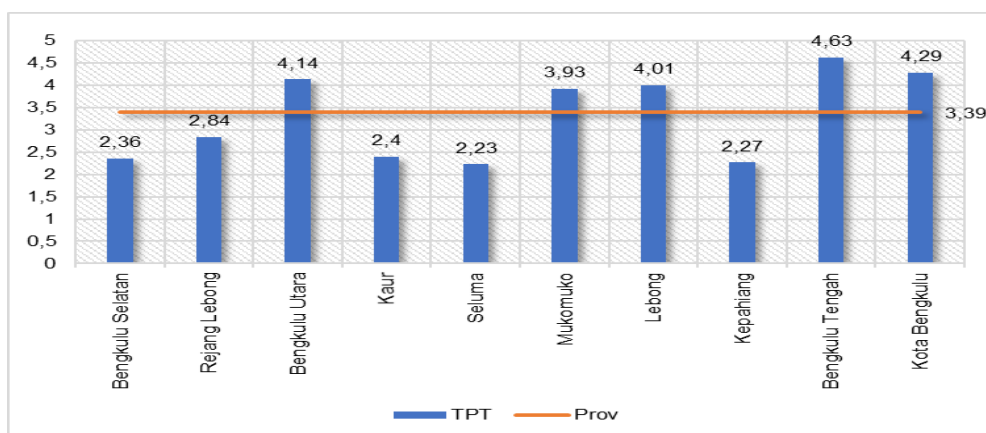


sebesar 17,03 persen, dan sektor Industri Pengolahan menyerap tenaga kerja sebesar 6,67 persen. Bila dibandingkan dengan keadaan Februari 2019, beberapa sektor lapangan pekerjaan mengalami peningkatan dan penurunan penyerapan penduduk bekerja. Sektor-sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu sektor Pertambangan dan penggalian yang turun sebesar 22,31 persen. Di sisi lain, sektor lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penyerapan penduduk bekerja tertinggi berada pada sektor Transportasi dan Pergudangan yang meningkat sebesar 50,1 persen atau sebanyak 8.500 orang. Berikutnya adalah sektor Jasa Pendidikan naik sebesar 12,38 persen atau bertambah 5.835 orang.

Penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2020 masih didominasi penduduk bekerja berpendidikan rendah yakni tamat Sekolah Dasar (SD) kebawah sebanyak 395.241 orang atau 37,75 persen dan tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 1932.84 orang atau 18,46 persen dengan total sebanyak 588.525 orang atau sebesar 56,21 persen. Sedangkan berpendidikan tinggi hanya sebanyak 134.399 orang atau 12,84 persen yang terdiri dari 24.962 orang berpendidikan Diploma atau 2,38 persen dan 109.437 orang atau 10,45 persen berpendidikan Universitas.

TPT menurut kabupaten Kota tertinggi keadaan Agustus 2019 di Provinsi Bengkulu adalah Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 4,63%. TPT terendah adalah Kabupaten Seluma yaitu sebesar 2,23%. Penurunan TPT tertinggi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir (Agustus2018- Agustus 2019) adalah Kabupaten Lebong yang turun sebesar 2,33% poin.

Gambar 2.9
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2019



Sumber : Provinsi Bengkulu Dalam Angka, SIPD diolah, 2020.



2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1. Seni Budaya

Pembangunan bidang seni dan budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Pembangunan sektor kebudayaan di Provinsi Bengkulu harus terus dilakukan untuk menjaga kultur budaya Bengkulu yang dihormati dan dijunjung tinggi. Pada tahun 2019, tercatat sedikitnya terdapat 78 grup kesenian di Provinsi Bengkulu. Grup kesenian tersebut merupakan grup kesenian yang bergerak dibidang tari kebudayaan, teater dan musik daerah. Perwujudan Bengkulu yang Berdaya Saing Tinggi diperlukan dengan memulai penguatan pondasi kultur dan budaya melalui grup-grup kesenian daerah. Provinsi Bengkulu adalah daerah yang kaya akan seni dan budaya kearifan lokal seperti Dhol dan Tabut. Provinsi Bengkulu saat ini tercatat memiliki kekayaan budaya (Sumber : Neraca Pendidikan Daerah, 2019) berupa Cagar Budaya sebanyak 1.358, Museum 1, Komunitas Budaya 5 dan Bahasa Daerah 6.

Pengembangan budaya dan seni di Provinsi Bengkulu ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Tahun 2019 yang mencapai 59,95%, peringkat 4 Nasional dan peringkat pertama di Pulau Sumatera.

Tabel 2.28
Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Tahun 2019

IPK	Prov	Nas
Ekonomi Budaya	25,86	30,55
Pendidikan	72,02	69,67
Ketahanan Sosial Budaya	77,51	72,84
Warisan Budaya	64,99	41,11
Ekspresi budaya	29,74	36,57
Budaya literasi	52,98	55,03
Gender	58,88	54,97
IPK	59,95	53,74

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah, 2020.



2. Olahraga

Provinsi Bengkulu telah mengadakan beberapa event olahraga yang eskala nasional dan internasional. Sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan olahraga, Provinsi Bengkulu telah menjadi tuang rumah pelaksanaan Triathlon, Kejurnas Offroad IOF dan PORWIL X Sumatera. Terkait dengan bidang olahraga, sampai dengan tahun 2019 Pemerintah Provinsi Bengkulu telah membangun sedikitnya 13 sarana olahraga, terutama sarana olahraga pendukung pelaksanaan PORWIL Sumatera X di Provinsi Bengkulu Tahun 2019.

Tabel 2.29
Jenis dan Jumlah Sarana Olahraga Pemprov Bengkulu

No.	Jenis Sarana	Nama Sarana	
1.	Gedung Olah Raga	1.	GOR Sawah Lebar
2.	Stadion	1.	Stadion Sawah Lebar
3.	Lapangan Tenis	1.	Lapangan Tenis Sawah Lebar
		2.	Lapangan Tenis Timur Indah
		3.	Lapangan Tenis Dinkes
		4.	Lapangan Tenis Pemprov
		5.	Lapangan Tenis Kolam Raflesia
4.	Kolam Renang	1.	Kolam Renang Raflesia
		2.	Kolam Renang Pantai Panjang
5.	Lapangan Futsal	1.	Lapangan Futsal Sawah Lebar
6.	Lapangan Basket	1.	Lapangan Basket Sprot Center
		2.	Lapangan Basket Sawah Lebar
		3.	Lapangan Basket Raflesia
7.	Lapangan Volly	1.	Lapangan Volly Pantai
		2.	Lapangan Volly Sawah Lebar
8.	Panjat Tebing	1.	Lapangan Panjat Tebing Sawah Lebar

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu, 2020.

Dari segi prestasi olahraga, pada gelaran PORWIL X Sumatera Tahun 2019, Provinsi Bengkulu berhasil menduduki peringkat 3 dengan raihan medali berupa 25 Medali Emas, 13 Medali Perak dan 18 Medali Perunggu. Selain PON, capaian prestasi yang berhasil diraih oleh Provinsi Bengkulu salah satunya adalah pada gelaran POPNAS yaitu sebagai berikut:



Tabel 2.30
Prestasi POPNAS Provinsi Bengkulu

No.	Tahun	Peringkat Provinsi	Emas	Perak	Perunggu
1.	2009	24	1	1	2
2.	2011	25	1	2	3
3.	2013	23	1	3	-
4.	2015	30	-	2	4
6.	2017	23	2	1	5
7.	2019	25	-	1	2

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu, 2020.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

Pelayanan umum bidang pendidikan yang merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2018, alokasi anggaran pendidikan yang bersumber dari APBD murni Provinsi Bengkulu adalah sebesar 13,57% dari total belanja daerah dan sebesar 20,02% jika dihitung beserta jumlah anggaran transfer dari pemerintah untuk keperluan pendidikan. Sedangkan pada tahun 2019, alokasi anggaran pendidikan yang bersumber dari APBD murni Provinsi Bengkulu adalah sebesar 12,39% dari total belanja daerah dan sebesar 19,43% jika dihitung beserta jumlah anggaran transfer dari pemerintah untuk keperluan pendidikan.

Alokasi transfer dari pemerintah pusat untuk urusan pendidikan di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan dari sebesar 704,64 miliar rupiah pada tahun 2018 menjadi 774,55 miliar rupiah pada tahun 2019.

Tabel 2.31
Alokasi Anggaran Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Bengkulu Tahun 2018 – 2019

Rincian Anggaran	2018	2019
DAK Fisik	26,86	24,88
TPG	108,53	121,68
Tamsil	0,33	3,14



Rincian Anggaran	2018	2019
TKG	0,04	1,25
DAU (Gaji GTK PNSD)	180,76	200,82
BOS	388,12	422,78
Jumlah Dana Transfer	704,64	774,55
1. Anggaran Pendidikan APBD Murni	13,57%	12,39%
2. Anggaran Pendidikan Dgn Transfer	20,02%	19,43%

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Provinsi Bengkulu, <https://npd.kemdikbud.go.id/>, 2020.

Selain dari sektor anggaran pendidikan, pelayanan wajib pendidikan juga dapat dilihat pada data rasio guru terhadap siswa dan rasio kelas terhadap rombongan belajar. Rasio guru terhadap siswa pada tahun 2018 dan tahun 2019 untuk semua jenjang pendidikan di Provinsi Bengkulu sudah relatif memadai. Tertinggi, rasio guru terhadap murid terdapat pada jenjang pendidikan SD yaitu 1 : 17 pada tahun 2018 dan 1 : 15 pada tahun 2019. Hal ini berarti, pada tahun 2019 satu orang guru bertanggungjawab kepada 15 murid SD. Interaksi yang sama juga dapat kita lihat pada jenjang pendidikan lainnya.

Rasio kelas terhadap rombongan belajar menggambarkan kondisi kapasitas 1 unit kelas untuk menampung 1 rombongan belajar yang Pasal 24 Permendikbud No. 17 Tahun 2017 adalah 28 siswa untuk SD, 32 siswa untuk SMP, 36 siswa untuk SMA dan 36 siswa untuk SMK. Jika kita mencermati data pada tabel dibawah ini, terlihat bahwa rasio kelas terhadap rombongan belajar pada jenjang pendidikan SMP masih belum seimbang yaitu sebesar 1 kelas untuk 0,9 rombongan belajar baik pada tahun 2018 dan tahun 2019. Hal ini berarti kapasitas ruang kelas SMP yang ada belum terisi cukup dengan rombongan belajar yang ada. Selain itu, untuk jenjang SMK, berdasarkan data tahun 2019 diperlukan penambahan ruang kelas karena rasio kelas terhadap rombongan belajar sudah melebihi 1,1. Hal ini berarti kapasitas ruang kelas yang tersedia belum cukup mampu menampung semua rombongan belajar yang ada.

Tabel 2.32

**Rasio Guru terhadap Siswa dan Rasio Kelas terhadap Rombongan Belajar
Provinsi Bengkulu Tahun 2018 – 2019**

Tahun	Rasio Guru : Siswa				Rasio Kelas : Rombongan Belajar			
	SD	SMP	SMA	SMK	SD	SMP	SMA	SMK
2018	1:17	1:14	1:13	1:12	1:1	1:0,9	1:1	1:1
2019	1:15	1:13	1:12	1:11	1:1	1:0,9	1:1	1:1,1

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Provinsi Bengkulu, <https://npd.kemdikbud.go.id/>, 2020.



Guru merupakan salah satu unsur terpenting dalam pendidikan. Baik buruknya kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh standar kualitas guru. Oleh karena itu, guru perlu meningkatkan kompetensinya seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Ada empat kompetensi yang harus dipenuhi guru, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan kompetensi sosial. Salah satu upaya dalam peningkatan kualitas guru ada melalui sertifikasi guru. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Sertifikasi guru di Provinsi Bengkulu pada setiap jenjang pendidikan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 2.33
Persentase Guru yang Sudah Sertifikasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2018 – 2019

Tahun	Persentase Guru yang sudah Sertifikasi (%)					
	PAUD	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
2018	19,5	50	43,5	44,1	36,3	23,6
2019	26,5	53,7	48,1	49,5	41,2	27,2

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Provinsi Bengkulu, <https://npd.kemdikbud.go.id/>, 2020.

Selain kualitas guru, kualitas ruang kelas juga merupakan penunjang keberhasilan pembangunan pendidikan di Provinsi Bengkulu. Perkembangan kondisi ruang kelas di Provinsi Bengkulu kurun waktu tahun 2018 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34
Kondisi Ruang Kelas di Provinsi Bengkulu Tahun 2018 – 2019

Jenjang	Satuan	Kondisi Ruang Kelas Tahun 2018			Kondisi Ruang Kelas Tahun 2019		
		Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat	Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
SD	Unit	8.172	1.099	1.114	7.741	1.177	1.459
SMP	Unit	2.666	516	444	2.568	540	508
SMA	Unit	1.673	93	51	1.521	175	93
SMK	Unit	1.130	43	15	1.028	92	23

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Provinsi Bengkulu, <https://npd.kemdikbud.go.id/>, 2020.



Kualitas pelayanan umum pendidikan juga dinilai dari akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentuksn kelayakan dan kinerja sekolah. Akreditasi sekolah bertujuan untuk memperoleh gambaran kinerja sekolah yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu serta menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan. Pada tahun 2019, akreditasi sekolah pada setiap jenjang sudah semakin baik, yang dilihat dari makin sedikitnya sekolah yang belum melakukan akreditasi. Gambaran akreditasi sekolah pada setiap jenjang pendidikan pada tahun 2018 dan 2019 di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.35
Perkembangan Akreditasi Sekolah di Provinsi Bengkulu Tahun 2018 – 2019

Jenjang	Akreditasi Tahun 2018 (%)				Akreditasi Tahun 2019 (%)			
	A	B	C	BELUM	A	B	C	BELUM
SD	14,00	49,90	31,30	4,80	14,00	50,20	33,10	2,70
SMP	25,80	36,60	29,30	8,30	25,70	37,00	30,40	6,80
SMA	49,60	25,20	19,40	5,80	50,00	25,70	19,30	5,00
SMK	13,60	42,90	7,50	36,10	12,60	56,30	19,40	11,70

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Provinsi Bengkulu, <https://npd.kemdikbud.go.id/>, 2020.

2. Kesehatan

a) Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan adalah salah satu indikator yang menentukan derajat kesehatan masyarakat. Pada bagian ini diuraikan tentang sarana kesehatan diantaranya Puskesmas (rawat inap dan non rawat inap) beserta jejaringnya, Rumah Sakit (baik RS umum maupun RS khusus), sarana produksi dan distribusi kefarmasian serta Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (Posyandu dan Posbindu PTM).

Jumlah Puskesmas di Provinsi Bengkulu pada tahun 2019 sebanyak 179 puskesmas. Dari 179 Puskesmas tersebut, 51 puskesmas perawatan dan 128 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa penduduk, di Provinsi Bengkulu jumlah rata-rata atau rasio puskesmas per 30.000 jiwa penduduk, adalah 3 per 30.000 penduduk, artinya



setiap 30.000 jiwa penduduk Provinsi Bengkulu sudah dapat dilayani 3 Puskesmas atau 1 puskesmas sudah dapat melayani 10.000 jiwa penduduk, dengan demikian di Provinsi Bengkulu saat ini masalah sarana puskesmas sudah tercukupi.

Untuk jumlah puskesmas pembantu di Provinsi Bengkulu pada tahun 2019 berjumlah 285 pustu. Dengan jumlah puskesmas pembantu sebanyak 285 unit dan puskesmas induk sebanyak 179 unit, maka Rasio puskesmas pembantu terhadap puskesmas di Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 adalah rata-rata 2 artinya setiap puskesmas rata-rata didukung oleh 2 puskesmas pembantu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Tabel 2.36
Jumlah Puskesmas dan Jaringannya di Provinsi Bengkulu Tahun 2019

No.	Kabupaten/Kota	PUSKESMAS				Posyandu	Posbindu PTM
		Perawatan	Non perawatan	Pustu	Pusling		
1	Bengkulu Selatan	5	9	26	12	199	125
2	Rejang Lebong	7	14	18	8	222	157
3	Bengkulu Utara	8	14	69	13	334	213
4	Kaur	4	12	22	13	329	172
5	Seluma	3	19	18	13	130	62
6	Mukomuko	7	10	31	6	427	80
7	Lebong	4	9	23	2	141	101
8	Kepahiaang	6	8	20	9	135	61
9	Bengkulu Tengah	4	16	20	12	214	113
10	Kota Bengkulu	3	17	38	17	140	53
	JUMLAH	51	128	285	105	2.272	1.137

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2019.

Akses dan mutu pelayanan kesehatan yang dijadikan sebagai hasil antara, sangat berpengaruh terhadap pencapaian hasil akhir dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar baik yang dilaksanakan di Puskesmas, Rumah Sakit pemerintah maupun swasta termasuk dunia usaha.

i. Cakupan Kunjungan Rawat Jalan dan Rawat Inap di Sarana Pelayanan Kesehatan.

Pada tahun 2019 jumlah puskesmas yang ada di Provinsi Bengkulu sebanyak 179 puskesmas, terdiri dari 51 Puskesmas perawatan dan 128 Puskesmas non perawatan. Dari data Program Yankes Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu tahun 2018 jumlah rawat jalan di puskesmas sebesar 241.096, dengan rincian: laki-laki 105,017 dan perempuan 136.079.



Sedangkan untuk jumlah rawat inap puskesmas secara keseluruhan sebesar 288 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 115 orang dan perempuan sebanyak 173 orang. Pada tahun yang sama jumlah rumah sakit yang ada sebanyak 23 Rumah Sakit, termasuk rumah sakit swasta dan rumah sakit TNI/Polri serta rumah sakit bergerak enggano ditambah rumah sakit jiwa. Jumlah rawat jalan rumah sakit sepanjang tahun 2018 sebesar 170,156 dan jumlah rawat inap rumah sakit sebesar 33.131 cakupan kunjungan rawat jalan dan rawat inap secara keseluruhan baik di Rumah Sakit maupun Puskesmas di Provinsi Bengkulu sebesar 23%, dan rawat inap 2%.

ii. Indikator Kinerja Pelayanan di Rumah Sakit.

Persentase pemakaian tempat tidur atau Bed Occpancy Rate (BOR) seluruh rumah sakit di Provinsi Bengkulu sepanjang tahun 2019 adalah 31% dari 2.215 tempat tidur yang ada diseluruh rumah sakit. Sedangkan frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode Bed turn Over (BTO) adalah 12, dan rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya atau TOI (turn over interval) adalah 22%, dan rata-rata lama rawat (dalam satuan hari) seorang pasien atau Average Length Of Stay (ALOS) adalah 7.

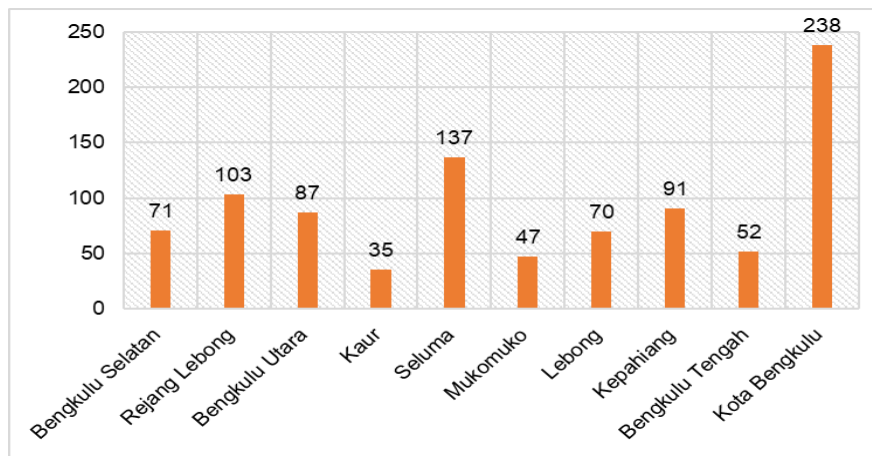
iii. Rasio Posyandu per 100 Balita

Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Jumlah Posyandu di Provinsi Bengkulu pada tahun 2019 sebanyak 2.272 buah dan jumlah balita sebanyak 182.262 jiwa. Dengan demikian rasio Posyandu terhadap Balita adalah 1:80. ini berarti bahwa dari 1 posyandu di Provinsi Bengkulu melayani 80 balita. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kondisi rasio Posyandu di Provinsi Bengkulu per Kabupaten/Kota:



Gambar 2.10
Rasio Posyandu per 100 Balita Tahun 2019



Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2019.

b) Tenaga Kesehatan

Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Data tenaga kesehatan yang disajikan disini terdiri dari tenaga medis (Dokter umum, Dokter Gigi, Dr/Drg Spesialis), perawat & bidan (termasuk lulusan DIII dan S1), farmasi (Apoteker, Asisten Apoteker), gizi (Lulusan D-I, D-III Gizi (SPAG dan AKZI dan D-IV), teknisi medis (Analis, ATEM dan Penata Rontgen, Penata Anestesi, Fisioterapi), sanitasi (Lulusan SPPH, APK, dan DIII Kesehatan Lingkungan) dan kesehatan masyarakat (SKM), dll. Total SDM Kesehatan di Provinsi Bengkulu tahun 2018 adalah 13.928 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.37
Jumlah SDM Kesehatan di Provinsi Bengkulu Tahun 2019

Jenis SDM Kesehatan	Jumlah	%
Perawat	3.991	28,65
Bidan	3.697	26,54
Tenaga Penunjang Kesehatan	2.883	20,70
Kesehatan Masyarakat	822	5,90
Dokter Umum	481	3,45
Tenaga Teknis Farmasi	307	2,20
Ahli Laboratorium Medik	288	2,07
Dokter Spesialis	284	2,04
Gizi	265	1,90



Jenis SDM	Jumlah	%
Tenaga Teknik Biomedika	210	1,51
Apoteker	183	1,31
Keteknisian Medis	182	1,31
Kesehatan Lingkungan	159	1,14
Dokter Gigi	128	0,92
Keterampilan Fisik	38	0,27
Dokter Gigi Spesialis	10	0,07
JUMLAH	13.928	100

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2019.

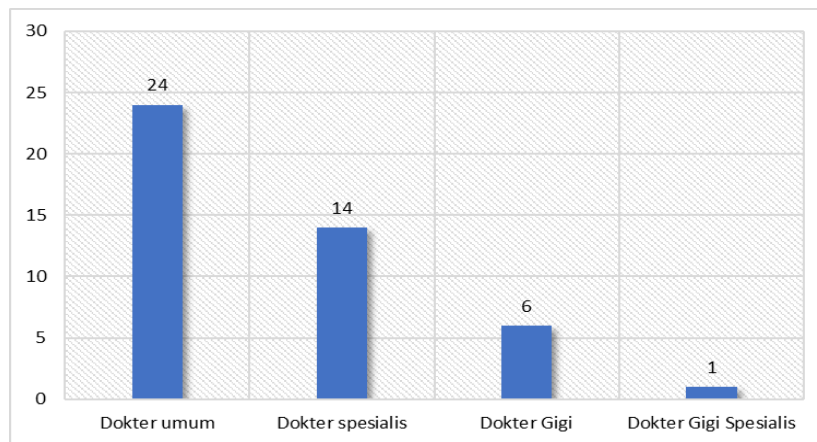
Pada tabel diatas dapat dilihat SDM terbanyak adalah tenaga perawat dan terkecil adalah dokter gigi spesialis, dari seluruh jumlah SDM tersebut proporsi tenaga kesehatan di Puskesmas terbanyak adalah bidan sebanyak 2.757 orang (75%), sedangkan proporsi tenaga kesehatan di Puskesmas yang paling sedikit yaitu Keterampilan Fisik sebanyak 1 orang (3%). Bila mengacu pada Permenkes RI nomor 75 tahun 2014, untuk tenaga bidan dan perawat sudah melebihi dimana masing-masing Puskesmas di Provinsi Bengkulu sudah mempunyai rata-rata bidan 15 orang dan Perawat 10 orang sedangkan standar untuk puskesmas non rawat inap jumlah bidan adalah 4 orang dan perawat 5 orang sedangkan untuk puskesmas rawat inap standar bidan adalah 7 orang dan perawat adalah 8 orang, baik puskesmas perkotaan maupun pedesaan.

i. Rasio Tenaga Medis per 100.000 penduduk

Tenaga Medis adalah terdiri dari dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran). Jumlah tenaga medis di Provinsi Bengkulu tahun 2019 secara keseluruhan sebanyak 903 orang yang terdiri dari 4 jenis tenaga medis. Rasio Medis per 100.000 penduduk adalah tenaga medis yang memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, baik di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah per 100.000 penduduk. Gambaran rasio untuk masing-masing jenis tenaga kesehatan per 100.000 penduduk dapat dilihat pada dibawah ini:



Gambar 2.11
Rasio Medis per 100.000 Penduduk di Provinsi Bengkulu Tahun 2019



Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2019.

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa rasio tenaga medis terbesar adalah rasio tenaga dokter umum yaitu sebesar 24 per 100.000 penduduk, dan dokter spesialis 14 per 100.000 penduduk, dan rasio yang paling kecil adalah rasio dokter spesialis gigi yaitu sebesar 1 per 100.000 penduduk. Artinya dalam 100.000 penduduk Provinsi Bengkulu baru dilayani 24 orang dokter umum 14 orang dokter spesialis, 6 orang dokter gigi dan 1 orang dokter spesialis gigi. Artinya di Provinsi Bengkulu masih mengalami kekurangan dokter : 16 orang dokter umum, 26 orang dokter spesialis, 34 orang dokter gigi dan 39 orang dokter spesialis gigi. Apabila mengacu pada Kepmenkes No.1202 Tahun 2003 standar Indonesia Sehat, rasio dokter dengan jumlah penduduk adalah 1 banding 2.500 orang (40 dokter untuk 100 ribu penduduk). Jumlah Dokter di Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 ada 903 dengan rincian 481 dokter umum, 284 dokter spesialis, 128 dokter gigi dan 10 orang dokter spesialis gigi (45 dokter per.100 ribu penduduk), Sehingga dapat diasumsikan jumlah dokter di Bengkulu untuk melayani 1.999.539 jiwa dibutuhkan sekitar 1018 dokter maka dengan demikian menurut perhitungan metode ratio Provinsi Bengkulu masih mengalami kekurangan sekitar 115 orang dokter.

ii. Rasio Tenaga Keperawatan per 100.000 penduduk

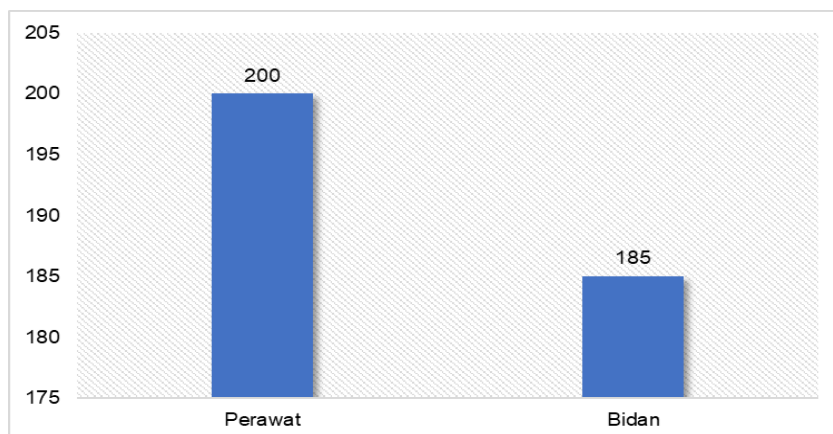
Jumlah Tenaga keperawatan, tenaga keperawatan adalah tenaga yang terdiri lulusan perawat dan kebidanan: perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan (UU Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan) dan Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari Pendidikan bidan yang telah teregistrasi



sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan). Jumlah tenaga keperawatan di Provinsi Bengkulu sebanyak 7688 yang terdiri dari perawat sebanyak 3.991 orang dan bidan 3.697 orang.

Rasio Perawat per 100.000 penduduk adalah perawat yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah per 100.000 penduduk. Yang termasuk dalam tenaga perawat yaitu perawat, perawat anestesi, dan perawat spesialis dan Rasio Bidan per 100.000 penduduk adalah bidan yang memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, baik di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah per 100.000 penduduk. Rasio Tenaga keperawatan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.12
Rasio Perawat per 100.000 Penduduk di Provinsi Bengkulu Tahun 2019



Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2019.

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa rasio tenaga kesehatan terbesar adalah rasio tenaga perawat yaitu sebesar 200 per 100.000 penduduk, artinya 100.000 penduduk sudah dilayani 200 orang perawat dan 185 orang bidan.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan dan peningkatan fasilitas transportasi seperti jalan dan jembatan penting demi memudahkan hubungan komunikasi dan proses mobilisasi penduduk antar daerah dalam menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, utamanya untuk daerah-daerah yang sulit terjangkau dan terisolir. Pada tahun 2019, panjang jalan Provinsi Bengkulu adalah 1.562,6 km. Sekitar 54,50 persen dari



panjang tersebut dalam kondisi baik; 12,07 persen dalam kondisi sedang, kondisi rusak ringan sebesar 20,82 persen serta kondisi rusak berat sebesar 12,60 persen.

Tabel 2.38
Kondisi Jalan di Provinsi Bengkulu Tahun 2019

NO.	Nama Ruas Jalan	Panjang Ruas (Km)	Lebar (M)	Panjang Tiap Kondisi							
				Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
				KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
1	Bengkulu Utara	572,09	4.5	251,15	43,90	119,93	20,96	134,38	23,49	66,63	11,65
2	Kota Bengkulu	44,18	6.0	38,75	87,71	3,83	8,67	1,45	3,28	0,15	0,34
3	Kaur	120,30	4.0	77,96	64,80	-	-	37,04	30,79	5,30	4,41
4	Mukomuko	97,22	4.0	68,37	70,33	-	-	24,00	24,69	4,85	4,99
5	Seluma	174,52	4.5	50,45	28,91	-	-	62,31	35,70	61,76	35,39
6	Lebong	66,16	4.5	53,76	81,26	-	-	2,00	3,02	10,40	15,72
7	Rejang Lebong	149,85	4.0	101,11	67,47	8,85	5,91	35,81	23,90	4,08	2,72
8	Kepahiang	123,62	4.0	61,12	49,44	22,58	18,27	22,64	18,31	17,28	13,98
9	Bengkulu Selatan	163,80	4.5	106,77	65,18	27,50	16,79	5,53	3,38	24,00	14,65
10	Bengkulu Tengah	50,93	4.0	42,22	82,90	5,98	11,74	0,23	0,45	2,50	4,91
	Total Panjang Jalan (km)	1.562,67		851,65	54,50	188,67	12,07	325,40	20,82	196,95	12,60

Sumber : Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, 2020.

Kondisi jalan rusak di Provinsi Bengkulu diakibatkan percepatan kerusakan yang sangat signifikan karena perkerasan yang semula kondisi rusak ringan kemudian menjadi rusak berat dan tidak diimbangi pendanaan yang cukup serta kondisi Momen Sumbu Tekan (MST) jalan yang tidak seragam ditambah kendaraan yang lewat melebihi tonase, juga disebabkan Provinsi Bengkulu belum memiliki Jalan Lingkar Luar (*Outer Ring Road*) yang saat ini masih dalam proses penyelesaian pembangunan.

4. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

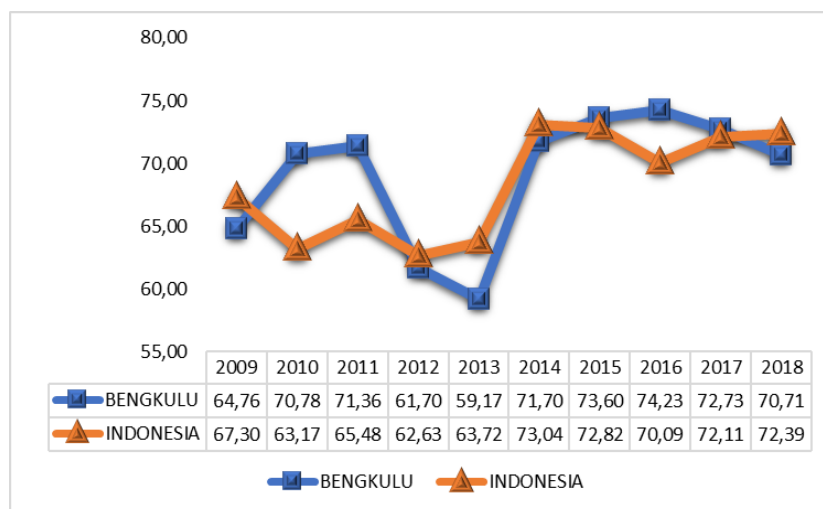
Gambaran capaian urusan layanan wajin ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat dilihat dari capaian Indeks Demokrasi Indonesia untuk Provinsi Bengkulu pada tahun 2018. IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan



dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bengkulu tahun 2018 mencapai 70,71 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan IDI 2017 yang capaiannya sebesar 72,73. Meskipun sedikit mengalami perubahan, tingkat demokrasi Indonesia tersebut masih termasuk dalam kategori “sedang”. Capaian IDI dari tahun 2009 hingga 2018 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI hanya sebesar 64,76. Angka ini terus mengalami perubahan hingga mencapai momen tertingginya pada tahun 2016 sebesar 74,23; walaupun pada akhirnya kembali turun menjadi 70,71 di tahun 2018. Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Indonesia. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (evidence-based) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

Gambar 2.13
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Bengkulu Tahun 2018



Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2020.

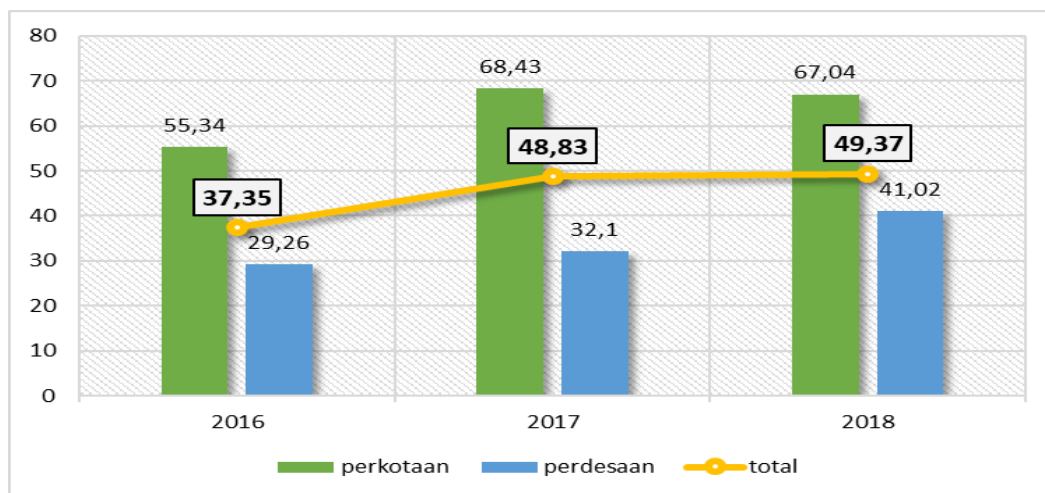


5. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Air Minum Layak

Selama periode 2016-2018, Bengkulu merupakan provinsi dengan persentase terendah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak. Sepanjang periode tersebut persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak di Provinsi Bengkulu masih berada di bawah 50 persen. Fenomena ini perlu mendapat perhatian khusus karena berdasarkan rata-rata persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak untuk wilayah Indonesia Bagian Barat, dimana Provinsi Bengkulu termasuk di dalamnya, telah mencapai 73,45 persen pada tahun 2018. Kondisi tersebut menggambarkan ketimpangan yang terjadi antarprovinsi di Indonesia Bagian Barat. Rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak di Provinsi Bengkulu salah satunya disebabkan pencemaran air oleh aktivitas pertambangan batubara di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Air Bengkulu.

Gambar 2.14
Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum Layak
di Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2018



Sumber : Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan Tahun 2018, BPS Provinsi Bengkulu, 2020.

b. Sanitasi Layak

Provinsi yang masih menjadi fenomena khusus dalam aksesibilitas sanitasi layak adalah Bengkulu. Walaupun bukan merupakan provinsi dengan persentase terendah, Bengkulu masih termasuk 3 provinsi dengan persentase terendah selama periode 2016-2018. Bahkan, persentasenya pun masih di bawah 50 persen, yaitu 49,75 persen pada tahun 2016 dan justru menurun menjadi 44,31 persen pada tahun 2018. Dalam buku Seri Analisis Pembangunan



Wilayah ProvinsimBengkulu 2015 (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BadanmPerencanaan Pembangunan Nasional, 2015) disebutkan bahwa tantangan terbesar dalam meningkatkan akses air bersih dan sanitasi di Bengkulu adalah masihrendahnya kesadaran masyarakat untuk mengadakan perilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu, permasalahan lain adalah minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana yang telah terbangun, serta kurang optimalnya sinergi pembangunan air minum dan sanitasi. Berdasarkan Gambar 5.4, ketimpangan terjadi antara wilayah Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur (69,27 persen berbanding 51,77 persen) pada tahun 2018.

Gambar 2.15
Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Sanitasi Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2018



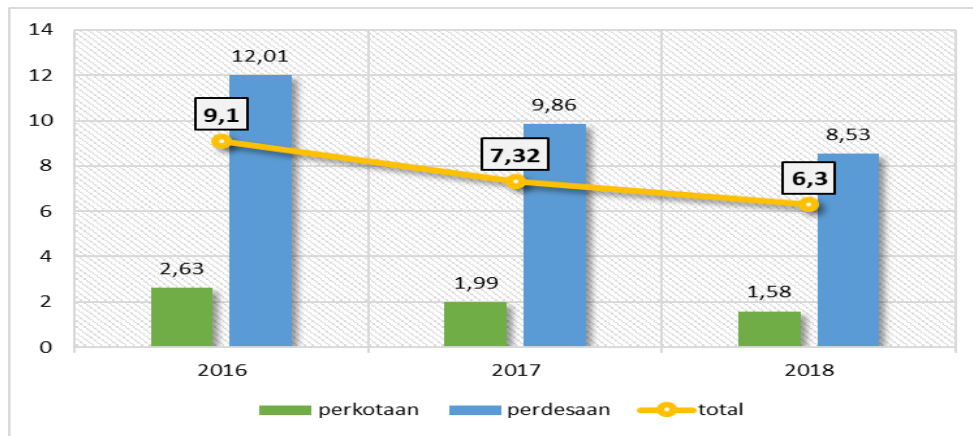
Sumber : Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan Tahun 2018, BPS Provinsi Bengkulu, 2020

c. Rumah Tidak Layak Huni

Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni (penjelasan pasal 24 huruf a UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Persentase rumah tangga yang menempati Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Bengkulu masih dikategorikan cukup tinggi, karena pada tahun 2018 berada pada posisi 6,30% berada diatas rata – rata nasional yang sebesar 4,30%. Rumah Tidak Layak Huni paling banyak ditempati oleh rumah tangga yang hidup di perdesaan. Adapun perkembangan persentase Rumah Tangga yang menempati rumah tidak layak huni di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:



Gambar 2.16
Persentase Rumah Tangga yang menempati RTLH
Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2018



Sumber : Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan Tahun 2018

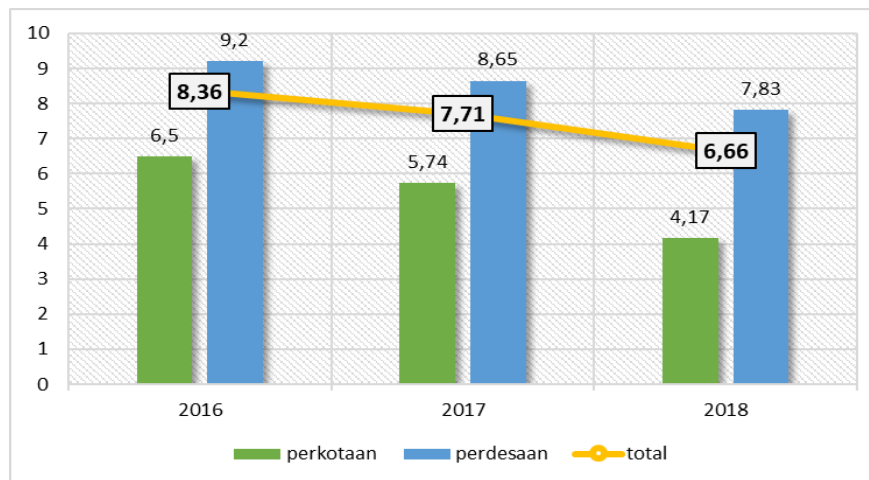
d. Rumah Tangga Kumuh

Daerah kumuh yang dimaksud adalah daerah atau kawasan tempat tinggal (hunian) yang dihuni sekelompok orang yang menempatibangunan sementara, tidak ada akses air yang aman untuk diminum, tidak adafasilitas sanitasi yang memadai, dan kondisi lingkungan yang tidak memadai. Adapun rumah tangga kumuh didefinisikan sebagai rumah tangga yang tidakmmemiliki akses terhadap sumber air minum layak, sanitasi layak, luas lantai permkapita kurang dari 7,2 mm per kapita, serta tidak memenuhi kondisi atap, lantai, dan dinding yang layak.

Persentase rumah tangga yang menempati Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Bengkulu masih dikategorikan cukup tinggi, karena pada tahun 2018 berada pada posisi 6,66% berada diatas rata – rata nasional yang sebesar 5,26%. Rumah tangga kumuh paling banyak ditempati oleh rumah tangga yang hidup di perdesaan. Adapun perkembangan persentase Rumah Tangga Kumuh di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:



Gambar 2.17
Persentase Rumah Tangga Kumuh di Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2018



Sumber : Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan Tahun 2018

6. Sosial

Persentase kemiskinan di Provinsi Bengkulu pada tahun 2019 sudah dapat ditekan hingga menurun menjadi 14,91%. Jika dilihat dari beberapa aspek, maka kemiskinan di Provinsi Bengkulu dapat dilihat sebagai berikut:

- Dari aspek pendidikan, sebesar 25,32% penduduk miskin di Provinsi Bengkulu berasal dari latar belakang pendidikan SD kebawah, 52,54% tamat SD/SLTP dan 22,14% adalah lulusan SLTA keatas. Sebanyak 99,31% penduduk miskin usia 15 – 55 tahun telah melek huruf. Angka Partisipasi Sekolah penduduk miskin usia 7 – 12 tahun telah mencapai 99,88% dan 95,00% untuk penduduk miskin usia 13 – 15 tahun.
- Dari aspek ketenagakerjaan, penduduk miskin yang tidak bekerja di Provinsi Bengkulu adalah sebesar 34,05%, bekerja disektor informal sebesar 48,76 dan bekerja disektor formal sebesar 17,18%. Selanjutnya sebesar 40,00% penduduk miskin bekerja pada sektor pertanian.
- Dari aspek kesehatan lingkungan, baru sebesar 33,95% penduduk miskin di Provinsi Bengkulu yang dapat menikmati Air Layak dan 77,95% yang memiliki jamban sendiri/bersama.
- Dari aspek kesejahteraan sosial, baru sebesar 42,96% rumah tangga miskin menerima Rastra atau BPNT dengan rata – rata kilogram beras yang ditemia adalah 15,77 kg untuk Rastra dan 5,55 kg untuk BPNT.



2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Industri

a. Industri Kecil dan Menengah

Jumlah industri di Provinsi Bengkulu tahun 2018 berjumlah 5.642 unit terdiri dari 37 industri menengah dan besar dan 5.605 industri kecil. Industri kecil ini tersebar di seluruh kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu dimana pada tahun 2018, jumlah industri kecil terbanyak terdapat di Kabupaten Mukomuko sebanyak 1.160 unit dan paling sedikit terdapat di Kabupaten Kaur sebanyak 210 unit.

Jumlah industri kecil meningkat sebanyak 699 unit selama periode 2015-2018 dimana jumlah industri kecil pada tahun 2015 berjumlah 4.906 unit. Selain jumlah industri, kenaikan juga terjadi pada nilai investasi dan jumlah tenaga kerja yang terserap. Jumlah investasi pada tahun 2015 sebesar Rp. 162 M dan naik sebesar menjadi Rp. 169 M pada tahun 2018. Sedangkan jumlah tenaga kerja naik dari 14.872 orang pada tahun 2015 menjadi 16.141 orang tahun 2019. Namun sebaliknya jumlah produksi mengalami penurunan yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp. 559 M menjadi sebesar Rp. 420 M tahun 2018.

b. Industri Sedang dan Besar

Jumlah perusahaan Industri Besar dan Sedang di Provinsi Bengkulu tahun 2018 tercatat sebanyak 48 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 8.172 orang, dengan nilai produksi sebesar 8,9 triliun rupiah. Perusahaan Industri Besar dan Sedang yang terdapat di Provinsi Bengkulu sebagian besar merupakan industri makanan (kode 10) sebanyak 66,67 persen. Industri Makanan juga menyerap tenaga kerja paling banyak dibandingkan industri lainnya yang ada di Provinsi Bengkulu.

Sebanyak 4.476 orang atau 54,77 persen tenaga kerja yang diserap pada Industri Makanan. Selain Industri Makanan, yang menyerap tenaga kerja paling banyak ialah Industri Karet, barang dari karet dan plastik (kode 22), yakni sebanyak 3.258 orang (39,87%) pada 7 perusahaan. Ditinjau menurut lokasi perusahaan, perusahaan Industri Besar dan Sedang sebagian besar berada di Kabupaten Mukomuko dengan 15 perusahaan atau 31,25 persen dengan daya serap tenaga kerja sebanyak 15 orang. Namun bila ditinjau dari daya serap tenaga kerja, Kabupaten Bengkulu Utara memiliki daya serap yang paling banyak. Sebanyak 2.939



orang atau 35,96 persen tenaga kerja berada pada 8 perusahaan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Kabupaten Mukomuko merupakan kabupaten dengan nilai produksi terbesar yakni sebesar 4,2 triliun atau 47,22 persen dari total nilai produksi yang ada di Provinsi Bengkulu.

2. Ketenagakerjaan

Perkembangan ekonomi suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Beberapa permasalahan dalam ketenagakerjaan yang ditemui masyarakat antara lain terkait dengan tingginya tingkat pengangguran, penyediaan lapangan kerja yang terbatas, serta produktivitas tenaga kerja yang rendah. Penyelesaian dari permasalahan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu barometer keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru sehingga tingkat pengangguran dapat berkurang.

Dari seluruh penduduk bekerja di Provinsi Bengkulu pada Februari 2020, status pekerjaan utama yang terbanyak sebagai Buruh/Karyawan/pegawai sebesar 26,64 persen. Diikuti status berusaha dibantu buruh tidak tetap/ tidak dibayar (22,90 persen) dan pekerja keluarga (19,42 persen). Sementara status pekerja bebas non pertanian memiliki presentase paling kecil yaitu sebesar 3,24 persen. Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk yang bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja formal mencakup berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan, sedangkan sisanya termasuk pekerja informal. Berdasarkan identifikasi tersebut pada Februari 2020 sebanyak 725.676 orang atau sebesar 69,30 persen tenaga kerja di Provinsi Bengkulu bekerja di sektor informal dan sisanya sebanyak 321.424 orang atau sebesar 30,70 persen bekerja di sektor formal.



Tabel 2.39
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja
Menurut Status pekerjaan Utama 2018–2020

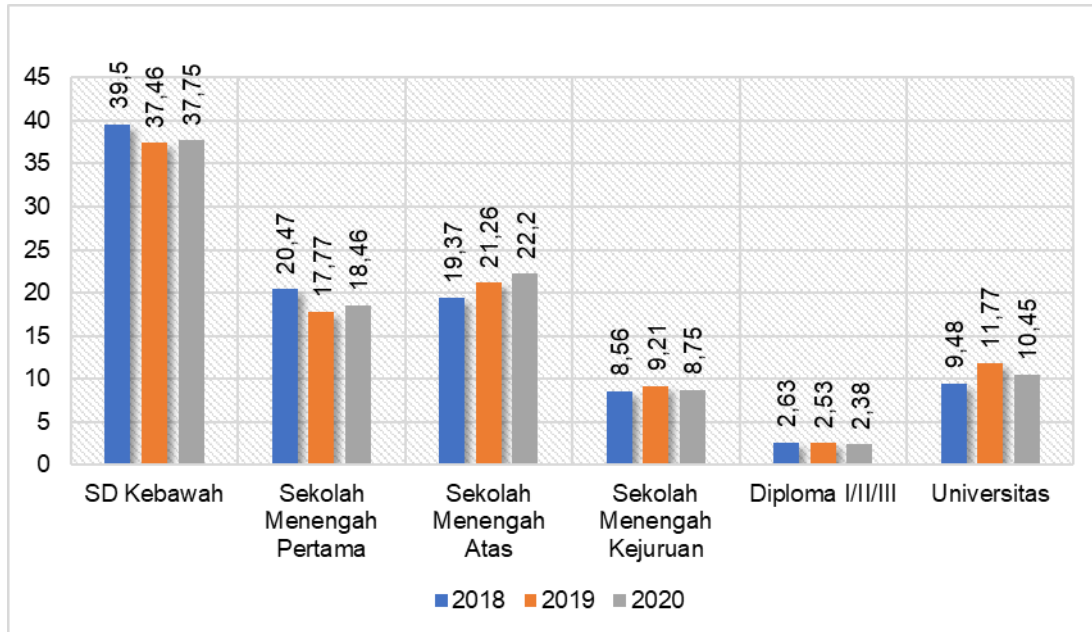
Status Pekerjaan Utama	Agustus 2018		Februari 2019		Agustus 2019		Februari 2020	
	Orang	%	Orang	%	Orang	%	Orang	%
Berusaha sendiri	173.225	17,98	185.678	18,33	18,33	18,33	188.931	18,04
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	207.165	21,5	224.365	22,14	22,14	22,14	239.821	22,90
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	33.887	3,52	38.123	3,76	3,76	3,76	42.481	4,06
Buruh/karyawan/pegawai	272.801	28,31	287.172	28,34	28,34	28,34	278.943	26,64
Pekerja bebas pertanian	51.990	5,4	51.230	5,06	5,06	5,06	59.694	5,70
Pekerja bebas non pertanian	38.145	3,96	42.624	4,21	4,21	4,21	33.897	3,24
Pekerja keluarga/ tak di bayar	186.250	19,33	184.053	18,16	18,16	18,16	203.333	19,42
Jumlah	963.463	100	1.013.245	100	981.095	100	1.047.100	100

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2020.

Penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2020 masih didominasi penduduk bekerja berpendidikan rendah yakni tamat Sekolah Dasar (SD) kebawah sebanyak 395.241 orang atau 37,75 persen dan tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 1932.84 orang atau 18,46 persen dengan total sebanyak 588.525 orang atau sebesar 56,21 persen. Sedangkan berpendidikan tinggi hanya sebanyak 134.399 orang atau 12,84 persen yang terdiri dari 24.962 orang berpendidikan Diploma atau 2,38 persen dan 109.437 orang atau 10,45 persen berpendidikan Universitas. Dalam setahun terakhir Februari 2019-Februari 2020 yang terjadi di Provinsi Bengkulu penduduk bekerja berpendidikan menengah bertambah sebanyak 2.644 orang atau naik sebesar 0,82 persen. Penduduk bekerja berpendidikan tinggi mengalami peningkatan sebanyak 9.800 orang atau bertambah 7,86 persen.



Gambar 2.18
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2018–2020



Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2020.

3. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

i bidang Keluarga Berencana (KB), berdasarkan data dari BKKBN Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa jumlah peserta KB aktif atau akseptor aktif di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan dibanding tahun 2015. Pada tahun 2018 jumlah akseptor aktif di Provinsi Bengkulu sebanyak 223.804 pasangan sedangkan tahun 2015 sebanyak 220.896 pasangan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 0,33% menggunakan KB tradisional dan 70,82% menggunakan KB moderen. Namun, baru sebesar 71,15% dari PUS yang merupakan peserta KB Aktif.

Tabel 2.40
Peserta KB Menurut Metode di Provinsi Bengkulu Tahun 2019

	Jumlah	Prevalensi
PUS	314.574	
KB Modern	222.774	70,82
KB Tradisional	1.030	0,33
KB Aktif	223.804	71,15

Sumber : Profil Kesehatan Indonesia, 2019.



4. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Bengkulu dalam kurun waktu 2010 - 2018, terus mengalami kenaikan dan selalu berada di atas rata – rata Nasional. Terakhir posisi IPG Provinsi Bengkulu tahun 2018 berada di angka 91,37. Hal ini menandakan bahwa disparitas gender dalam pembangunan di Provinsi Bengkulu sudah dapat ditekan pada level yang lebih rendah.

Tabel 2.41
Perkembangan IPG Provinsi Bengkulu Tahun 2010 – 2018

NO	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bengkulu Selatan	91,71	91,82	92,16	93,60	94,00	94,42		93,74	94.08
2	Rejang Lebong	91,57	92,26	92,43	92,44	92,55	92,85		94,15	94.59
3	Bengkulu Utara	89,87	90,29	90,57	91,09	91,32	91,39		91,00	91.19
4	Kaur	81,63	83,15	84,39	85,34	85,66	86,21		86,91	87.20
5	Seluma	81,33	82,81	83,29	83,51	84,80	84,98		85,20	85.28
6	Mukomuko	82,58	82,95	83,13	83,84	84,25	84,28		83,98	84.18
7	Lebong	89,02	89,83	89,85	90,45	91,11	91,12		90,64	90.99
8	Kepahiang	91,11	92,42	93,73	93,75	94,99	94,66		94,69	95.20
9	Bengkulu Tengah	78,38	78,53	80,54	80,83	84,68	85,07		85,77	86.36
10	Bengkulu	91,48	92,59	93,53	94,34	95,71	95,64		96,36	96.55
11	BENGLULU	88,88	89,47	90,51	90,55	91,02	91,38	91,06	91,34	91,37
	Nasional		89,52	90,07	90,19	90,34	91,03	90,82	90,96	90,96

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2019.



b. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan ukuran untuk menggambarkan persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam aspek-aspek tersebut yaitu kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Sehingga, IDG menggambarkan besarnya peranan perempuan dalam hal pencapaian kapabilitas berdasarkan status dan kedudukan perempuan dibandingkan dengan laki-laki. IDG Provinsi Bengkulu bergerak fluktuatif namun tren meningkat. Pada pada tahun 2011, IDG Provinsi Bengkulu sebesar 69,33% dan meningkat menjadi 69,60% pada tahun 2018. IDG Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 masih berada dibawah capaian nasional yang sebesar 72,10%.

Tabel 2.42
Perkembangan IDG Provinsi Bengkulu Tahun 2011 – 2018

NO	Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bengkulu Selatan	61,45	62,06	63,45	58,63	59,4		54,75	54,89
2	Rejang Lebong	62,42	56,69	57,23	57,76	57,63		61,73	61,99
3	Bengkulu Utara	62,3	64,38	64,81	65,15	62,88		65,76	65,92
4	Kaur	57,95	60,05	60,77	61,69	61,66		61,86	66,25
5	Seluma	58,2	58,98	68,56	66,86	66,22		65,15	61,95
6	Mukomuko	47,6	54,27	54,21	59,74	60,66		61,32	61,40
7	Lebong	73,07	69,5	69,77	77,91	79,07		79,39	79,68
8	Kepahiang	67,28	67,7	66,65	77,61	75,63		73,29	73,63
9	Bengkulu Tengah	55,81	62,7	64,5	66,22	69,09		70,15	73,80
10	Bengkulu	74,63	75,21	75,64	75,97	75,96		76,46	76,61
11	Provinsi Bengkulu	69,33	69,57	73,45	68,76	68,86	71,09	71,40	69,60
	Nasional	69,14	70,07	70,46	70,68	70,83	71,39	71,74	72,10

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2019.

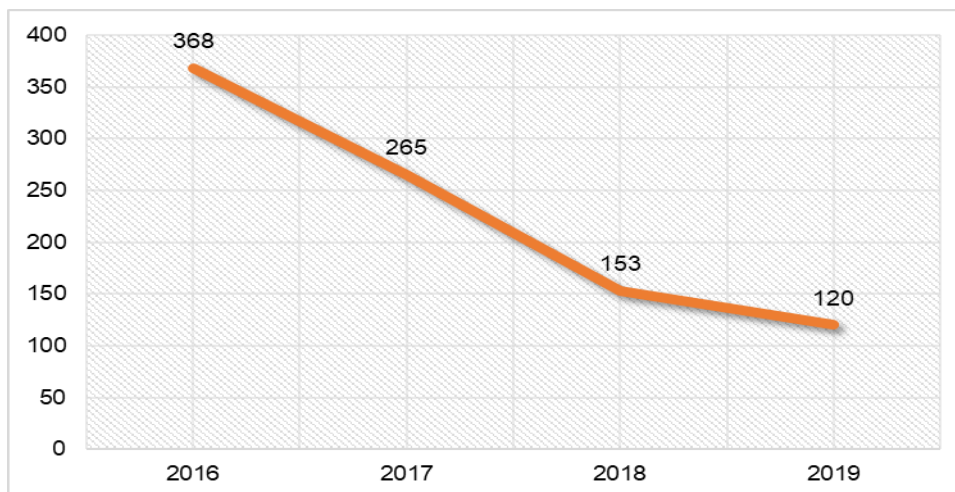
c. Perlindungan Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang dikenakan pada seseorang semata-mata karena dia perempuan yang berakibat atau dapat menyebabkan kesengsaraan/penderitaan secara fisik, psikologis atau seksual. Termasuk juga ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di muka umum maupun dalam kehidupan pribadi.



Bila dilihat dari grafik, jumlah kasus kekerasan cenderung menurun selama 3 tahun terakhir. Dimana pada tahun 2016 ada 368 kasus kekerasan, 2017 sebanyak 265 kasus kekerasan, 2018 sebanyak 153 kasus kekerasan dan pada tahun 2019 sampai bulan agustus 2019 sebanyak 120 kasus kekerasan

Gambar 2.19
Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
di Provinsi Bengkulu Tahun 2019



Sumber: DP3APPKB Provinsi Bengkulu, 2019.

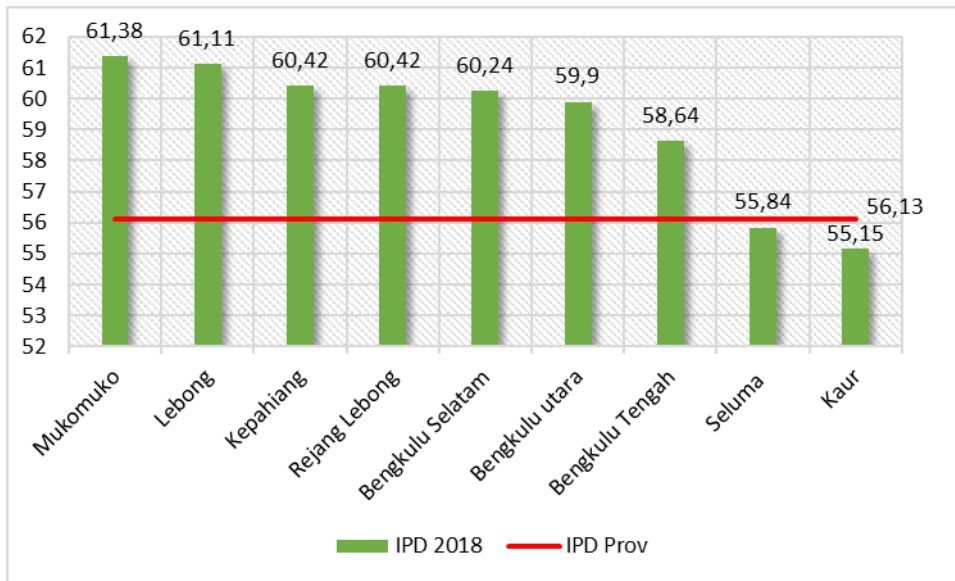
5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Desa sebagai wilayah administrasi terendah secara mandiri telah dijadikan subyek pembangunan. Tujuannya mengurangi kesenjangan pembangunan perdesaan dan perkotaan yang cenderung bias perkotaan (urban bias). Selain itu, mendekatkan pelayanan pemerintahan di tingkat desa, supaya menjadi solusi bagi perubahan sosial ekonomi desa. Desa sebagai subyek pembangunan, diharapkan mampu mendekatkan pelayanan terhadap warga melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan. Mulai dari menggerakkan perekonomian, membangun sarana pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana energi, transportasi, dan komunikasi, serta sarana lain yang dibutuhkan.

Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Bengkulu secara rata-rata adalah sebesar 58,64. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan angka rata-rata Indeks Pembangunan Desa secara nasional. Jumlah desa di Provinsi Bengkulu adalah 1.341 desa, sebanyak 171 desa (12,75 persen) berada dalam kategori desa tertinggal, 1.150 desa (85,76 persen) berada dalam kategori desa berkembang, dan sebanyak 20 desa (1,49 persen) dalam kategori desa mandiri.



Gambar 2.20
IPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018



Sumber: IPD Tahun 2018, BPS, 2020.

Rata-rata Indeks Pembangunan Desa paling tinggi adalah di Kabupaten Muko-muko dengan nilai indeks rata-rata 61,38 dengan jumlah desa sebanyak 148 desa, sedangkan rata-rata Indeks Pembangunan Desa yang paling rendah adalah di Kabupaten Kaur dengan nilai indeks rata-rata 55,15 dengan jumlah desa sebanyak 192 desa. Kabupaten Rejang Lebong adalah satu-satunya kabupaten di Provinsi Bengkulu yang tidak memiliki Desa Mandiri.

Dalam regional Sumatera, capaian IPD Provinsi Bengkulu tahun 2018 merupakan IPD terendah kedua setelah Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Barat memiliki nilai IPD tertinggi di Pulau Sumatera dengan nilai indeks 67,70; diikuti oleh Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung (66,06) serta Provinsi Lampung (64,05). Sedangkan nilai Indeks Pembangunan Desa terendah terdapat di Provinsi Sumatera Utara dengan nilai indeks 56,62. Nilai rata-rata Indeks Pembangunan Desa Pulau Sumatera (60,02) berada ada di atas rata-rata nasional atau terbesar ketiga setelah Pulau Jawa-Bali dan Pulau Sulawesi.

6. Ketahanan Pangan

Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Sedangkan di tingkat keluarga dan individu, asupan makanan sesuai prinsip



konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) untuk memenuhi kebutuhan zat gizi dapat diketahui dengan melakukan penilaian konsumsi pangan, melalui pendekatan penghitungan porsi.

Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Pentingnya pencapaian skor PPH tersebut diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Tabel 2.43
Skor PPH Provinsi Bengkulu Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Skor PPH
Bengkulu Selatan	81,4
Rejang Lebong	79,8
Bengkulu Utara	84,4
Kaur	81,4
Seluma	75,4
Mukomuko	91,9
Lebong	78,2
Kepahiang	84,2
Bengkulu Tengah	86,8
Kota Bengkulu	92,7

Sumber: Provinsi Bengkulu Dalam Angka, 2020.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. PDRB

Perekonomian Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2019 tumbuh sebesar 4,79% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan III 2019 sebesar 4,98% (yoy). Perlambatan bersumber dari deselerasi mayoritas komponen sisi penggunaan, kecuali konsumsi rumah tangga yang tumbuh meningkat. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Bengkulu di triwulan IV 2019 masih mengikuti pola pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya.



Pada tahun 2019, perekonomian Provinsi Bengkulu tumbuh 4,96% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 4,99% (yoy). Deselerasi bersumber dari melambatnya konsumsi rumah tangga seiring berkurangnya pendapatan masyarakat akibat tren penurunan harga komoditas. Lebih lanjut, kinerja investasi juga tercatat lebih rendah akibat pengaruh perlambatan ekonomi dunia serta dinamika politik dalam negeri yang menyebabkan para pelaku usaha menahan realisasi investasinya.

Gambar 2.21
Pola Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu



Sumber: Kajian Ekonomi Keuangan Regional Bengkulu, 2019

b. Keuangan Pemerintah

Realisasi pendapatan APBD pemerintah Provinsi Bengkulu pada triwulan I 2020 menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp638,03 miliar dengan persentase 18,94% dari pagu, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi triwulan yang sama tahun sebelumnya Rp748,38 miliar dengan persentase realisasi 22,31%. Menurunnya realisasi pendapatan ini bersumber dari komponen pendapatan perimbangan. Pendapatan perimbangan/transfer menjadi komponen terbesar dalam pendapatan APBD Provinsi Bengkulu dengan pangsa realisasi mencapai 72,70%. Pada triwulan laporan, realisasi dana perimbangan tercatat sebesar Rp463,88 dengan persentase 20,61% dari pagu, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya Rp580,79 miliar dengan persentase realisasi 26,81%. Penurunan realisasi ini terjadi pada semua pos pendapatan perimbangan/transfer seiring upaya refocusing anggaran oleh



Pemerintah Pusat untuk menanggulangi pandemi COVID-19 serta banyaknya desa yang belum mengajukan pencairan Dana Desa.

Menurunnya realisasi pendapatan daerah dapat ditahan oleh realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercatat meningkat. Realisasi PAD triwulan I 2020 mencapai Rp260,17 miliar dengan persentase realisasi 15,57% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya Rp167,31 miliar dengan persentase realisasi 14,08%. Kenaikan realisasi tersebut didorong oleh realisasi pendapatan pajak daerah, terutama Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) jenis pribadi yang mencapai Rp54,94 miliar. Adanya program samsat keliling yang dilaksanakan secara optimal diyakini berpengaruh terhadap kenaikan PKB tersebut seiring semakin mudahnya masyarakat dalam membayar pajak. Selain pendapatan pajak daerah, meningkatnya PAD juga bersumber dari realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang mencapai Rp46,02 miliar. Peningkatan tersebut terutama bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit, khususnya rumah sakit daerah. Penunjukan rumah sakit daerah sebagai rujukan pandemi COVID-19 diyakini mendorong naiknya realisasi pendapatan BLUD seiring meningkatnya permintaan akan obat/vitamin dan layanan kesehatan.

Tabel 2.44
Pendapatan APBD Provinsi Bengkulu Triwulan I 2020

PENDAPATAN APBD Pemerintah Provinsi	Realisasi Tw I 2019				Realisasi Tw I 2020			
	Pagu	Rp Miliar	%	Share Realisasi	Pagu	Rp Miliar	%	Share Realisasi
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,188.16	167.31	14.08%	22.36%	1,116.84	173.87	15.57%	27.25%
PENDAPATAN PAJAK DAERAH	861.66	122.11	14.17%	16.32%	912.37	127.28	13.95%	19.95%
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	5.36	0.80	14.84%	0.11%	5.77	0.57	9.88%	0.09%
PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	26.53	-	0.00%	0.00%	13.96	-	0.00%	0.00%
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	294.61	44.40	15.07%	5.93%	184.73	46.02	24.91%	7.21%
PENDAPATAN PERIMBANGAN/TRANSFER	2,165.95	580.79	26.81%	77.61%	2,250.97	463.88	20.61%	72.70%
DANA BAGI HASIL PAJAK	39.11	6.52	16.67%	0.87%	36.97	6.36	17.21%	1.00%
DANA BAGI HASIL BUKAN PAJAK (SUMBER DAYA ALAM)	33.93	6.64	19.55%	0.89%	24.44	4.80	19.64%	0.75%
DANA ALOKASI UMUM	1,334.18	444.73	33.33%	59.43%	1,350.73	448.83	33.23%	70.35%
DANA ALOKASI KHUSUS	161.09	0.00	0.00%	0.00%	207.81	0.00	0.00%	0.00%
DANA PENYESUAIAN	597.63	122.91	20.57%	16.42%	631.02	3.88	0.61%	0.61%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	1.07	0.28	26.12%	0.04%	1.07	0.28	26.12%	0.04%
JUMLAH PENDAPATAN APBD	3,355.17	748.38	22.31%	100.00%	3,368.88	638.03	18.94%	100.00%



triwulan laporan tercatat sebesar Rp479,35 miliar dengan persentase 13,79% dari pagu, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp342,01 miliar dengan persentase realisasi 9,42%. Meningkatnya realisasi belanja didorong baik oleh belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Realisasi belanja langsung pada triwulan I 2020 sebesar Rp115,99 miliar dengan persentase 8,06% dari pagu, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya Rp73,62 miliar dengan persentase realisasi 4,08%. Berdasarkan komponennya, realisasi terbesar pada belanja langsung adalah belanja modal yang tercatat sebesar Rp67,77 miliar dengan persentase 11,88% dari pagu, meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp16,72 miliar dengan persentase realisasi 1,76%. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh belanja pengadaan jalan propinsi dengan nominal mencapai Rp51,40 miliar serta belanja pengadaan meubelair sebesar Rp7,12 miliar. Sementara itu, realisasi belanja tidak langsung tercatat sebesar Rp363,36 miliar dengan persentase 17,83% dari pagu, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp268,40 miliar dengan persentase realisasi 14,69%. Meningkatnya realisasi belanja tidak langsung utamanya didorong oleh belanja pegawai seiring kenaikan belanja tambahan penghasilan bagi PNS serta belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi.

Tabel 2.45
Belanja APBD Provinsi Bengkulu Triwulan IV 2019

BELANJA APBD Pemerintah Provinsi	Realisasi Tw I 2019				Realisasi Tw I 2020			
	Pagu	Rp Miliar	%	Share Realisasi	Pagu	Rp Miliar	%	Share Realisasi
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,826.50	268.40	14.69%	78.48%	2,037.41	363.36	17.83%	75.80%
BELANJA PEGAWAI	1,149.64	232.72	20.24%	68.04%	1,139.82	280.58	24.62%	58.53%
BELANJA HIBAH	392.82	19.30	4.91%	5.64%	588.67	72.81	12.37%	15.19%
BELANJA BAGI HASIL	258.53	16.38	6.34%	4.79%	304.62	9.97	3.27%	2.08%
BELANJA BANTUAN KEUANGAN	20.50	0.00	0.00%	0.00%	2.30	0.00	0.00%	0.00%
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.00	0.00	0.00%	0.00%	2.00	0.00	0.00%	0.00%
BELANJA LANGSUNG	1,803.37	73.62	4.08%	21.52%	1,438.35	115.99	8.06%	24.20%
BELANJA PEGAWAI	39.63	2.37	5.98%	0.69%	35.48	1.78	5.00%	0.37%
BELANJA BARANG DAN JASA	813.22	54.52	6.70%	15.94%	791.44	46.44	5.87%	9.69%
BELANJA MODAL	950.52	16.72	1.76%	4.89%	611.42	67.77	11.08%	14.14%
JUMLAH BELANJA APBD	3,629.87	342.01	9.42%	100.00%	3,475.76	479.35	13.79%	100.00%

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, 2020.



c. Inflasi

Laju inflasi tahunan Provinsi Bengkulu pada triwulan I 2020 menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Menurunnya laju inflasi triwulan I 2020 terutama disebabkan oleh meredanya tekanan inflasi pada kelompok transportasi, khususnya untuk komoditas angkutan udara, sejalan dengan moderasi permintaan masyarakat pasca periode liburan akhir tahun yang biasanya digunakan untuk bepergian. Laju perlambatan inflasi tertahan oleh meningkatnya tekanan inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, khususnya pada komoditas cabai merah dan bawang putih. Seperti halnya pada komoditas cabai merah, kenaikan harga bawang putih diantaranya disebabkan hasil panen yang kurang maksimal karena faktor curah hujan yang tinggi.

Tabel 2.46
Perkembangan Inflasi Tahunan per Kelompok Provinsi Bengkulu

KELOMPOK	Inflasi Tahunan 2020 (%)			Andil Inflasi Tahunan (%)		
	Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
UMUM	2,17	2,59	2,42	2,17	2,59	2,42
MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	4,48	5,81	5,51	1,20	1,53	1,46
PAKAIAN DAN ALAS KAKI	3,62	3,33	2,70	0,23	0,21	0,17
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR LAINNYA	0,30	0,26	0,22	0,05	0,04	0,03
PERLENGKAPAN, PERALATAN, DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	2,86	2,28	2,29	0,12	0,10	0,10
KESEHATAN	3,32	6,32	4,88	0,08	0,16	0,12
TRANSPORTASI	-0,57	-0,52	-0,71	-0,10	-0,09	-0,12
INFORMASI, KOMUNIKASI DAN JASA KEUANGAN	1,04	1,70	1,55	0,06	0,11	0,10
REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	0,85	0,90	0,90	0,02	0,02	0,02
PENDIDIKAN	0,78	0,78	0,77	0,04	0,04	0,04
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/ RESTORAN	2,85	2,86	2,79	0,24	0,24	0,23
PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	4,39	4,34	4,95	0,23	0,23	0,26

Sumber: Kajian Ekonomi Keuangan Regional Bengkulu, 2020.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

Energi yang potensial dikembangkan di Provinsi Bengkulu adalah energi kelistrikan, baik yang berasal dari pembangkit listrik tenaga air skala besar (PLTA), pembangkit listrik tenaga skala mikro hidro (PLTMH), pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), dan pembangkit listrik tenaga geothermal (PLTG). Sistem tenaga listrik Provinsi Bengkulu terdiri dari Sistem Interkoneksi 150 kv dan 70 kV serta sistem isolated. Pasokan utama sistem tenaga listrik Provinsi Bengkulu berasal dari sistem interkoneksi Sumbagselteng melalui transmisi 150 kV dan 70 kV. Provinsi Bengkulu memiliki potensi energi primer yang terdiri dari batubara yang diperkirakan mencapai

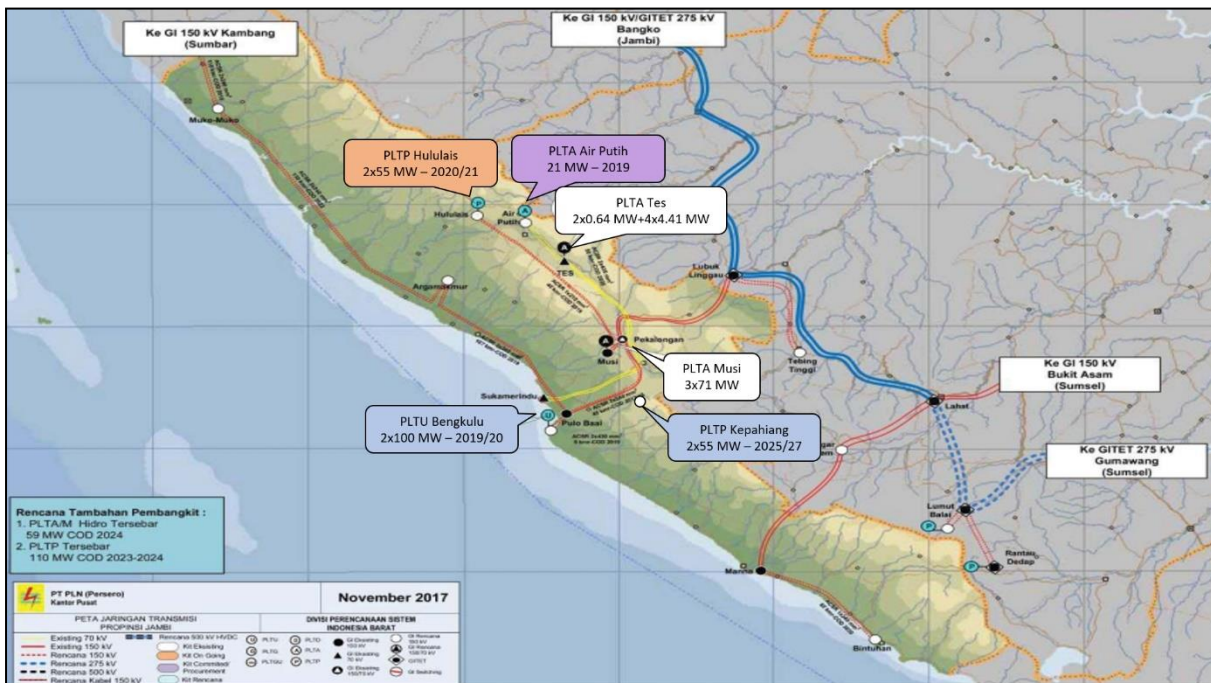


192,10 juta ton, panas bumi yang diperkirakan potensiyam encapai 1.362 MWE yang tersebar pada 5 lokasi antara lain tembang Sawah, B. Gedung Hulu Lais, Lebong Simpang, Suban Ayam dan Kepahiang/G. Kaba, serta tenaga air dilokasi tersebar.

Total DMN pembangkit tenaga listrik yang ada di Provinsi Bengkulu tahun 2018 adalah sekitar 272 MW yang didominasi oleh pembangkit perusahaan PT PLN (Persero) sekitar 269 MW (99%), dan Non PT PLN (Persero) sekitar 3 MW (1%) . Adapun berdasarkan jenisnya, DMN pembangkit tersebut didominasi oleh PLTA sekitar 247 MW (90,7%), PLTD sekitar 16 MW (5,9%), PLTMH sekitar 6 MW (2,2%), PLTBg sekitar 3 MW (1,1%), dan PLTS sekitar 0,3 MW (0,1%). Konsumsi energi listrik di Provinsi Bengkulu tahun 2018 mencapai sekitar 913 GWh dengan komposisi konsumsi per sektor pemakai didominasi oleh sektor rumah tangga sekitar 669 GWh (73%), bisnis sekitar 120 GWh (13%), publik sekitar 71 GWh (8%), dan industri sekitar 53 GWh (6%). Adapun rasio elektrifikasi tahun 2018 mencapai sekitar 99,96%.

Sebaran pembangkit listrik di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

Gambar 2.22
Sebaran Pembangkit Listrik di Provinsi Bengkulu Tahun 2019



Sumber: RUPTL PLN 2019-2028



2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Pada tahun 2017, nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Bengkulu mencapai angka Rp. 296 M dengan total proyek investasi sebanyak 45 proyek. Angka ini menempatkan Provinsi Bengkulu pada posisi ke 25 dari 34 provinsi se Indonesia berdasarkan nilai investasi yang masuk sepanjang tahun 2017. Investasi di Provinsi Bengkulu terus mengalami peningkatan menjadi Rp. 4,9 Triliun pada tahun 2018 dengan 99 proyek dan sebesar Rp. 2,2 triliun dengan 123 proyek pada tahun 2019.

Tabel 2.47
Perkembangan Investasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2017 – 2019

Sektor	2017		2018		2019	
	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan / <i>Food Crops, Plantation, and Livestock</i>	3	10.100,0	11	548.642,6	10	879.323,9
Perikanan / <i>Fishery</i>	2	24.656,7	3	9.282,5	4	8.925,2
Pertambangan / <i>Mining</i>			4	3.567.895,7	2	354.436,1
Industri Makanan / <i>Food Industry</i>	2	0,0	2	145.758,2	5	191.900,0
Industri Kayu / <i>Wood Industry</i>					1	0,0
Industri Kertas dan Percetakan / <i>Paper and Printing Industry</i>					1	0,0
Industri Karet dan Plastik / <i>Rubber and Plastic Industry</i>	1	0,0	3	7.553,8	2	409.098,6
Industri Mineral Non Logam / <i>Non Metallic Mineral Industry</i>			1	1.400,0		
Industri Lainnya / <i>Other Industry</i>					1	0,0
Listrik, Gas dan Air / <i>Electricity, Gas & Water Supply</i>	8	155.971,9	26	250.191,7	26	211.364,9
Konstruksi / <i>Construction</i>			2	2.540,0	8	3.218,6



Sektor	2017		2018		2019	
	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)
Perdagangan dan Reparasi / <i>Trade & Repair</i>	10	16.900,0	15	260.105,2	27	48.626,0
Hotel dan Restoran / <i>Hotel & Restaurant</i>	3	34.780,0	15	98.445,0	10	16.846,5
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi / <i>Transport, Storage & Communication</i>	1	0,0	3	1.214,2	4	19.032,0
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran / <i>Real Estate, Ind. Estate & Business Activities</i>	4	3.892,6	2	4.842,4	5	3.028,3
Jasa Lainnya / <i>Other Services</i>	11	50.232,5	12	4.932,8	17	105.971,0
Total Bengkulu / Bengkulu	45	296.533,7	99	4.902.804,1	123	2.251.771,1

Sumber: https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik

Rasa aman merupakan variabel yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial, dan ekonomi. Statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya jumlah angka kejahatan (crime total), jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (crime rate) setiap 100.000 penduduk. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa kondisi masyarakat menjadi semakin tidak aman. Statistik kriminalitas di Provinsi Bengkulu dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.48
Statistik Kriminalitas di Provinsi Bengkulu Tahun 2016 – 2018

Aspek Kriminal	2016	2017	2018
Kejahatan yang dilaporkan	203.687	4.867	3.389
Kejahatan yang diselesaikan (clearance rate)	43,47	49,72	83,59
Resiko Penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk (Crime rate)	250	252	175

Sumber: Statistik Kriminal 2019, BPS, 2020.



Penyelesaian kasus kejahatan di Provinsi Bengkulu pada tahun 2016 – 2018 menunjukkan tren meningkat dari sebesar 43,47% pada tahun 2016 meningkat menjadi 83,59% pada tahun 2018. Begitu juga dengan Crime rate atau Resiko Penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk, menunjukkan tren menurun dari 250 pada tahun 2016 menjadi 175 pada tahun 2018. Dengan capaian keberhasilan menekan kriminal, maka akan meningkatkan daya saing Provinsi Bengkulu.

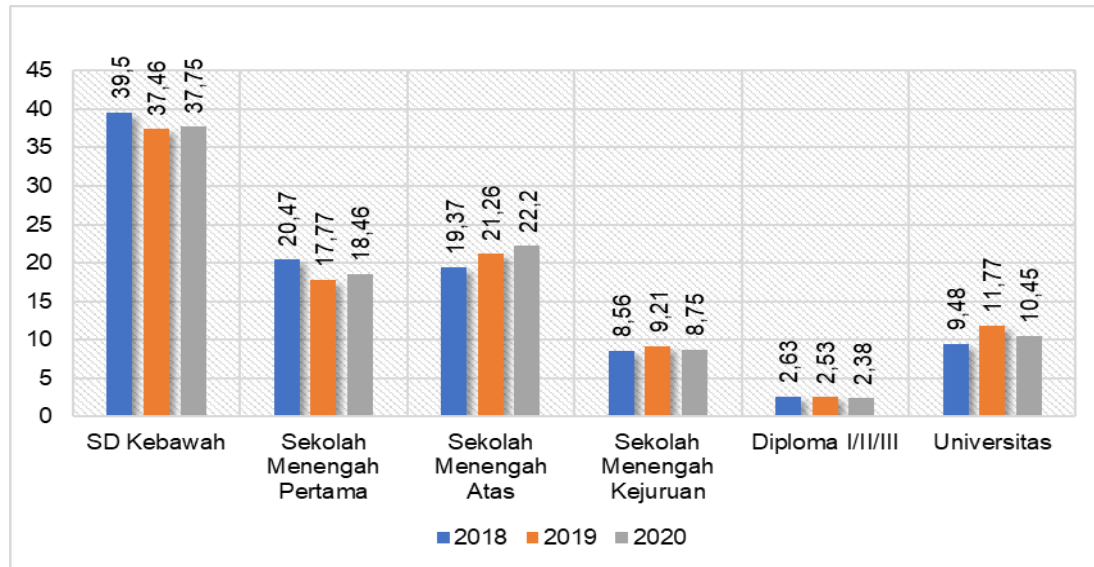
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.

Penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2020 masih didominasi penduduk bekerja berpendidikan rendah yakni tamat Sekolah Dasar (SD) kebawah sebanyak 395.241 orang atau 37,75 persen dan tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 1932.84 orang atau 18,46 persen dengan total sebanyak 588.525 orang atau sebesar 56,21 persen. Sedangkan berpendidikan tinggi hanya sebanyak 134.399 orang atau 12,84 persen yang terdiri dari 24.962 orang berpendidikan Diploma atau 2,38 persen dan 109.437 orang atau 10,45 persen berpendidikan Universitas. Dalam setahun terakhir Februari 2019-Februari 2020 yang terjadi di Provinsi Bengkulu penduduk bekerja berpendidikan menengah bertambah sebanyak 2.644 orang atau naik sebesar 0,82 persen. Penduduk bekerja berpendidikan tinggi mengalami peningkatan sebanyak 9.800 orang atau bertambah 7,86 persen.



Gambar 2.49
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Damatkan 2018–2019



Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2020.



BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyalurkan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyaluran antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Selama periode Tahun Anggaran 2010-2016 Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu terus meningkat, dimana pada tahun 2010 pendapatan sebesar Rp. 1.000.860.633.676,22 menjadi Rp. 2.355.704.992.229,69 pada tahun 2016 dengan rata-rata pertumbuhan 14,61 %. Sumbangan pendapatan yang terbesar terdiri dari sektor :

1. Lain-lain PAD yang sah, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 69,62 %
2. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 197,31 %
3. Dana Alokasi Khusus, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 143,11 %
4. Pajak daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,26 %.

Sedangkan Pendapatan Daerah yang mengalami penurunan adalah Retribusi Daerah, dari Rp. 59.610.610.114,02 pada tahun 2010 menjadi Rp. 4.581.080.771,00 di tahun 2016, dengan rata-rata penurunan sebesar 12,53 %. Hal ini dapat dilihat dari Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2010 sampai dengan 2016, disajikan pada Tabel 3.1



Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2010 s/d 2016 Provinsi Bengkulu

NO	URAIAN	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
1	Pendapatan	1.000.860.633.676,22	1.166.982.246.117,93	1.562.525.395.259,19	1.696.369.921.111,81	1.986.238.994.265,82	2.180.678.757.436,96	2.355.704.992.229,69
1.1	Pendapatan Asli Daerah	351.091.488.316,22	440.920.183.714,43	483.768.274.997,19	525.207.934.928,81	672.064.468.248,82	701.300.383.228,96	734.791.873.386,69
1.1.1	Pajak Daerah	259.804.030.509,00	333.095.936.271,00	370.247.702.785,00	394.141.932.690,00	483.711.050.510,33	510.664.691.644,03	526.386.011.060,00
1.1.2	Retribusi Daerah	59.610.610.114,02	6.590.792.486,00	7.655.852.673,00	12.326.201.961,00	4.625.282.039,00	4.048.631.654,00	5.022.740.139,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yg dipisahkan	10.895.322.281,86	12.488.395.444,06	7.636.009.367,62	12.069.161.322,93	17.080.375.706,79	18.128.899.632,61	18.036.697.197,10
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	20.781.525.411,34	88.745.059.513,37	98.228.710.171,57	106.670.638.954,88	166.647.759.992,70	168.458.160.298,32	185.346.424.990,59
1.2	Dana Perimbangan	598.799.426.879,00	712.264.324.698,00	882.996.672.752,00	977.347.953.983,00	1.104.582.675.517,00	1.208.985.365.208,00	1.616.462.129.843
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	54.774.236.879,00	18.527.693.522,00	61.848.269.048,00	71.112.795.983,00	95.560.468.517,00	99.011.345.208,00	77.348.428.343
1.2.2	Dana Alokasi Umum	523.041.290.000,00	607.388.036.000,00	775.311.166.000,00	854.647.828.000,00	955.095.187.000,00	1.046.080.820.000,00	1.070.751.292.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	20.983.900.000,00	36.609.600.000,00	28.620.610.000,00	51.587.330.000,00	53.927.020.000,00	63.893.200.000,00	468.362.409.500
1.3	Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah	50.969.718.481,00	13.797.737.705,50	195.760.447.510,00	193.814.032.200,00	209.591.850.500,00	270.393.009.000,00	4.450.989.000
1.3.1	hibah	-	4.557.666.705,50	2.677.055.010,00	2.089.174.700,00	2.383.547.000,00	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov dan Pemerintah Daerah Lainnya						1.999.694.000,00	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	13.887.568.100,00	9.240.071.000,00	193.083.392.500,00	191.724.857.500,00	207.208.303.500,00	268.393.315.000,00	
1.3.5	Bantuan Keuangan dan Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-	-	-	-	-	-	-
1.3.6	Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF dan PPD)	37.082.150.381,00	-	-	-	-	-	-



Berdasarkan pencermatan terhadap realisasi Pendapatan Daerah, proporsi komponen pendapatan terhadap total pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu selama Tahun Anggaran 2010-2016 ditunjukkan pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3.

Tabel 3.2
Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap
Total Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2016

Jenis Penerimaan	Proporsi Terhadap Total Pendapatan Daerah Menurut Tahun (%)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
P A D	35,07	37,60	30,96	30,96	33,84	32,16	31,19
Dana Perimbangan	59,84	61,22	68,87	68,92	66,04	67,75	68,62
Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	5,09	1,19	0,17	0,12	0,12	0,09	0,19
T o t a l	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 s.d. 2016



Tabel 3.3
Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap
Total Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2016

No.	Jenis Penerimaan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	PAD	351.091.488.316,22	440.920.183.714,43	483.768.274.997,19	525.207.934.928,81	672.064.468.248,82	701.300.383.228,96	734.791.873.386,69
2	Dana Perimbangan	598.799.426.879,00	712.264.324.698,00	882.996.672.752,00	977.347.953.983,00	1.104.582.675.517,00	1.208.985.365.208,00	1.616.462.129.843,00
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	50.969.718.481,00	13.797.737.705,50	195.760.447.510,00	193.814.032.200,00	209.291.850.500,00	270.393.009.000,00	4.450.989.000,00
	Total	1.000.860.633.676,22	1.166.982.246.117,93	1.562.525.395.259,19	1.696.369.921.111,81	1.985.938.994.265,82	2.180.678.757.436,96	2.355.704.992.229,69

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 s.d. 2016



secara terperinci, target dan realisasi pendapatan daerah selama periode Tahun Anggaran 2010-2016, tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan (d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah secara rata-rata terlampaui, kecuali tahun 2010 sebesar 83,88 % dan Tahun 2016 sebesar 97,36 %. Selama periode Tahun Anggaran 2010-2016, dari hasil akumulasi target tahunan sebesar Rp. 3.892.561.379.540,16,- realisasinya melampaui target yang ditetapkan, yaitu tercapai sebesar Rp. 3.909.144.606.821,12- atau 100,43 %, seperti dijelaskan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bengkulu
Tahun Anggaran 2010-2016

Tahun Anggaran	Target PAD Setelah Perubahan APBD	Realisasi Pajak PAD	%	Lebih/Kurang
2010	418.587.239.610,00	351.091.488.316,22	83,88	-67.495.751.293,78
2011	426.601.946.673,00	440.920.183.714,43	103,36	14.318.237.041,43
2012	477.029.472.785,00	483.768.274.997,19	101,41	6.738.802.212,19
2013	512.962.106.531,00	525.207.934.928,81	102,39	12.245.828.397,81
2014	608.982.474.365,25	672.064.468.248,82	110,36	63.081.993.883,57
2015	693.784.348.935,49	701.300.383.228,96	101,08	7.516.034.293,47
2016	754.613.790.640,42	734.791.873.386,69	97,37	-19.821.917.253,73
Jumlah	3.892.561.379.540,16	3.909.144.606.821,12	100,43	16.583.227.280,96

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 s.d. 2016

Selama periode Tahun Anggaran 2010-2016 target dan realisasi Pajak Daerah terlampaui, total target Pajak Daerah sebesar Rp. 2.798.616.334.099,- dan total realisasinya sebesar Rp. 2.878.05.355.469,03,- atau 102,84 % disajikan pada Tabel 3.5.



Tabel 3.5
Target dan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2016

Tahun Anggaran	Target Pajak Daerah Setelah Perubahan APBD	Realisasi Pajak Daerah	%	Lebih/kurang
2010	250.968.989.603,00	259.804.030.509,00	103,52	8.835.040.906,00
2011	293.672.568.725,00	333.095.936.271,00	113,42	39.423.367.546,00
2012	362.692.164.000,00	370.247.702.785,00	102,08	7.555.538.785,00
2013	393.560.043.061,00	394.141.932.690,00	100,15	581.889.629,00
2014	458.747.536.346,00	483.711.050.510,00	105,44	24.963.514.164,00
2015	500.443.644.035,00	510.664.691.644,03	102,04	10.221.047.609,03
2016	538.541.388.329,00	526.386.011.060,00	97,74	-12.155.377.269,00
Jumlah	2.798.626.334.099,00	2.878.051.355.469,03	102,84	79.425.021.370,03

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 s.d. 2016

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah provinsi kepada kepentingan orang pribadi atau badan, baik yang bersifat pelayanan jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Target dan realisasi Retribusi Daerah selama periode 2010-2016 hanya 2013 – 2016 yang tercapai, yaitu sebesar 132,32 % pada tahun 2013, sebesar 109,75 % pada tahun 2014, 100,86 % pada tahun 2015 dan 109,64 % pada tahun 2016 . Selama periode Tahun Anggaran 2010-2016, target Retribusi Daerah secara akumulasi sebesar Rp. 112.566.997.194,08,- dan realisasinya belum melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 99.880.111.066,00,- atau 88,73 %, disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun Anggaran 2010-2016

Tahun Anggaran	Target Retribusi Daerah Setelah Perubahan APBD	Realisasi Retribusi Daerah	%	Lebih/Kurang
2010	69.704.633.088,00	59.610.610.114,00	85,52	-10.094.022.974,00
2011	12.305.420.300,00	6.590.792.486,00	53,56	-5.714.627.814,00
2012	8.432.166.000,00	7.655.852.673,00	90,79	-776.313.327,00
2013	9.315.114.255,08	12.326.201.961,00	132,32	3.011.087.705,92
2014	4.214.527.428,00	4.625.282.039,00	109,75	410.754.611,00
2015	4.014.055.352,00	4.048.631.654,00	100,86	34.576.302,00
2016	4.581.080.771,00	5.022.740.139,00	109,64	441.659.368,00
Jumlah	112.566.997.194,08	99.880.111.066,00	88,73	-12.686.886.128,08

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 s.d. 2016



Selama periode Tahun Anggaran 2010-2016, target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara akumulasi sebesar Rp. 96.667.133.301,90,- dengan realisasinya sebesar Rp. 97.654.928.600,87,- atau 101,02 %, disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2016

Tahun Anggaran	Target Retribusi Daerah Setelah Perubahan APBD	Realisasi Retribusi Daerah	%	Lebih/Kurang
2010	10.913.156.477,00	10.895.322.281,86	99,84	-17.834.195,14
2011	12.101.760.000,00	12.488.395.444,06	103,19	386.635.444,06
2012	7.601.760.000,00	7.636.009.367,62	100,45	34.249.367,62
2013	12.146.443.446,92	12.069.161.322,93	99,36	-77.282.123,99
2014	16.652.096.483,37	17.080.375.706,79	102,57	428.279.223,42
2015	17.895.152.049,61	18.128.899.632,61	101,31	233.747.583,00
2016	19.356.764.845,00	18.036.697.197,10	93,18	1.320.067.647,90
Jumlah	96.667.133.301,90	97.654.928.600,87	101,02	987.795.298,97

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 s.d. 2016

Selama periode Tahun Anggaran 2010-2016, target Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp. 884.710.914.945,18,- sedangkan realisasinya mencapai Rp. 938.777.973.571,77,- atau sebesar 94,35 %, disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Provinsi Bengkulu
Tahun Anggaran 2010-2016

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Lebih/kurang
2010	87.000.460.442,00	50.969.718.481,00	58,59	-36.030.741.961,00
2011	108.522.197.648,00	13.797.737.705,50	12,71	-94.724.459.942,50
2012	98.303.382.785,00	195.760.447.510,00	199,14	97.457.064.725,00
2013	97.940.505.768,00	193.814.032.200,00	197,89	95.873.526.432,00
2014	129.378.314.107,88	209.591.850.500,00	162,00	80.213.536.392,12
2015	171.431.497.498,88	270.393.009.000,00	157,73	98.961.511.501,12
2016	192.134.556.695,42	4.450.989.000,00	2,32	-187.683.567.695,42
Jumlah	884.710.914.945,18	938.777.784.396,50	106,11	54.066.869.451,32

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 s.d. 2015



2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri atas: (a) Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, (b) Dana Alokasi Umum dan (c) Dana Alokasi Khusus. Secara keseluruhan, target pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan selama periode Tahun Anggaran 2010-2016 sebesar Rp. 7.319.848.568.652,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.101.438.548.880,00- atau sebesar 97,02 %.

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Bengkulu
Tahun Anggaran 2010-2016

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	598.910.462.479,00	598.799.426.879,00	99,98	(111.035.600,00)
2011	694.595.975.358,00	712.264.324.698,00	102,54	17.668.349.340,00
2012	1.076.964.618.907,00	882.996.672.752,00	81,99	(193.967.946.155,00)
2013	1.163.713.904.701,00	977.347.953.983,00	83,99	(186.365.950.718,00)
2014	1.076.161.876.799,00	1.104.582.675.517,00	102,64	28.420.798.718,00
2015	1.250.182.486.758,00	1.208.985.365.208,00	96,70	(41.197.121.550,00)
2016	1.459.319.243.650,00	1.616.462.129.843,00	110,77	157.142.886.193,00
JUMLAH	7.319.848.568.652,00	7.101.438.548.880,00	97,02	(218.410.019.772,00)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 s.d. 2016

Secara keseluruhan, target penerimaan Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak selama periode Tahun Anggaran 2010-2016 adalah sebesar Rp. 517.436.768.108,- sedangkan realisasinya mencapai sebesar Rp. 478.183.237.500,- atau 92,41 % dari target, disajikan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2016

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Lebih/Kurang
2010	54.885.272.479,00	54.774.236.879,00	99,80	-111.035.600,00
2011	50.598.339.358,00	18.527.693.522,00	36,62	-32.070.645.836,00
2012	69.513.482.907,00	61.848.269.048,00	88,97	-7.665.213.859,00
2013	65.554.393.701,00	71.112.795.983,00	108,48	5.558.402.282,00
2014	67.139.669.799,00	95.560.468.517,00	142,33	28.420.798.718,00
2015	140.208.466.758,00	99.011.345.208,00	70,62	-41.197.121.550,00
2016	69.537.143.106,00	77.348.428.343,00	111,2332559	7.811.285.237,00
Jumlah	517.436.768.108,00	478.183.237.500,00	92,41	-39.253.530.608,00

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 s.d. 2016



Target penerimaan Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum selama periode Tahun Anggaran 2010-2016 adalah sebesar Rp. 5.638.440.856.544,- sedangkan realisasinya mencapai sebesar Rp. 5.832.315.619.000,- atau 103,44 % dari target, disajikan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11

Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2016

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	523.041.290.000	523.041.290.000	100,00	0
2011	607.388.036.000	607.388.036.000	100,00	0
2012	775.311.166.000	775.311.166.000	100,00	0
2013	854.647.828.000	854.647.828.000	100,00	0
2014	955.095.187.000	955.095.187.000	100,00	0
2015	1.046.080.820.000	1.046.080.820.000	100,00	0
2016	876.876.529.544	1.070.751.292.000	122,11	193.874.762.456
JUMLAH	5.638.440.856.544	5.832.315.619.000	103,44	193.874.762.456

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 s.d. 2016

Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus selama periode tahun 2010-2016 dengan target sebesar Rp. 768.527.234.000,- dan realisasi penerimaan selama periode Tahun Anggaran 2010-2016 adalah sebesar Rp. 723.984.069.500,- atau 94,20 % dari target, disajikan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12

Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2016

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	20.983.900.000	20.983.900.000	100	-
2011	36.609.600.000	36.609.600.000	100	-
2012	28.620.610.000	28.620.610.000	100	-
2013	51.587.333.000	51.587.330.000	100	-
2014	53.927.020.000	53.927.020.000	100	-
2015	63.893.200.000	63.893.200.000	100	-
2016	512.905.571.000	468.362.409.500	91,32	(44.543.161.500)
Jumlah	768.527.234.000	723.984.069.500	94,20	(44.543.164.500)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 s.d. 2016



3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Selama periode Tahun Anggaran 2010-2016, ditargetkan sebesar Rp. 602.577.961.090,- dengan realisasi sebesar Rp. 939.318.435.396,50,- atau sebesar 155,88 % dari target, disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2016

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Lebih/kurang
2010	57.406.193.100,00	50.969.718.481,00	88,79	-6.436.474.619,00
2011	38.878.571.000,00	13.797.737.705,50	35,49	-25.080.833.294,50
2012	4.325.560.459,00	195.760.447.510,00	4.525,67	191.434.887.051,00
2013	4.325.560.459,00	193.814.032.200,00	4.480,67	189.488.471.741,00
2014	209.213.510.000,00	209.591.850.500,00	100,18	378.340.500,00
2015	283.436.926.072,00	270.393.009.000,00	95,40	-13.043.917.072,00
2016	4.991.640.000,00	4.450.989.000,00	2,32	187.683.567.695,42
Jumlah	602.577.961.090,00	939.318.435.396,50	155,88	336.740.474.306,50

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 s.d. 2016

Selama periode Tahun Anggaran 2010-2016, target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah sebesar Rp. 47.342.120.918,- sedangkan realisasinya Rp.11.707.443.416,- atau sebesar 24,7 % dari target, disajikan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Pendapatan Hibah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2016

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Lebih/kurang
2010	6.335.000.000	-	-	(6.335.000.000,00)
2011	29.850.000.000	4.557.666.705,5	15,3	(25.292.333.294,50)
2012	4.325.560.459	2.677.055.010	61,9	(1.648.505.449,00)
2013	4.325.560.459	2.089.174.700	48,3	(2.236.385.759,00)
2014	2.506.000.000	2.383.547.000	95,1	(122.453.000,00)
2015	-	-	-	-
Jumlah	47.342.120.918	11.707.443.416	24,7	(35.634.677.502,50)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 s.d. 2016



3.1.2. Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Tabel 3.15
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Bengkulu

URAIAN	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
ASET	
ASET LANCAR	
1 Kas	1,90
2 Piutang	8,52
3 Persediaan	31,52
ASET TETAP	
12 Tanah	12,20
13 Peralatan dan Mesin	10,44
14 Gedung dan Bangunan	9,37
15 Jalan Irigasi dan Jaringan	15,12
16 Aset Tetap Lainnya	36,73
17 Konstruksi Dalam Pengerjaan	(68,75)
ASET LAINNYA	
20 Aset Tak Berwujud	(36,93)
21 Tagihan Penjualan Angsuran	(27,45)
22 Tuntutan Ganti Rugi	(23,16)
23 Kemitraan dengan Pihak ke Tiga	13,37
24 Aset Lain-Lain	(10,11)
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Utang Perhitungan pihak ke 3	4.230,94
Pendapatan diterima dimuka	100,00
Utang Beban	100,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	(2,11)
Utang Pada Pihak ke 3	100,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,33
EKUITAS DANA	
EKUITAS DANA LANCAR	
27 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	3,18
28 Pendapatan yang ditangguhkan	(2.293,47)
29 Cadangan Piutang	(5,52)
30 Cadangan Persediaan	31,52
31 Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jgk Pendek	23,37
EKUITAS DANA INVESTASI	
32 Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	13,63
33 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	8,92
34 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	(5,86)
35 Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jgk Panjang	72,35
EKUITAS DANA CADANGAN	
36 Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan	

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 s.d. 2015



Tabel 3.16

Analisis Rasio Keuangan Provinsi Bengkulu Tahun 2013 - 2015

No	Uraian	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Rasio Lancar (current ratio)	335,11	669,30	225,25
2	Rasio quick (quick ratio)	290,12	557,48	62,88
3	Rasio total hutang terhadap total aset	2,20	1,17	1,93

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 s.d. 2015

Rasio keuangan yang dianalisis yaitu rasio likuiditas dan rasio solvabilitas (leverage). Rasio Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis ini yaitu:

1. Current Rasio, rasio yang menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Semakin besar nilai Current Ratio artinya semakin likuid, dengan nilai proposional berada pada batas 200%. Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2013, setiap 100% hutang lancar dijamin oleh Aktiva Lancar sebesar 335,11%, tahun 2014 sebesar 669,30% dan tahun 2015 sebesar 225,25%;
2. Quick Ratio yaitu ukuran kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, dimana nilai yang baik berada pada batas 100 persen. Dengan melihat pada tabel diatas, terlihat bahwa hutang lancar sebesar 100 % dijamin dengan Aktiva sebesar 290,12 % pada tahun 2013; tahun 2014 sebesar 557,48%; dan tahun 2015 sebesar 62,88%. Hal tersebut menunjukkan kelebihan kas dan piutang untuk membayar kewajiban jangka pendek.

Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang, yang sekaligus menunjukkan indikasi tingkat keamanan bagi para pemberi pinjaman. Rasio yang digunakan yaitu rasio total hutang terhadap total aset, yang menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan, juga menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh kreditur. Pengaruh hutang terhadap aktiva tahun 2013 sebesar 2,20 persen, tahun 2014 sebesar 1,17 persen, dan tahun 2015 sebesar 1,93 persen.



Target dan Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai kewajiban daerah, yang diwujudkan melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010-2015, disusun menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, dari akumulasi target Belanja Daerah sebesar Rp. 10.504.750.778.416,40,- terealisasi sebesar Rp. 9.443.414.958.764,31,- atau 89,90 %, disajikan pada Tabel 3.18.

Tabel 3.17
Target dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	1.083.364.041.159,00	971.200.061.122,66	89,65	(112.163.980.036,34)
2011	1.192.127.514.821,00	1.009.215.053.873,68	84,66	(182.912.460.947,32)
2012	1.755.659.122.969,00	1.518.452.804.792,60	86,49	(237.206.318.176,40)
2013	1.922.413.632.975,00	1.727.482.061.723,53	89,86	(194.931.571.251,47)
2014	2.092.057.074.189,25	1.934.721.597.643,06	92,48	(157.335.476.546,19)
2015	2.459.129.392.303,18	2.282.344.879.608,78	92,81	(176.784.512.694,40)
Jumlah	10.504.750.778.416,40	9.443.414.458.764,31	89,90	(1.061.334.319.652,12)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 s.d. 2015

Belanja Daerah terbagi ke dalam dua kelompok belanja yaitu: 1) Belanja Tidak Langsung dan 2) Belanja Langsung.

1) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung terdiri atas: (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota, (g) Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan (h) Belanja Tidak Terduga. Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 dari target sebesar Rp. 5.290.439.288.679,43 dan realisasi sebesar Rp. 4.814.465.774.566,19,- atau 91,00 % sebagaimana disajikan pada Tabel 3.19.



Tabel 3.18
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Provinsi Bengkulu
Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	581.481.066.707,00	521.635.607.018,66	89,71	(59.845.459.688,34)
2011	583.566.697.423,00	494.038.124.707,68	84,66	(89.528.572.715,32)
2012	870.905.409.594,00	786.792.391.071,60	90,34	(84.113.018.522,40)
2013	860.466.466.802,00	795.787.286.113,53	92,48	(64.679.180.688,47)
2014	973.255.373.412,25	908.754.312.643,06	93,37	(64.501.060.769,19)
2015	1.122.626.499.696,18	1.069.307.494.995,78	95,25	(53.319.004.700,40)
Jumlah	4.992.301.513.634,43	4.576.315.216.550,31	91,67	(415.986.297.084,12)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 s.d. 2015

Target Belanja Pegawai Provinsi Bengkulu selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 sebesar Rp. 3.409.693.938.866,31 dengan realisasi sebesar Rp. 3.194.454.315.179,24 atau 93,69 %, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.20.

Tabel 3.19

Target dan Realisasi Belanja Pegawai Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	367.451.147.401,00	329.366.251.062,00	89,64	(38.084.896.339,00)
2011	378.790.133.862,00	364.245.284.071,00	96,16	(14.544.849.791,00)
2012	432.834.821.000,00	407.803.333.177,00	94,22	(25.031.487.823,00)
2013	450.506.790.018,00	426.204.230.386,40	94,61	(24.302.559.631,60)
2014	476.398.824.381,00	450.265.492.550,00	94,51	(26.133.331.831,00)
2015	508.723.898.128,06	493.881.156.995,78	97,08	(14.842.741.132,28)
Jumlah	2.614.705.614.790,06	2.471.765.748.242,18	94,53	(142.939.866.547,88)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 s.d. 2015

Target Belanja Subsidi, selama periode Tahun Anggaran 2010 -2015 terealisasi Rp 0 atau 0 % dari target sebesar Rp. 1,000,000,000,- seperti disajikan pada Tabel 3.21.

Tabel 3.20

Target dan Realisasi Belanja Subsidi Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	-	-	-	-
2011	1,000,000,000	0	0	(1,000,000,000)
2012	-	-	-	-
2013	-	-	-	-
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
Jumlah	1,000,000,000	0	0	(1,000,000,000)



Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 s.d. 2015

Target Belanja Hibah selama periode Tahun Anggaran 2010 – 2015 adalah sebesar Rp. 1.130.067.431.360,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.099.757.584.360 atau 97,32 %. Pada Tahun Anggaran 2012 Belanja Hibah mengalami kenaikan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang disebabkan adanya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah, disajikan pada Tabel 3.22.

Tabel 3.21

Target dan Realisasi Belanja Hibah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	62.013.323.860	61.461.173.860	99,11	(552.150.000,00)
2011	21.600.000.000	19.369.140.000	89,67	(2.230.860.000,00)
2012	237.227.020.000	221.706.458.000	93,46	(15.520.562.000,00)
2013	210.575.350.000	209.507.795.000	99,49	(1.067.555.000,00)
2014	233.452.217.500	225.782.947.500	96,71	(7.669.270.000,00)
2015	365.199.520.000	361.930.070.000	99,10	(3.269.450.000,00)
Jumlah	1.130.067.431.360	1.099.757.584.360	97,32	(30.309.847.000,00)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 s.d. 2015

Selama periode Tahun Anggaran 2010 - 2015, Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp. 29,021,785,000.00 atau 90.32 % dari target sebesar Rp. 32,132,460,000.00. Pada Tahun Anggaran 2012, target dan realisasinya mengalami penurunan yang cukup signifikan disebabkan mulai berlakunya Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.23.

Tabel 3.22

Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	20.541.300.000	20.358.540.000,00	99,11	(182.760.000,00)
2011	11.591.160.000	8.663.245.000,00	74,74	(2.927.915.000,00)
2012	-	-	-	-
2013	-	-	-	-
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
Jumlah	32.132.460.000	29.021.785.000	90,32	(3.110.675.000,00)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 s.d. 2015



Target Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 Rp. 52.828.930.939,- dengan realisasi sebesar Rp. 46.674.448.496,- atau 88.35 %, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.24.

Tabel 3.23
Target dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota
Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	4.000.000.000	3.944.789.000	98,62	(55.211.000,00)
2011	4.000.000.000	944.789.000	23,62	(3.055.211.000,00)
2012	3.904.000.000	3.444.789.000	88,24	(459.211.000,00)
2013	17.377.648.000	15.627.639.000	89,93	(1.750.009.000,00)
2014	21.644.798.000	21.144.500.513	97,69	(500.297.487,00)
2015	1.902.484.939	1.567.941.983	82,42	(334.542.956,00)
Jumlah	52.828.930.939	46.674.448.496	88,35	(6.154.482.443,00)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 s.d. 2015

Target Belanja Tidak Terduga (BTT) selama periode Tahun Anggaran 2010–2015 sebesar Rp. 90.174.071.706,74,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.043.014.332,92 atau 21,12 %. Kecilnya realisasi BTT disebabkan pencairan dana tersebut mensyaratkan kriteria yang setiap tahun diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.25.

Tabel 3.24
Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	10.000.000.000	7.399.467.000	73,99	(2.600.533.000,00)
2011	38.925.000.000	-	-	-
2012	13.721.241.757	-	-	-
2013	5.156.205.598	1.821.108.000	35,32	(3.335.097.598,00)
2014	13.054.628.019,82	505.443.000	3,87	(12.549.185.019,82)
2015	9.316.996.331,92	9.316.996.331,92	100,00	-
Jumlah	90.174.071.706,74	19.043.014.331,92	21,12	(71.131.057.374,82)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 s.d. 2015

Target Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota selama periode Tahun Anggaran 2010 – 2015 sebesar Rp. 1.071.392.913.838,63 dengan realisasi sebesar Rp. 919.369.632.472,71 atau 85.81 %, sebagaimana pada Tabel 3.26.



Tabel 3.25
Target dan Realisasi Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota
Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	117.475.295.446,00	99.105.386.096,66	84,36	(18,369,909,349.34)
2011	127.660.403.561,00	100.815.666.636,68	78,97	(26,844,736,924.32)
2012	183.218.326.837,00	153.837.810.894,60	83,96	(29,380,515,942.40)
2013	176.850.473.186,00	142.626.513.727,13	80,65	(34,223,959,458.87)
2014	228.704.905.511,43	211.055.929.080,06	92,28	(17,648,976,431.37)
2015	237.483.509.297,20	211.928.326.037,58	89,24	(25.555.183.259,62)
Jumlah	1.071.392.913.838,63	919.369.632.472,71	85,81	(152.023.281.365,92)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 s.d. 2015

2) Belanja Langsung

Belanja Langsung terdiri dari: (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan Jasa, serta (c) Belanja Modal. Selama periode Tahun Anggaran 2010 - 2015, rata-rata realisasi Belanja Langsung secara akumulatif tidak mencapai target, yaitu sebesar Rp. 4.625.992.213.418,40 dari target Rp. 5.214.317.489.737,- atau 88.72 %, disajikan pada Tabel 3.27.

Tabel 3.26
Target dan Realisasi Belanja Langsung Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	453.077.306.552,00	405.522.122.828,00	89,50	(47.555.183.724,00)
2011	543.007.188.548,00	458.480.222.347,00	84,43	(84.526.966.201,00)
2012	800.821.160.575,00	658.986.489.132,00	82,29	(141.834.671.443,00)
2013	962.107.240.678,00	840.770.918.450,00	87,39	(121.336.322.228,00)
2014	1.118.801.700.777,00	1.025.967.285.000,00	91,70	(92.834.415.777,00)
2015	1.336.502.892.607,00	1.236.265.175.661,40	92,50	(100.237.716.945,60)
Jumlah	5.214.317.489.737,00	4.625.992.213.418,40	88,72	(588.325.276.318,60)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 s.d. 2015

Target Belanja Pegawai pada Belanja Langsung selama periode Tahun Anggaran 2010 - 2015 sebesar Rp. 521.733,326.519,00 dengan realisasi sebesar Rp. 468.881.421.469,00 atau 89,87 %, disajikan pada Tabel 3.28.



Tabel 3.27

**Target dan Realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Langsung
Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2015**

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	48.805.667.900	44.005.107.276	90,16	(4.800.560.624,00)
2011	65.553.628.850	56.696.706.819	86,49	(8.856.922.031,00)
2012	83.932.552.800	72.673.924.589	86,59	(11.258.628.211,00)
2013	99.839.925.495	90.923.857.160	91,07	(8.916.068.335,00)
2014	102.783.526.900	96.977.552.925	94,35	(5.805.973.975,00)
2015	120.818.024.574,00	107.604.272.700,00	89,06	(13.213.751.874,00)
Jumlah	521.733.326.519,00	468.881.421.469,00	89,87	(52.851.905.050,00)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 s.d. 2015

Target Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Langsung selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 sebesar Rp. 3.018.051.505.710 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 2.660.389.334.348 atau 88,15 %, disajikan pada Tabel 3.29.

Tabel 3.28

**Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Provinsi Bengkulu
Tahun Anggaran 2010-2015**

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	265.750.872.857	240.495.882.498	90,50	(25.254.990.359,00)
2011	292.737.971.948	237.590.663.074	81,16	(55.147.308.874,00)
2012	433.693.201.120	368.721.829.924	85,02	(64.971.371.196,00)
2013	633.673.341.582	563.392.939.381	88,91	(70.280.402.201,00)
2014	685.871.248.519	623.936.193.665	90,97	(61.935.054.854,00)
2015	706.324.869.684	626.251.825.806	88,66	(80.073.043.878,00)
Jumlah	3.018.051.505.710	2.660.389.334.348	88,15	(357.662.171.362,00)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 s.d. 2015

Belanja Modal pada Belanja Langsung, selama periode Tahun Anggaran 2010 - 2015 terealisasi Rp. 1.737.828.986.397 atau 88,10 % dari target sebesar Rp. 1.972.664.432.553, disajikan pada Tabel 3.30.



Tabel 3.29
Target dan Realisasi Belanja Modal Provinsi Bengkulu
Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	187.326.433.695	165.061.964.330	88,11	(22.264.469.365,00)
2011	250.269.216.600	220.889.559.273	88,26	(29.379.657.327,00)
2012	367.127.959.455	290.264.659.208	79,06	(76.863.300.247,00)
2013	328.433.899.096	277.377.979.069	84,45	(51.055.920.027,00)
2014	330.146.925.358	305.053.538.410	92,40	(25.093.386.948,00)
2015	509.359.998.349	479.181.286.107	94,08	(30.178.712.242,00)
Jumlah	1.972.664.432.553	1.737.828.986.397	88,10	(234.835.446.156,00)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 s.d. 2015

Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan antara lain berasal dari: (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA), (b) Koreksi (*contra post*), (c) Pencairan Dana Cadangan, (d) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, (e) Penerimaan Pinjaman Daerah, (f) Penerimaan kembali pemberian pinjaman, (g) penerimaan piutang daerah.

Target penerimaan Pembiayaan selama periode Tahun Anggaran 2010 – 2015 sebesar Rp. 923.342.226.871,69,-sedangkan realisasinya mencapai Rp. 930.434.848.203,24,- atau 100,77%, seperti disajikan dalam Tabel 3.31.

Tabel 3.30
Rincian Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	10.570.145.970	459.938.862,66	4,35	(10.110.207.107,34)
2011	32.051.021.790	43.371.660.401,42	135,32	11.320.638.611,42
2012	197.339.470.818	197.339.470.817,67	100,00	(0,33)
2013	241.412.061.284	241.356.037.084,26	99,98	(56.024.199,74)
2014	210.243.896.472	210.176.309.411,54	99,97	(67.587.060,46)
2015	231.725.630.537,69	237.731.431.625,69	102,59	6.005.801.088,00
Jumlah	923.342.226.871,69	930.434.848.203,24	100,77	7.092.621.331,55

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 s.d. 2015



Realisasi SILPA, selama periode Tahun Anggaran 2010 – 2015 Rp. 948.491.736.244,85 atau 100,77 % dari target sebesar Rp. 941.241.958.871,30 disajikan pada Tabel 3.32.

Tabel 3.31
Rincian Estimasi dan Realisasi SILPA Provinsi Bengkulu
Tahun Anggaran 2010 – 2015

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	10.570.145.970	459.938.862,66	4,35	(10.110.207.107,34)
2011	32.157.361.740	43.478.100.351,42	135,20	11.320.738.611,42
2012	197.339.470.818	197.339.470.817,67	100,00	(0,33)
2013	241.412.061.284	241.356.037.084,26	99,98	(56.024.199,74)
2014	210.243.896.472	210.176.309.411,54	99,97	(67.587.060,46)
2015	249.519.022.587,30	255.681.879.717,30	102,47	6.162.857.130,00
Jumlah	941.241.958.871,30	948.491.736.244,85	100,77	7.249.777.373,55

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 s.d. 2015

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Untuk melihat upaya pemenuhan kebutuhan aparatur selama 3 (tiga) tahun terakhir, dapat dilihat rincian proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.32
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Bengkulu

NO	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan) (Rp)	Prosentase
1	TAHUN ANGGARAN 2013	1.305.656.460.927,40	1.727.482.061.723,53	0,76
2	TAHUN ANGGARAN 2014	1.934.721.597.643,06	1.946.896.281.090,06	0,99
3	TAHUN ANGGARAN 2015	1.591.235.267.464,20	2.300.138.271.658,39	0,69

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 s.d. 2015

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu, tahun 2013 sebesar 0,76 persen; tahun 2014 sebesar 0,99 persen dan tahun 2015 sebesar 0,69 persen.

Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan lebih kecil proporsinya terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Selain itu, dari tahun ke tahun diupayakan efisiensi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur jika diproporsikan terhadap APBD, meskipun jumlah aparatur terus meningkat.



3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut.

1. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran. Langkah awal dalam melakukan analisis ini dilakukan dengan mencari nilai defisit riil anggaran, yaitu mencari nilai realisasi pendapatan, setelah dikurangi realisasi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan. Selanjutnya, dilihat apakah ada Penerimaan Pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran, sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Untuk melihat perkembangan defisit riil anggaran, dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.33
Defisit Riil Anggaran Provinsi Bengkulu

No	Uraian	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1,696,369,921,111.81	1,986,238,994,265.82	2,180,678,757,436.96
2	Realisasi Belanja Daerah	1,727,482,061,723.53	1,934,721,597,643.06	2,282,344,879,608.78
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah		12,174,683,447.00	17,793,392,049.61
		- 31,112,140,611.72	51,517,396,622.76	-101,666,122,171.82

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 s.d. 2015

Tabel 3.34
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Provinsi Bengkulu

No	Uraian	Proporsi dari Total Defisit riil		
		2013 %	2014 %	2015 %
1	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	210.243.896.472,54	249.519.022.587,30	136.222.365.495,87

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 s.d. 2015

2. Analisis SILPA

Analisa SILPA diperlukan untuk melihat darimana sumber peroleh SILPA dan seberapa besar kontribusi yang diberikan. Berikut adalah gambaran peroleh SILPA selama Tahun 2013- 2015 di Provinsi Bengkulu.



Tabel 3.35

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Bengkulu

No	Uraian	2013		2014		2015	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Jumlah Silpa	210.243.896.472,54		249.519.022.587,30		136.222.365.495,87	
2	Pelampauan Penerimaan PAD	12.245.828.397,81	5,82	63.081.993.883,57	25,28	7.516.034.293,47	5,52
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	5.358.906.782,00	2,55	28.420.798.718,00	11,39	41.778.606.550,00	-30,67
4	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	- 2.236.385.759,00	- 1,06	- 122.453.000,00	-0,05	- 12.462.432.072,00	-9,15
5	Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat lainnya	194.931.571.251,47	92,72	157.335.476.546,19	63,06	176.784.512.694,40	129,78
6	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai akhir tahun belum selesai	-	0,00	-	0,00	-	0,00
7	Kegiatan Lanjutan	-	0,00	-	0,00	-	0,00

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 s.d. 2015

3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta prioritas Utama

Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 3.36
Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Bengkulu

NO	URAIAN	2015	2014	Pertumbuhan	%
A	Belanja Tidak Langsung	1.069.307.494.995,78	908.754.312.643,06	160.553.182.352,72	15,01
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	402.117.460.329,00	368.931.559.524,00	33.185.900.805,00	8,25
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	78.547.191.952,20	64.953.598.426,00	13.593.593.526,20	17,31
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.239.000.000,00	4.814.000.000,00	-3.575.000.000,00	(288,54)
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	11.977.504.694,00	11.566.334.600,00	411.170.094,00	3,43
5	Belanja Hibah	361.930.070.000,00	225.782.947.500,00	136.147.122.500,00	37,62
6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	211.928.326.037,58	211.055.929.080,06	872.396.957,52	0,41
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.567.941.983,00	21.144.500.513,00	-19.576.558.530,00	(1.248,55)
B	Belanja Langsung	1.213.037.384.613,00	1.025.967.285.000,00	187.070.099.613,00	15,42
1	Honorarium PNS	68.503.278.500,00	63.313.448.800,00	5.189.829.700,00	7,58
2	Honorarium Non PNS	34.843.135.400,00	29.466.089.625,00	5.377.045.775,00	15,43
3	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	269.700.000,00	54.000.000,00	215.700.000,00	79,98
4	Belanja Honorarium Non Pegawai	155.800.000,00		155.800.000,00	100,00
5	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	3.832.358.800,00	4.144.014.500,00	-311.655.700,00	(8,13)
6	Belanja Bahan Pakai Habis	22.061.623.283,00	15.622.991.295,00	6.438.631.988,00	29,18
7	Belanja Bahan/Material	83.390.144.378,00	86.103.150.154,00	-2.713.005.776,00	(3,25)
8	Belanja Jasa Kantor	81.609.382.330,00	95.783.739.781,00	-14.174.357.451,00	(17,37)



9	Belanja Premi Asuransi	11.315.496.700,00	748.428.862,00	10.567.067.838,00	93,39
10	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.028.563.765,00	11.113.088.070,00	915.475.695,00	7,61
11	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.415.701.625,00	15.866.893.550,00	548.808.075,00	3,34
12	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.851.569.861,00	6.351.520.182,00	-1.499.950.321,00	(30,92)
13	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.545.763.600,00	6.306.097.341,00	-760.333.741,00	(13,71)
14	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.642.080.000,00	4.481.748.217,00	-2.839.668.217,00	(172,93)
15	Belanja Makanan dan Minuman	36.115.256.493,00	36.443.730.169,00	-328.473.676,00	(0,91)
16	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.257.077.750,00	2.657.968.000,00	-400.890.250,00	(17,76)
17	Belanja Pakaian Kerja	745.056.500,00	255.732.000,00	489.324.500,00	65,68
18	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.310.917.300,00	8.829.487.800,00	-5.518.570.500,00	(166,68)
19	Belanja Perjalanan Dinas	107.466.660.555,00	144.960.404.590,00	-37.493.744.035,00	(34,89)
20	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	802.735.000,00	1.971.500.000,00	-1.168.765.000,00	(145,60)
21	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	7.353.131.907,00	9.179.285.324,00	-1.826.153.417,00	(24,84)
22	Belanja Pemeliharaan	69.123.072.980,00	28.457.082.811,00	40.665.990.169,00	58,83
23	Belanja Jasa Konsultansi	27.760.744.306,00	15.329.164.900,00	12.431.579.406,00	44,78
24	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	24.196.517.315,00	31.996.408.798,00	-7.799.891.483,00	(32,24)
25	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	31.600.000,00		31.600.000,00	100,00
26	Belanja Barang dan Jasa	102.250.668.638,00	97.146.091.821,00	5.104.576.817,00	4,99
27	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	5.978.061.520,00	3.915.760.000,00	2.062.301.520,00	34,50
C	Pembiayaan Pengeluaran	17.793.392.049,61	12.174.683.447,00	5.618.708.602,61	31,58
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	17.793.392.049,61	12.174.683.447,00	5.618.708.602,61	31,58

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 s.d. 2015



Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel diatas menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

3.3.2. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2017-2021

Belanja Daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan ditambah satu tahun transisi. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi). Keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektifitas). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan (transparansi), selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (akuntabilitas).

Belanja Daerah, atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, belanja daerah dikenal sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah (pemerintah daerah), di samping pos pendapatan pemerintah daerah. Semakin besar belanja daerah diharapkan akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah (terjadi ekspansi perekonomian).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menegaskan, belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (propinsi ataupun kabupaten/kota) yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juga telah menentukan, struktur belanja terdiri dari belanja tidak langsung, dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.



Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Prioritas pertama adalah belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Arah kebijakan belanja tidak langsung sampai dengan tahun 2017-2021 diperkirakan akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar. Proporsi pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota. Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali gaji PNS, sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap. Kenaikan gaji PNS tersebut dibiayai oleh sumber pendapatan dari DAU. Dengan demikian kenaikan gaji pegawai diharapkan dapat diikuti oleh kenaikan DAU. Belanja yang signifikan pada kelompok belanja tidak langsung adalah belanja bantuan hibah. Alokasi belanja hibah diarahkan kepada berbagai organisasi baik profesi maupun kemasyarakatan. Tujuan alokasi belanja hibah merupakan manifestasi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat.

Belanja langsung adalah belanja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang diusulkan pada belanja langsung disesuaikan dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran, dan Rencana Strategis SKPD. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja pegawai dalam belanja langsung ini berbeda dengan belanja pegawai pada belanja tidak langsung. Belanja pegawai pada belanja langsung antara lain untuk honorarium, uang lembur, belanja beasiswa pendidikan, dan belanja kursus.

Prioritas kedua adalah Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu, antara lain untuk peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehaptan, pengurangan kemiskinan, eksplorasi potensi pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa. Besarnya dana yang dikeluarkan untuk masing-masing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat. Sementara itu, khusus untuk belanja modal, pengeluaran belanja modal pada Lima tahun mendatang



diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka pengelolaan belanja daerah dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan, sebagai berikut:

1. Belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja daerah disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur publik dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.
2. Memprioritaskan alokasi anggaran belanja daerah pada sektor-sektor peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas, serta mengembangkan sistem jaminan sosial, sesuai amanat undang-undang, serta visi, misi dan program kepala/wakil kepala daerah.
3. Meningkatkan anggaran belanja daerah untuk program-program penanggulangan kemiskinan.
4. Mengarahkan alokasi anggaran belanja daerah pada pembangunan infrastruktur yang mendukung pembangunan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan .
5. Meningkatkan kepedulian terhadap penerapan prinsip-prinsip efisiensi belanja dalam pelayanan publik yang meliputi manfaat ekonomi, faktor eksternalitas, kesenjangan potensi ekonomi, dan kapasitas administrasi, kecenderungan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta pemeliharaan stabilitas ekonomi makro.
6. Meningkatkan efektivitas kebijakan belanja daerah melalui penciptaan kerja sama yang harmonis antara eksekutif, legislatif, serta partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapan anggaran belanja daerah.
7. Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui publikasi masyarakat sehingga mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasil.

Prioritas ketiga adalah belanja untuk memenuhi urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak terkait langsung dengan pencapaian visi dan misi namun tetap harus dianggarkan karena terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana amanat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. Pemerintah daerah juga berhak melakukan pinjaman daerah. Selain dilakukan secara hati-hati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, pinjaman yang dilakukan harus tepat sasaran. Alokasi pinjaman daerah selain memberikan pemasukan pada PAD juga diharapkan mampu untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan berkembangnya sektor perdagangan dan jasa.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan penyertaan modal yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat.

Proyeksi pendapatan dan alokasi belanja Provinsi Bengkulu selama 5 (lima) tahun kedepan Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.37
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021

URAIAN	Proyeksi 2017	Realisasi 2017	Proyeksi 2018	Realisasi 2018	Proyeksi 2019	Realisasi 2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021
PENDAPATAN	3.041.325.078.997	2.804.577.827.356	3.616.699.983.226	2.851.808.282.196	4.067.620.365.899	2.939.877.463.728	2.809.257.854.508	2.968.621.251.054
PENDAPATAN ASLI DAERAH	905.536.548.769	804.575.838.594	992.830.272.070	872.257.738.965	1.088.539.110.297	832.494.458.384	753.999.323.178	828.224.064.937
Pendapatan Pajak Daerah	646.249.665.995	597.694.185.212	708.548.133.797	679.457.749.006	776.852.173.895	622.484.621.719	611.286.689.697	672.415.358.666
Hasil Retribusi Daerah	14.924.662.000	5.374.651.415	16.363.399.417	4.095.104.357	17.940.831.121	4.661.820.320	4.859.181.201	5.359.181.201
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.067.685.167	17.657.206.696	24.195.010.017	17.379.569.025	26.527.408.982	13.981.579.485	14.081.579.485	14.300.464.995
Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	222.294.535.607	183.849.795.270	243.723.728.840	171.325.316.576	267.218.696.300	191.366.436.860	123.771.872.795	136.149.060.075
DANA PERIMBANGAN	2.132.917.440.228	1.997.884.640.743	2.620.855.066.656	1.978.482.543.231	2.975.915.878.877	106.267.005.344	2.054.142.531.330	2.139.281.186.117
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	79.834.140.000	61.311.707.511	87.817.554.000	66.368.734.844	96.599.309.400	46.258.205.454	68.036.215.000	68.036.215.000
Dana Alokasi Umum	1.354.429.212.228	1.301.538.847.000	1.622.905.971.836	1.300.978.160.419	1.869.058.391.641	1.334.178.390.000	1.229.164.175.330	1.253.747.458.837
Dana Alokasi Khusus	698.654.088.000	635.034.086.232	910.131.540.820	611.135.647.968	1.010.258.177.836	725.830.409.890	756.942.141.000	817.497.512.280
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.871.090.000	2.117.348.019	3.014.644.500	1.068.000.000	3.165.376.725	1.116.000.000	1.116.000.000	1.116.000.000
Pendapatan Lainnya	2.871.090.000	2.117.348.019	3.014.644.500	1.068.000.000	3.165.376.725	1.116.000.000	1.116.000.000	1.116.000.000

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu, 2020



Tabel 3.38
Realisasi dan Proyeksi Belanja Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021

URAIAN	Proyeksi 2017	Realisasi 2017	Proyeksi 2018	Realisasi 2018	Proyeksi 2019	Realisasi 2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021
BELANJA	3.296.770.279.787	2.868.814.054.579	3.892.601.490.936	2.978.797.167.716	4.292.204.919.887	3.123.503.041.131	2.803.513.546.899	2.970.621.251.054
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.580.112.191.787	1.500.252.284.671	1.840.484.413.936	1.622.411.064.256	1.983.474.303.887	1.571.004.078.315	1.803.545.795.085	1.915.039.112.854
Belanja Pegawai	975.543.933.531	958.716.986.706	1.094.245.199.759	1.018.412.868.261	1.146.946.465.987	1.028.509.363.204	1.096.455.297.611	.146.070.672.854
Belanja Hibah	290.789.209.000	278.389.957.000	359.974.969.255	324.924.782.000	412.837.168.486	341.978.235.000	529.843.170.323	403.668.440.000
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	294.245.598.256	261.415.985.349	354.264.244.922	277.516.027.247	389.690.669.414	196.203.764.259	154.947.327.151	358.000.000.000
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	14.533.451.000	1.729.355.616	20.000.000.000	1.549.873.648	20.000.000.000	1.598.555.852	2.300.000.000	2.300.000.000
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	0	12.000.000.000	7.513.100	14.000.000.000	2.714.160.000	20.000.000.000	5.000.000.000
BELANJA LANGSUNG	1.716.658.088.000	1.368.561.769.908	2.052.117.077.000	1.356.386.103.459	2.308.730.616.000	1.552.498.962.817	999.967.751.814	1.055.582.138.200

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu, 2020



Tabel 3.39
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021

URAIAN	Proyeksi 2017	Realisasi 2017	Proyeksi 2018	Realisasi 2018	Proyeksi 2019	Realisasi 2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021
PEMBIAYAAN DAERAH	255.445.200.790	413.723.668.426	275.901.507.710	341.088.168.926	224.584.553.988	212.698.214.221	5.744.307.609	2.000.000.000
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	273.445.200.790	438.813.668.426	293.901.507.710	351.088.168.926	242.584.553.988	213.318.214.221	9.255.692.391	5.000.000.000
SILPA tahun sebelumnya	293.901.507.710	438.813.668.426	242.584.553.988	351.088.168.926	209.517.071.202	213.318.214.221	9.255.692.391	15.000.000.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	18.000.000.000	25.090.000.000	18.000.000.000	10.000.000.000	18.000.000.000	620.000.000	15.000.000.000	13.000.000.000
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	18.000.000.000	25.090.000.000	18.000.000.000	10.000.000.000	18.000.000.000	620.000.000	15.000.000.000	13.000.000.000
SILPA tahun anggaran berkenaan	0	351.088.168.926	0	213.318.214.221	0	29.072.636.817	0	0

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu, 2020



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Dalam bab ini dideskripsikan berbagai permasalahan kekinian yang dihadapi Provinsi Bengkulu yang secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap percepatan pembangunan lima tahun mendatang. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis menjadi sangat penting sebagai salah satu pertimbangan dalam rangka perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

4.1. Permasalahan Pembangunan

1. Kemiskinan dan Keteringgalan

Terkait dengan kemiskinan, dari data yang tersedia menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu tahun 2019 tercatat sebesar 14,91 persen, turun sebesar 0,50 persen di banding tahun 2018. Namun angka ini jauh lebih tinggi di atas rata-rata nasional sebesar 9,22 persen. Dengan angka tersebut, Provinsi Bengkulu termasuk urutan ke tujuh provinsi termiskin tingkat nasional dan termiskin kedua se-Sumatera setelah Aceh.

Berdasarkan data angka kemiskinan per Maret 2018, dari sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, wilayah selatan provinsi merupakan daerah dengan persentase penduduk miskin paling besar dibanding daerah lainnya, yaitu Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Bengkulu Selatan masing-masing sebesar 19,10 persen, 18,89 persen dan 18,54 persen. Sampai saat ini, Provinsi Bengkulu masih dihadapkan pada tingkat kemiskinan yang cukup rentan. Salah satu faktor penyebabnya adalah masih tingginya penyerapan tenaga kerja sektor informal dan tingkat pendidikan yang rendah. Persentase penduduk yang bekerja pada sektor informal di Provinsi Bengkulu pada tahun 2019 sebesar 64,31 persen dan penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah mencapai 55,23 persen.



Gambar 4.1
Perkembangan Kemiskinan Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2019



Sumber : Provinsi Bengkulu Dalam Angka, SIPD diolah, 2020.

Tabel 4.1
Angka Kemiskinan Provinsi Bengkulu Tahun 2012 – 2019

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Provinsi Bengkulu	17,51	17,75	17,09	17,16	17,03	16,45	15,43	14,91
Nasional	11,66	11,37	10,96	11,13	10,70	10,04	9,82	9,22

Sumber : Provinsi Bengkulu Dalam Angka, SIPD diolah, 2020.

Selain itu dari sektor ketertinggalan, Provinsi Bengkulu masih dikategorikan provinsi tertinggal dengan capaian Indeks Pembangunan Desa yang hanya 58,54 persen dibawah capaian Indeks Pembangunan Desa Sumatera yang sebesar 60,02 persen. Capaian Indeks Pembangunan Desa tersebut memposisikan Bengkulu sebagai Provinsi dengan IPD terendah ke dua se-Sumatera. Desa tertinggal di Provinsi Bengkulu mencapai 12,75 persen atau sebanyak 171 desa dari 1.341 desa.

2. Kondisi Infrastruktur Strategis

Di Provinsi Bengkulu, jaringan listrik dan infrastruktur perhubungan menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan. Terkait dengan infrastruktur strategis, paling tidak terdapat beberapa hal yang harus dibenahi Bengkulu: (1) Pembangunan Jalan tol dan jalan konektivitas dengan provinsi tetangga; (2) Pengembangan pelabuhan Pulau Baai dan pelabuhan Enggano, Linau dan Bantal ; (3) Pengembangan Bandar Udara Fatmawati dan Bandara Perintis Mukomuko dan Enggano ; dan (4) Pembangunan Trase Kereta Api yang menghubungkan Bengkulu dengan Sumatera Selatan.



Infrastruktur strategis tersebut memiliki kaitan dengan percepatan pembangunan daerah Bengkulu. Infrastruktur jalan yang ada belum mendukung kelancaran distribusi peti kemas dari Pulau Baai ke berbagai daerah di sekitar Bengkulu. Jalan yang menghubungkan Kota Bengkulu dengan Kota Lubuk Linggau (Sumatera Selatan) harus di revitalisasi agar mampu dilewati peti kemas dan mempersingkat waktu tempuh ke arah timur yang merupakan koridor ekonomi Sumatera.

Demikian juga, hal yang harus dibenahi dan sangat penting untuk menunjang perekonomian Provinsi Bengkulu adalah Bandara Udara Fatmawati. Bandara Fatmawati dapat menjadi simpul konektivitas bagi daerah-daerah sekitar Provinsi Bengkulu. Kondisi infrastruktur jalan provinsi tahun 2018 memang cukup memprihatinkan. Sekitar 40,45 persen jalan provinsi, misalnya, dalam kondisi rusak dan rusak berat. Hal ini membutuhkan penanganan khusus untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas arus barang dan orang. Tentunya, kondisi jalan provinsi ini akan sangat tergantung pada ketersediaan anggaran yang ada di APBD yang memang ruang fiskalnya relatif sangat terbatas.

3. Infrastruktur Dasar

Kondisi jalan di Provinsi Bengkulu sebesar 33,42 persen berada pada kondisi rusak atau sepanjang 522,35 km dari 1.562,67 km jalan provinsi. Kondisi ini menghambat distribusi dan mobilitas angkutan barang komoditas dan barang sehingga mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Infrastruktur pada tingkat pedesaan juga menjadi permasalahan pembangunan di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Desa (IPD) tahun 2018 dimensi kondisi infrastruktur hanya mencapai 44,61 persen hal ini menggambarkan bahwa permasalahan infrastruktur dasar menjadi issue yang harus diselesaikan dari tingkat desa.

Tabel 4.2
Kondisi Jalan di Provinsi Bengkulu Tahun 2019

NO.	Nama Ruas Jalan	Panjang Ruas (Km)	Lebar (M)	Panjang Tiap Kondisi							
				Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
				KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
1	Bengkulu Utara	572,09	4.5	251,15	43,90	119,93	20,96	134,38	23,49	66,63	11,65
2	Kota Bengkulu	44,18	6.0	38,75	87,71	3,83	8,67	1,45	3,28	0,15	0,34
3	Kaur	120,30	4.0	77,96	64,80	-	-	37,04	30,79	5,30	4,41
4	Mukomuko	97,22	4.0	68,37	70,33	-	-	24,00	24,69	4,85	4,99
5	Seluma	174,52	4.5	50,45	28,91	-	-	62,31	35,70	61,76	35,39
6	Lebong	66,16	4.5	53,76	81,26	-	-	2,00	3,02	10,40	15,72
7	Rejang Lebong	149,85	4.0	101,11	67,47	8,85	5,91	35,81	23,90	4,08	2,72

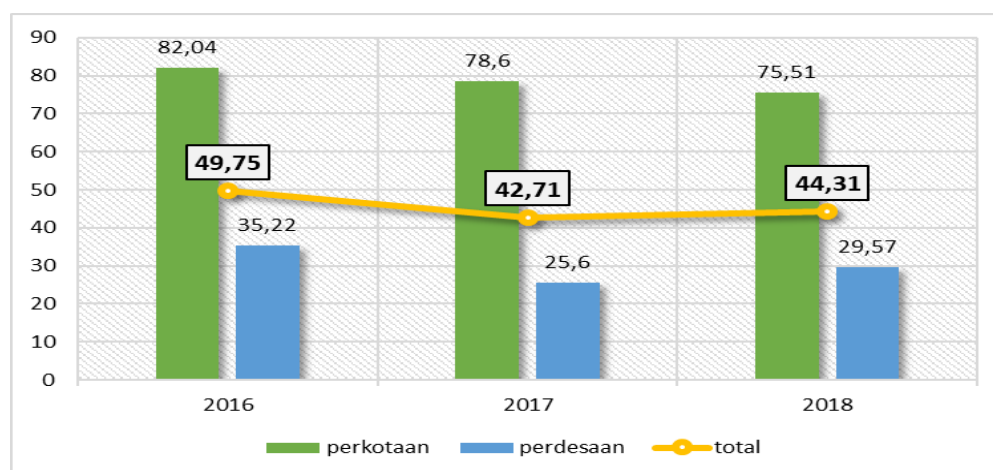


NO.	Nama Ruas Jalan	Panjang Ruas (Km)	Lebar (M)	Panjang Tiap Kondisi							
				Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
				KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
8	Kepahiang	123,62	4.0	61,12	49,44	22,58	18,27	22,64	18,31	17,28	13,98
9	Bengkulu Selatan	163,80	4.5	106,77	65,18	27,50	16,79	5,53	3,38	24,00	14,65
10	Bengkulu Tengah	50,93	4.0	42,22	82,90	5,98	11,74	0,23	0,45	2,50	4,91
	Total Panjang Jalan (km)	1.562,67		851,65	54,50	188,67	12,07	325,40	20,82	196,95	12,60

Sumber : Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, 2020.

Selain itu, berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2018 yang dirilis BPS, Provinsi Bengkulu merupakan provinsi dengan capaian sanitasi layak tiga terendah terendah di Provinsi Bengkulu Provinsi yang masih menjadi fenomena khusus dalam aksesibilitas sanitasi layak adalah Bengkulu. Walaupun bukan merupakan provinsi dengan persentase terendah, Bengkulu masih termasuk 3 provinsi dengan persentase terendah selama periode 2016-2018. Bahkan, persentasenya pun masih di bawah 50 persen, yaitu 49,75 persen pada tahun 2016 dan justru menurun menjadi 44,31 persen pada tahun 2018. Dalam buku Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu 2015 (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015) disebutkan bahwa tantangan terbesar dalam meningkatkan akses air bersih dan sanitasi di Bengkulu adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengadakan perilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu, permasalahan lain adalah minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana yang telah terbangun, serta kurang optimalnya sinergi pembangunan air minum dan sanitasi.

Gambar 4.2
Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Sanitasi Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2018

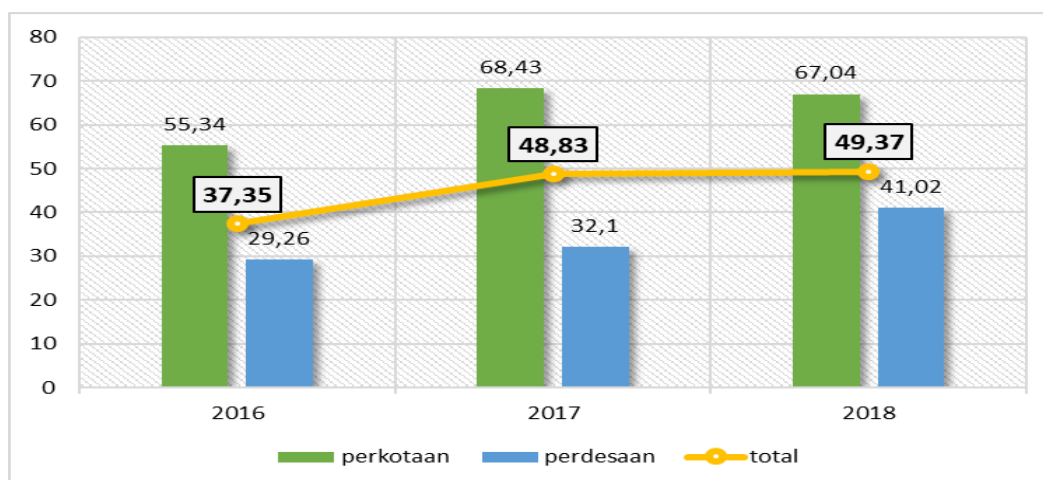


Sumber : Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan Tahun 2018 BPS Provinsi Bengkulu, 2020.



Selain sanitasi layak, provinsi Bengkulu merupakan provinsi dengan capaian Akses air minum layak terendah di Indonesia. Selama periode 2016-2018, Bengkulu merupakan provinsi dengan persentase terendah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak. Sepanjang periode tersebut persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak di Provinsi Bengkulu masih berada di bawah 50 persen. Pada tahun 2018, akses masyarakat terhadap air minum layak hanya sebesar 48,37%. Fenomena ini perlu mendapat perhatian khusus karena berdasarkan rata-rata persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak untuk wilayah Indonesia Bagian Barat, dimana Provinsi Bengkulu termasuk di dalamnya, telah mencapai 73,45 persen pada tahun 2018. Kondisi tersebut menggambarkan ketimpangan yang terjadi antarprovinsi di Indonesia Bagian Barat. Rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak di Provinsi Bengkulu salah satunya disebabkan pencemaran air oleh aktivitas pertambangan batubara di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Air Bengkulu.

Gambar 4.3
Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2018

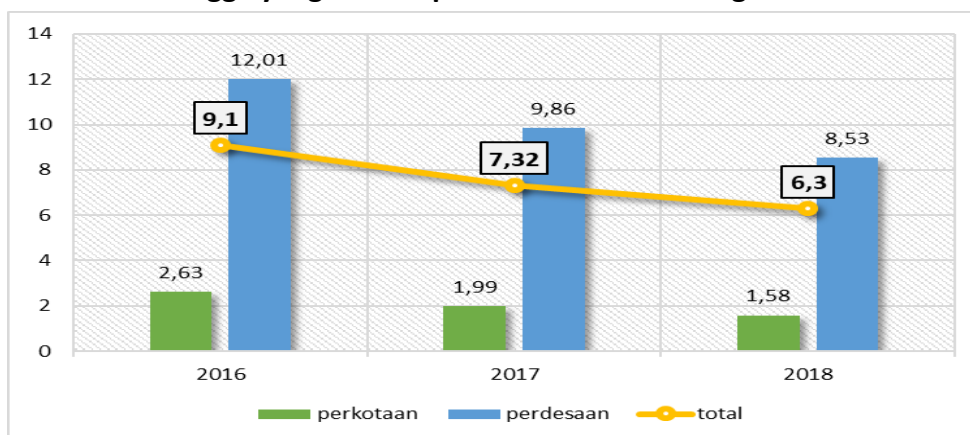


Sumber: Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan Tahun 2018, BPS Provinsi Bengkulu, 2020.

Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni (penjelasan pasal 24 huruf a UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Persentase rumah tangga yang menempati Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Bengkulu masih dikategorikan cukup tinggi, karena pada tahun 2018 berada pada posisi 6,30% berada diatas rata – rata nasional yang sebesar 4,30%. Rumah Tidak Layak Huni paling banyak ditempati oleh rumah tangga yang hidup di perdesaan. Adapun perkembangan persentase Rumah Tangga yang menempati rumah tidak layak huni di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:



Gambar 4.4
Persentase Rumah Tangga yang menempati RTLH Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2018

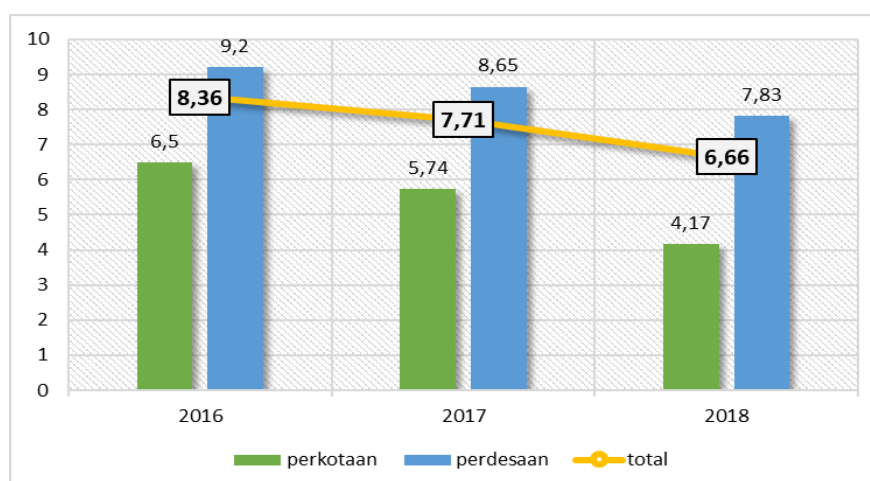


Sumber : Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan Tahun 2018

Daerah kumuh yang dimaksud adalah daerah atau kawasanmempat tinggal (hunian) yang dihuni sekelompok orang yang menempatibangunan sementara, tidak ada akses air yang aman untuk diminum, tidak adafasilitas sanitasi yang memadai, dan kondisi lingkungan yang tidak memadai. Adapun rumah tangga kumuh didefinisikan sebagai rumah tangga yang tidakmmemiliki akses terhadap sumber air minum layak, sanitasi layak, luas lantai permkapita kurang dari 7,2 mm per kapita, serta tidak memenuhi kondisi atap, lantai, dan dinding yang layak.

Persentase rumah tangga yang menempati Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Bengkulu masih dikategorikan cukup tinggi, karena pada tahun 2018 berada pada posisi 6,66% berada diatas rata – rata nasional yang sebesar 5,26%. Rumah tangga kumuh paling banyak ditempati oleh rumah tangga yang hidup di perdesaan. Adapun perkembangan persentase Rumah Tangga Kumuh di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

Gambar 4.5
Persentase Rumah Tangga Kumuh di Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2018



Sumber : Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan Tahun 2018



4. Pembangunan Kemaritiman

Dengan panjang pantai hampir 525 Km, Provinsi Bengkulu memiliki potensi kemaritiman yang luar biasa. Namun demikian, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Di Bengkulu terdapat 16.437 rumah tangga nelayan pada tahun 2017 dan naik menjadi 16.648 rumah tangga tahun 2018 (*Sumber: Bengkulu Dalam Angka, 2019*). Produksi perikanan tangkap pada tahun 2018 sebesar 66.679 ton, naik dibandingkan produksi tahun 2017 yang sebesar 65.794 ton. Penggunaan teknologi tangkap hanya berupa pukat kantong dan jaring angkat. Diperkirakan nilai produksi ikan tangkap akan jauh lebih meningkat apabila ada penerapan teknologi tangkap yang sesuai dengan perairan Bengkulu.

Pembangunan kemaritiman yang terpadu memerlukan kebijakan khusus sehingga benar-benar mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu. Pembangunan kemaritiman harus diselaraskan dengan kebijakan nasional terkait dengan poros maritim, infrastruktur pelabuhan utama dan pengumpan, infrastruktur jalan, pembangunan kepariwisataan, pemberdayaan masyarakat nelayan dan berbagai kebijakan pendukung lainnya. Pembangunan kemaritiman harus benar-benar berbasis potensi lokal dan oleh karenanya memerlukan kebijakan pembangunan khusus yang berorientasi pada penurunan tingkat kemiskinan nelayan, perbaikan permukiman dan diversifikasi lapangan kerja bagi masyarakat nelayan.

5. Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan

Provinsi Bengkulu memiliki kekayaan hutan dan hasil ikutannya yang cukup melimpah. Sekitar 56 persen wilayah Bengkulu terdiri dari kawasan hutan, baik hutan lindung, taman nasional, cagar alam, maupun hutan produksi. Namun demikian, keberadaan kawasan hutan itu sudah mulai terancam oleh kegiatan-kegiatan perkebunan dan perladangan penduduk maupun perusahaan yang mengkonversi hutan menjadi perkebunan. Keberadaan hutan juga belum memberikan kontribusi kepada kesejahteraan penduduk.

Selain itu, Provinsi Bengkulu sangat kaya dengan aliran sungai yang mengandung konsekuensi banyaknya daerah aliran sungai (DAS) yang sekarang mulai mengalami kerusakan akibat perkebunan dan perladangan rakyat serta pertambangan. DAS yang mengalami kerusakan pada gilirannya akan mempengaruhi pasokan air yang dibutuhkan untuk pembangkit tenaga listrik dan atau kebutuhan baku air minum. Kasus yang terjadi, perusahaan batu bara dan atau pabrik pengolahan karet yang membuang limbah ke sungai sehingga mempengaruhi kualitas air. Semua ini sebagai akibat lemahnya penegakan hukum dan pengendalian yang terlalu longgar.



Dalam kasus lain, Provinsi Bengkulu memiliki kekayaan sumberdaya pertambangan seperti batu bara, emas, dan bijih besi yang relatif cukup melimpah. Namun demikian, citra pertambangan ini cenderung merusak lingkungan, termasuk kerusakan infrastruktur jalan. Pembuangan limbah pertambangan di sisi yang lain ternyata mempengaruhi air baku untuk sumber air bersih. Sumberdaya kelautan yang terbentang sepanjang 525 Km masih belum dioptimalkan dengan baik. Sumberdaya potensial maupun aktual dari kelautan belum didayagunakan secara maksimal. Kondisi ini lebih diperparah oleh fenomena merebaknya pencurian ikan dan pola-pola penangkapan ikan yang merusak. Kerap kali pencurian tersebut dilakukan di pulau-pulau terluar seperti Pulau Enggano yang masih belum dikelola dengan baik. Potensi kelautan belum dapat dioptimalkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat.

4.2. Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan pembangunan di atas serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 dan RPJMN 2020 - 2024, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis untuk dijadikan sebagai basis pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan, antara lain:

A. Isu Strategis SDGs

Pada tahun 2014, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melakukan pembaruan *Millenium Development Goals* (MDGs) dengan agenda pembangunan global yang bernama *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan-tujuan yang tertuang dalam SDGs merupakan penyempurnaan tujuan pembangunan SDGs. Melalui mandat SDGs, PBB berupaya untuk mewujudkan SDM global yang berkualitas, meningkatkan perekonomian global yang mensejajarkan dengan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) untuk 2016-2030 meliputi:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia;



4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan;
7. Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan untuk semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara;
11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Agenda SDGs dinilai sangat relevan untuk konteks pembangunan Provinsi Bengkulu. Tujuan SDGs memiliki tujuan yang baik, yaitu mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup.



Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk melaksanakan agenda-agenda SDGs yang targetnya dapat tercapai pada tahun 2030.

B. Isu Strategis dalam Visi, Misi, Agenda Pembangunan RPJMN 2020 – 2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pencapaian pembangunan selama kurun waktu tahun 2020-2024 yang awalnya diperkirakan akan menempatkan Indonesia ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries), menghadapi tantangan besar akibat pandemi Covid-19 di awal tahun 2020.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Diperlukan kerja keras untuk mempertahankan pencapaian pembangunan pada periode RPJMN sebelumnya agar sasaran di atas dapat dicapai.

Visi Misi Presiden terpilih tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mempunyai visi:

***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”.***

Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi

- I. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- II. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- III. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- IV. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- V. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- VI. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;



- VII. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- VIII. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
- IX. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yang disusun berlandaskan RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden terpilih.

Arahan Presiden tentang 5 Fokus Kerja Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019-2024

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Penjabaran setiap fokus kerja tersebut adalah:

1. *Pembangunan Sumber Daya Manusia*, dengan prioritas utama :

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. *Pembangunan Infrastruktur*, dengan prioritas utama:

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. *Penyederhanaan Regulasi*, dengan prioritas utama:

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. *Penyederhanaan Birokrasi*, dengan prioritas utama:

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.



5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

C. Isu Strategis Dampak Corona Virus Disease atau Covid-19

Corona Virus Disease atau Covid-19 ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020. Virus dengan cepat telah menyebar di berbagai negara di dunia bahkan di Indonesia dengan kasus terkonfirmasi positif pertama Covid-19 di Indonesia dilaporkan pada awal Maret 2020 dan terus bertambah yang tersebar di 34 provinsi. Provinsi Bengkulu mencatat kasus pertama Covid-19 pada akhir Maret 2020, dan menjadi provinsi ketiga terakhir yang mejadi zona merah.

Pada April 2020, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan pandemi ini sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Sejalan dengan itu, Gubernur Bengkulu telah mengeluarkan beberapa kebijakan strategis untuk melakukan berbagai upaya menekan penyebaran virus tersebut yaitu:

1. SE Gubernur Nomor 440/271/B.1/2020, tanggal 20 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Covid-19;
2. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor H.197/Dinkes/2020, tentang penetapan Ruang Keperawatan dan Karantina Kasus Covid-19 di Provinsi Bengkulu;
3. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor H.171/BPBD/2020, tanggal 4 April 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
4. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor H.172/BPBD/2020 tanggal 4 April 2020 tentang Peningkatan Status Siaga Bencana menjadi Status Tanggap Darurat Bencana

Pencegahan Covid-19 berdampak pada pelarangan berbagai kegiatan seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, sosial dan budaya, moda transportasi, dan pertahanan dan keamanan. Pandemi Covid-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran Covid-19 saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal nonpertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Tekanan besar pada sistem



kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (health security), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif Covid-19 menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit terhambat.

Dampak Covid-19 terhadap Ekonomi Dunia



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Tidak berbeda dengan ekonomi dunia dan Indonesia, ekonomi Provinsi Bengkulu juga terkena dampak negatif Covid-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (physical distancing). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan serta ekspor impor terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya non performing loan (NPL) dan volatilitas di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu pada Triwulan I 2020 hanya mampu tumbuh sebesar 3,82%, melemah dari Triwulan I 2019 yang mencapai 5,02%, serta tumbuh dengan risiko menuju negatif jika penanganan penyebaran pandemi Covid-19 berlangsung lebih lama. Turunnya daya beli masyarakat mengakibatkan rendahnya produksi.

Pembatasan pergerakan masyarakat juga mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja di industri maupun perkantoran, serta penurunan indikator makro ekonomi



nasional, di antaranya konsumsi dan produksi rumah tangga, investasi riil, ekspor dan impor, dan penyerapan tenaga kerja. Sektor pariwisata juga terdampak dengan penurunan kunjungan wisatawan, tutupnya aktivitas perhotelan, akomodasi dan makan minum. Sektor ini memiliki rantai produksi yang melibatkan SDM cukup besar, seperti perhotelan, restoran, jasa pemandu wisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga transportasi domestik dan maskapai penerbangan.

Pandemi Covid-19 memaksa dunia usaha dan pemerintah menerapkan teknologi informasi dengan lebih intensif. Proses transisi ke ekonomi digital berlangsung lebih cepat. Beberapa perusahaan yang sukses bertransisi ke sistem online memiliki peluang untuk bertahan karena permintaan rumah tangga khususnya untuk konsumsi pangan dan kebutuhan pokok lainnya masih dapat berjalan. Dengan kata lain, terdapat risiko penurunan elastisitas penciptaan lapangan kerja baru terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pengangguran relatif lebih tinggi dari baseline, khususnya di wilayah-wilayah dengan konektivitas digital relatif baik. Jumlah orang miskin dan rentan meningkat terutama dari kelompok pekerja informal, jika tidak ada jaring pengaman sosial yang memadai. Sistem produksi yang tidak berjalan optimal dan membebani biaya menyebabkan sebagian perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Tambahan pengangguran diperkirakan meningkat dan. Interupsi kegiatan belajar mengajar dalam waktu lama juga berpotensi mengurangi efektivitas pembelajaran. Risiko yang lebih besar dialami siswa atau mahasiswa yang memiliki hambatan literasi digital atau kesulitan mendapatkan akses informasi.

Berdasarkan permasalahan pembangunan di atas serta memperhatikan Tujuan SDGs, Tujuh Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020 - 2024 dan Isu Strategis Dampak Corona Virus Disease atau Covid-19, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis untuk dijadikan sebagai basis pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan, antara lain:

1. Masih tingginya angka kemiskinan dan ketertinggalan

Penanggulangan kemiskinan dan ketertinggalan yang ada di Provinsi Bengkulu terutama ditujukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan ketertinggalan, baik antara kelompok masyarakat maupun antar wilayah. Isu-isu pembangunan yang sebaiknya diperhatikan antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan layanan pemenuhan hak-hak dasar berusaha masyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan golongan.



- b. Pembukaan kesempatan kerja yang adil dan transparan, terutama bagi penurunan angka pengangguran di kalangan terdidik melalui pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pasar kerja.
- c. Mengembangkan program penciptaan wirausaha baru yang kompetitif dan berdaya saing dalam pembangunan ekonomi Bengkulu.
- d. Meningkatkan infrastruktur jalan ke sentra-sentra produksi yang memungkinkan arus barang dan manusia berlangsung dengan lancar dan sekaligus mengurangi ekonomi berbiaya tinggi.
- e. Meningkatkan daya beli masyarakat miskin melalui pola-pola pemberdayaan yang berorientasi pada kemandirian berusaha dan berkarya.

2. Rendahnya kualitas dan kuantitas layanan dasar

A. Bidang Pendidikan

Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat; peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; dan peningkatan kuantitas/kualitas guru (kualitas pendidikan); peningkatan kualitas pembelajaran (daya saing di pasar kerja); pemerataan kualifikasi dan penempatan guru; dan pementapan kesejahteraan guru.

B. Kesehatan

Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai; peningkatan akses pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah terpencil; peningkatan kuantitas dan kualitas dokter dan paramedis; kepastian layanan jaminan kesehatan; pengembangan program kader dokter desa bekerja sama dengan UNIB; dan pementapan kesejahteraan dokter dan paramedis.

C. Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal

Peningkatan akses permodalan bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi dalam bentuk kemitraan yang saling menguntungkan; peningkatan daya saing produk UKMK melalui pelatihan dan pendampingan; pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal; revitalisasi koperasi dan kelompok usaha baru (KUB); menggalakkan ekspose produk UKMK di tingkat nasional dan regional.

3. Rendahnya kapasitas infrastruktur dasar

Peningkatan kualitas jalan dan jembatan; peningkatan jangkauan listrik perdesaan; peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi dan air bersih serta pengurangan lingkungan permukiman kumuh dan peningkatan kualitas rumah layak huni. Isu ini



harus menghasilkan dihapuskannya desa-desa yang tidak terjangkau pelayanan dasar pemerintah.

4. Rendahnya kapasitas infrastruktur strategis dan berdaya saing

A. Rendahnya kapasitas Pelabuhan Pulau Baai dan Pelabuhan pengumpan lainnya

Mengingat potensi peran Pelabuhan Pulau Baai dalam pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu, maka diperlukan adanya terobosan kebijakan untuk optimalisasi kapasitas pelabuhan melalui: peningkatan kapasitas sarana dan prasarananya, maupun tata kelolanya; pembangunan dan pembangunan beberapa terminal pelabuhan (seperti peti kemas, benda cair, karantina hewan, terminal pengantongan semen curah); pengembangan kerjasama dengan multi pihak untuk menjadikan Pelabuhan Pulau Baai sebagai pusat koneksi pelabuhan samudera di Indonesia Bagian Barat. Peningkatan kapasitas pelabuhan ini harus mencerminkan adanya keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pelabuhan sejenis yang ada di provinsi lain. Selain itu juga diperlukan pengembangan pelabuhan pengumpan lainnya seperti pelabuhan linau, pelabuhan di Enggano dan pelabuhan bantal di Mukomuko.

B. Rendahnya Kapasitas Bandara udara Fatmawati, Bandara Mukomuko dan Bandara Enggano

Perluasan kapasitas bandara sebagai sarana transportasi orang dan barang; pembangunan sarana dan prasarana kargo sesuai dengan standar internasional; menjadikan Bandara Fatmawati sebagai pusat kegiatan lalu lintas arus barang dan orang, paling tidak di wilayah Sumatera bagian selatan. Perluasan kapasitas bandara ini juga harus mampu mencerminkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan bandara lain. Selain itu juga diperlukan pengembangan kapasitas Bandara Mukomuko dan Bandara Enggano sebagai bandara perintis yang ada di Provinsi Bengkulu.

C. Belum Optimalnya Infrastruktur Kelistrikan

Pembangunan jaringan internal provinsi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan industri; pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara (padat dan cair); pembangunan transmisi yang menjangkau provinsi-provinsi tetangga; re-orientasi bisnis kelistrikan Bengkulu sebagai pemasok tenaga listrik provinsi-provinsi di wilayah Sumatera bagian Selatan.



D. Rendahnya konektivitas akses Lintas Provinsi

Isu ini adalah: membuka keterisolasian dan atau kelancaran arus barang dan orang dari dan ke Provinsi Bengkulu; membangun dan atau meningkatkan kapasitas infrastruktur jalan lintas provinsi dari aspek jarak tempuh dan pengurangan biaya angkut; membangun kerjasama dengan provinsi sekitar untuk membangun pola-pola pembangunan koridor. Peningkatan akses lintas provinsi ini ditujukan agar Bengkulu memiliki keunggulan kompetitif dan berdaya saing untuk menarik minat investor. Beberapa kebijakan yang perlu ditempuh adalah dengan menghubungkan Provinsi Bengkulu ke dalam jalan tol trans sumatera melalui pembangunan Jalan Tol Bengkulu – Lubuk Linggau, Pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Bengkulu ke jalur kereta api Sumatera (*Trans Sumatera Railways*) melalui pembangunan jalur kereta api Bengkulu – Kota Padang Rejang Lebong yang terkoneksi dengan jalur kereta Muara Enim – Lubuk Linggau serta pembukaan ruas-ruas jalan baru yang menghubungkan Provinsi Bengkulu ke Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi.

5. Belum optimalnya pembangunan kemaritiman yang integratif, berdaya saing dan berkelanjutan

Pembangunan kemaritiman diarahkan untuk menunjang pembangunan poros maritim nasional melalui perumusan kebijakan dan program penanganan sektor-sektor kelautan antara lain (1) Sektor perikanan tangkap melalui modernisasi alat tangkap dan pengolahan; (2) Sektor wisata bahari, pemanfaatan maritim sebagai obyek dan daya tarik seperti wisata pantai, keragaman hayati, seperti taman laut wisata alam, wisata bisnis, wisata budaya, maupun wisata olah raga; (3) Sektor Transportasi Laut yakni memanfaatkan transportasi laut sebagai penunjang aktivitas ekspor dan impor Bengkulu; (4) Industri maritim seperti Pembangunan Industri Kelautan dengan berbagai jenis industri sebagai penciptaan nilai tambah; pengembangan industri pariwisata bahari; pengembangan industri kreatif kebaharian; pembangunan infrastruktur kelautan seperti pelabuhan dan Industri Perkapalan baik yang kecil, menengah, dan besar, industri pemeliharaan dan perbaikan kapal dan atau galangan kapal; (5) Sektor pertambangan (Energi dan Sumberdaya Mineral) yaitu mengoptimalkan sumberdaya mineral di kawasan laut Bengkulu, baik yang bersifat potensial maupun aktual; (6) Sektor bangunan laut, yakni peningkatan kualitas, kuantitas serta kapasitas pelabuhan laut yang ada di Bengkulu sebagai pusat aktivitas perekonomian barang dan jasa (antar pulau, ekspor maupun impor), sehingga keberadaannya sangat diperlukan dalam pembangunan kelautan ; (7) Sektor jasa kelautan dapat berupa aktivitas



ekonomi yang meliputi jasa perdagangan, penelitian dibidang kelautan, dan jasa-jasa lainnya.

6. Belum Optimalnya Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan

Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dilakukan melalui kebijakan antara lain: (1) Mengembangkan dan meningkatkan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; (2) Meningkatkan efektivitas pengelolaan, konservasi, dan rehabilitasi sumberdaya alam; (3) Mencegah dan mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup; (4) Menata kelembagaan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup serta penegakan hukum; (5) Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan berbasiskan adat istiadat dan kearifan lokal; (6) menggali potensi sumberdaya yang terbarukan bekerjasama dengan multi *stakeholders*; dan (7) meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di kalangan generasi muda dan anak usia sekolah.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. Visi

Berdasarkan pada kondisi makro, permasalahan dan isu-isu strategis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka visi Provinsi Bengkulu yang hendak dicapai tahun 2016-2021 adalah:

***“ TERWUJUDNYA BENGKULU YANG MAJU, SEJAHTERA, BERMARTABAT,
DAN BERDAYA SAING TINGGI ”***

Pemahaman Bengkulu maju, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi adalah (1) terpenuhinya kebutuhan layanan dasar masyarakat yang berkualitas; (2) meningkatnya hasil-hasil pembangunan yang berkeadilan dengan didukung oleh kondisi aman, pemerintahan bersih dan berwibawa, efektif, transparan dan mengayomi; (3) mewujudkan masyarakat Provinsi Bengkulu yang berjiwa menghargai keberbedaan, memiliki kebanggaan terhadap sumber daya yang ada dan menjunjung tinggi martabat bangsa; (4) meningkatnya daya saing Provinsi Bengkulu dalam beragam aspek kehidupan dan pembangunan.

Bengkulu yang maju mengandung makna masyarakat Provinsi Bengkulu yang berpengetahuan dan sadar akan kebutuhan secara individual atau kelompok serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan regional, nasional dan global dengan tetap mempertahankan ciri dan identitas masyarakat Provinsi Bengkulu yang beragam serta bijaksana dalam menghargai adat istiadat dan kearifan lokal.

Bengkulu yang sejahtera mengandung makna masyarakat Provinsi Bengkulu yang terpenuhinya layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian rakyat serta terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan rohani dalam kerangka kehidupan yang berkeseimbangan secara lahir dan batin. Melalui pelaksanaan visi ini diharapkan akan terwujud derajat kehidupan masyarakat Provinsi Bengkulu yang mampu memenuhi kebutuhan dasar, sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan lingkungan.

Bengkulu yang bermartabat mengandung makna masyarakat Provinsi Bengkulu yang memiliki kebanggaan dan dihargai sebagai masyarakat yang memiliki kompetensi, bertakwa serta memiliki nilai-nilai luhur budaya bangsa. Visi ini dapat tercapai apabila masyarakat Provinsi Bengkulu sudah maju dalam segenap aspek kehidupan, sejahtera dalam aspek jasmani dan rohani, dan bermartabat dalam aspek kemampuan dan keunggulan diri.



Bengkulu yang berdaya saing tinggi mengandung makna bahwa Provinsi Bengkulu memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, yang tercermin dalam tata kelola pemerintahan, profesionalisme aparatur, pelayanan publik, iklim usaha dan investasi, infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis, komoditas unggulan, kemaritiman serta kepemudaan dan keolahragaan.

5.2. Misi

Untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Bengkulu yang maju, sejahtera dan bermartabat, maka misi yang diemban lima tahun ke depan adalah:

Misi Pertama: Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan public

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional melalui perbaikan tata kelola pemerintahan; pengelolaan APBD yang efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konsisten dengan perencanaan daerah; peningkatan daya saing daerah dan investasi; mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa; peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan melalui model *e-goverment*.

Misi Kedua: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Bengkulu yang sejahtera melalui peningkatan kuantitas dan kualitas di bidang kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan dan bidang pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal.

2.1. Bidang Kesejahteraan Sosial

Misi ini difokuskan pada upaya-upaya meningkatkan kualitas perlindungan sosial, rehabilitasi sosial dan pembangunan sosial lainnya, termasuk di dalamnya penanganan kebencanaan.



2.2. Bidang Pendidikan

Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat; peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; dan peningkatan kuantitas/kualitas guru (kualitas pendidikan); peningkatan kualitas pembelajaran (daya saing di pasar kerja); pemerataan kualifikasi dan penempatan guru; dan pementapan kesejahteraan guru.

2.3. Bidang Kesehatan

Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai; peningkatan akses pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah terpencil; peningkatan kuantitas dan kualitas dokter dan paramedis; kepastian layanan jaminan kesehatan; pengembangan program kader dokter desa; dan pementapan kesejahteraan dokter dan paramedis.

2.4. Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal

Peningkatan akses permodalan bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi dalam bentuk kemitraan yang saling menguntungkan; peningkatan daya saing produk UKM melalui pelatihan dan pendampingan; pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal; revitalisasi koperasi dan kelompok usaha baru (KUB); menggalakkan ekspose produk UKM di tingkat nasional dan regional.

Misi Ketiga: Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Provinsi Bengkulu maju, sehat dan cerdas melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis :

3.1. Infrastruktur Dasar

Kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan pembangunan sarana dan prasarana irigasi perdesaan; jalan dan jembatan; peningkatan jangkauan listrik perdesaan; pembangunan dan atau perbaikan jalan desa ke sentra-sentra produksi; dan peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi dan air bersih dan revitalisasi pasar desa. Misi ini terutama ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan dan ketertinggalan desa-desa terpencil dan terisolir.



3.2. Infrastruktur Strategis:

A. Rendahnya kapasitas Pelabuhan Pulau Baai dan Pelabuhan pengumpan lainnya

Mengingat potensi peran Pelabuhan Pulau Baai dalam pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu, maka diperlukan adanya terobosan kebijakan untuk optimalisasi kapasitas pelabuhan melalui: peningkatan kapasitas sarana dan prasarananya, maupun tata kelolanya; pembangunan dan pembangunan beberapa terminal pelabuhan (seperti peti kemas, benda cair, karantina hewan, terminal pengantongan semen curah); pengembangan kerjasama dengan multi pihak untuk menjadikan Pelabuhan Pulau Baai sebagai pusat koneksi pelabuhan samudera di Indonesia Bagian Barat. Peningkatan kapasitas pelabuhan ini harus mencerminkan adanya keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pelabuhan sejenis yang ada di provinsi lain. Selain itu juga diperlukan pengembangan pelabuhan pengumpan lainnya seperti pelabuhan linau, pelabuhan di enggano dan pelabuhan bantal di Mukomuko.

B. Rendahnya Kapasitas Bandara udara Fatmawati, Bandara Mukomuko dan Bandara Enggano

Perluasan kapasitas bandara sebagai sarana transportasi orang dan barang; pembangunan sarana dan prasarana kargo sesuai dengan standar internasional; menjadikan Bandara Fatmawati sebagai pusat kegiatan lalu lintas arus barang dan orang, paling tidak di wilayah Sumatera bagian selatan. Perluasan kapasitas bandara ini juga harus mampu mencerminkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan bandara lain. Selain itu juga diperlukan pengembangan kapasitas Bandara Mukomuko dan Bandara Enggano sebagai bandara perintis yang ada di Provinsi Bengkulu.

C. Belum Optimalnya Infrastruktur Kelistrikan

Pembangunan jaringan internal provinsi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan industri; pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara (padat dan cair); pembangunan transmisi yang menjangkau provinsi-provinsi tetangga; re-orientasi bisnis kelistrikan Bengkulu sebagai pemasok tenaga listrik provinsi-provinsi di wilayah Sumatera bagian Selatan.

D. Rendahnya konektivitas akses Lintas Provinsi

Isu ini adalah: membuka keterisolasian dan atau kelancaran arus barang dan orang dari dan ke Provinsi Bengkulu; membangun dan atau meningkatkan kapasitas infrastruktur jalan



lintas provinsi dari aspek jarak tempuh dan pengurangan biaya angkut; membangun kerjasama dengan provinsi sekitar untuk membangun pola-pola pembangunan koridor. Peningkatan akses lintas provinsi ini ditujukan agar Bengkulu memiliki keunggulan kompetitif dan berdaya saing untuk menarik minat investor. Beberapa kebijakan yang perlu ditempuh adalah dengan menghubungkan Provinsi Bengkulu ke dalam jalan tol trans sumatera melalui pembangunan Jalan Tol Bengkulu – Lubuk Linggau, Pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Bengkulu ke jalur kereta api Sumatera (*Trans Sumatera Railways*) melalui pembangunan jalur kereta api Bengkulu – Kota Padang Rejang Lebong yang terkoneksi dengan jalur kereta Muara Enim – Lubuk Linggau serta pembukaan ruas-ruas jalan baru yang menghubungkan Provinsi Bengkulu ke Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi.

Misi Keempat: Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan berbasis keunggulan lokal

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Provinsi Bengkulu yang sejahtera, bermartabat dan berdaya saing melalui program-program antara lain: mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya mineral yang berkelanjutan; meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya laut; memanfaatkan sumberdaya panas bumi (*geothermal*) untuk memenuhi kebutuhan listrik lokal dan regional; pemanfaatan batubara untuk kebutuhan pembangkit tenaga listrik; penciptaan nilai tambah produksi perkebunan; pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat; pengolahan produksi hasil ikutan hutan untuk menciptakan nilai tambah; pemanfaatan sumberdaya mineral untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat *dan* optimalisasi produksi ikan tangkap dan ikan budidaya.

Selain itu, misi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan ini juga diarahkan untuk mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan berdaya saing. Misi ini dapat dilakukan melalui kebijakan dan atau program antara lain: (1) re-orientasi kebijakan yang integratif kepariwisataan di Provinsi Bengkulu; (2) peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kepariwisataan; (3) peningkatan kapasitas insan kepariwisataan; (4) optimalisasi promosi dan ekspose potensi wisata Provinsi Bengkulu; (5) penyediaan tenaga ahli dan terampil dalam bidang manajemen kepariwisataan; membangun jaringan wisata internasional; dan (6) kemudahan investasi dibidang kepariwisataan.

Misi Kelima: Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing



Pembangunan kemaritiman diarahkan untuk menunjang pembangunan poros maritim nasional melalui perumusan kebijakan dan program penanganan sektor- sektor kelautan antara lain (1) Sektor perikanan tangkap melalui modernisasi alat tangkap dan pengolahan; (2) Sektor wisata bahari, pemanfaatan maritim sebagai obyek dan daya tarik seperti wisata pantai, keragaman hayati, seperti taman laut wisata alam, wisata bisnis, wisata budaya maupun wisata olah raga, (3) Sektor transportasi laut yakni memanfaatkan transportasi laut sebagai penunjang aktivitas ekspor dan impor Provinsi Bengkulu; (4) industri maritim seperti Pembangunan Industri Kelautan dengan berbagai jenis industri sebagai penciptaan nilai tambah; pengembangan Industri Pariwisata Bahari; pengembangan Industri Kreatif Kebaharian; pembangunan Infrastruktur Kelautan, seperti pelabuhan dan Industri Perkapalan baik yang kecil, menengah dan besar, industri pemeliharaan dan perbaikan kapal dan atau galangan kapal;

(5) Sektor pertambangan (Energi dan Sumberdaya Mineral), yaitu mengoptimalkan sumberdaya mineral di kawasan laut Provinsi Bengkulu, baik yang bersifat potensial maupun aktual; (6) Sektor bangunan laut yakni peningkatan kualitas, kuantitas serta kapasitas pelabuhan laut yang ada di Provinsi Bengkulu sebagai pusat aktivitas perekonomian barang dan jasa (antar pulau, ekspor maupun impor), sehingga keberadaannya sangat diperlukan dalam pembangunan kelautan; (7) Sektor jasa kelautan dapat berupa aktivitas ekonomi yang meliputi jasa perdagangan, penelitian dibidang kelautan dan jasa-jasa lainnya.

Misi Keenam: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Misi ini dilakukan melalui kebijakan-kebijakan dan atau program antara lain: (1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan dasar bagi perempuan (pendidikan, kesehatan dan ekonomi); (2) Memperkuat kapasitas kelembagaan pengarusutamaan (*mainstreaming*) *gender* dalam setiap tahapan pembangunan; (3) Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik dengan tidak menghilangkan kodratnya sebagai perempuan; (4) Menghapus berbagai bentuk kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan dan anak; (5) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak; (6) Meningkatkan akses pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan peningkatan peran kaum laki-laki ber-KB; (7) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan reproduksi remaja berbasis *gender*; (8) Perlindungan anak dari tindakan kekerasan; dan (9) Menyediakan data dan informasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga.



Misi Ketujuh: Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

Peningkatan daya saing kepemudaan dilakukan : (1) Peningkatan kompetensi pemuda melalui pola pengkaderan secara terencana sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan metode pendidikan, pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, *serta* pemanfaatan kajian, kemitraan; (2) Pengembangan kapasitas kepemudaan sebagai agen pembangunan dan perubahan yang bertanggung jawab, berjiwa wirausaha dan mandiri; (3) Peningkatan pengetahuan pemuda dini terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya sejak dini; (4) Pembentukan dan pengembangan kelompok-kelompok kepemudaan sebagai media penyaluran minat dan bakat; (5) Peningkatan profesionalisme dan etika pembina, penyelenggara dan pengelola kegiatan kepemudaan;

Peningkatan daya saing keolahragaan dilakukan melalui: (1) Pemanfaatan kemitraan lintas sektoral antar tingkat pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pemassalan, pembudayaan, *serta* pengembangan industri dan sentra-sentra olahraga; (2) Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana olah raga yang menunjang pencapaian prestasi agar mampu bersaing tingkat nasional, regional maupun internasional; (3) Mewujudkan yang olahragawan berprestasi pada kompetisi bertaraf nasional, regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan; (4) Meningkatkan profesionalisme dan etika pembina, penyelenggara, pengelola dan pelaksana kegiatan keolahragaan.

Misi Kedelapan: Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis, berbudaya, berkesadaran wisata dan demokratis

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Provinsi Bengkulu yang sejahtera dan bermartabat. Sebagai provinsi yang merefleksikan miniatur Indonesia yang didalamnya terdiri dari berbagai suku, agama dan golongan dengan beragam kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah daerah untuk menjaga dan menjamin rasa aman bagi umat beragama dalam menjalankan aktivitas-aktivitas keagamaannya. Oleh karena itu, program yang harus dilakukan antara lain:



- a. Memfasilitasi dialog antar umat beragama untuk menyamakan pandangan terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- b. Meningkatkan peran tokoh-tokoh agama untuk berperan aktif sebagai agen perubahan (*agents of change*) untuk membina umat;
- c. Menciptakan kondisi dimana prinsip-prinsip keagamaan diintegrasikan ke dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik;
- d. Meningkatkan indeks demokrasi sebagai cerminan masyarakat Provinsi Bengkulu yang demokratis dan berbudaya;
- e. Melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap insan budaya Provinsi Bengkulu melalui pagelaran-pagelaran seni budaya; dan
- f. Mempromosikan budaya daerah ke kancah nasional sebagai perwujudan ciri kepribadian masyarakat Provinsi Bengkulu.

Proritas Provinsi Bengkulu

1. Bengkulu Sehat
2. Bengkulu Cerdas
3. Bengkulu Maju
4. Bengkulu Mapan
5. Bengkulu Bersih Profesional
6. Bengkulu Berbudaya dan Berkesadaran Wisata
7. Bengkulu Beriman

Rincian khusus koherensi atau sinkronisasi visi, misi dan prioritas RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 dapat digambarkan dalam table 5.1 berikut ini.

**TABEL 5.1 KOHERENSI VISI, MISI DAN PRIORITAS RPJMD PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2016 – 2021**

**VISI : TERWUJUDNYA BENGKULU YANG MAJU, SEJAHTERA, BERMARTABAT,
DAN BERDAYA SAING TINGGI**

NO	MISI RPJMD	KATA KUNCI VISI	PRIORITAS
1.	Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan public	- Maju - Bermartabat - Berdaya Saing	- Bengkulu Bersih dan Profesional - Bengkulu Maju



NO	MISI RPJMD	KATA KUNCI VISI	PRIORITAS
		Tinggi	
2.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan	- Sejahtera - Maju	- Bengkulu Cerdas - Bengkulu Sehat - Bengkulu Maju
3.	Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis	- Maju - Berdaya Saing Tinggi	- Bengkulu Maju - Bengkulu Mapan
4.	Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan berbasis keunggulan lokal	- Sejahtera - Bermartabat - Berdaya Saing Tinggi	- Bengkulu Mapan - Bengkulu Maju - Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata
5.	Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing	- Berdaya Saing Tinggi - Maju	- Bengkulu Maju - Bengkulu Mapan
6.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Bermartabat - Sejahtera	- Bengkulu Mapan
7.	Meningkatkan daya saing kepemudaan dan keolahragaan	- Berdaya Saing Tinggi	- Bengkulu Maju
8.	Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis, berbudaya, berkesadaran wisata dan demokratis	- Sejahtera - Bermartabat	- Bengkulu Berbudaya dan berkesadaran wisata - Bengkulu Beriman

Program Prioritas Provinsi Bengkulu

Sedangkan 5 (lima) Program Prioritas Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 yaitu :

1. Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan

Program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan merupakan salah satu program prioritas yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan pada sifat dan karakteristik kemiskinan yang ada, maka strategi pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan dalam dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bentuk pendekatan yakni :



1.1. Bantuan Masyarakat Miskin

Strategi penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga miskin sebaiknya mencakup penyediaan beberapa bantuan sosial yang akan diberikan kepada keluarga miskin, antara lain:

Pertama, Bantuan langsung kepada keluarga miskin dan hampir miskin. Bantuan langsung dapat berupa bantuan langsung tunai bersyarat, bantuan langsung tunai tanpa syarat, bantuan langsung dalam bentuk barang, seperti pemberian beras bagi masyarakat miskin (raskin), serta bantuan bagi kelompok masyarakat rentan seperti mereka yang cacat, lansia, yatim/piatu dan sebagainya. Penyediaan bantuan yang diadakan oleh pemerintah provinsi ini sekaligus melengkapi prioritas Pemerintah Pusat sehingga dampaknya bagi rumah tangga miskin penerima manfaat strategi akan semakin diperkuat.

Kedua, bantuan pendidikan berupa beasiswa dan pendidikan anak usia dini. Bantuan ini diberikan kepada anggota keluarga rumah tangga miskin dan hampir miskin yang masih berusia sekolah melalui pemberian uang, dimana sebagai imbalannya keluarga penerima diwajibkan untuk menyekolahkan anaknya yang berada dalam kategori usia sekolah. Termasuk dalam strategi ini memberikan insentif bagi kepala keluarga rumah tangga miskin untuk memasukkan anak-anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah, seperti pekerja anak, untuk kembali ke bangku sekolah. Bantuan-bantuan tersebut secara langsung melengkapi program-program nasional seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Ketiga, bantuan ini dilakukan melalui pemberi pelayanan kesehatan yang ditunjuk. Bantuan ini diberikan kepada ibu-ibu hamil atau yang sedang mengasuh anak balita dalam rumah tangga miskin dan hampir miskin dengan syarat ibu-ibu hamil atau yang sedang mengasuh anak balita tersebut memeriksakan kesehatan mereka atau anak balita mereka ke Puskesmas. Selain itu, bantuan kesehatan ini dapat berupa jaminan kesehatan daerah, Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan sebagainya.

Keempat, bantuan tunai untuk penanggulangan pengangguran sementara. Bantuan ini disediakan bagi anggota keluarga rumah tangga miskin yang sudah berusia antara 15-24 tahun namun masih belum mempunyai pekerjaan tetap. Mereka akan diberikan modal kerja sementara untuk mempersiapkan memperoleh pekerjaan yang sesuai. Selain itu, mereka juga akan diberikan pelatihan peningkatan kompetensi untuk dapat bersaing di pasar kerja.



Kelima, bantuan permodalan atau penyediaan kredit usaha bersama bagi kelompok rumah tangga miskin. Program ini ditujukan untuk memberikan kesempatan pada kelompok-kelompok rumah tangga miskin dan hampir miskin yang memiliki anggota keluarga produktif untuk memiliki usaha mikro dan kecil. Dengan demikian, mereka dapat meningkatkan akses terhadap permodalan, teknologi dan pasar. Strategi penanggulangan kemiskinan berbasis individu terpilih sebagai pemicu pencapaian peningkatan pendapatan bagi kelompok rumah tangga miskin produktif ini akan bersinergi dengan program KUR sehingga diharapkan akan berlangsung akselerasi pengembangan kegiatan perekonomian terutama di sektor riil, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan keluarga miskin dan hampir miskin.

1.2. Pembangunan Sarana dan prasarana Desa tertinggal

A. Pembangunan sarana dan prasarana untuk pemerataan Pendidikan

Masih banyaknya desa-desa yang belum memiliki sarana dan prasarana pendidikan. Apabila satu desa tidak memungkinkan dibangun SD karena rasio penduduk tidak memungkinkan, maka perlu dibangun SD berdasarkan kluster desa-desa terdekat. Pola kluster ini juga dapat diterapkan untuk SLTP, dan SLTA. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan untuk masyarakat miskin dan hampir miskin agar mereka mampu bersekolah dengan baik.

B. Pembangunan sarana dan prasarana untuk pemerataan pelayanan Kesehatan

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan menjadi sangat krusial. Diperlukan pemerataan akses pelayanan kesehatan untuk keluarga miskin dan hampir miskin. Setiap desa sebaiknya sudah memiliki pusat-pusat pelayanan kesehatan (polindes, misalnya) agar kesehatan masyarakat miskin dapat terlayani dengan baik. Demikian juga, diperlukan peningkatan jumlah paramedis yang bertugas di pusat-pusat pelayanan kesehatan desa, misalnya bidan dan perawat apabila penyediaan dokter tidak memungkinkan.

C. Pembangunan Sarana dan prasarana ekonomi desa

Peningkatan aktivitas perekonomian desa dapat ditingkatkan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan. Diperlukan program revitalisasi pasar desa (*pasar kalangan*), termasuk di dalamnya revitalisasi pasar-pasar tradisional. Program ini menjadi sangat penting agar keluarga miskin mampu mengases pasar untuk melakukan transaksi jual beli komoditas yang diusahakan keluarga miskin. Angka kemiskinan tidak mungkin dapat diturunkan dengan baik apabila masalah ketertinggalan dan keterisolasian desa tidak segera dipecahkan. Oleh karena itu, pembangunan



jalan desa ke pusat-pusat ekonomi dan produksi menjadi sangat mendesak. Hal ini ditujukan agar keluarga miskin dapat menjual hasil produksi pertaniannya dengan biaya yang jauh lebih rendah. Dengan kata lain, pembangunan jalan desa ini ditujukan untuk meningkatkan arus barang dan orang. Untuk meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan, diperlukan adanya pembangunan jalan ke sentra-sentra usahatani dan sentra-sentra produksi. Selain itu, untuk meningkatkan produksi pangan, maka pembangunan dan atau rehabilitasi saluran irigasi harus menjadi perhatian. Demikian juga pengadaan sarana dan prasarana pertanian baik pangan, perikanan dan peternakan, pembangunan industri pengolahan serta pasar hasil-hasil produksi pertanian, menjadi program-program yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi penurunan angka kemiskinan.

1.3. Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Strategi pengentasan kemiskinan dan perentasan ketertinggalan dapat dilakukan melalui pendekatan komunitas, atau dapat saja disebut sebagai pemberdayaan kelompok rumah tangga miskin. Strategi ini bertujuan untuk: (1) membiasakan para rumah tangga miskin agar berkelompok, belajar mengelola kegiatan secara bersama, memupuk solidaritas sosial; (2) meningkatkan peranserta aktif kelompok rumah tangga miskin dalam satu satuan wilayah terkecil; (3) meningkatkan akses bagi anggota masyarakat miskin kepada pelayanan sosial maupun sarana dan prasarana sosial dasar. Pemberdayaan pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan kekuatan kepada pihak yang kurang berdaya agar memiliki kemampuan untuk aktualisasi diri. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang berkelanjutan sehingga dibutuhkan partisipasi masyarakat agar mampu menyuarakan aspirasi mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dengan kebijakan publik yang berorientasi terhadap masyarakat miskin.

2. Penguatan Komoditas Unggulan Agro-Maritim dan Hilirisasi

Berdasarkan pada potensi dan agro-klimat Bengkulu, maka komoditas unggulan di Provinsi dapat digolongkan ke dalam empat kelompok besar, yakni: (1) Komoditas pertambangan dan energi; (2) Komoditas unggulan agro-maritim; dan (3) Komoditas unggulan wisata. Strategi penguatan komoditas unggulan dapat dilakukan melalui program-program berikut ini:

- A. Inventarisasi produk-produk unggulan, baik yang potensial maupun actual
- B. Intensifikasi produk
- C. Ekstensifikasi produk



- D. Diversifikasi produk
- E. Pengaturan distribusi dan perluasan pasar
- F. Penguatan kelembagaan dan Iptek
- G. Akses keuangan dan permodalan
- H. Penciptaan nilai tambah produk (hilirisasi)

3. Pengembangan Infrastruktur Strategis dan Industrialisasi

Beberapa program prioritas dalam pengembangan infrastruktur strategis dan industrialisasi di Provinsi Bengkulu antara lain:

1. Pembangunan Jalan Tol Bengkulu – Curup – Lubuk Linggau

Pembangunan Proyek Strategis Nasional Jalan Tol yang menghubungkan Provinsi Bengkulu ke Provinsi Sumatera Selatan sepanjang 95 Km yang akan terkoneksi dengan jalan tol trans Sumatera. Rencana Pembangunan jalan Tol ini melewati beberapa kabupaten/kota yaitu Kota Bengkulu – Bengkulu Tengah – Kepahiang – Rejang Lebong. Trase jalan tol tersebut saat ini sudah ditetapkan. Rencana kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya yaitu penyusunan dokumen Feasibility Study, Basic Design, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT). Kabupaten/Kota yang menjadi lintasan trase Jalan Tol tersebut telah memberikan komitmen dukungan melalui fasilitasi kebijakan dan kegiatan terkait pemmbangunan Jalan Tol.

2. Peningkatan Infrastruktur Jalan

Untuk meningkatkan dan mempertahankan tingkat pelayanan infrastruktur jalan guna mendukung tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan maka arah kebijakan pengembangan infrastruktur jalan adalah sebagai berikut :

- 2.1. Perbaikan perkerasan pada ruas jalan-ruas jalan yang rusak di seluruh jalan kewenangan Provinsi diseluruh kabupaten/kota.
- 2.2. Pengembangan jaringan jalan Trans Enggano yaitu ruas jalan Ka’ana-Kahyapu, Kahyapu - Tg. Keramai, Malakoni - Ka’ana, Malakoni -Banjarsari.
- 2.3. Peningkatan fungsi jalan nasional Batas Sumbar-Batas Lampung
- 2.4. Pembanguan ruas jalan Lingkar Luar Bengkulu (Bengkulu Outer Ring Road) di Kota Bengkulu.

Perkembangan Bengkulu menjadi sebagai pusat pertumbuhan bagi daerah hinterlandnya sudah menjadi wacana nyata saat ini. Dalam perkembangan dan



pertumbuhannya banyak dampak ikutan yang muncul. Salah satu permasalahan yang seringkali muncul dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu kota adalah permasalahan transportasi. Sarana pergerakan menjadi tidak nyaman karena tertunda pergerakannya. Tundaan ini disebabkan karena prasarana yang semakin tidak memadai dibandingkan kebutuhan yang diminta. Jika tidak dirancang mulai sekarang, Bengkulu dalam perkembangan 20 tahun ke depan akan banyak mengalami berbagai dampak tundaan pergerakan lalu lintas di dalamnya. Untuk mengatasi berbagai dampak yang muncul itu, pengembangan jaringan jalan menjadi pilihan penting. Pilihan alternatif solusi pengembangan jaringan jalan ini harus secara selektif pemilihan lokasinya. Salah satu pilihan strategis saat ini adalah Jalan Lingkar Luar (outer ring road) Bengkulu.

Jalan lingkar luar (Bengkulu Outer Ring Road) akan menghubungkan Air Sebakul hingga Simpang Nakau Kota Bengkulu. Pembangunan jalan ini, kini dalam proses pengerjaan dan ditargetkan bisa diselesaikan dalam tahun mendatang sehingga bisa segera dimanfaatkan. Jalur sepanjang 5,8 kilometer itu akan tersambung jembatan elevated sepanjang 600 meter.

3. Peningkatan Konektivitas melalui pembukaan ruas jalan baru

Provinsi Bengkulu saat ini hanya memiliki 5 (lima) jalur konektivitas jalan menuju provinsi tetangga. Arah kebijakan peningkatan konektivitas melalui pembukaan ruas jalan baru adalah sebagai berikut:

- 3.1. Peningkatan kualitas jalan dan pembukaan ruas jalan baru dari dan menuju Provinsi Bengkulu, dengan rincian sebagai berikut:
 - 3.1.1. Kabupaten Bengkulu Selatan : Peningkatan kualitas ruas jalan nasional eksisting yaitu ruas jalan Manna – Tanjung Sakti – Pagar Alam (Sumsel)
 - 3.1.2. Kabupaten Kaur : Pembangunan dan Peningkatan Akses Jalan eksisting yaitu ruas jalan Tanjung Iman – Muara Sahung – Air Tembok – Muara Dua (Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan)
 - 3.1.3. Kabupaten Lebong : Pembukaan ruas jalan baru Sungai Lisai – Jangkat – Merangin (Jambi).
 - 3.1.4. Kabupaten Seluma : Pembukaan ruas jalan baru Suka Raja – Padang Capo (Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu) – Air Kelinsar (Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan) sepanjang 49 Km.



- 3.1.5. Kabupaten Mukomuko : Pembukaan ruas jalan baru Penarik – Sungai Ipuh (Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu) – Lempur (Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi).

4. Pembangunan Infrastruktur Kereta Api

Arah kebijakan pengembangan jalur Kereta Api di Provinsi Bengkulu didasarkan pada strategi pengembangan jaringan transportasi kapasitas tinggi, khususnya untuk angkutan barang atau produk komoditas unggulan berskala besar. Pengembangan jaringan jalur Kereta Api di Provinsi Bengkulu dibangun secara terpadu dengan jaringan transportasi lainnya guna menunjang kegiatan ekonomi berdaya saing, membuka keterisolasian wilayah, dan meningkatkan keterkaitan antarwilayah.

Jalur pembangunan jaringan jalur kereta api Pulau Baai / Kota Bengkulu – Kuti Agung - Air Kemuning - Talang Empat –Taba Penanjung 2 – Taba Penanjung 1 – Kepahiang – Tebat Karai – Batu Bandung – Air Punggur -Kepala Curup – Sindang Beliti Ulu - Kotapadang.

5. Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan

Provinsi Bengkulu sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di Pulau Sumatera memiliki potensi sebagai gerbang baru Pulau Sumatera dan alternatif jalur pelayaran setelah Selat Malaka. Provinsi Bengkulu saat ini memiliki Pelabuhan terbesar yaitu Pelabuhan Pulau Baai di Kota Bengkulu yang dikelola oleh PT. Pelindo II. Arah Kebijakan pengembangan infrastruktur pelabuhan di Provinsi Bengkulu dilakukan sebagai berikut:

5.A.1. Untuk Pelabuhan Pulau Baai di Kota Bengkulu adalah:

5.A.1.1. Pengembangan Pelabuhan Pulau Baai sebagai pelabuhan utama.

5.A.1.2. Mewujudkan Pelabuhan Pulau Baai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus

5.A.1.3. Peningkatan dermaga Pulau Baai untuk melayani kapal berbobot besar dengan muatan container

5.A.1.4. Pembangunan lapangan penumpukan peti kemas

5.A.1.5. Pembangunan lapangan karantina hewan ternak nasional.

5.A.1.6. Perpanjangan break water pelabuhan Pulau Baai.

5.A.2. Untuk di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara, pengembangan infrastruktur pelabuhan dilakukan dengan pengembangan pelabuhan Kahyapu dan Malakoni untuk angkutan khusus wisatawan. Pelabuhan Malakoni diarahkan menjadi



Pelabuhan Pengumpan Lokal. Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara adalah merupakan kawasan Destinasi Pariwisata Nasional, sehingga infrastruktur pelabuhan dikembangkan untuk lalu lintas wisatawan.

- 5.A.3. Pengembangan Pelabuhan Linau, di Kabupaten Kaur, yang merupakan peningkatan dari kegiatan pelabuhan yang ada untuk mendukung peluang integrasi antara pelabuhan laut dengan pelabuhan penyeberangan dan jaringan jalur kereta api. Pelabuhan Linau sudah ditetapkan menjadi Pelabuhan Pengumpul.
- 5.A.4. Pengembangan dan peningkatan pelabuhan Mukomuko & Bantal, di Kabupaten Mukomuko, yang merupakan peningkatan dari kegiatan pelabuhan yang ada/pernah ada. Pelabuhan ini diarahkan menjadi Pelabuhan Pengumpan Lokal.

6. Pengembangan Infrastruktur Bandara Udara

Arah kebijakan pengembangan infrastruktur Bandara Udara adalah sebagai berikut:

A. Pengembangan Bandara Udara Fatmawati di Kota Bengkulu

Bandara udara Fatmawati saat ini masih berstatus BLU di bawah Kementerian Perhubungan RI. Pada awal Tahun 2018 lalu, telah dilakukan MoU pengelolaan Bandara Fatmawati dari BLU Kementerian Perhubungan RI kepada PT. Angkasa Pura II. Pengalihan pengelolaan tersebut untuk mewujudkan Bandara Fatmawati menjadi Bandara Udara Internasional. Arah kebijakan pengembangan Bandara Fatmawati di Kota Bengkulu dilakukan sebagai berikut:

- 6.A.1.1. Perpanjangan landas pacu dari 2250 meter menjadi 2800-3000
- 6.A.1.2. Peningkatan kapasitas dan fasilitas terminal bandara
- 6.A.1.3. Pengembangan Rute Penerbangan ke luar propinsi dan ke luar negeri untuk mendukung kegiatan pariwisata.
- 6.A.1.4. Peningkatan fasilitas barang/car.
- 6.A.1.5. Menjadikan Bandara Udara Fatmawati sebagai Embarkasi Antara untuk penyelenggaraan ibadah Haji
- 6.A.1.6. Pengembangan terminal penumpang dan barang serta perpanjangan landasan pacu Bandara Fatmawati Soekarno sebagai bandara pengumpul skala pelayanan sekunder nasional dan internasional.

- B. Peningkatan Bandar Udara Mukomuko, di Kabupaten Mukomuko dari lapangan terbang yang ada sekarang, dengan kapasitas pelayanan untuk pesawat kecil.



C. Pengembangan Bandar Udara perintis di Enggano Kabupaten Bengkulu Utara, yang akan mendukung perkembangan perekonomian Pulau Enggano dan untuk mendukung kegiatan pariwisata.

7. Peningkatan Ketersediaan Energi

Arah Kebijakan untuk meningkatkan ketersediaan energi adalah sebagai berikut :

- 7.A.1.1. Pembangunan instalasi baru pembangkit listrik.
- 7.A.1.2. Peningkatan pasokan daya listrik yang bersumber dari energi alternative untuk memenuhi kebutuhan listrik perdesaan, diantaranya mikrohidro, angin, dan surya di perdesaan.
- 7.A.1.3. Pengoperasian instalasi penyaluran.
- 7.A.1.4. Pengembangan energi biodiesel dari tanaman jarak dan kelapa sawit untuk kebutuhan masyarakat.
- 7.A.1.5. Pengembangan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Air meliputi PLTA Tes dan PLTA Musi.
- 7.A.1.6. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pulau Baai yang didukung oleh cadangan batubara yang memadai, serta pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) atau Geothermal di Hulu Lais, PLTG Alam dan PLTD disesuaikan dengan ketersediaan potensi sumber.
- 7.A.1.7. Pengembangan Pembangkit Listrik Mikrohidro (PLTMH) di daerah perdesaan, yang didukung dengan adanya sekitar 130 sungai di provinsi Bengkulu, yang sangat mendukung untuk pengembangan
- 7.A.1.8. Eksplorasi dan eksploitasi batu bara di Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah dan Seluma.

4. Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT

Beberapa program prioritas dalam peningkatan Transformasi Birokrasi & Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT diantaranya :

- A. Peningkatan Kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Perizinan;
- B. Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Kualifikasi Kompetensi;
- C. Penerapan *E-Government*;
- D. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
- E. Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)



5. Visit 2020 Wonderful Bengkulu

Berdasarkan pada kriteria atau unsur yang harus dipenuhi apabila kita ingin mengembangkan kepariwisataan, maka pembangunan kepariwisataan di Bengkulu dapat dilakukan melalui program-program sebagai berikut:

- A. Penataan ruang pariwisata : wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, wisata religi, wisata kuliner dan wisata buatan;
- B. Pengembangan destinasi wisata : daya tarik (even dan produk), aksesibilitas, sarana dan prasarana dan pengembangan masyarakat sadar wisata;
- C. Penguatan kelembagaan pariwisata : organisasi, sumberdaya manusia terampil serta penelitian dan pengembangan;
- D. Pengembangan pemasaran wisata : pasar, citra, kemitraan dan promosi;
- E. Industri pariwisata : produk, teknologi, jaringan dan even.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan 8 (delapan) misi dan program prioritas RPJMD tersebut maka disusunlah tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama daerah yang mencerminkan pencapaian program selama kurun waktu 2016-2021 seperti digambarkan dalam tabel 5.2 berikut ini :

TABEL 5.2 TUJUAN,SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET				
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dalam rangka pencapaian pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Pelayanan Publik Provinsi Bengkulu	75%	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Provinsi Bengkulu pada perizinan pelayanan terpadu	79	80	81	82	83	84	85
			Meningkatnya kinerja Pengawasan internal	Persentase kasus dan temuan yang diselesaikan (%)	70	75	80	80	85	85	90
			Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan	Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi	B	B	B	B	B	BB	BB
				Opini atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi	C	C	CC	CC	B	BB	BB
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial dan layanan dasar	Meningkatnya layanan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial	Angka Kemiskinan (%)	17,16	17,03	16,45	15,43	14,91	15,5	15,02
			Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan serta meningkatnya minat baca di semua lapisan masyarakat	Angka partisipasi murni (APM) PAUD (%)	57,81	64,8	71,8	78,8	85,8	92,8	100
				Angka partisipasi murni (APM) SD (%)	98,03	98,33	98,73	99,03	99,39	99,69	100
				Angka partisipasi murni (APM) SLTP (%)	76,44	80,14	83,84	87,54	91,24	95	100
				Angka partisipasi murni (APM) SLTA (%)	64,61	69,61	74,61	79,61	84,61	90	95
				Angka buta aksara (%)	2,20	1,76	1,32	0,88	0,44	0,22	0
			Meningkatnya standar layanan pendidikan dan relevansi pendidikan terhadap pengembangan potensi daerah	Persentase SD yang ter-akreditasi (%)	86	88	91	94	96	98	100
				Persentase SLTP yang ter-akreditasi (%)	83	86	89	92	95	98	100
				Persentase SLTA yang ter-akreditasi (%)	90,6	92	99	100	100	100	100
				Persentase Kompetensi Kejurusan SMK yang ter-akreditasi (%)	91	92,5	94	96	98	99	100
			Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	68,50	69,20	69,47	69,82	70,23	69,5	70
				AKB/1.000 (Jiwa)	10,14	10,14	10	9	9	8	8
				AKI/100.000 (Jiwa)	162	117,15	116	115	114	113	112
				Persentase gizi buruk/gizi kurang (%)	8,7	8,7	8,5	8,3	7,9	7,5	7
			Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pengendalian penduduk, KB dan kesehatan reproduksi remaja	Pertumbuhan penduduk (%)	1,65	1,69	1,55	1,50	1,45	1,41	1,36
				Persentase Akseptor KB (%)	67,83	68	69	70	71	72	73

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET				
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Meningkatnya Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis kewilayahan dan keunggulan lokal	Pendapatan perkapita (Rp)	26.849.718	29.609.869	33.399.932	37.675.123	42.497.539	47.937.224	54.073.189
				Jumlah kawasan kampung nelayan terpadu yang dikembangkan (kawasan)	0	0	7	7	7	7	7
			Meningkatnya kapasitas UMKM dan Koperasi serta berkembangnya sarana Perdagangan rakyat	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	0	0	15%	15%	15%	15%	15%
				Persentase Pertumbuhan Unit industri kecil	6,56%	14,27%	14,80%	14,90%	15,00%	15,20%	15,50%
				Nilai Investasi Sektor Industri (Rp)	162,6 Milyar	169,3 Milyar	169,3 Milyar	176,5 Milyar	185 Milyar	195 Milyar	206 Milyar
			Meningkatnya kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja	Angka Pengangguran (%)	4,91	3,30	3,25	3,51	3,21	4,00	3,80
Meningkatnya Perekonomian Perdesaan	Jumlah BUMDES yang difasilitasi dalam pembentukan dan pengembangannya (unit)	116	116	60	60	60	60	60			
3	Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis dalam rangka peningkatan produktivitas ekonomi dan layanan dasar	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar	Rasio Elektrifikasi (%)	85,55	89,8	89,8	91,1	94,5	97,5	100
				Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi baik (%)	58	60	61,73	62,31	62,5	63,9	64
				Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik/sedang (%)	42	46	50	58,58	66	68	70
				Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak (%)	48,83	49,37	50,57	60,18	64,00	65	66,00
				Persentase rumah tangga terlayani sanitasi layak (%)	34,92	41,6	36,9	38,36	40	45	50
				Persentase rumah tangga terlayani pengelolaan persampahan (%)	42	42	63	75	87	100	100
			Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur strategis dan berdaya saing	Jumlah Volume Bongkar/muat (ton)	NA	2.582.269	2.632.269	2.682.270	2.732.269	2.782.269	2.832.269
				Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan (%)	0	0	20	20	20	20	20
				Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Bandar Udara (%)	0	0	20	20	20	20	20

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
4	Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan berbasis keunggulan lokal	Terjaminnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan	Meningkatnya investasi	Nilai Investasi (Rp trilyun)	1,4	1,9	2,4	2,7	3	3,3	3,6	
			Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam bagi pembangunan	Nilai Tukar Petani - NTP	93,9	97,80	101	102	103	104	105	
				Produksi Tanaman Pangan dan hortikultura								
				a. padi (ton)	593.194	668.140	668.140	695.000	701.972	708.991	716.081	
				b. Jagung (ton)	72.756	95.707	95.707	99.000	104.381	109.363	112.152	
				c. Kedelai (ton)	5.715	5.949	5.949	6.000	6.069	6.129	6.191	
				Jumlah Ketersediaan Pangan (Kkal/Kap/Hr)	3608	3650	3700	3800	3900	4000	4000	
				Produksi Perkebunan unggulan (ton)								
				a. Kelapa Sawit	469238	509639	553519	601177	652938	709156	770285	
				b. Karet	93552	96433	99403	102465	105621	108874	112140	
				c. Kopi	56374	63618	71793	81019	91429	103178	116436	
				Produksi daging ternak (ton)								
				a. Sapi Potong	3006	3794	3343	3717	4134	4597	5112	
				b. Kambing / Domba	295	589	313	331	351	373	395	
				c. Unggas	2713	2077	2826	2925	3094	3255	3437	
				Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	64059	64110	66033	68344	70804	73494	75618	
				Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	74857,85	87939	97101	106957	119580	127580	131538	
				Berkembangnya sektor pariwisata	Rata-rata lama tinggal (hari)	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3
					Persentase tingkat hunian hotel	33	43	53	63	73	83	90
					Jumlah Wisatawan Mancanegara (Orang)	952	1952	2955	3972	4995	6015	7243
		Jumlah Wisatawan Nusantara (orang)	357863	361578	375475	394265	420025	435605	451766			
	Menurunnya pencemaran lingkungan	Indeks kualitas Air	54	54	54	54	54	55	56			
		Indeks kualitas Udara	85	85	85	85	85	86	87			
	Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persentase desa tangguh bencana di daerah zona merah (%)	12,5	30	30 - 45	45-60	60-75	75-90	90-100			
	Menurunnya luas lahan kritis	Persentase luas tutupan lahan di luar kawasan meningkat (%)	3,06	3,11	3,16	3,21	3,26	3,31	3,36			
5	Menwujudkan pembangunan yang integratif dan berdaya saing	Terwujudnya Bengkulu sebagai daerah maritim yang berdaya saing	Meningkatnya pembangunan industri maritim dan transportasi laut yang integratif dan berdaya saing	Jumlah kawasan wisata bahari yang dikembangkan	0	0	1	1	1	1	0	
				Persentase Peningkatan Pelabuhan Pengumpulan di Provinsi Bengkulu (%)	0	0	0	0	0	50	50	
6	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan dasar bagi perempuan dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan	Indeks pembangunan gender (IPG)	91,02	91,52	92,02	92,52	93,02	93,52	94,02	
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,76	69,26	69,26	69,76	69,80	69,90	69,95	
			Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan (%)	30%	30%-50%	10% - 20%	20%-30%	30%-40%	40%-50%	50%-60%	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET				
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Meningkatnya kompetensi pemuda dan prestasi keolahragaan	Meningkatnya kapasitas pemuda sebagai agen pembangunan dan perubahan yang bertanggung jawab, berjiwa wirausaha dan mandiri	Meningkatnya kapasitas pemuda sebagai agen pembangunan dan perubahan yang bertanggung jawab, berjiwa wirausaha dan mandiri	Jumlah Pemuda kader, pemuda pelopor dan pemuda wirausaha, Pramuka tingkat Provinsi (orang)	20190	4190	4190	4190	4190	4190	4190
				Meningkatnya daya saing dan prestasi olahraga	Meningkatnya daya saing dan prestasi olahraga	Peringkat Prestasi Olahraga Berskala Nasional					
		a. PON		32	34	-	-	-	25-20	25-20	
		b. POPNAS		32	-	32 - 20	-	20 - 10	-	20-10	
		c. POPCANAS		28	-	28 - 20	-	20 - 10	-	20-10	
		d. POSPENAS		28	28 - 20	-	-	20 - 10	-	20-10	
		e. PORWIL		10	-	-	-	6-5	-	6-5	
8	Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis, berbudaya, dan demokratis	Meningkatnya kualitas keagamaan, kebudayaan, dan demokrasi masyarakat Bengkulu	Meningkatnya kondisi dimana prinsip-prinsip keagamaan, Budaya dan Demokratis terintegrasi dengan baik dalam kegiatan pemerintahan dan masyarakat	Rasio Stabilitas Kesatuan Bangsa	0,57	0,58	0,6	0,63	0,65	0,7	0,73
				Indeks Demokrasi Indonesia Prov. Bengkulu	73,6	74	72,73	70,71	71	71,5	72

TABEL 5.3 KESELARASAN SASARAN PEMBANGUNAN RPJMD DAN RPJMN

NO	MISI RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	SASARAN RPJMN	INDIKATOR SASARAN RPJMN
1	Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Pelayanan Publik Provinsi Bengkulu	Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik	Instansi Pemerintah (IP) dengan tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik (IP)
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Provinsi Bengkulu pada perizinan pelayanan terpadu		Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sakip \geq B
		Meningkatnya kinerja Pengawasan internal	Persentase kasus dan temuan yang diselesaikan (%)		Persentase Instansi Pemerintah yang mendapatkan Opini WTP
		Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan	Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi		Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit Kategori \geq Baik
			Opini atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi		Persentase kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah
Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik				
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan	Meningkatnya layanan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial	Angka Kemiskinan (%)	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	Persentase penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial
			Cakupan penerima bantuan sosial non-tunai dan subsidi tepat sasaran		
	Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan serta meningkatnya minat baca di semua lapisan masyarakat	Angka partisipasi murni (APM) SLTP (%)	Terpenuhinya layanan dasar	Angka Harapan Lama Sekolah	
		Angka partisipasi murni (APM) SLTA (%)		Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	
Angka buta aksara (%)					
		Meningkatnya standar layanan	Persentase SLTA yang ter-akreditasi (%)		

NO	MISI RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	SASARAN RPJMN	INDIKATOR SASARAN RPJMN
		pendidikan dan relevansi pendidikan terhadap pengembangan potensi daerah	Persentase Kompetensi Kejurusan SMK yang ter-akreditasi (%)		
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)		Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
			AKB/1.000 (Jiwa)		Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)
			AKI/100.000 (Jiwa)		
			Persentase gizi buruk/gizi kurang (%)		
		Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pengendalian penduduk, KB dan kesehatan reproduksi remaja	Pertumbuhan penduduk (%)		
			Persentase Akseptor KB (%)		
		Meningkatnya Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis kewilayahan dan keunggulan lokal	Pendapatan perkapita (Rp)	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	Kontribusi PDB kemaritiman
			Jumlah kawasan kampung nelayan terpadu yang dikembangkan (kawasan)		
		Meningkatnya kapasitas UMKM dan Koperasi serta berkembangnya sarana Perdagangan rakyat	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	Kontribusi UMKM terhadap PDB
			Persentase Pertumbuhan Unit industri kecil		
			Nilai Investasi Sektor Industri (Rp)		

NO	MISI RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	SASARAN RPJMN	INDIKATOR SASARAN RPJMN
		Meningkatnya kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja	Angka Pengangguran (%)	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	Angka pengangguran
		Meningkatnya Perekonomian Perdesaan	Jumlah BUMDES yang difasilitasi dalam pembentukan dan pengembangannya (unit)		
3	Meningkatkan dan Memantapkan Kapasitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar	Rasio Elektrifikasi (%)	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman
			Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi baik (%)		Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman
			Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik/sedang (%)		Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau
		Persentase rumah tangga berakses air bersih (%)	Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien	Rasio Elektrifikasi	
		Persentase rumah tangga terlayani pengelolaan air limbah bersanitasi (%)	Meningkatnya konektivitas wilayah	Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/ atau beroperasi	
		Persentase rumah tangga terlayani pengelolaan persampahan (%)		Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif)	
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur strategis dan berdaya	Jumlah Volume Bongkar/muat (ton)	Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar	

NO	MISI RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	SASARAN RPJMN	INDIKATOR SASARAN RPJMN
			Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan (%)		Persentase kondisi mantap jalan nasional/ provinsi/kabupaten-kota
			Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Bandar Udara (%)	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi	Pembangunan jaringan irigasi baru
					Peningkatan persentase irigasi premium
4	Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan sumber	Meningkatnya investasi	Nilai Investasi (Rp trilyun)	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	Kontribusi UMKM terhadap PDB
					Nilai realisasi PMA dan PMDN
		Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam bagi pembangunan	Nilai Tukar Petani - NTP		Pertumbuhan PDB pertanian
			Produksi Tanaman Pangan dan hortikultura		Kontribusi PDB industri pengolahan
			a. padi (ton)		Pertumbuhan perdagangan besar dan eceran
			b. Jagung (ton)		Laju inflasi
			c. Kedelai (ton)		
			Jumlah Ketersediaan Pangan (Kkal/Kap/Hr)		
			Produksi Perkebunan unggulan (ton)		
			a. Kelapa Sawit		
			b. Karet		
			c. Kopi		
			Produksi daging ternak (ton)		
			a. Sapi Potong		
			b. Kambing / Domba		
			c. Unggas		
			Produksi Perikanan Tangkap (Ton)		
	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)				

NO	MISI RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	SASARAN RPJMN	INDIKATOR SASARAN RPJMN
		Berkembangnya sektor pariwisata	Rata-rata lama tinggal (hari)	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	Kontribusi PDB pariwisata
			Persentase tingkat hunian hotel		
		Re-orientasi kebijakan yang integratif kepariwisataan di Bengkulu	Jumlah Wisatawan Mancanegara (Orang)		
			Jumlah Wisatawan Nusantara (orang)		
		Menurunnya pencemaran lingkungan	Indeks kualitas Air	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup
			Indeks kualitas Udara		
		Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persentase desa tangguh bencana di daerah zona merah (%)		
		Menurunnya luas lahan kritis	Persentase luas tutupan lahan di luar kawasan meningkat (%)		
5	Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing	Meningkatnya pembangunan industri maritim dan transportasi laut yang integratif dan berdaya saing	Jumlah kawasan wisata bahari yang dikembangkan	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	Kontribusi PDB kemaritiman
			Persentase Peningkatan Pelabuhan Pengumpan di Provinsi Bengkulu (%)		
6	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan dasar bagi perempuan dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan	Indeks pembangunan gender (IPG)	Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir

NO	MISI RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	SASARAN RPJMN	INDIKATOR SASARAN RPJMN
		Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan (%)		Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya
7	Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Meningkatnya kapasitas pemuda sebagai agen pembangunan dan perubahan yang bertanggung jawab, berjiwa wirausaha dan mandiri	Jumlah Pemuda kader, pemuda pelopor dan pemuda wirausaha, Pramuka tingkat Provinsi (orang)	Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda
		Meningkatnya daya saing dan prestasi olahraga	Peringkat Prestasi Olahraga Berskala Nasional a. PON b. POPNAS c. POPCANAS d. POSPENAS e. PORWIL	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing	Peringkat Asian Games
8	Mewujudkan Masyarakat Bengkulu yang Agamis, Berbudaya, berkesadaran wisata dan Demokratis	Meningkatnya kondisi dimana prinsip-prinsip keagamaan, Budaya dan Demokratis terintegrasi dengan baik dalam kegiatan pemerintahan dan masyarakat	Rasio Stabilitas Kesatuan Bangsa Indeks Demokrasi Indonesia Prov. Bengkulu	Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik	Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional Indeks Demokrasi Indonesia



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan komponen yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah, sebagai dasar perumusan program menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Rumusan strategi merupakan uraian pernyataan yang menjelaskan bagaimana misi, tujuan dan sasaran akan diwujudkan. Strategi akan dilengkapi dengan arah kebijakan, yang menunjukkan fokus atau prioritas perhatian yang ditetapkan untuk mendukung terjaganya proses pembangunan agar menuju pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

TABEL 6.1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi : Terwujudnya Bengkulu Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat, dan Berdaya Saing Tinggi “			
Misi I: Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan dan memperluas pelayanan publik	Meningkatkan standar kualitas pelayanan publik
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi aparatur	1. Penempatan dan distribusi ASN sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kebutuhan 2. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur berbasis kompetensi .
		Meningkatkan kinerja pengawasan Pemerintahan Daerah	Penguatan sistem pengendalian internal
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan serta penerapan e-government	1. Optimalisasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja 2. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah 3. Optimalisasi pelaksanaan



			reformasi birokrasi 4. Penerapan <i>e- government</i> dalam pengelolaan pemerintahan
Misi II : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas SDM dan Pemerataan Ekonomi	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	1. Pencegahan, Pengurangan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2. Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja serta pengembangan sarana prasarana pelatihan kerja	Meningkatkan kualitas pelayanan sosial masyarakat dan penyandang kesejahteraan sosial. 1. Meningkatkan kesempatan dan Kompetensi Tenaga Kerja melalui pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pasar kerja. 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja
	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Meningkatkan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang adil, merata dan berkualitas	Pembangunan dan perbaikan sarana & prasarana pendidikan dan peningkatan pusat - pusat Pembelajaran dan Pelatihan serta meningkatkan minat baca masyarakat
		Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan standar pendidikan	1. Peningkatan Mutu pendidikan dan Kompetensi Tenaga Pendidik 2. Meningkatkan standar akreditasi pendidikan
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak 2. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular



		Meningkatkan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kebutuhan sumberdaya di setiap fasilitas pelayanan kesehatan jaringannya 2. Meningkatkan akses dan pemerataan layanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK)
		Menurunkan angka kelahiran penduduk dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan intensitas layanan kesehatan reproduksi bagi remaja guna mencegah kelahiran di usia remaja
Misi III : Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar	Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur dasar di seluruh wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan 2. Peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi dan air bersih. 3. Pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Strategis	Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan dan jembatan 2. Peningkatan kapasitas Pelabuhan 3. Peningkatan kapasitas Bandar udara 4. Peningkatan akses lintas Provinsi 5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Keselamatan transportasi darat 6. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian



Misi IV: Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan berbasis keunggulan lokal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terjaminnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan	Meningkatnya investasi	Optimalisasi pengelolaan investasi	Meningkatkan promosi investasi dan memperbanyak sumber dan jenis investasi
	Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam bagi pembangunan	Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian dan perkebunan 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluh 3. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil peternakan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi peternakan 4. Meningkatkan nilai tambah produk peternakan 5. Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan tangkap 6. Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya
			<ol style="list-style-type: none"> 7. Meningkatkan eksplorasi sumber daya alam 8. Mengurangi dampak negatif pemanfaatan mineral, batu bara dan batuan terhadap lingkungan 9. Optimalisasi pengelolaan sumber daya hutan untuk menciptakan nilai tambah berbasis masyarakat
		Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM serta mengembangkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas teknis, permodalan dan peralatan KUKM dan IKM



		sarana perekonomian rakyat	2. Mengembangkan sarana perekonomian rakyat
	Berkembangnya sektor pariwisata	Mengembangkan destinasi wisata unggulan dan meningkatkan promosi wisata	Peningkatan pengembangan pemasaran seni budaya dan pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan
		Pengembangan objek wisata dan produk unggulan daerah yang terintegrasi	Peningkatan kualitas objek wisata unggulan dan seni budaya daerah
	Menurunnya pencemaran lingkungan	Menurunkan beban pencemaran lingkungan	Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan air dan udara dengan meningkatkan daya dukung penahanan laju kerusakan lingkungan
	Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan, pengendalian dan Pemulihan akibat bencana	Meningkatkan peran serta dunia Usaha, Swasta dan Masyarakat dalam Pra, saat dan Pasca Bencana
	Menurunnya luas lahan kritis	Mempertahankan fungsi hutan	Pemulihan lahan sangat kritis dan kritis

Misi V: Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Bengkulu sebagai daerah maritim yang berdaya saing	Meningkatnya pembangunan industri maritim dan transportasi laut yang integratif dan berdaya saing	Optimalisasi pendayagunaan dan pengendalian kemaritiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sarana sumber daya kemaritiman 2. Pembangunan dan peningkatan fungsi pelabuhan 3. Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan tangkap



Misi VI: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan dasar bagi perempuan dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan peran dan akses perempuan dalam pembangunan	Peningkatan Pengarusutaman Gender dalam pembangunan
	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Meningkatkan layanan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan
Misi VII: Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kompetensi pemuda dan prestasi keolahragaan	Meningkatnya kapasitas pemuda sebagai agen pembangunan dan perubahan yang bertanggung jawab, berjiwa wirausaha dan mandiri;	Meningkatkan peran, potensi, prestasi pemuda dan olahraga	Peningkatan peran, kompetensi pemuda melalui pola pengkaderan secara terencana sistematis dan berkelanjutan
	Meningkatnya daya saing dan prestasi olahraga	Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kompetensi dan prestasi di bidang olah raga melalui pola pengkaderan secara terencana sistematis dan berkelanjutan. 2. Pembangunan Kawasan olahraga terpadu berstandar Internasional. 3. Peningkatan profesionalisme dan etika pembina, penyelenggara, pengelola



			dan pelaksana kegiatan keolahragaan
Misi VIII: Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis, berbudaya, berkesadaran wisata dan demokratis			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas keagamaan, kebudayaan, dan demokrasi masyarakat Bengkulu	Meningkatnya kondisi dimana prinsip-prinsip keagamaan, Budaya dan Demokratis terintegrasikan dengan baik dalam kegiatan pemerintahan dan masyarakat	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, budaya dan demokrasi dalam masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan kondisi yang kondusif dalam kehidupan di masyarakat 2. Meningkatkan penerapan Demokrasi dalam kehidupan bernegara

TABEL 6.2. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

NO	MISI	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR	PROGRAM	SUMBER DANA	OPD PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM PRIORITAS				
			ARAH KEBIJAKAN		2015	2016	2017	2018	2019									
1	Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Strategi: Meningkatkan dan memperluas pelayanan publik															
			Arah Kebijakan: Meningkatkan standar kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Provinsi Bengkulu pada perizinan pelayanan terpadu	79	80	81	82	83	83	Program Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat	APBD PROV	DPMPTSP	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis IT				
				Nilai Pelayanan Publik Provinsi Bengkulu	75%	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Program ketatalaksanaan dan pelayanan publik	APBD PROV	Biro Organisasi	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis IT				
				Jumlah jenis perizinan/nonperizinan yang dilayani (jenis)	95	96	97	217	220	220	Program Peningkatan Pelayanan Publik	APBD PROV	DPMPTSP	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis IT				
	Meningkatnya profesionalisme Aparatur	Meningkatnya profesionalisme Aparatur	Arah kebijakan : Penempatan dan distribusi ASN sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kebutuhan	Persentase penempatan pejabat ASN pemerintah provinsi berdasarkan kualifikasi pendidikan (%)								Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	APBD PROV	BKD	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis IT			
				Eselon II	74	80	85	90	95	95								
				Eselon III	88	88	95	100	100	100								
				Eselon IV	88	88	95	100	100	100								
			Persentase SKPD provinsi yang memiliki jumlah ASN sesuai dengan kebutuhan (%)	8	25	50	75	100	100	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	APBD PROV	BKD	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis IT					
			Arah Kebijakan : Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur berbasis kompetensi	Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur berbasis kompetensi	Persentase pejabat struktural Pemprov yang telah mengikuti diklat kepemimpinan (%)									Program pembinaan dan pengembangan aparatur	APBD PROV	BKD	BPSDM	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis IT
					- Eselon II	58	58	58	65	70	70							
					- Eselon III	33	33	52	71	90	90							
					- Eselon IV	26	26	44	62	75	75							
					Jumlah ASN yang mengikuti diklat formal (orang) :							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	APBD PROV/APBN					
- Spesialis Kedokteran					Lama : 1 Baru : 4	Lama : 5 Baru : 2	Lama : 6 Baru : 1	10										
- S2			Lama : - Baru : 2	Lama : 2 Baru : 2	Lama : 4 Baru : 2	10												
- S3			Lama : - Baru : 2	Lama : 2 Baru : 2	Lama : 4 Baru : 2	10												

NO	MISI	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR	PROGRAM	SUMBER DANA	OPD PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM PRIORITAS
			ARAH KEBIJAKAN		2015	2016	2017	2018	2019					
		Meningkatnya kinerja Pengawasan internal	Strategi : Meningkatkan kinerja pengawasan Pemerintahan Daerah Arah kebijakan : Penguatan sistem pengendalian internal	Persentase kasus dan temuan yang diselesaikan (%) Tingkat/Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	70 2 2	75 2 2	80 2 2	80 2 2	85 3 3	85 3 3	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH Program Peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	APBD Prov	Inspektorat	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis IT
		Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan	Arah Kebijakan: Optimalisasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Jumlah SKPD Provinsi yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB (SKPD)	B 4	B 10	B 23	B 31	B 35	B 35	Program pengembangan kinerja dan reformasi birokrasi Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH	APBD Prov APBD Prov	Setda/ Bappeda/ Inspektorat Setda/ Bappeda/ Inspektorat	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis IT Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis IT
			Arah Kebijakan: Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	APBD Prov	BPKD	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis IT
			Arah Kebijakan: Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi	C	C	CC	CC	B	B	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH	APBD Prov	Inspektorat	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis IT
			Arah kebijakan: Penerapan e-government dalam pengelolaan pemerintahan	Jumlah aplikasi elektronik yang dikembangkan (aplikasi) Jumlah OPD yang memanfaatkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	0 0	2 0	8 1	14 4	18 5	18 10	Program Pengembangan Teknologi Informatika Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi, Informatika Penataan Administrasi Kependudukan	APBD PROV APBD PROV	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis IT Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis IT
				Jumlah desa yang belum terkoneksi oleh jaringan TIK (desa)	150	150	130	95	55	280	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	APBD Prov	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1. Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggal; 2. Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis IT
				Jumlah objek wisata yang terkoneksi jaringan TIK (obyek)	0	0	0	3	3	6	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	APBD Prov	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1. Transformasi Birokrasi & Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT; 2. Visit 2020 Wonderful Bengkulu

NO	MISI	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR	PROGRAM	SUMBER DANA	OPD PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM PRIORITAS
			ARAH KEBIJAKAN		2015	2016	2017	2018	2019					
			Strategi : Meningkatkan kerja sama antara Eksekutif dan legislatif											
			Arah Kebijakan : Meningkatkan jumlah Rancangan Perda yang disahkan	Persentase Raperda yang ditetapkan menjadi Perda (%)	50	54	100	100	100	100	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	APBD PROV	Sekretariat DPRD	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis IT
			Strategi : Percepatan Penanganan Penyelesaian Batas Daerah											
			Arah Kebijakan : Peningkatan Penyelesaian Batas Daerah	Persentase Segmen Batas Daerah Yang Diselesaikan (%)	75	100	100	100	100	100	Program Peningkatan Bina Administrasi Kewilayahan	APBD PROV	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SETDA	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis IT
			Strategi : Peningkatan sistem pelayanan arsip OPD											
			Arah Kebijakan : Peningkatan sarana dan Prasarana IT Kearsipan	Persentase OPD yang menyelenggarakan penataan kearsipan berbasis IT (%)	0	0	20	20	50	50	Program Preservasi Arsip	APBD PROV	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis IT
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan	Meningkatnya layanan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial	Strategi : Pencegahan, Pengurangan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)											
			Arah kebijakan: Meningkatkan kualitas pelayanan sosial masyarakat dan penyandang kesejahteraan sosial.	Jumlah Kepala keluarga miskin yang diberdayakan (KK)	2.920	1.210	1.138	2.700	2.928	6.766	1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 2. Program Penanganan Fakir Miskin	APBD Prov/kab/kota dan APBN	Dinas Sosial	Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
				Jumlah penyandang masalah Kesejahteraan sosial yang dibina, direhab dan dilayani (Orang)	9.734	1.817	1.579	1.785	1.785	5.149	1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2. Program Rehabilitasi Sosial			Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
				Jumlah partisipasi masyarakat dalam potensi dan sumber kesejahteraan sosial (Orang)	8.952	1.532	1.192	1.182	1.472	3.846	1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 2. Program Pemberdayaan Sosial			Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
				Jumlah orang yang Menerima Perlindungan dan Bantuan Jaminan Sosial (orang)	11.621	2.018	2.204	2.204	2.204	6.612	1. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan

NO	MISI	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR	PROGRAM	SUMBER DANA	OPD PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM PRIORITAS
			ARAH KEBIJAKAN		2015	2016	2017	2018	2019					
		Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan serta meningkatnya minat baca di semua lapisan masyarakat	Strategi : Meningkatkan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang adil, merata dan berkualitas											
			Arah Kebijakan : Pembangunan dan perbaikan sarana & prasarana pendidikan dan peningkatan pusat - pusat Pembelajaran dan Pelatihan serta meningkatkan minat baca masyarakat	Angka partisipasi murni (APM) PAUD (%)	57,81	64,58	71,8	78,8	85,8	85,8	Program pendidikan anak usia dini	APBD Kab/kota	Dikbud	Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
				Angka partisipasi murni (APM) SD (%)	98,03	98,33	98,73	99,03	99,39	99,39	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	APBD Kab/kota dan APBN	Dikbud	Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
				Jumlah Desa Tertinggal yang belum memiliki SD (Desa)	194	194 - 165	165 - 136	136 - 107	107 - 78	107 - 78	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	APBD Kab/kota dan APBN	Dikbud	Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
										Bantuan keuangan kepada kab/kota	APBD Prov	BPKD	Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan	
				Angka partisipasi murni (APM) SLTP (%)	76,44	80,14	83,84	87,54	91,24	91,24	Program wajar dikdas	APBD Kab/kota dan APBN	Dikbud	Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
				Jumlah SLTP yang dibangun	2	2	0	1	1	6	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	APBD Kab/kota dan APBN	Dikbud	Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
										Bantuan Keuangan kepada kab/kota	APBD Prov	BPKD	Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan	
				Angka partisipasi murni (APM) SMA (%)	64,61	69,61	74,61	79,61	84,61	100	Program pendidikan menengah	APBD Prov dan APBN	Dikbud	Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
				Jumlah Kecamatan yang belum memiliki SMA (Kecamatan)		18	17	14	10	10		APBD Prov dan APBN	Dikbud	Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
				Angka buta aksara (%)	2,20	1,76	1,32	0,88	0,44	0,44	Program pendidikan non formal	APBD Prov	Dikbud	Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
			STRATEGI : Peningkatan kualitas layanan dan kebudayaan gemar membaca											
			ARAH KEBIJAKAN : Peningkatan sarana dan prasarana, promosi gemar membaca	Jumlah pengunjung perpustakaan (orang/bulan)	23.437	24610	23437	24610	26110	26110	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR, Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	APBD Prov	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
			ARAH KEBIJAKAN : Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan sekolah	Prosentase sarana dan prasarana digital Perpustakaan sekolah sesuai standar Nasional (%)	0	0	0	40	70	70	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	APBD Prov	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan

NO	MISI	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR	PROGRAM	SUMBER DANA	OPD PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM PRIORITAS
			ARAH KEBIJAKAN		2015	2016	2017	2018	2019					
		Meningkatnya standar layanan pendidikan dan relevansi pendidikan terhadap pengembangan potensi daerah	Strategi : Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan standar pendidikan											
		Meningkatnya standar layanan pendidikan dan relevansi pendidikan terhadap pengembangan potensi daerah	Arah Kebijakan : Peningkatan Mutu pendidikan dan Kompetensi Tenaga Pendidik	Persentase Guru SLTA yang berpendidikan Minimal S1 (%)	96,8	96,8	97,6	98,4	99,2	99,2	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	APBD Prov	Dikbud	Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
				Persentase Guru SLTA bersertifikasi (%)	38,7	50,96	63,22	75,48	87,74	87,74	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	APBD Prov	Dikbud	Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
			Arah Kebijakan : Meningkatkan standar akreditasi pendidikan	Persentase SD yang terakreditasi (%)	86	88	91	94	96	96	Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APBD kab/kota	Dikbud	Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
				Persentase SLTP yang terakreditasi (%)	83	86	89	92	95	95	Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APBD kab/kota	Dikbud	Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
				Persentase SLTA yang terakreditasi (%)	90,6	92	99	100	100	100	Program pendidikan menengah	APBD Prov	Dikbud	Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
				Persentase Kompetensi Kejurusan SMK yang terakreditasi (%)	91	92,5	94	96	98	98	Program pendidikan menengah	APBD Prov	Dikbud	Penguatan komoditas unggulan agromaritim dan hilirisasi
				Jumlah SMK berbasis potensi unggulan daerah yang dibangun (Unit)	0	0	1	1	1	1	3	Program pendidikan menengah	APBD Prov	Dikbud
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Strategi: Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat											
		Arah Kebijakan: Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Bayi (AKB)/1000 kelahiran hidup	10,14	10,14	10	9	9	9	Program Peningkatan kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi	APBD Prov/kab/kota dan APBN	Dinkes	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan	
			Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000 kelahiran hidup	162	117,15	116	115	114	114					
			Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang (%)	8,7	8,7	8,5	8,3	7,9	7,9	Program Perbaikan Gizi Masyarakat				
		Arah Kebijakan: Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi malaria (kab/kota)	3	3	5	7	8	8	Program Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	APBD Prov/kab/kota dan APBN	Dinkes	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan	
			Angka kejadian DBD per 100.000 penduduk	49	89	60	50	45	45					
			Persentase Penderita Penyakit Hipertensi Usia > 18 Th (%)	21,6	21,6	21,30	21,00	20,75	20,75	Program Pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular				
			Persentasi Penderita Penyakit Diabetes Militus usia > 15 Th (%)	0,90	0,90	0,85	0,85	0,80	0,80					

NO	MISI	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR	PROGRAM	SUMBER DANA	OPD PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM PRIORITAS
			ARAH KEBIJAKAN		2015	2016	2017	2018	2019					
		Meningkatnya akses, pemerataan dan standar layanan kesehatan	Strategi: Meningkatkan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar											
			Arah kebijakan: Pemenuhan kebutuhan sumberdaya di setiap fasilitas pelayanan kesehatan jaringannya	Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi (unit)	30	30	86	135	180	180	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya	APBD Prov/kab/kota dan APBN	Dinkes	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan
				Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan kelas dari B ke A	1	1	1	1	1	1	Program pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana RS	APBD Prov dan APBN	RSUD M Yunus	
				Jumlah Kecamatan yang belum memiliki Puskesmas (unit)	9	9	7	5	3	3	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya	APBD Prov/kab/kota dan APBN	Dinkes	
				Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan (%)		63	75	85	100	100	Program Jaminan Kesehatan Nasional	APBD Prov/kab/kota dan APBN	Dinkes/Dinsos/BPJS	
			Arah kebijakan: Meningkatkan akses dan pemerataan layanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK)	Jumlah Desa Tertinggal yang belum memiliki sarana kesehatan (desa)	191	191	191-161	161-131	131-101	131-101	Program Pembangunan sarana kesehatan/Bantuan keuangan kepada kab/kota	APBD Prov/kab/kota	Dinkes/BPKD	
				Jumlah Pelayanan kesehatan spesialistik di DTPK (desa)	35	35	37	40	45	45	Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan	APBD Prov/kab/kota	Dinkes	
		Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pengendalian penduduk, KB dan kesehatan reproduksi remaja	Strategi : Menurunkan angka kelahiran penduduk dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja											
			Arah Kebijakan : Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas	Pertumbuhan Penduduk (%)	1,65	1,69	1,55	1,50	1,45	1,45	Program keluarga Berencana Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	APBD Prov/kab/kota dan APBN	P3A, PP & KB	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan
				Persentase Rasio Akseptor KB	67,83	68	69	70	71	71	Program Keluarga Berencana Program Pelayanan Kontrasepsi	APBD Prov/kab/kota dan APBN	P3A, PP & KB	
			Arah Kebijakan : Peningkatan intensitas layanan kesehatan reproduksi bagi remaja guna mencegah kelahiran di usia remaja	Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang melahirkan (%)	45,10	41,57	38,31	35,31	32,55	32,55	Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	APBD Prov/kab/kota dan APBN	P3A, PP & KB	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan

NO	MISI	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR	PROGRAM	SUMBER DANA	OPD PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM PRIORITAS
			ARAH KEBIJAKAN		2015	2016	2017	2018	2019					
		Meningkatnya pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis kewilayahan dan keunggulan lokal	Strategi : Mengembangkan kawasan ekonomi terpadu											
			Arah Kebijakan : Mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal	Jumlah Sentra IKM yang dikembangkan	-	-	1 sentra	3 sentra	20 sentra	24 sentra	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Penataan Struktur Industri Program Pengembangan Industri Agro	APBD Prov/kab/kota dan APBN	Disperindag	1. Pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan; 2. Penguatan komoditas unggulan agromaritim dan hilirisasi; 3. Pengembangan infrastruktur strategis dan industrialisasi
				Jumlah kawasan kampung nelayan terpadu yang dikembangkan	0	0	7	7	7	7	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Pengembangan Perikanan tangkap Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Diversifikasi Pangan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	APBD APBD DAN APBN APBD APBD DAN APBN APBD DAN APBN APBD DAN APBN APBD DAN APBN APBD APBD APBD	DKP DKP DKP Dinas PUTR DiskopUKM DiskopUKM Dinas Peternakan dan keswan Dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan BKP BAPPEDA Dikbud Dinkes	1. Pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan; 2. Penguatan komoditas unggulan agromaritim dan hilirisasi
			Arah Kebijakan : Mengembangkan kawasan kampung nelayan terpadu berbasis agro maritim											

NO	MISI	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR	PROGRAM	SUMBER DANA	OPD PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM PRIORITAS	
			ARAH KEBIJAKAN		2015	2016	2017	2018	2019						
											Program pengembangan perumahan	APBD DAN APBN	Dinas perumahan rakyat		
											Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	APBD	DPMPD		
											Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	APBD	Disperindag		
											Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	APBD	Dinas Pariwisata		
											Program Pemberdayaan Fakir Miskin , KAT dan PMKS Lainnya.	APBD/APBN	Dinas sosial		
											Program pengembangan ketenagalistrikan	APBD/APBN	Dinas ESDM		
											Program Peningkatan Kesempatan Kerja	APBD	Disnakertrans		
											Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	APBD/APBN	DishutLH		
											Program keluarga Berencana dan Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	APBD	BP3AKB		
		Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) serta berkembangnya sarana perekonomian rakyat	Strategi : meningkatkan daya saing KUKM dan IKM serta mengembangkan sarana perdagangan rakyat Arah Kebijakan : Meningkatkan kapasitas teknis, permodalan dan peralatan KUKM dan IKM	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	0	0	15%	15%	15%	45%	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif	APBD DAN APBN	Diskop UKM	1. Pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan; 2. Penguatan komoditas unggulan agromaritim dan hilirisasi	
				Jumlah Sentra Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Yang Dibangun	-	-	20 sentra	30 sentra	40 sentra	90 sentra	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	APBD DAN APBN			
				Persentase Pertumbuhan Unit industri kecil	6,56%	14,27%	14,80%	14,90%	15,00%	15,00%	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	APBD DAN APBN	Disperindag	1. Pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan; 2. Penguatan komoditas unggulan agromaritim dan hilirisasi	
				Nilai Investasi Sektor Industri	162.6 Milyar	169.3 Milyar	169.3 Milyar	176.5 Milyar	185 Milyar	185 Milyar	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				
				Arah Kebijakan : Mengembangkan sarana perekonomian rakyat	Jumlah pasar tradisional yang di revitalisasi	18	18	10	10	11	67	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	APBD DAN APBN	Disperindag	pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

NO	MISI	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR	PROGRAM	SUMBER DANA	OPD PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM PRIORITAS
			ARAH KEBIJAKAN		2015	2016	2017	2018	2019					
		Meningkatnya kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja	Strategi: Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja serta pengembangan sarana prasarana pelatihan kerja											
		Meningkatnya kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja	Arah kebijakan: Meningkatkan kesempatan dan Kompetensi Tenaga Kerja melalui pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pasar kerja.	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan keterampilan/berbasis kompetensi/berbasis masyarakat	336	96	96	325	387	1240	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	APBD DAN APBN	Disnakertrans	1. Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan 2. Penguatan Komoditas Unggulan Agro-Maritim & Hilirisasi
			Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi	0	0	64	160	224	448	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan			
			Jumlah masyarakat kurang mampu yang mengikuti pelatihan kewirausahaan, keterampilan dan keahlian dalam memulai usaha	-	-	80	300	400	780	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1. Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan 2. Penguatan Komoditas Unggulan Agro-Maritim & Hilirisasi			
			Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	171	140	200	225	250	986	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1. Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan			
			Arah Kebijakan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja	Jumlah BLK yang ditingkatkan dari tipe B ke A	-	-	-	-	1	1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			1. Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan 2. Penguatan Komoditas Unggulan Agro-Maritim & Hilirisasi
		Meningkatnya Perekonomian Perdesaan dan Kapasitas Aparatur Desa	Strategi: Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan pemberdayaan ekonomi perdesaan											
		Meningkatnya Perekonomian Perdesaan dan Kapasitas Aparatur Desa	Arah Kebijakan: Meningkatkan pemberdayaan ekonomi perdesaan	Jumlah Bumdes yang Difasilitasi dalam Pembentukan & Pengembangan (Bumdes)	116	116	60	60	60	180	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	APBD	DPMPD	1. Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan
			Jumlah masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang ekonomi produktif	120	180	220	200	240	660					
			Arah Kebijakan: Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah desa	Jumlah Aparatur desa yang ditingkatkan kapasitasnya	480	280	481	1056	1056	2.593	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			

NO	MISI	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR	PROGRAM	SUMBER DANA	OPD PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM PRIORITAS	
			ARAH KEBIJAKAN		2015	2016	2017	2018	2019						
3	Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar	Strategi : Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur dasar di seluruh wilayah												
			Arah kebijakan : Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur listrik	Persentase desa yang belum teraliri listrik (%)	-	-	5,5-5%	5-3,5	3,5-2	3,5-2	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	APBD PROV, APBD KAB/KOTA, APBN	ESDM	pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan	
			Arah kebijakan : Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian	Panjang jalan usaha tani yang dibangun (m)	31.500	-	-	15.000	16.000	62.500	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	APBD PROV, APBD KAB/KOTA	Dinas TPHP	1. Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan 2. Penguatan Komoditas Unggulan Agro-Maritim & Hilirisasi	
				Panjang jalan usaha Tani yang direhabilitasi (m)	-	-	-	6.000	6.000	12.000					
			Arah kebijakan : Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian	Panjang jalan sentra produksi yang di bangun (m)	106.600	0	1.000	8.900	5.000	121.500	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	APBD PROV, APBD KAB/KOTA	Dinas TPHP		
				Panjang Jalan sentra Produksi yang ditingkatkan kualitasnya (M)	34.100	-	-	10.400	10.000	54.500					
			Arah kebijakan : Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Luas Jaringan irigasi usaha tani yang diperbaiki/dibangun (Ha)	-	-	-	-	-	-	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian	APBD PROV, APBD KAB/KOTA, APBN	Dinas TPHP	Kementan	
				Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi baik (%)	58	60	61,73	62,31	62,5	63					
			Arah kebijakan : Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik/sedang(%)	42	46	50	59	66	66	1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	APBD PROV	Dinas PU dan Tata Ruang	pengembangan infrastruktur strategis dan industrialisasi	
				Jumlah desa tertinggal yang belum dihotmix pada ruas jalan provinsi (desa)	64	62	56	48	30	30					
			Arah Kebijakan : Peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi dan air bersih.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak (%)	49	49	50,57	60	64	64	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air Minum dan Air Limbah	APBD PROV, APBD KAB/KOTA, APBN	PUTR, DINKES, PDAM, ESDM, DINAS PKPP, DPMPD	pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan	
				Persentase rumah tangga terlayani sanitasi layak (%)	34,92	41,6	3690%	3836%	4000%	40					
				Persentase rumah tangga terlayani pengelolaan persampahan (%)	42	42	63	75	87	87					

NO	MISI	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR	PROGRAM	SUMBER DANA	OPD PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM PRIORITAS
			ARAH KEBIJAKAN		2015	2016	2017	2018	2019					
			Arah kebijakan : Pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman	Jumlah rumah layak huni yang dibangun (unit)	0	0	44	70	200	314	Program pengembangan perumahan	APBD PROV, APBD KAB/KOTA, APBN	Dinas perumahan rakyat	pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
				Luas kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya (ha)	0	0	0	2	3	5	Program pengembangan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	APBD PROV, APBD KAB/KOTA, APBN		
			Arah kebijakan : Peningkatan cakupan sarana informasi dan komunikasi msy	Persentase Jangkauan daerah terakses infrastruktur TIK (%)	10	20	20-40	40-60	60-75	60-75	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	APBD Provinsi/ APBD Kab/Kota	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan; 2. transformasi birokrasi dan pengelolaan pemerintahan
			Strategi : Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur strategis											
			Arah Kebijakan : Peningkatan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi (%)	85,55	89,8	89,8	91,1	94,5	94,5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	APBN/APBD PROV	ESDM	pengembangan infrastruktur strategis dan industrialisasi
			Arah Kebijakan : Peningkatan Kapasitas Bandar Udara	Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Bandara (%)	0	0	20	20	20	60	Program peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	APBN/APBD PROV	Dishub/kemenhub	pengembangan infrastruktur strategis dan industrialisasi
				Jumlah Bandara Pengumpul Yang dikembangkan (unit)	0	0	3	3	3	3				
			Arah Kebijakan : Peningkatan Kapasitas pelabuhan	Jumlah Volume Bongkar/muat (ton)	NA	2.582.269	2.632.269	2.682.270	2.732.269	2.732.269	Program peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	APBN/APBD PROV	Dishub/Kemenhub	pengembangan infrastruktur strategis dan industrialisasi
			Arah Kebijakan : Peningkatan akses konektivitas antar provinsi (ruas)	Jumlah ruas jalan konektivitas antar provinsi (ruas)	-	-	-	9	9	9	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	APBD DAN APBN	Dinas PU dan Tata Ruang	pengembangan infrastruktur strategis dan industrialisasi
			Arah kebijakan : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Keselamatan transportasi darat	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Transportasi Darat yang dibangun (jenis)	6	6	6	6	6	6	Program peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	APBN/APBD PROV	Dishub/kemenhub	pengembangan infrastruktur strategis dan industrialisasi

NO	MISI	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR	PROGRAM	SUMBER DANA	OPD PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM PRIORITAS
			ARAH KEBIJAKAN		2015	2016	2017	2018	2019					
4	Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan berbasis keunggulan lokal	Meningkatkan Investasi	Strategi : Optimalisasi Pengelolaan Investasi											
		Arah Kebijakan : Meningkatkan promosi investasi dan memperbanyak sumber dan jenis investasi	Nilai Investasi (Rp trilyun)	1	1,9	2	3	3	10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	APBD Prov,	DPMPSTP	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keteringgalan	
		Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam bagi pembangunan	Strategi: Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam											
			Arah Kebijakan: Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian dan perkebunan	Cetak sawah baru (ha)	91.651	91.791	2.000	1.500,0	100,0	95.391	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	APBD PROV, APBD KAB/KOTA	Dinas TPHP	1. Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Keteringgalan 2. Penguatan Komoditas Unggulan Agro-Maritim & Hilirisasi
				Produksi Tanaman Pangan dan hortikultura (ton) :							Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi	APBD PROV, APBD KAB/KOTA	Dinas TPHP	
				a. padi	593.194	668.140	668.140	695.000	701.972	701.972	Program Peningkatan Teknologi, Sarana dan Prasarana Pertanian	APBD PROV, APBD KAB/KOTA	Dinas TPHP	
				b. Jagung	72.756	95.707	95.707	99.000	104.381	104.381				
				c. Kedelai	5.715	5.949	5.949	6.000	6.069	6.069	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	APBN	Kementan	
				d.Cabe Merah	46.670	47.207	47.207	47.826	48.458	48.458	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi	APBD PROV, APBD KAB/KOTA	Dinas TPHP	
				e. Bawang Merah	471	521	521	630-	693	693	Program Peningkatan Teknologi, Sarana dan Prasarana Pertanian	APBD PROV, APBD	Dinas TPHP	
				f. Jeruk	7.254	7.261	7.261	7.286	8.488	8.488				
				Jumlah Desa Mandiri Benih yang dibangun	9	2	8	2	5	26	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	APBN	Kementan	
				Jumlah desa mandiri pangan yang di bina dan Kawasan Mandiri Pangan yang diKembangkan	desa	60	0	5	7	72	Program kemandirian pangan	APBD PROV, APBD KAB/KOTA	Dinas Ketahanan Pangan	
					kawasan	2	2	2	3	9				
				Jumlah Penumbuhan Desa Mandiri Pangan	Desa	22	5	5	5	37				
				Jumlah Gapoktan untuk pengembangan Packaging Beras	Gapoktan	3	1	4	5	13	Program pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan	APBD	Dinas Ketahanan Pangan	

NO	MISI	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR	PROGRAM	SUMBER DANA	OPD PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM PRIORITAS	
			ARAH KEBIJAKAN		2015	2016	2017	2018	2019						
					Produksi Perkebunan unggulan (ton)						Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan	APBD PROV, APBD KAB/KOTA	Dinas TPHP		
					a. Kelapa Sawit	469.238	509.639	553.519	601.177	652.938	652.938	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi	APBD PROV, APBD KAB/KOTA	Dinas TPHP	
					b. Karet	93.552	96.433	99.403	102.465	105.621	105.621	Program Peningkatan Teknologi, Sarana dan Prasarana Pertanian	APBD PROV, APBD KAB/KOTA	Dinas TPHP	
					c. Kopi	56.374	63.618	71.793	81.019	91.429	91.429	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	APBN	Kementan	
					d. Pala	26	44	75	127	215	215	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	APBN	Kementan	
					Jumlah Bibit Pala yang tersalur ke petani (batang)	-	-	46.557	1.000	1.000	48.557				
			Arah kebijakan: Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluh		Rasio Penyuluh terhadap Kelompok Tani	1:18	1:18	1:16	1:14	1:12	1:10	Program Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	APBD PROV, APBD KAB/KOTA, APBN	Dinas TPHP	
					Jumlah Penyuluh Yang ditingkatkan Kompetensinya	0	30	30	120	120	420	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	APBN	Kementan	
			Arah Kebijakan : Meningkatkan Produksi, produktifitas, dan mutu hasil peternakan melalui eksentensifikasi dan intensifikasi peternakan		Produksi daging ternak (ton)										
					a. Sapi Potong	3006	3794	3343	3717	4134	4134	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	APBN	Disnak Keswan dan Kementan	
					b. Kambing / Domba	295	589	313	331	351	351				
					c. Unggas	2713	2077	2826	2925	3094	3094	Program Peningkatan Produksi hasil peternakan	APBD PROV, APBD Kab/kota	Disnak Keswan dan Kementan	
					d. Produksi telur	3632	3902	4351	4858	5429	5429	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	APBN	Disnak Keswan dan Kementan	
					Populasi Sapi Perah ((ekor)	237	270	373	769	3.380	351	Program Peningkatan Produksi hasil peternakan	APBD PROV, APBD Kab/kota,	Disnak Keswan dan Kementan	
											Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	APBN	Disnak Keswan dan Kementan		

NO	MISI	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR	PROGRAM	SUMBER DANA	OPD PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM PRIORITAS
			ARAH KEBIJAKAN		2015	2016	2017	2018	2019					
			Arah Kebijakan : meningkatkan nilai tambah produk peternakan	Jumlah unit pengolahan hasil peternakan yang direvitalisasi	0	0	0	2	2	4	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	APBD PROV, APBD Kab/kota,	Disnak Keswan dan Kementan	
			Arah kebijakan : Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	64.059	64.110	66.033	68.344	70.804	70.804	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	APBD PROV, APBD Kab/kota,	DKP/kemen KKP	
			Arah kebijakan : Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	74.857,85	87.939	97.101	106.957	119.580	119.580	Program pengembangan budidaya perikanan	APBD PROV, APBD Kab/kota,	DKP/kemen KKP	
			Arah kebijakan : Meningkatkan eksplorasi sumber daya alam	Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Rp M)	110	86	100-105	105-110	110-115	110-115	Program Optimalisasi penerimaan negara dibidang pertambangan	APBD Prov, APBD Kab/Kota	ESDM	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan; Pengembangan infrastruktur strategis dan industrialisasi
			Arah kebijakan : Mengurangi dampak negatif pemanfaatan mineral, batu bara dan batuan terhadap lingkungan	Persentase Luas Lahan Reklamasi (%)			-	20%	40%	40%	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	APBD	ESDM	Pengembangan infrastruktur strategis dan industrialisasi
			Arah kebijakan : Optimalisasi pengelolaan sumber daya hutan untuk menciptakan nilai tambah berbasis masyarakat	Luas hutan yang dikelola masyarakat (ha)	-	31.535	49.990	72.847	83.192	83.192	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	APBD DAN APBN	DishutLH	Pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
				Jumlah bahan baku industri hasil hutan (btg)	0	0	14	22	30	30				Penguatan komoditas unggulan agromaritim dan hilirisasi
		Berkembangnya Sektor Pariwisata	Strategi : Mengembangkan destinasi wisata unggulan											
			Arah Kebijakan : Peningkatan pengembangan pemasaran seni budaya dan pariwisata dalam meningkatkan kunjungan	Jumlah wisatawan Mancanegara	952	1952	2955	3972	4995	4.995	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	APBD PROV, APBD Kab/kota dan APBN	Dinas Pariwisata	Visit 2020 wonderful Bengkulu
				Jumlah Wisatawan Nusantara	357.863	361.578	375.475	394.265	420.025	420.025				
				Persentase tingkat hunian hotel	33	43	53	63	73	73				
				Rata- rata lama tinggal	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	2,7				

NO	MISI	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR	PROGRAM	SUMBER DANA	OPD PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM PRIORITAS
			ARAH KEBIJAKAN		2015	2016	2017	2018	2019					
			Strategi : Pengembangan objek wisata dan produk unggulan daerah yang terintegrasi											
			Arah kebijakan : Peningkatan kualitas objek wisata unggulan dan seni budaya daerah	Jumlah obyek wisata unggulan kabupaten/Kota yang dikembangkan	0	0	10	10	10	10	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	APBD dan APBN	Dinas Pariwisata	Visit 2020 wonderful Bengkulu
		Menurunnya Pencemaran Lingkungan	Strategi : Menurunkan beban pencemaran lingkungan											
		Menurunnya Pencemaran Lingkungan	Arah kebijakan : Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan air dan udara dengan meningkatkan daya dukung penahanan laju kerusakan lingkungan	Indeks kualitas air	54	54	54	54	54	54	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	APBD Prov / Kab	Dinas LHK	Visit 2020 wonderful Bengkulu
				Indeks kualitas udara	85	85	85	85	85	85				
		Meningkatnya jumlah daerah yang bersih dan tertata	Strategi : Meningkatkan kebersihan dan penataan lingkungan perkotaan											
		Meningkatnya jumlah daerah yang bersih dan tertata	Arah kebijakan : Meningkatkan kebersihan dan penataan lingkungan perkotaan	Persentase kota sehat adipura (%)	-	-	20%	40%	60%	1	Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	APBD Prov / Kab	Dinas LHK	Visit 2020 wonderful Bengkulu
		Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Strategi : Meningkatkan kesiapsiagaan, pengendalian dan pemulihan akibat bencana											
		Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Meningkatkan peran serta dunia usaha, swasta dan masyarakat dalam Pra, Saat dan Pasca Bencana	Persentase desa tangguh bencana	12,5	12,5 - 30	30-45	45-60	60-75	60-75	1. Program pengurangan risiko bencana 2. Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana 3. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana 4. Program Pemulihan Dengan Segera Sarana Dan Prasarana Vital	APBD Provinsi/ APBD Kab/Kota	BPBD	Visit 2020 wonderful Bengkulu
		Menurunnya luas lahan kritis	Strategi : Mempertahankan fungsi hutan											
		Menurunnya luas lahan kritis	Arah kebijakan : Pemulihan lahan kritis	Persentase luas tutupan lahan di luar kawasan meningkat	3,06	3,11	3,16	3,21	3,26	3,26	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	APBD Prov	Dinas LHK	Visit 2020 wonderful Bengkulu

NO	MISI	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR	PROGRAM	SUMBER DANA	OPD PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM PRIORITAS
			ARAH KEBIJAKAN		2015	2016	2017	2018	2019					
5	Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing	Meningkatnya pembangunan industri maritim dan transportasi laut yang integratif dan berdaya saing	Strategi : Optimalisasi pendayagunaan dan pengendalian kemaritiman											
			Arah Kebijakan : Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sarana sumber daya kemaritiman	Jumlah kawasan wisata bahari yang dikembangkan (kawasan)	0	0	0	1	1	2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	APBD PROV, APBN	DKP, Kemen Pariwisata, Kemen KKP	Visit 2020 Wonderful Bengkulu
			Arah Kebijakan : Pembangunan dan peningkatan fungsi pelabuhan	Jumlah Pelabuhan Perikanan Yang dikembangkan(unit) :	0	0	2	1	1	4	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	APBD DAN APBN	DKP, Kemen KKP	Pengembangan Infrastruktur Strategis dan Industrialisasi
				Persentase peningkatan pelabuhan pengumpan (%)	-	-	-	-	-	0	Program peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	APBN/APBD PROV	Dishub/Kemenhub	pengembangan infrastruktur strategis dan industrialisasi
6	Pemberdayaan Perempuan dan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan dasar bagi perempuan dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan	Strategi : Meningkatkan peran dan akses perempuan dalam pembangunan											
			Arah Kebijakan : Peningkatan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	Indeks pembangunan gender (IPG)	91,02	91,52	92,02	92,52	93,02	93,02	Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	APBD Prov	PP dan PA	Pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,76	69,26	69,26	69,76	69,80	69,80	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			
	Meningkatnya layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan	Strategi : Melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan											
			Meningkatkan layanan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan	Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan di DP3APPKB (%)	80%	90%	100%	100%	100%	100%	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	APBD PROV	PP dan PA	Pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
				Jumlah anak yang dilayani dan dilindungi di dalam dan luar panti (orang)	912	210	194	194	194	1.704	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			
										Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan				
										Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan				
										Program Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak	APBD PROV	Dinkesos		

NO	MISI	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR	PROGRAM	SUMBER DANA	OPD PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM PRIORITAS
			ARAH KEBIJAKAN		2015	2016	2017	2018	2019					
7	Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Meningkatnya kapasitas pemuda sebagai agen pembangunan dan perubahan yang bertanggung jawab, berjiwa wirausaha dan mandiri;	Strategi: Meningkatkan peran, potensi, prestasi pemuda dan olahraga											
			Arah kebijakan: Peningkatan peran, kompetensi pemuda melalui pola pengkaderan secara terencana sistematis dan berkelanjutan	Jumlah kelompok usaha pemuda produktif yang dibina dan dikembangkan (kelompok)	10	0	20	20	20	70	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	APBD PROV, APBD KAB/KOTA, APBN	DISPORA	pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan
			Jumlah Pemuda kader, pemuda pelopor dan pemuda wirausaha, Pramuka tingkat Provinsi (orang)	20.190	4.190	4.190	4.190	4.190	36.950	Program peningkatan peran serta kepemudaan	APBD Prov/ APBN	DISPORA	visit 2020 wonderful Bengkulu	
		Strategi: Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga												
		Arah Kebijakan: Peningkatan kompetensi dan prestasi di bidang olah raga	Peringkat Prestasi Olahraga Berskala Nasional								Program Pembinaan Olahraga Prestasi/ Program Pemberdayaan dan Pemasyarakatan Olahraga	APBD Prov/ APBD Kab/Kota	DISPORA	visit 2020 wonderful Bengkulu
			a. PON	32	32-20	-	-	-	-					
	b. POPNAS	32	-	32-20	-	20-10	20-10							
	c. POMNAS	32	-	28-20	-	20-10	20-10							
	d. PORWIL	10	-	-	-	6 - 5	6 - 5							
	Arah Kebijakan: Pembangunan Kawasan olahraga terpadu berstandar Internasional	Persentase Pembangunan kawasan Internasional Sport Center di Provinsi Bengkulu (BISC) (%)	0	0%	5%-25%	25-55%	55-90%	55-90%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	APBD Prov/ APBD Kab/Kota	DISPORA			
	Arah Kebijakan : Peningkatan profesionalisme pembina, pengelola dan pelaksana kegiatan keolahragaan	Jumlah Wasit/Pelatih/Juri	16		120	110	110	356	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	APBD Prov/ APBD Kab/Kota	DISPORA			

NO	MISI	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR	PROGRAM	SUMBER DANA	OPD PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM PRIORITAS
			ARAH KEBIJAKAN		2015	2016	2017	2018	2019					
8	Mewujudkan Masyarakat Bengkulu yang Agamis, Berbudaya, berkesadaran wisata dan Demokratis	Meningkatnya kondisi dimana prinsip-prinsip keagamaan, Budaya dan Demokratis terintegrasi dengan baik dalam kegiatan pemerintahan dan masyarakat	Strategi : Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, budaya dan demokrasi dalam masyarakat.											
			Arah Kebijakan: Menciptakan kondisi yang kondusif dalam kehidupan di masyarakat	Rasio Stabilitas Kesatuan Bangsa	0,57	0,58	0,6	0,63	0,65	0,65	Program pengembangan wawasan kebangsaan	APBD Provinsi/ APBD Kab/Kota	Kesbangpol	visit 2020 wonderful Bengkulu
			Arah Kebijakan : Meningkatkan penerapan Demokrasi dalam kehidupan bernegara	Indeks Demokrasi Indonesia Prov. Bengkulu	73,60	74,00	72,73	70,71	71,00	71,00	Program Pendidikan Politik Masyarakat	APBD Provinsi/ APBD Kab/Kota	Kesbangpol	

TABEL 6.3
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif

Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	2020		2021		Perangkat daerah
		Target	Rp	Target	Rp	
Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik						
Tujuan : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dalam rangka pencapaian pemerintahan yang baik dan bersih						
Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Pelayanan Publik	Hijau		Hijau		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Provinsi Bengkulu pada perizinan pelayanan terpadu	84		85		
	Jumlah jenis perizinan/nonperizinan yang dilayani (jenis)	223		226		
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	95%	188.600.000	100%	198.030.000	DPMPPTSP
Program Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase perizinan yang diselesaikan tepat waktu	100%	556.870.000	100%	584.713.500	DPMPPTSP
	Persentase pelayanan perizinan secara online	100%		100%		
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	Kepatuhan terhadap <i>clinical pathway</i>	3	117.350.977.000	3	120.284.751.425	RSUD M. YUNUS
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar Rumah Sakit Kelas A	95%	24.828.194.000	100%	26.069.603.700	RSUD M. YUNUS
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Tingkat penilaian proper	Biru	150.000.000	Biru	150.000.000	RSUD M. YUNUS
Program peningkatan pelayanan publik	Persentase pemenuhan fasilitas pelayanan samsat	71,57%	450.000.000	74,27%	472.500.000	BPKD
	Persentase kecamatan yang terlayani pelayanan samsat	46,46%		48,03%		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan fasilitas pelayanan samsat	71,57%	5.390.436.000	74,27%	2.840.436.000	BPKD
	Persentase kecamatan yang terlayani pelayanan samsat	46,46%		48,03%		
Program penataan administrasi kependudukan	Persentase wajib KTP yang telah memiliki KTP elektronik	98%	941.615.000	100%	988.695.750	Dinas DUKCAPIL
	Persentase kepemilikan KIA usia 0-16 tahun	20%		30%		
	Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun	95%		100%		
	persentase desa/kelurahan tertib adminduk	85%		100%		
Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan	Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi	BB		BB		
	Jumlah SKPD Provinsi yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB (SKPD)	39		39		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase OPD yang menyusun dokumen Renstra, PK, IKU, Rencana Aksi	100%	400.000.000	100%	400.000.000	Bappeda
	Persentase indikator kinerja tujuan dan sasaran dalam Renstra, PK dan IKU yang berorientasi hasil	100%		100%		
	Persentase indikator kinerja program dalam Renstra dan PK yang berorientasi hasil	95%		100%		
	Persentase tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang berorientasi hasil	100%		100%		
	Persentase indikator kinerja program dalam RPJMD yang berorientasi hasil	100%		100%		

Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	2020		2021		Perangkat daerah
		Target	Rp	Target	Rp	
Program perencanaan pembangunan daerah	Peresentase keselarasan program antara RPJMD dengan RKPd	100%	1.450.000.000	100%	1.750.000.000	Bappeda
	Persentase OPD yang menyusun dokumen Renja dan Laporan Evaluasi kinerja Triwulanan	100%		100%		
	Persentase indikator kinerja tujuan dan sasaran dalam Renja yang berorientasi hasil	100%		100%		
	Persentase indikator kinerja program dalam Renja yang berorientasi hasil	95%		100%		
	Persentase indikator kinerja program yang mendukung capaian indikator kinerja sasaran dan tujuan	100%		100%		
Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang tercapai	100%	450.000.000	100%	500.000.000	Bappeda
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD bidang ekonomi dan sumber daya alam yang tercapai	100%	1.225.000.000	100%	1.225.000.000	Bappeda
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Persentase target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD bidang sosial dan pemerintahan yang tercapai	100%	1.275.000.000	100%	1.275.000.000	Bappeda
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD bidang infrastruktur dan prasarana wilayah yang tercapai	100%	1.225.000.000	100%	1.225.000.000	Bappeda
Program Pengembangan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase OPD Yang Menyusun Dokumen LAKIP	100%	400.000.000	100%	420.000.000	Biro Organisasi
	Persentase OPD yang menyampaikan dokumen LAKIP tepat waktu	100%		100%		
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase OPD yang menyusun laporan evaluasi pencapaian kinerja triwulanan	100%	550.000.000	100%	577.500.000	Inspektorat
	Persentase OPD yang menyusun Rencana Aksi Kinerja	100%		100%		
	Persentase OPD yang nilai Rencana Aksi Kinerjanya "A"	50%		100%		
Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP		WTP		
Program Peningkatan Pengelolaan Aset Provinsi	Persentase barang milik daerah daerah yang diamankan	100%	3.800.000.000	100%	3.500.000.000	BPKD
	Persentase barang milik daerah daerah yang tertibkan	75%		78,67%		
	Persentase barang milik daerah daerah yang dimanfaatkan	67%		67%		
Program peningkatan Pengelolaan akuntansi keuangan daerah	Persentase perangkat daerah yang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100%	1.110.000.000	100%	1.005.000.000	BPKD
	Persentase perangkat daerah yang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	100%		100%		
Program pengelolaan anggaran keuangan Daerah	Ketepatan waktu penetapan APBD	Tepat waktu	5.400.000.000	Tepat waktu	5.400.000.000	BPKD
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase OPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan	100%	4.268.112.000	100%	4.481.517.600	Inspektorat
	Persentase OPD yang menindaklanjuti temuan kerugian negara/daerah	100%		100%		

Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	2020		2021		Perangkat daerah
		Target	Rp	Target	Rp	
Sasaran : Meningkatkan profesionalisme Aparatur	Persentase penempatan pejabat ASN pemerintah provinsi berdasarkan kualifikasi pendidikan (%) :					
	Eselon II	100		100		
	Eselon III	100		100		
	Eselon IV	100		100		
	Persentase SKPD provinsi yang memiliki jumlah ASN sesuai dengan kebutuhan (%)	100		100		
	Persentase pejabat struktural Pemprov yang telah mengikuti					
	- Eselon II	80		100		
	- Eselon III	100		100		
	- Eselon IV	85		100		
	Jumlah ASN yang mengikuti diklat formal (orang) :					
- Spesialis Kedokteran	Lama : 7 Baru : 1			Lama : 8 Baru : 1		
- S2	Lama : 4 Baru : 2			Lama : 6 Baru : 2		
- S3	Lama : 6 Baru : 2			Lama : 8 Baru : 2		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat PIM	77%	277.500.000	80,60%	300.000.000	BKD
	Persentase PNS yang mengikuti diklat teknis dan diklat fungsional	9,7%		87,37%		
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase jumlah pejabat fungsional tertentu sesuai formasi	91,29%	170.000.000	93,60%	200.000.000	BKD
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Kasus disiplin PNS yang ditindak lanjuti	100%	140.250.000	100%	150.000.000	BKD
	Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan nilai SKP	86,410%	246.500.000	86,416%	250.000.000	
Sasaran : Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah aplikasi elektronik yang dikembangkan (aplikasi)	22		25		
Program Pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa	Persentase Dokumen pembangunan daerah yang dipublikasikan	100%	2.657.120.000	100%	3.000.000.000	Diskominfo
	Persentase OPD yang melapor ke PPID	80%		90%		
Sasaran : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar	Persentase Jangkauan daerah terakses infrastruktur TIK (%)	75-90		90-100		
Program Peningkatan dan Pengembangan e-Government (SPBE)	Persentase kualitas infrastruktur dan jaringan TIK	46%	3.686.950.200	50%	4.000.000.000	Diskominfo
	Persentase pengembangan aplikasi	46%		50%		
	Persentase peningkatan kapasitas SDM e-Gov dan TIK	46%		50%		
Misi 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan						
Tujuan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial dan layanan dasar						
Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan serta meningkatnya minat baca di semua lapisan masyarakat	Angka partisipasi murni (APM) PAUD (%)	85,8		92,8		
	Angka partisipasi murni (APM) SD (%)	99,39		99,69		
	Angka partisipasi murni (APM) SLTP (%)	91,24		95		
	Angka partisipasi murni (APM) SLTA (%)	90		95		
	Angka buta aksara (%)	0,22		0		
Program manajemen pelayanan pendidikan	Persentase SLTA yang melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	71%	11.780.388.600	81%	1.500.000.000	Dinas Dikbud
Program Dana BOS	Persentase SLTA yang melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	71%	100.000.000.000	81%	100.000.000.000	Dinas Dikbud
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase guru yang ditingkatkan kompetensinya	70,25%	500.000.000	71,34%	500.000.000	Dinas Dikbud

Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	2020		2021		Perangkat daerah
		Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase Guru SLTA yang bersertifikasi	76,69%		83,48%		
Program Pendidikan Menengah	Persentase SLTA terakreditasi	98,58%	120.400.000.000	100%	121.000.000.000	Dinas Dikbud
	Persentase SMK yang terakreditasi	97,17%		100%		
	Rasio ketersediaan ruang kelas SLTA terhadap rombongan belajar	1:4		1:3		
	Persentase peningkatan jumlah SLTA	0,71%		0,71%		
Program pendidikan luar biasa	Angka partisipasi kasar pendidikan khusus	77%	4.007.184.000	78%	4.500.000.000	Dinas Dikbud
Sasaran : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	69,5		70		
	AKB/1.000 (jiwa)	8		8		
	AKI/100.000 (jiwa)	113		112		
	Persentase gizi buruk/gizi kurang (%)	7,5		7		
Program Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi	Persentase ibu melahirkan di fasilitas kesehatan	86%	100.000.000	87%	150.000.000	Dinas Kesehatan
	Persentase Kunjungan Ibu Hamil minimal 4 kali	92%		95%		
	Persentase ibu hamil yang mendapatkan makanan tambahan dan tablet tambah darah	90%		92%		
	Cakupan kunjungan neonatal	98%		99%		
	Persentase balita gizi buruk	0,28%		0%		
Program Kesehatan Bayi, Anak dan Remaja	Cakupan kunjungan neonatal	98%	150.000.000	99%	200.000.000	Dinas Kesehatan
	Persentase balita gizi buruk	0,28%		0%		
Program perbaikan gizi masyarakat	Persentase balita gizi buruk	0,28%	3.639.999.000,00	0%	4.000.000.000	Dinas Kesehatan
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Angka Kesakitan DBD Per 100.000 Penduduk	<49	475.000.000	<49	550.000.000	Dinas Kesehatan
	Angka Kesakitan Malaria per 1.000 Penduduk	<1		<1		
	Angka Kesakitan TB per 100.000 Penduduk	384		379		
	Persentase cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	93,5%		94%		
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	Angka kesakitan Diabetes Melitus usia di atas 15 tahun	0,7	150.000.000	0,5	200.000.000	Dinas Kesehatan
	Angka Kesakitan Hipertensi Usia diatas 18 Tahun	27,8		27,5		
Program Keluarga Berencana	Persentase Unmed need	14,45%	100.000.000	14,4%	125.000.000	DP3APPKB
	Persentase kehamilan tidak diinginkan (KTD) Wanita Usia Subur (WUS) 15-47 tahun	2,27%		2,26%		
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase Remaja Perempuan 15-19 tahun yang melahirkan	27%	100.000.000	25%	125.000.000	DP3APPKB
Tujuan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial dan layanan dasar						
Sasaran : Meningkatkan layanan kualitas dan kuantitas pelayanan	Angka kemiskinan	15,5		15,02		
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya.	Persentase Fakir miskin yang diberdayakan	1,63%	731.520.000	1,71%	750.000.000	Dinas sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Dibina, Direhab dan Dilayani	16,6%	6.214.209.000	17,3%	450.000.000	Dinas sosial
Program bantuan dan jaminan Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang Menerima Perlindungan dan Bantuan Jaminan Sosial	74%	561.000.000	75%	600.000.000	Dinas sosial
Sasaran : Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi	Angka pengangguran	4,00		3,80		
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	98%	330.000.000	99%	500.000.000	Disnakertrans

Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	2020		2021		Perangkat daerah
		Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase pencari kerja yang dilatih	11,16%		13%		
Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi	91%	1.651.071.000	95%	2.000.000.000	Disnakertrans
	Persentase pencari kerja yang dilatih	11.16%		13%		
	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	98%		99%		
Misi 3 : Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis						
Tujuan : Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis						
Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak (%)	65		66,00		
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air Minum dan Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki sambungan rumah (SR) Air Minum layak	25%	100.000.000	30%	150.000.000	Dinas PUPR
Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional KOBEMA	Persentase rumah tangga yang memiliki sambungan rumah (SR) Air Minum layak	25%	1.715.000.000	30%	500.000.000	Dinas PUPR
	Jumlah Sumber Air Baku yang dibangun	1 unit		1 unit		
Program pengembangan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	Persentase peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang dibangun sambungan rumah (SR) air bersih	1,5%	450.000.000	1,5%	450.000.000	Dinas Perumahan dan kawasan permukiman
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman	Persentase peningkatan jumlah rumah tangga dikawasan kumuh yang dibangun sambungan rumah (SR) air bersih	1,5%	450.000.000	1,5%	450.000.000	Dinas Perumahan dan kawasan permukiman
Sasaran : Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar	Persentase rumah tangga terlayani sanitasi layak (%)	45		50		
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum/Air Limbah	Persentase rumah tangga yang terlayani MCK Komunal/IPAL Komunal	38%	100.000.000	40%	150.000.000	Dinas PUPR
Program pengembangan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	Persentase Peningkatan Jumlah rumah tangga miskin yang memiliki MCK layak	2,50%	650.000.000	2,50%	650.000.000	Dinas Perumahan dan kawasan permukiman
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman	Persentase penigkatan jumlah rumah tangga dikawasan kumuh yang memiliki MCK	1,5%	450.000.000	1,5%	450.000.000	Dinas Perumahan dan kawasan permukiman
Sasaran : Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar	Jumlah rumah layak huni yang dibangun (unit)	352		450		
	Luas kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya (ha)	4		6		
Program pengembangan perumahan	Persentase rumah tidak layak huni yang diperbaiki	13,50	1.515.750.000	13,61	1.500.000.000	Dinas Perumahan dan kawasan permukiman
	Persentase rumah layak huni yang dibangun	0,06		0,06		
Sasaran : Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar	Rasio Elektrifikasi	97,5		100		
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Persentase rumah tangga teraliri listrik	99%	1.820.000.000	99,5%	1.500.000.000	Dinas ESDM
	Persentase desa berlistrik	100%		100%		

Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	2020		2021		Perangkat daerah
		Target	Rp	Target	Rp	
Sasaran : Meningkatnya kuantitas dan kualitas dan infrastruktur strategis	Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik/ sedang (%)	68		70		
Program pembangunan jalan dan jembatan	Persentase Jaringan Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik dan Sedang	68,14%	47.000.000.000	71,14%	200.000.000.000	Dinas PUPR
	Persentase Jaringan Jalan Provinsi dalam Kondisi Rusak Ringan dan Rusak Berat	31,86%		28,86%		
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase Jaringan Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik dan Sedang	68,14%	11.664.290.000	71,14%	12.000.000.000	Dinas PUPR
	Persentase Jaringan Jalan Provinsi dalam Kondisi Rusak Ringan dan Rusak Berat	31,86%		28,86%		
Sasaran : Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur strategis dan berdaya saing	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan (%)	20		20		
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan	83%	650.000.000	86%	650.000.000	Dinas Perhubungan
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase pemenuhan dokumen pengembangan transportasi	83%	1.572.500.000	86%	1.212.500.000	Dinas Perhubungan
Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase pemenuhan dokumen pengembangan transportasi	83%	10.271.664.000	86%	1.775.000.000	Dinas Perhubungan
Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar	Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi baik (%)	63,9		64		
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase luas jaringan irigasi yang direhabilitasi/ditingkatkan	7%	320.000.000	7,8%	4.000.000.000	Dinas PUPR
	Persentase luas jaringan irigasi yang dipelihara secara rutin/berkala	61,2%		62,3%		
Misi 4 : Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan berbasis keunggulan lokal						
Tujuan : Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan						
Sasaran : Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam bagi pembangunan	Nilai Tukar Petani - NTP	104		105		
	Produksi Tanaman Pangan dan hortikultura					
	a. padi (ton)	708.991		716.081		
	b. Jagung (ton)	109.363		112.152		
	c. Kedelai (ton)	6.129		6.191		
	Produksi Perkebunan unggulan (ton)					
	a. Kelapa Sawit	709.156		770.285		
	b. Karet	108.874		112.140		
	c. Kopi	103.178		116.436		
	Produksi daging ternak (ton)					
	a. Sapi Potong	4597		5112		
	b. Kambing / Domba	373		395		
	c. Unggas	3255		3437		
	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	73.494		75.618		
	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	127.580		131.538		
Program Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Persentase peningkatan luas tanam padi	0,31%	2.800.000.000	0,31%	3.000.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
	Produktivitas padi (Kwintal/Hektar)	44,55		44,75		
	Persentase Poktan Tanaman Pangan yang memiliki handtraktor dan mesin perontok padi	55,91%		65,17%		
	Persentase luas lahan sawah yang teraliri aliran irigasi	73,60%		74,75%		
	Persentase peningkatan luas tanam jagung	0,04%		0,04%		
	Produktivitas jagung (Kwintal/Hektar)	61,35		61,40		

Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	2020		2021		Perangkat daerah
		Target	Rp	Target	Rp	
Program Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Persentase Peningkatan Luas Tanam Bawang Merah	21,28	2.375.000.000	8,77	2.500.000.000	
	Produktivitas Bawang Merah (kw/Ha)	45		50		
	Persentase Peningkatan Luas Tanam Cabai Merah	2,10		1,17		
	Produktivitas Cabai (Kw/Ha)	43,50		45		
Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Produktivitas karet (Ton/Hektar)	2,16	1.350.000.000	2,41	1.500.000.000	
	Produktivitas Kopi (Ton/Hektar)	1,22		1,51		
	Produktivitas Kebun Sawit Rakyat (Ton/Hektar)	3,89		4,11		
	Persentase luas lahan karet (TTM/TR) yang dilakukan replanting	21,09%		30,53%		
	Persentase kebun kopi rakyat (TTM/TR) yang direhabilitasi/intensifikasi	52,30%		62,28%		
	Persentase luas lahan kelapa sawit (TTM/TR) yang dilakukan replanting	59,06%		88,59%		
Peningkatan produksi hasil peternakan	Persentase peningkatan populasi sapi	5%	7.205.000.000	5%	7.300.000.000	Dinas Peternakan dan keswan
	Persentase peningkatan populasi kambing	12,30%		12,30%		
	Persentase peningkatan populasi unggas	6,30%		6,70%		
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase Penurunan angka kematian ternak akibat penyakit Menular Hewan Strategis (PHMS) dan Zoonosis	60%	1.665.000.000	70%	1.700.000.000	
	Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular strategis	75%		80%		
	Persentase penurunan kasus penyakit-penyakit zoonosis	75%		80%		
Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Persentase Penambahan Jenis Produk Olahan Peternakan	12%	536.000.000	6%	600.000.000	
	Persentase Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan	82%		100%		
Program Pengembangan budidaya perikanan	Jumlah pembudidaya ikan (orang)	121.797	1.646.480.000	126.497	1.500.000.000	Dinas kelautan dan perikanan
	Persentase peningkatan luas lahan perikanan budidaya	17%		18,29%		
	Persentase pembudidaya ikan yang menggunakan bibit ikan unggul	9,40%		10,70%		
	Persentase pembudidaya ikan yang terpenuhi kebutuhan pakan ikan sesuai standar	15%		17%		
Program Pengembangan perikanan tangkap	Persentase nelayan yang mempunyai alat tangkap	87,09%	4.267.174.000	93,85%	1.500.000.000	
	Persentase nelayan yang mempunyai alat bantu penangkapan ikan sesuai standar	80,37%		83,93%		
	Persentase nelayan yang memiliki kapal	46,20%		46,72%		
	Persentase peningkatan jumlah nelayan yang ditingkatkan keterampilannya	2,75%		2,68%		
Program Pengembangan Industri Sedang Besar	Persentase pertumbuhan unit industri pengolahan non-migas sedang dan besar	6,5%	109.225.000	7%	125.000.000	Disperindag
	Nilai Investasi industri sedang dan besar	270 M		297 M		

Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	2020		2021		Perangkat daerah
		Target	Rp	Target	Rp	
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase pertumbuhan unit industri kecil dan menengah	11%	1.018.220.100	13%	1.100.000.000	
	Persentase sentra industri yang dikembangkan	3,79%		5,05%		
	Persentase peningkatan nilai produksi kecil menengah	6%		8%		
Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi aktif dan bersertifikat NIK	17,50%	150.000.000	20%	175.000.000	Dinas koperasi dan UKM
	Persentase koperasi aktif dan bersertifikat NIK	22,50%		22,75%		
Program peningkatan pegawasan dan penilaian kesehatan KSP/USP	Persentase pertumbuhan KSP/USP sehat	12,50%	100.000.000	14,44%	125.000.000	
	Persentase KSP/USP sehat	14,20%		16,23%		
Program pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	5,32%	150.000.000	6,36%	175.000.000	
Program pemberdayaan usaha kecil dan kewirausahaan	Persentase pertumbuhan Kelompok Usaha Baru (KUB)/Wira Usaha Baru (WUB)	3,59%	1.300.000.000	3,72%	1.300.000.000	
	Persentase pertumbuhan omzet	3,37%		3,84%		
Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan dalam Negeri	Persentase pertumbuhan sub sektor perdagangan dalam negeri	2%	377.630.000	2%	400.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase peningkatan nilai perdagangan besar dan eceran	5%		5%		
	Koefisien kestabilan harga	>10		>10		
0	Koefisien kestabilan harga	80	-	81	3.300.000.000	
Program Peningkatan dan Pengembangan Luar Negeri	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	16,24%	1.695.919.700	16,84%	1.000.000.000	
Program Pengembangan destinasi pariwisata	Persentase peningkatan jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	28,57%	175.000.000	22,22%	250.000.000	Dinas Pariwisata
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah media promosi wisata	8 media	1.005.000.000	9 media	7.000.000.000	
	Persentase peningkatan frekuensi promosi wisata	25%		30%		
Program Pengembangan Produk dan Pelayanan Wisata	Persentase pemandu wisata yang ditingkatkan kompetensinya	75%	650.000.000	100%	1.000.000.000	
	Persentase kelompok sadar wisata yang dibina	75%		100%		
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekraf Berbasis EKMDI yang ditingkatkan kompetensinya	50 orang	295.000.000	50 orang	300.000.000	
	Jumlah Pelaku Ekraf Berbasis Seni dan Budaya yang ditingkatkan kompetensinya	7 orang		10 orang		
	Jumlah Pelaku Ekraf Berbasis Edukasi dan Kekayaan Intelektual yang ditingkatkan kompetensinya	50 orang		50 orang		
Program optimalisasi penerimaan negara dibidang pertambangan	Persentase peningkatan nilai landrent dan royalti	3,5 %	150.000.000	4%	200.000.000	Dinas ESDM
Program pengembangan perizinan energi dan sumber daya mineral	Persentase peningkatan PAD sektor pertambangan dan penggalian	35%	225.000.000	40%	250.000.000	
Program pengembangan dan akreditasi lab analisa mineral batubara dan lab analisa air	Persentase peningkatan PAD sektor pertambangan dan penggalian	35%	350.000.000	40%	300.000.000	
Program pemanfaatan Potensi Sumber daya Hutan	Persentase Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sub sektor kehutanan	20%	390.000.000	20%	400.000.000	DLHK
Sasaran : Meningkatnya investasi	Nilai Investasi (Rp trilyun)	3,3		3,6		

Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	2020		2021		Perangkat daerah
		Target	Rp	Target	Rp	
Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Persentase peningkatan jumlah investor	20%	425.000.000	25%	450.000.000	DPMPSTP
Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Persentase peningkatan jumlah kerjasama investasi	12,50%	405.000.000	12,50%	450.000.000	
Sasaran 4.3 : Sasaran : Meningkatnya pemanfaatan dan	Jumlah Ketersediaan Pangan (Kkal/Kap/Hr)	4000		4000		
Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan	Persentase Peningkatan Jumlah Kelompok Pemanfaatan Pekarangan	30%	811.900.000	60%	800.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
	Persentase Jumlah Komoditas Pangan Segar yang diawasi	60%		100%		
Program kemandirian pangan	Persentase peningkatan jumlah kawasan mandiri pangan	67%	350.000.000	67%	400.000.000	
	Persentase peningkatan jumlah desa yang melakukan gerakan menanam	67%		100%		
Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Stabilisasi Harga Pangan di Tingkat Produsen (Gabah)	4,45%	410.000.000	4,05%	450.000.000	
	Stabilisasi harga pangan di tingkat konsumen (Beras)	4,25%		3,95%		
Sasaran : Menurunnya pencemaran lingkungan	Indeks kualitas Air	55		56		
	Indeks kualitas Udara	86		87		
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	jumlah sungai yang dipantau kualitas mutu airnya	6 sungai	915.000.000	6 sungai	750.000.000	DLHK
	Jumlah kabupaten/kota yang dipantau kualitas udara ambient	10 kab/kota		10 kab/kota		
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase luas lahan kritis	3,1%	2.209.850.000	3,0%	735.000.000	
Program perlindungan Konservasi Sumberdaya Hutan	Laju Deforestasi	0,05%	826.084.000	0,045%	650.000.000	
Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	52%	1.150.000.000	60%	1.000.000.000	BPBD
	Persentase Sekolah Aman Bencana	41%		46%		
	Persentase masyarakat yang diberi pemahaman pengurangan resiko bencana	11,92%		13,12%		
Program peningkatan kualitas SDM dan kesiapsiagaan tanggap darurat	persentase SDM tanggap darurat yang ditingkatkan kompetensinya	66%	157.680.000	74%	175.000.000	
Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Persentase data kebencanaan yang dilaporkan	80%	325.000.000	100%	350.000.000	
Program peningkatan sarana dan prasarana logistik	Persentasepersediaan logistik yang sesuai standar	65%	400.000.000	68%	400.000.000	
	Persentase jumlah peralatan yang sesuai standar	66%		69%		
Program pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital	Persentase SDM JITUPASNA yang ditingkatkan kompetensi	40%	150.000.000	48%	150.000.000	
	Persentase sarana dan prasarana yang terdampak kerusakan dan kerugian yang dapat diidentifikasi	100%		100%		
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Persentase Perusahaan Pemegang IUP Aktif	34%	550.000.000	38%	400.000.000	Dinas ESDM
	Persentase penurunan pertambangan tanpa izin	59%		100%		
	Persentase luas lahan reklamasi	40%		50%		
Program pengendali banjir dan pengaman pantai	Persentase panjang sungai yang dibangun talud/bronjong	0,23%	1.200.000.000	0,23%	2.000.000.000	Dinas PUPR
Misi 5 : Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing						

Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	2020		2021		Perangkat daerah
		Target	Rp	Target	Rp	
Tujuan : Terjaminnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan						
Sasaran 5.1: Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam bagi pembangunan	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	73.494		75.618		
	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	127.580		131.538		
Program Pengembangan perikanan tangkap	Persentase nelayan yang mempunyai alat tangkap	87,09%	4.267.174.000	93,85%	1.500.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase nelayan yang mempunyai alat bantu penangkapan ikan sesuai standar	80,37%		83,93%		
	Persentase nelayan yang memiliki kapal	46,20%		46,72%		
	Persentase peningkatan jumlah nelayan yang ditingkatkan keterampilannya	2,75%		2,68%		
Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan	Persentase POKMASWAS yang dibina	88,46%	931.750.000	100%	700.000.000	
	Persentase pelaku usaha perikanan yang taat aturan	100%		100%		
Program Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil	Persentase biota laut yang telah dilakukan upaya pelestarian	100%	1.265.750.000	100%	300.000.000	
	Luas vegetasi pantai yang dikonservasi	9,35%		14,02%		
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Jasa Pelabuhan Penyeberangan	67,68%	1.572.500.000	70%	1.212.500.000	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Jasa Pelabuhan Penyeberangan	67,68%	10.271.664.000	70%	1.775.000.000	Dinas Perhubungan
Pengembangan destinasi wisata	Persentase peningkatan jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	28,57%	175.000.000	22,22%	500.000.000	Dinas Pariwisata
Pengembangan pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan frekuensi promosi wisata	25%	1.005.000.000	30%	9.500.000.000	
Misi 6 : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Tujuan : Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Sasaran 6.1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan dasar bagi perempuan dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan	Indeks pembangunan gender (IPG)	93,52		94,02		
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,90		69,95		
Program Peningkatan Peran serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Indeks perempuan sebagai tenaga profesional	34,27	242.500.000	34,29	250.000.000	DP3APPKB
	Indeks keterwakilan perempuan di parlemen	10,96		10,98		
	Indeks sumbangan pendapatan perempuan	24,67		24,69		
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Indeks perempuan sebagai tenaga profesional	34,27	1.110.000.000	34,29	200.000.000	
	Indeks keterwakilan perempuan di parlemen	10,96		10,98		
	Indeks sumbangan pendapatan perempuan	24,67		24,69		
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	100%	226.040.000	100%	250.000.000	
	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak	100%		100%		

Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	2020		2021		Perangkat daerah
		Target	Rp	Target	Rp	
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	100%	240.000.000	100%	250.000.000	
	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak	100%		100%		
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	100%	287.215.000	100%	300.000.000	
	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak	100%		100%		
Misi 7 : Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan						
Tujuan : Meningkatnya daya saing dan prestasi olahraga						
Sasaran : Meningkatnya daya saing dan prestasi olahraga	Peringkat Prestasi Olahraga Berskala Nasional					
	a. PON	25-20		25-20		
	b. POPNAS	-		20-10		
	c. POPCANAS	-		20-10		
	d. POSPENAS	-		20-10		
	e. PORWIL	-		6-5		
Program pengembangan pemuda	Persentase organisasi Pemuda yang dibina	47%	1.700.000.000	50%	1.700.000.000	Dinas Pemuda dan olahraga
	Persentase peningkatan jumlah pemuda yang aktif dalam kegiatan pengembangan kepemudaan	1,58%		1,19%		
Program Pemberdayaan pemuda	Persentase peningkatan jumlah pemuda yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan kepemudaan	33%	550.000.000	25%	550.000.000	
Program Pembinaan Olahraga Prestasi	Persentase Cabang Olahraga Prestasi yang dibina	71,43%	4.690.000.000	85,71%	4.000.000.000	
	Persentase Pelatih dan Wasit yang ditingkatkan Kompetensinya	75%		90%		
	Persentase Nomor Lomba Olahraga Prestasi yang dimenangkan tingkat nasional	55%		65%		
Program Pembudayaan Olahraga	Persentase Nomor Lomba Olahraga Budaya/rekreasi yang dimenangkan tingkat nasional	60%	3.575.479.899,00	65%	3.600.000.000	
	Persentase Peningkatan Jumlah Atlit/Calon Atlit yang dibina	9,65%		6%		
Misi 8 : Mewujudkan Masyarakat Bengkulu yang Agamis, Berbudaya, berkesadaran wisata dan Demokratis						
Tujuan : Meningkatnya kualitas keagamaan, kebudayaan, dan demokrasi masyarakat Bengkulu						
Sasaran 8.1 : Meningkatnya kondisi dimana prinsip-prinsip keagamaan , Budaya dan	Rasio Stabilitas Kesatuan Bangsa	0,7		0,73		
	Indeks Demokrasi Indonesia Prov. Bengkulu	71,5		72		
Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Peningkatan Jumlah Kader Penggerak Wawasan Kebangsaan dan Forum Pembauran	23,98%	130.000.000	13,54%	130.000.000	Badan Kesbangpol
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase permasalahan strategis daerah yang diinventarisir	100%	7.740.000.000	100%	1.300.000.000	
	Persentase permasalahan strategis daerah yang ditindaklanjuti	100%		100%		
Program pengembangan kemitraan wawasan kebangsaan	Persentase Peningkatan Jumlah Kader Anti Narkoba	9,30	150.000.000	20,21	150.000.000	
Program pendidikan politik masyarakat	Persentase peningkatan kebebasan sipil	79,77%	415.000.000	80,27%	400.000.000	

Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	2020		2021		Perangkat daerah
		Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase peningkatan pemenuhan hak-hak politik	75,13%		75,63%		
	Persentase peningkatan peran lembaga-lembaga demokrasi	63,18%		63,68%		



Tabel 6.4
KESELARASAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD DENGAN RPJMN

NO	RPJMD PROVINSI		RPJMN	RPJMD PROVINSI	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan dan memperluas pelayanan publik	Transformasi pelayanan publik	Meningkatkan standar kualitas pelayanan publik	Pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu.
2.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi aparatur	Penguatan implementasi manajemen ASN	Penempatan dan distribusi ASN sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kebutuhan Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur berbasis kompetensi	Penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional
		Meningkatkan kinerja pengawasan Pemerintahan Daerah	Peningkatkan transparansi dalam pengawasan dan pengelolaan tindaklanjut hasil pengawasan, dan penyusunan rencana pengawasan intern nasional terpadu dan terfokus pada pengawalan prioritas pembangunan	Penguatan sistem pengendalian internal	Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan serta penerapan e-government	Reformasi sistem akuntabilitas kinerja	Optimalisasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja, Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah, Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengelolaan pemerintahan	Perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, reformasi sistem perencanaan dan penganggaran serta penerapan SPBE terintegrasi



NO	RPJMD PROVINSI		RPJMN	RPJMD PROVINSI	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
3.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Pencegahan, Pengurangan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial	Meningkatkan kualitas pelayanan sosial masyarakat dan penyandang kesejahteraan sosial.	Penguatan pelaksanaan jaminan sosial, Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat sasaran, Perlindungan sosial adaptif, Peningkatan kesejahteraan social.
		Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja serta pengembangan sarana prasarana pelatihan kerja	Pemberian pelatihan untuk memasuki pasar tenaga kerja dan penerapan model wirausaha serta pendampingan untuk pemberdayaan usaha mandiri Mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/industri dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja	Meningkatkan kesempatan dan Kompetensi Tenaga Kerja melalui pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pasar kerja serta pembangunan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja	Memfungsikan pasar tenaga Kerja serta meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja
4.	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Meningkatkan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang adil, merata dan berkualitas serta meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan standar pendidikan	Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan Mutu pendidikan dan Kompetensi Tenaga Pendidik serta Meningkatkan standar akreditasi pendidikan	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, peningkatan pemerataan akses layanan Pendidikan serta peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata
5.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, meningkatkan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar serta	Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta	Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak, meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, pemenuhan kebutuhan sumberdaya di setiap fasilitas pelayanan kesehatan jaringannya, peningkatan akses dan	Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, Percepatan perbaikan gizi masyarakat serta Peningkatan pengendalian penyakit



NO	RPJMD PROVINSI		RPJMN	RPJMD PROVINSI	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
		meningkatkan kesehatan reproduksi		pelayanan KB serta peningkatan intensitas layanan kesehatan reproduksi	
6.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar	Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur dasar di seluruh wilayah	Meningkatkan pemenuhan akses, pasokan energi, dan tenaga listrik merata, handal, efisien, dan berkelanjutan Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau	Peningkatan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan Peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi dan air bersih. Pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman	Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan, Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik serta Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik Peningkatan kapasitas penyelenggara air minum, Pengembangan dan pengelolaan SPAM serta Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman Perluasan fasilitas pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap, Peningkatan penyediaan perumahan serta Pengembangan sistem perumahan publik berbasis rumah susun di perkotaan
7.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur strategis	Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur strategis	Peningkatan kualitas jalan dan ketersediaan jaringan jalan yang mendukung pengembangan wilayah	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta Peningkatan akses lintas Provinsi	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan, termasuk pemeliharaan rutin jalan serta pemenuhan kelengkapan jalan serta pembangunan jalan pada jalan lintas utama pulau, jalan yang mendukung kawasan industri dan



NO	RPJMD PROVINSI		RPJMN	RPJMD PROVINSI	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
			<p>Pembangunan konektivitas transportasi laut untuk mendukung kinerja logistik nasional</p> <p>Pembangunan/peningkatan kapasitas bandara</p>	<p>Peningkatan kapasitas Pelabuhan</p> <p>Peningkatan kapasitas Bandar udara</p>	<p>pariwisata prioritas, jalan akses ke simpul transportasi prioritas, jalan lingkar/trans pulau terluar dan jalan akses mendukung wilayah 3T dan kawasan perbatasan</p> <p>Penetapan standardisasi kinerja meliputi tingkat kedalaman pelabuhan, panjang dermaga, dan kinerja bongkar muat, peremajaan kapal niaga serta penguatan keterpaduan angkutan tol laut bersubsidi dengan moda transportasi lain termasuk angkutan barang udara bersubsidi dan angkutan perintis darat</p> <p>Pembangunan bandara baru, pengembangan bandara hub primer, rehabilitasi dan pengembangan bandara, pengembangan bandara mendukung kawasan prioritas (KSPN, KEK, dan KI) serta pembangunan bandara perairan (waterbased airport) untuk mendukung destinasi pariwisata perairan</p>



NO	RPJMD PROVINSI		RPJMN	RPJMD PROVINSI	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
8.	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Optimalisasi pengelolaan investasi	Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi	Meningkatkan promosi investasi dan memperbanyak sumber dan jenis investasi	Peningkatan kepastian hukum terkait investasi, penyederhanaan prosedur perijinan, Pengembangan layanan investasi serta Pemberian insentif dan fasilitasi investasi
9.	Meningkatnya kontribusi sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM serta mengembangkan sarana perekonomian rakyat	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan serta Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi	Peningkatan produksi, mutu dan nilai tambah produk pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan perikanan melalui ekstensifikasi, intensifikasi, rekayasa teknologi dan pengolahan hasil Meningkatkan kapasitas teknis, permodalan dan peralatan KUKM dan IKM serta Mengembangkan sarana perekonomian rakyat	Meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi secara berkelanjutan, menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, sistem pertanian presisi, pengelolaan lahan dan air irigasi serta meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman yang terintegrasi hulu-hilir Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar, meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha serta meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi



NO	RPJMD PROVINSI		RPJMN	RPJMD PROVINSI	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
		Mengembangkan destinasi wisata unggulan dan meningkatkan promosi wisata	Pengembangan amenities, atraksi dan akses wisata	Peningkatan pengembangan pemasaran seni budaya dan pariwisata serta Peningkatan kualitas objek wisata unggulan dan seni budaya daerah	Peningkatan kerja sama pembiayaan, perbaikan pengelolaan destinasi, penerapan standar layanan, penguatan rantai pasok industri pariwisata, penataan kota sebagai service hub pariwisata, penataan kawasan perdesaan untuk mendukung pariwisata, serta pengembangan desa wisata
10.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Menurunkan beban pencemaran lingkungan, Meningkatkan kesiapsiagaan, pengendalian dan Pemulihan akibat bencana serta Mempertahankan fungsi hutan	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan air dan udara dengan meningkatkan daya dukung penahanan laju kerusakan lingkungan, Mengurangi dampak negatif pemanfaatan mineral, batu bara dan batuan terhadap lingkungan, Meningkatkan peran serta dunia Usaha, Swasta dan Masyarakat dalam Pra, saat dan Pasca Bencana serta Pemulihan lahan sangat kritis dan kritis	Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut, Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha, Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan, Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Laut dan Pesisir, Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik, Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis secara terpadu, Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut, Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 serta Pemulihan Kerusakan Ekosistem dan Lingkungan Pesisir dan Laut, termasuk



NO	RPJMD PROVINSI		RPJMN	RPJMD PROVINSI	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
					ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun
11.	Meningkatnya kontribusi kemaritiman terhadap perekonomian	Optimalisasi pendayagunaan dan pengendalian kemaritiman	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sarana sumber daya kemaritiman, Pembangunan dan peningkatan fungsi pelabuhan serta Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan tangkap	Mengelola ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan, meningkatkan produksi, produktivitas, standardisasi, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan, meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, teknologi dan pasar, peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan terpadu, perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil
12.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatkan peran dan akses perempuan dalam pembangunan serta Melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO	Peningkatan Pengarusutaman Gender dalam pembangunan serta meningkatkan layanan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan	Penguatan kebijakan dan regulasi, Penguatan kelembagaan PUG dan penguatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG), peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang KtP dan TPPO, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penyelenggara pemerintahan tentang KtP dan TPPO serta penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan



NO	RPJMD PROVINSI		RPJMN	RPJMD PROVINSI	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
13.	Meningkatnya prestasi olahraga dan peran serta pemuda dalam pembangunan	Meningkatkan peran, potensi, prestasi pemuda dan olahraga serta Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	Peningkatan kualitas pemuda serta peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional	Peningkatan peran, kompetensi pemuda melalui pola pengkaderan secara terencana sistematis dan berkelanjutan serta Peningkatan kompetensi dan prestasi di bidang olahraga melalui pola pengkaderan secara terencana sistematis dan berkelanjutan	Penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan peran dunia usaha dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan, peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda, pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, Pengembangan budaya olahraga, Penataan sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan, Penataan kelembagaan olahraga, Peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan dan prasarana dan sarana olahraga berstandar internasional
14.	Meningkatnya Stabilitas Kesatuan Bangsa dan Penegakan Demokrasi	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, budaya dan demokrasi dalam masyarakat	Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan serta Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Menciptakan kondisi yang kondusif dalam kehidupan di masyarakat serta Meningkatkan penerapan Demokrasi dalam kehidupan bernegara	Pemantapan demokrasi parpol, Penguatan penyelenggara Pemilu, Pendidikan politik dan pemilih, Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil, Penyelenggaraan kepemiluan yang baik, Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba serta Penanganan kasus TPPO dan kejahatan lainnya



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Indikasi rencana program prioritas Provinsi Bengkulu, berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah maupun untuk pemenuhan layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program prioritas kegiatan tahunan.

Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhannya.

Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD ini dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna program prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap tahun kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu.

TABEL 7.1
REKAPITULASI INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

NO	SKPD	2016	2017	2018	2019
		(Rp. 000)	(Rp. 000)	(Rp. 000)	(Rp. 000)
	TOTAL	1.097.430.955	1.716.542.088	2.050.897.077	2.308.530.616
	I. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar				
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	82.291.185	225.062.553	287.004.943	296.067.195
2	Dinas Kesehatan	52.834.363	22.554.712	49.844.262	52.183.485
3	RSUD M. Yunus	151.761.799	226.407.016	222.453.590	236.630.483
4	RSJK Soeprpto	25.151.448	25.836.258	25.570.000	24.000.000
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	312.232.140	687.595.446	739.642.503	925.535.710
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		5.116.258	20.090.000	22.755.000
7	Satpol PP	10.990.154	8.505.621	8.225.622	9.173.184
8	Badan Kesbangpol	10.023.909	10.618.805	7.157.886	7.394.070
9	Dinas Kesejahteraan Sosial	19.829.437	22.762.897	27.645.083	29.816.415
	II. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar				
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.496.309	5.716.209	9.405.100	13.033.900
11	Dinas PPPA dan KB	6.374.866	6.349.982	12.387.551	13.501.068
12	Dinas Ketahanan Pangan	10.743.936	6.529.699	7.680.920	11.408.500
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	24.095.088	10.994.356	11.267.944	13.704.156
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.590.624	9.559.818	16.030.583	24.057.935
15	Dinas Perhubungan	9.188.244	13.630.290	47.181.524	36.087.760
16	Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik		15.749.513	22.050.000	19.920.000
17	Dinas Koperasi dan UKM		7.121.544	12.575.450	14.394.495
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.768.795	8.550.669	16.202.496	20.969.369
19	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.807.300	5.173.971	9.095.162	8.873.427
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	18.244.025	24.232.565	39.868.740	32.078.740
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.050.596	3.805.541	13.726.062	10.608.434
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		3.733.848	9.721.921	5.556.022
	III. Urusan Pemerintahan Pilihan				
23	Dinas Kelautan Perikanan	18.963.218	19.760.285	19.775.782	29.214.800
24	Dinas Pariwisata	5.464.966	15.754.181	22.241.800	19.163.400
25	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	51.592.944	24.592.978	36.093.619	43.284.636
26	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	21.560.683	24.426.307	29.864.305	53.738.232
27	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3.669.565	4.564.281	12.450.000	10.646.000
	IV. Fungsi Lain Sesuai Sengan Peraturan Perundang-Undangan				
28	Bappeda	14.208.367	14.225.787	25.595.820	20.330.320
29	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	22.443.304	29.165.470	35.481.988	31.475.296
30	Badan Kepegawaian Daerah	5.774.573	5.379.890	10.435.153	10.162.201
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13.627.849	16.297.397	21.561.332	20.291.980
32	Inspektorat	8.177.361	12.733.746	20.547.324	22.149.079
	Biro Organisasi	3.804.180	2.775.000	8.110.000	8.675.000
	Biro Adm. Pembangunan	3.694.916	4.600.380	5.561.490	6.147.340
	Biro Adm. Perekonomian dan SDA	6.376.890	3.610.534	3.771.596	4.430.400
	Biro Adm. Pemerintahan & Kesra	13.885.625	15.622.050	16.355.000	18.030.000
	Biro Hukum	3.891.248	4.938.204	6.335.000	7.921.200
	KDH/WKDH, Setda, Biro Umum dan Humas Protokol	63.474.776	70.686.688	77.711.367	84.278.359
34	Badan Penghubung	6.595.478	4.568.626	7.396.866	5.876.648
35	Sekretariat DPRD	58.098.471	82.274.634	67.961.293	74.716.377
36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.652.324	4.958.080	8.820.000	10.250.000

TABEL 7.2
REKAPITULASI INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

NO	SKPD	2020	2021	TOTAL
		7.2		
	TOTAL	999.967.751.814	1.054.132.138.200	3.826.123.302.104
I.	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar			
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	303.799.404.570	288.600.000.000	832.339.007.570
2	Dinas Kesehatan	37.110.949.000	29.550.000.000	104.092.179.000
3	RSUD M. Yunus	151.159.171.000	144.950.000.000	468.893.434.409
4	RSJK Soeprapto	21.498.715.000	23.050.000.000	72.721.939.591
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	179.038.893.733	261.720.000.000	1.181.487.119.333
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.695.380.000	3.350.000.000	17.185.080.000
8	Badan Kesbangpol	9.385.820.000	3.765.000.000	21.010.820.000
7	Satpol PP	6.577.550.000	6.705.000.000	22.782.550.000
36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.606.799.000	3.550.000.000	26.294.770.500
9	Dinas Kesejahteraan Sosial	4.024.273.000	4.800.000.000	15.976.938.400
II.	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar			
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.108.162.200	5.975.000.000	22.846.356.700
11	Dinas PPPA dan KB	2.130.395.200	2.275.000.000	10.042.654.200
26	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.019.240.000	4.045.000.000	25.082.353.800
12	Dinas Ketahanan Pangan	2.193.515.200	2.295.000.000	8.488.515.200
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.320.894.000	4.511.888.200	24.943.951.200
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.517.667.175	1.650.000.000	8.489.075.175
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.958.040.000	3.990.000.000	19.619.500.000
15	Dinas Perhubungan	3.948.786.000	4.080.000.000	17.128.786.000
16	Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik	8.196.632.800	9.275.000.000	33.536.632.800
17	Dinas Koperasi dan UKM	4.458.870.000	5.895.000.000	18.300.950.000
19	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.405.000.000	1.510.250.000	8.505.598.000
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	8.212.344.984	10.665.000.000	59.374.114.984
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.942.921.600	2.145.000.000	21.816.436.600
III.	Urusan Pemerintahan Pilihan			
23	Dinas Kelautan Perikanan	3.816.040.600	4.120.000.000	17.966.939.800
24	Dinas Pariwisata	3.128.944.000	7.920.000.000	28.954.694.000
25	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	19.908.056.500	9.370.000.000	89.993.946.500
27	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.034.313.600	3.070.000.000	10.137.609.600
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.577.943.000	4.490.000.000	22.672.943.000
IV.	Fungsi Lain Sesuai Sengan Peraturan Perundang-Undangan			
28	Bappeda	8.662.500.000	10.775.000.000	33.342.495.000
29	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	25.736.187.302	30.300.000.000	56.036.187.302
30	Badan Kepegawaian Daerah	2.741.555.200	2.875.000.000	11.729.169.200
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.201.117.200	5.250.000.000	25.131.995.200
	KDH/WKDH, Setda, Biro Umum dan Humas Protokol	53.007.272.000	53.650.000.000	179.546.382.590
	Biro Organisasi	1.124.000.000	1.250.000.000	4.149.000.000
	Biro Adm. Pemerintahan & Kesra	10.375.000.000	10.550.000.000	33.260.000.000
	Biro Adm. Perekonomian dan SDA	585.000.000	800.000.000	3.385.000.000
	Biro Hukum	2.463.740.000	2.550.000.000	8.063.740.000
	Biro Adm. Pembangunan	3.792.550.500	3.770.000.000	12.447.730.500
35	Sekretariat DPRD	62.670.147.450	62.400.000.000	208.361.335.950
32	Inspektorat	4.962.200.000	6.000.000.000	18.617.960.000
34	Badan Penghubung	5.871.760.000	6.640.000.000	21.367.410.000

TABEL 7.3 KESELARASAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN RPJMD

No	PRIORITAS NASIONAL RPJMN	PROGRAM PRIORITAS RPJMN	PROGRAM PEMBANGUNAN RPJMD
1	PN1 : Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
			Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
			Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya
			Program Penataan Administrasi Kependudukan
		Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Program Upaya Kesehatan
			Program Perbaikan Gizi Masyarakat
			Program Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular
			Program Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi
		Pemerataan Layanan Pendidikan Bekualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi	Program Pendidikan Menengah
			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
			Program Pengkajian, Penelitian dan Penerapan IPTEK
		Pengentasan kemiskinan	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya
Program Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Kewirausahaan			
Program Peningkatan Daya Saing Koperasi Dan UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu			
2	PN: Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	Perluasan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Perumahan
			Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan Dan Permukiman
			Program Pengembangan Infrastruktur Dasar Perumahan Dan Permukiman
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
		Peningkatan Konektifitas Multimoda dan antar Moda	Program pembangunan jalan dan jembatan
			Program peningkatan pelayanan angkutan
			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
		Transformasi Digital	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
			Program Peningkatan dan Pengembangan e-government (SPBE)
			PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK DAN PERSANDIAN
3	PN : Nilai Tambah Sektor riil Industrialisasi dan Kesempatan Kerja	Penguatan Kewirausahaan dan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Kewirausahaan
			Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Koperasi
		Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di sektor Riil dan Industrialisasi	Program pengembangan industri sedang besar
			Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

No	PRIORITAS NASIONAL RPJMN	PROGRAM PRIORITAS RPJMN	PROGRAM PEMBANGUNAN RPJMD
		Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja dan Penciptaan lapangan kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja
		Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan dan Pengembangan Luar Negeri
4	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat Program Kemandirian Pangan Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan
		Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
		Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
		Peningkatan Kualitas Lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi SDA Dan LH
		Penguatan Ketahanan Bencana	Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Logistik
5	STABILITAS PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja daerah yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 mempunyai tujuan memberi gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD yang diinginkan dilihat pencapaian indikator *outcome* prioritas pembangunan daerah setiap tahun.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Indikator kinerja daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah. Pada aspek kesejahteraan masyarakat, penentuan capaian indikator tiap tahunnya meliputi; pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olah raga. Atau dengan kata lain dapat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (indikator komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun social.

Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pada aspek daya saing daerah penentuan capaian indikator tiap tahunnya mencakup pada kemampuan ekonomi, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Provinsi Bengkulu dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

TABEL 8.1 TUJUAN,SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Tujuan : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dalam rangka pencapaian pemerintahan yang baik dan bersih										
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Pelayanan Publik Provinsi Bengkulu	75%	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
		Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan	Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi	B	B	B	B	B	BB	BB	BB
			Opini atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi	C	C	CC	CC	B	BB	BB	BB	
2	Tujuan : Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial dan layanan dasar										
		Meningkatnya layanan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial	Angka Kemiskinan (%)	17,16	17,03	16,45	15,43	14,91	15,50	15,02	15,02
		Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan serta meningkatnya minat baca di semua lapisan masyarakat	Angka partisipasi murni (APM) SLTA (%)	64,61	69,61	74,61	79,61	84,61	90	95	95
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	68,50	69,20	69,47	69,82	70,23	69,5	70	70,00
		Meningkatnya kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja	Angka Pengangguran (%)	4,91	3,30	3,25	3,51	3,21	4,00	3,80	3,80
3	Tujuan : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis dalam rangka peningkatan produktivitas ekonomi dan layanan dasar										

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar	Rasio Elektrifikasi (%)	85,55	89,8	89,8	91,1	94,5	97,5	100	100
		Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik/ sedang (%)	58	60	62	62,31	63	64	64	82
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak (%)	48,83	49,37	50,57	60,18	64,00	65	66,00	100
		Persentase rumah tangga terlayani sanitasi layak (%)	34,92	41,6	3690%	3836%	4000%	45	50	95-100
4	Tujuan : Terjaminnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan									
	Meningkatnya investasi	Nilai Investasi (Rp trilyun)	1,4	1,9	2,4	2,7	3	3,3	3,6	16

TABEL 8.2 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1	Pertumbuhan PDRB (%)	5,3	5,3	5,50-5,80	5,75-6,05	6,01-6,31	6,26-6,56	6,56-6,8	6,56-6,8
2	Laju inflasi provinsi (%)	3,25	4,93-5,93	4,79-5,79	4,60-5,60	4,36-5,36	4,07-5,07	3,5-4,07	3,5-4,07
3	Nilai PDRB atas dasar harga konstan (Rp Juta)	38.066.005	40.082.870	41.386.348-43.386.348	43.887.654-45.887.654	46.650.545-48.650.545	49.704.490-51.704.490	51.704.490-53.704.490	51.704.490-53.704.490
4	Nilai PDRB atas dasar harga Berlaku (Rp juta)	50.336.990	55.402.507	61.114.190-63.114.190	68.105.263-70.105.263	75.964.427-77.964.427	84.807.864-86.807.864	86.807.864-88.807.864	86.807.864-88.807.864
5	IPM	68,59	67,66-70,50	68,29-71,13	69,06-71,90	69,97-72,81	71,03-73,87	73,87-75	73,87-75
6	Angka Kemiskinan (%)	17,16	17,03	17,03-16,63	16,63-16,23	16,09-15,69	15,42-15,02	14,64-14,24	14,64-14,24
	Fokus Kesejahteraan Masyarakat								
7	Angka Pengangguran (%)	4,91	3,30	3,25	3,51	3,21	4,00	3,80	3,80
8	Angka partisipasi murni (APM) PAUD (%)	57,81	64,8	71,8	78,8	85,8	92,8	100	100,00
9	Angka partisipasi murni (APM) SD (%)	98,03	98,33	98,73	99,03	99,39	99,69	100	100,00
10	Angka partisipasi murni (APM) SLTP (%)	76,44	80,14	83,84	87,54	91,24	95	100	100,00
11	Angka partisipasi murni (APM) (%) SLTA	64,61	69,61	74,61	79,61	84,61	90	95	95,00
12	Angka buta aksara (%)	2,20	1,76	1,32	0,88	0,44	0,22	0	-
13	Usia harapan hidup (tahun)	68,50	69,20	69,47	69,82	70,23	69,5	70	70,00
14	Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang (%)	8,7	8,7	8,5	8,3	7,9	7,5	7	7,00
15	Rasio Stabilitas Kesatuan Bangsa	0,57	0,58	0,6	0,63	0,65	0,7	0,73	0,73
16	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Bengkulu	73,6	74	72,73	70,71	71	71,5	72	72,00

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
17	Angka Kematian Bayi (AKB)/1000 kelahiran hidup	10,14	10,14	10	9	9	8	8	8,00
18	Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000 kelahiran hidup	162	117,15	116	115	114	113	112	112,00
19	Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi malaria (kab/kota)	3	3	5	7	8	8-10	8-10	8-10
20	Angka kejadian DBD per 100.000 penduduk	49	89	60	50	45	40	35	35,00
21	Persentase Penderita Penyakit Hipertensi Usia > 18 Th (%)	21,6	21,6	21,30	21,00	20,75	20,50	20,00	20,00
22	Persentasi Penderita Penyakit Diabetes Militus usia > 15 Th (%)	0,90	0,90	0,85	0,85	0,80	0,80	0,75	0,75
B	ASPEK PELAYANAN UMUM								
	Fokus Layanan Urusan Wajib								
23	Persentase Guru SLTA yang berpendidikan Minimal S1 (%)	96,8	96,8	97,6	98,4	99,2	99,6	100	100,00
24	Persentase Guru SLTA bersertifikasi (%)	38,7	50,96	63,22	75,48	87,74	95	100	100,00
25	Persentase SD yang ter-akreditasi (%)	86	88	91	94	96	98	100	100,00
26	Persentase SLTP yang ter-akreditasi (%)	83	86	89	92	95	98	100	100,00
27	Persentase SLTA yang ter-akreditasi (%)	90,6	92	99	100	100	100	100	100,00
28	Persentase Kompetensi Kejurusan SMK yang ter-akreditasi (%)	91	92,5	94	96	98	99	100	100,00
29	Jumlah Desa Tertinggal yang belum memiliki SD	194	194 - 165	165 - 136	136 - 107	107 - 78	78 - 49	49-20	49-20
30	Jumlah SLTP yang dibangun	2	2	0	1	1	1	1	8
31	Jumlah Kecamatan yang belum memiliki SLTA		18	17	14	10	5	0	0
32	Panjang jalan usaha tani yang dibangun (m)	31.500	0	0	15.000	16.000	13.000		75.500
33	Panjang jalan usaha Tani yang direhabilitasi (m)	0	0	0	6.000	6.000	5.000	6.000	23.000

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
34	Panjang jalan sentra produksi yang di bangun (m)	106.600	0	1.000	8.900	5.000	5.000	5.000	131.500
35	Panjang Jalan sentra Produksi yang ditingkatkan kualitasnya (m)	34.100	0	0	10.400	10.000	10.000	17.000	81.500
36	Luas Jaringan irigasi usaha tani yang dibangun (Ha)	0	0	0	0	0	1.500	425	1.925
37	Persentase sarana dan prasarana digital Perpustakaan sekolah sesuai standar Nasional (%)	0	0	0	40	70	100	100	100
38	Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi baik (%)	58	60	61,73	62,31	62,5	63,9	64	64
39	Prosentase jalan provinsi dalam kondisi baik/sedang (%)	42	46	50	58,58	66	68	70	70
40	Jumlah ruas jalan konektivitas antar provinsi (ruas)	0	0	0	9	9	9	9	9
41	Jumlah Desa Tertinggal Yang Belum di Hotmix pada Ruas Jalan Provinsi (desa)	64	62	56	48	30	20	15	15
42	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak (%)	49	49,37	50,57	60,18	64,00	65	66,00	66
43	Persentase rumah tangga terlayani sanitasi layak (%)	34,92	41,6	36,90	38,36	40,00	45	50	100
44	Persentase rumah tangga terlayani pengelolaan persampahan (%)	42	42	63	75	87	100	100	100
45	Jumlah rumah layak huni yang dibangun (unit)	0	0	44	70	200	352	450	1116
46	Luas kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya (ha)	0	0	0	2	3	4	6	15
47	Persentase Jangkauan daerah terakses infrastruktur telematika (%)	10	20	20-40	40-60	60-75	75-90	90-100	90-100
48	Persentase Jumlah Segmen Batas Daerah Yang Diselesaikan (%)	75	100	100	100	100	100	100	100
49	Persentase Raperda yang ditetapkan menjadi Perda (%)	50	54	100	100	100	100	100	100
50	Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi (unit)	30	30	86	135	180	180	190	190

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
51	Jumlah kecamatan yang belum memiliki puskesmas (unit)	9	9	7	5	3	1	0	0
52	Jumlah Desa Tertinggal yang belum memiliki sarana kesehatan (desa)	191	191	191-161	161-131	131-101	101-71	71-10	71-10
53	Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan kelas dari B ke A	1	1	1	1	1	1	1	1
54	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan (%)		63	75	85	100	100	100	100
55	Persentase desa tangguh bencana di daerah zona merah (berisiko tinggi)	12,5	30	30 - 45	45-60	60-75	75-90	90-100	90-100
56	Indeks kualitas air	54	54	54	54	54	55	56	=164
57	Indeks kualitas udara	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	86,00	87,00	87,00
	Fokus Layanan Urusan Pilihan								
58	Cetak sawah baru (ha)	91.651	91.791	2.000	1.500	100			187.042
	Produksi Tanaman Pangan dan hortikultura (ton) :								
59	a. padi	593.194	668.140	668.140	695.000	701.972	708.991	716.081	716.081
60	b. Jagung	72.756	95.707	95.707	99.000	104.381	109.363	112.152	112.152
61	c. Kedelai	5.715	5.949	5.949	6.000	6.069	6.129	6.191	6.191
62	d. Cabe Merah	46.670	47.207	47.207	47.826	48.458	49.104	49.764	49.764
63	e. Bawang Merah	471	521	521	630-	693	800	800	800
64	f. Jeruk	7.254	7.261	7.261	7.286	8.488	9.990	11.867	11.867
65	Jumlah Desa Mandiri Benih yang dibangun (desa)	9	2	8	2	5	5	2	33
66	jumlah desa mandiri pangan yang di kembangkan(desas)		60	0	5	7	30	40	142
67	jumlah penumbuhan Desa Mandiri Pangan (Desa)		22	5	5	5	10	15	62

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
68	Jumlah kawasan mandiri pangan yang dikembangkan (Kawasan)	0	2	2	2	2	2	2	12
	Produksi Perkebunan unggulan (ton)								
69	a. Kelapa Sawit	469.238	509.639	553.519	601.177	652.938	709.156	770.285	770.285
70	b.Karet	93.552	96.433	99.403	102.465	105.621	108.874	112.140	112.140
71	c. Kopi	56.374	63.618	71.793	81.019	91.429	103.178	116.436	116.436
72	d. Pala	26	44	44-75	75-127	127-215	215-366	366-620	366-620
73	Jumlah Penyuluh Yang ditingkatkan Kompetensinya (orang)		30	30	120	120	120	120	540
	Produksi daging ternak (ton)								
74	a. Sapi	3.006	3.794	3.343	3.717	4.134	4.597	5.112	5.112
75	b. Kambing / Domba	295	589	313	331	351	373	395	395
76	c. Ungggas	2.713	2.077	2.826	2.925	3.094	3.255	3.437	3.437
77	Produksi telur (ton)	3.632	3.902	4.351	4.858	5.429	6.074	6.074	6.074
78	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	64.059	64.110	66.033	68.344	70.804	73.494	75.618	75.618
79	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	74.858	87.939	97.101	106.957	119.580	127.580	131.538	131.538
80	Pertumbuhan Penduduk (%)	1,65	1,69	1,55	1,50	1,45	1,41	1,36	1,36
81	Persentase Rasio Akseptor KB	67,83	68	69	70	71	72	73	73
82	Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang melahirkan (%)	45,10	45,10-41,57	41,57-38,31	38,31-35,31	35,31-32,55	32,55-30	30-27,50	30-27,50
83	jumlah pasar tradisional yang di revitalisasi (unit)	18	18	10	10	11	10	10	87
84	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi (%)			15%	15%	15%	15%	15%	75%
85	Persentase Pertumbuhan Unit industri kecil (%)	6,56%	14,27%	14,80%	14,90%	15,00%	15,20%	15,50%	15,50%

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
86	Jumlah tenaga kerja yang mendapat sertifikat kompetensi (orang)			98	110	120	130	140	498
87	Jumlah BLK yang ditingkatkan kelas B ke A (unit)					1	1		2
88	Jumlah masyarakat kurang mampu yang mengikuti pelatihan kewirausahaan, keterampilan dan keahlian dalam memulai usaha (orang)			80	300	400	500	750	2030
89	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan keterampilan / berbasis kompetensi / Berbasis Masyarakat (orang)	336	96	96	325	387	480	677	2061
90	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	171	140	200	225	250	300	350	1465
91	Jumlah masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang ekonomi produktif	120	180	220	200	240	290	290	1420
92	Jumlah Bumdes yang Difasilitasi dalam Pembentukan & Pengembangan	116	116	60	60	60	60	60	416
93	Persentase desa yang belum teraliri listrik (%)			5,5-5%	5-3,5	3,5-2	2-1	1-0	1-0
94	Jumlah Kepala keluarga miskin yang diberdayakan (KK)	2.920	1.210	1.138	2.700	2.928	2.930	2.058	12.964
95	Jumlah penyandang masalah Kesejahteraan sosial yang dibina, direhab dan dilayani (Orang)	9.734	1.817	1.579	1.785	1.785	1.715	1.715	10.396
96	Jumlah orang yang Menerima Perlindungan dan Bantuan Jaminan Sosial (orang)	11.621	2.018	2.204	2.204	2.204	2.054	2.054	12.738
97	Indeks pembangunan gender (IPG)	91,02	91,52	92,02	92,52	93,02	93,52	94,02	94,02
98	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,76	69,26	69,26	69,76	69,80	69,90	69,95	69,95

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
99	Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan di DP3APPKB (%)	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
100	Jumlah anak yang dilayani dan dilindungi di dalam dan luar panti (orang)	912	210	194	194	194	203	203	1.198
101	Persentase OPD yang menyelenggarakan penataan kearsipan berbasis IT	0%	0%	2%	20%	50%	60%	70%	70%
102	Jumlah aplikasi elektronik yang dikembangkan (aplikasi)	0	2	8	14	18	22	25	25
103	Jumlah desa yang belum terkoneksi oleh jaringan TIK (desa)	150	150	130	95	55	40		20
104	Jumlah objek wisata yang belum terkoneksi jaringan TIK (obyek)				3	3	6	3	15
C	ASPEK DAYA SAING								
	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah								
105	Nilai Tukar Petani - NTP	93,9	97,80	101	102	103	104	105	105
106	Rasio Penyuluh terhadap Kelompok Tani	1:18	1:18	1:16	1:14	1:12	1:10	1:10	1:10
107	Jumlah unit pengolahan hasil ternak yang direvitalisasi (unit)	0	0	0	2	2	2	2	8
108	Jumlah Sentra IKM yang dikembangkan (sentra)	-	-	1	3	20	20	23	70
109	Jumlah kawasan kampung nelayan terpadu yang dikembangkan (kawasan)	0	0	7	7	7	7	7	7
	Fokus Iklim Berinvestasi								
110	Nilai Investasi Sektor Industri	162.6 Milyar	169.3 Milyar	169.3 Milyar	176.5 Milyar	185 Milyar	195 Milyar	206 Milyar	206 Milyar
111	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Provinsi Bengkulu pada perizinan pelayanan terpadu	79	80	81	82	83	84	85	85

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
112	Nilai Investasi (Rp trilyun)	1,4	1,9	2,4	2,7	3	3,3	3,6	3,6
113	Jumlah jenis perizinan/nonperizinan yang dilayani (jenis)	95	96	97	217	220	223	226	226
	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
114	Jumlah SMK berbasis potensi unggulan daerah yang dibangun (unit)	0	0	1	1	1	1	1	5
115	Rata-rata lama tinggal (hari)	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3	3
116	Jumlah Wisatawan Mancanegara (Orang)	952 - 1.952	952 - 1.952	1.952 - 2.955	2.955 - 3.972	3.972 - 4.995	4 995 - 6.015	4 995 - 7.243	4 995 - 7.243
117	Jumlah Wisatawan Nusantara (orang)	357.863 - 361.578	357.863 - 361.578	361.578 - 375.475	375.475 - 394.265	394.265 - 420.025	420.025 - 435.605	435.605 - 451.766	435.605 - 451.766
118	Persentase kota sehat adipura (%)	0	20	20	40	60	70	80	80
119	Persentase luas tutupan lahan di luar kawasan meningkat (%)	3,06	3,11	3,16	3,21	3,26	3,31	3,36	3,36
120	Jumlah wisata bahari yang dikembangkan (kawasan)		0	0	1	1	1	1	4
121	Jumlah Pelabuhan Perikanan Yang dikembangkan (unit)	0	1	2	1	1	1	0	5
122	Rasio Elektrifikasi	85,55	89,8	89,8	91,1	94,5	97,5	100	100
123	Jumlah Volume Bongkar/muat (ton)	NA	2.582.269	2.632.269	2.682.270	2.732.269	2.782.269	2.832.269	2.832.269
124	Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Bandar Udara (%)	0	0	20	20	20	20	20	100
125	Jumlah Bandara Pengumpul Yang dikembangkan (unit)	0	0	3	3	3	0	0	3
	Fokus Sumber Daya Manusia								
126	Jumlah Pemuda kader, pemuda pelopor dan pemuda wirausaha, Pramuka tingkat Provinsi	20.190	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190	45.330
127	Jumlah kelompok usaha pemuda produktif yang dibina dan dikembangkan (kelompok)	10	0	20	20	20	20	20	20
128	Peringkat Prestasi Olahraga Berskala Nasional								

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	a. PON	32	32-20	-	-	-	20-10	20-10	20-10
	b. POPNAS	32	-	32-20	-	20-10	-	-	20-10
	c. POMNAS	32	-	28-20	-	20-10	-	20-10	20-10
	d. PORWIL	10	-	-	-	6 - 5	-	6 - 5	6 - 5
129	Jumlah Wasit/Pelatih/Juri yang ditingkatkan kompetensinya	16		120	110	110	80	80	516
130	Persentase pejabat struktural Pemprov yang telah mengikuti diklat kepemimpinan								
	- Eselon II	58	58	58	65	70	80	100	100
	- Eselon III	33	33	52	71	90	100	100	100
	- Eselon IV	26	26	44	62	75	85	100	100
131	Jumlah ASN Yang Mengikuti diklat formal (orang):								
	- Spesialis Kedokteran			Lama : 1 Baru : 4	Lama : 5 Baru : 2	Lama : 6 Baru : 1	Lama : 7 Baru : 1	Lama : 8 Baru : 1	10
	- S2			Lama : - Baru : 2	Lama : 2 Baru : 2	Lama : 4 Baru : 2	Lama : 4 Baru : 2	Lama : 6 Baru : 2	10
	- S3			Lama : - Baru : 2	Lama : 2 Baru : 2	Lama : 4 Baru : 2	Lama : 6 Baru : 2	Lama : 8 Baru : 2	10
132	Nilai Pelayanan Publik Provinsi Bengkulu	75%	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	hijau	Hijau
133	Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi	B	B	B	B	B	BB	BB	BB
134	Jumlah SKPD Provinsi yang memperoleh nilai SAKIP Minimal BB (SKPD)	4	10	23	31	35	39	39	39
135	Opini atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
136	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi	C	C	CC	CC	B	B	BB	BB

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
137	Persentase penempatan pejabat ASN pemerintah provinsi berdasarkan kualifikasi pendidikan (%) :								
	Eselon II	74	80	85	90	95	100	100	100
	Eselon III	88	88	95	100	100	100	100	100
	Eselon IV	88	88	95	100	100	100	100	100
138	Persentase SKPD provinsi yang memiliki jumlah ASN sesuai dengan kebutuhan	8	25	50	75	100	100	100	100
139	Persentase kasus dan temuan yang diselesaikan (%)	70%	75%	80	80	85	85	90	90



BAB IX PENUTUP

PEDOMAN TRANSISI

Gubernur Bengkulu yang sedang memimpin pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu untuk tahun pertama periode Pemerintahan Gubernur Bengkulu berikutnya, dengan mengacu kepada RPJMD ini. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir.

Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tersebut digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu tahun pertama periode Pemerintahan Gubernur Bengkulu berikutnya.

KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah. Dokumen RPJMD memuat kebijakan umum, kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan program kerja OPD, program lintas OPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dokumen RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 bukan hanya merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yang mendapat legitimasi Peraturan Daerah yang menjadi instrumen penting untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan program pembangunan Provinsi Bengkulu. Selain itu, RPJMD merupakan pedoman bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pembangunan daerah. Dengan demikian RPJMD merupakan perwujudan komitmen pemerintah, masyarakat dan swasta dalam upaya pembangunan lima tahun ke depan. Komitmen yang terbangun dalam RPJMD ini sepatutnya dijadikan pegangan, patokan dan ukuran dalam mengimplementasikan program pembangunan Provinsi Bengkulu hingga Tahun 2021.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Bengkulu 2016-2021 maka seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu memahami substansi dokumen perencanaan ini dan menterjemahkannya secara kreatif dan inovatif tanpa keluar dari aturan yang ada. Bagi OPD lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu, RPJMD Provinsi Bengkulu 2016-2021 menjadi acuan utama untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) OPD tahun 2016-2021 serta dijadikan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RKPD dan Renja OPD digunakan sebagai bahan penyusunan APBD selama periode 2016-2021. Dokumen-dokumen tersebut menjadi bahan dalam evaluasi dan pelaporan kinerja kepemimpinan daerah Provinsi Bengkulu selama kurun waktu 2016-2021.



Implementasi RPJMD ini mensyaratkan pentingnya sinkronisasi dan koordinasi lintas program dan kegiatan, lintas instansi serta lintas pemerintahan dengan tetap memperhatikan peran, kewenangan, tanggung jawab dan tugas masing-masing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sikap yang mengedepankan ego sektoral harus dihilangkan agar terjadi sinergisitas, efisiensi dan akselerasi dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Bengkulu.

Terwujudnya masyarakat Provinsi Bengkulu yang maju, sejahtera, bermartabat, dan berdaya saing perlu didukung oleh : 1) Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik; 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan; 3) Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis; 4) Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan berbasis keunggulan lokal; 5) Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing; 6) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 7) Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan; dan 8) Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis, berbudaya, berkesadaran wisata dan demokratis.


Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan pedoman bagi setiap kepala OPD menyusun Renstra OPD dan pedoman untuk menyusun RKPD. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. OPD, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
2. OPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja OPD setiap tahun;
3. OPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra OPD;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra OPD.

GUBERNUR BENGKULU

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

KEPALA BIRO HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

SUPRAN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
Nip. 19681221 199303 1 002

